



# Laporan Tahunan

**Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Bajiminasa  
Website : [www.dkp.sulselprov.go.id](http://www.dkp.sulselprov.go.id)  
Makassar 2023

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat tersusun. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan gambaran dan informasi sejumlah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan diselama tahun 2022.

Secara umum program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan pembangunan Kelautan dan Perikanan ditahun 2023 dan masa mendatang.

Disadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari hasil kerjasama yang baik dan terpadu antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu terbitnya Buku Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 diucapkan terima kasih.

Makassar,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dr. M. ILYAS, ST, M.Sc

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 19700606 199603 1 006



## RINGKASAN

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota Makassar terletak antara 0°12' - 8° LS dan diantara 116°48' - 112° 36' BT dengan luas wilayah sekitar 45.764,53 Km<sup>2</sup>, panjang garis pantai 1.937 Km yang terdiri dari 24 kabupaten/kota, 304 kecamatan.

Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan tahun 2022 tercatat sebanyak 9,225,747 jiwa. Diantara jumlah penduduk tersebut terdapat tenaga kerja yang mengelola sumberdaya Kelautan dan Perikanan (nelayan, pembudidaya) sebanyak 500,538 orang atau 5,4 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 275,392 orang (55 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 225,146 orang (45 %).

Untuk mengorganisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik non teknis maupun teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan staf yang cukup dan memiliki integritas yang handal. Pada tahun 2022 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki staf pegawai negeri sipil sebanyak 189 orang.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengacu pada Visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselarasi Kesejahteraan Masyarakat.

Pelaksanaan masing-masing sub program dibiayai melalui dana Dekonsentrasi (APBN) sebesar Rp. 2,984,728,000, APBD (Belanja Langsung) sebesar Rp. 22,791,590,530 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi sebesar Rp. 8,518,600,000

Hasil pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan selama tahun 2022 tercatat total produksi sebesar 4,532,670.4 ton, sedangkan pada tahun 2021 produksi perikanan sebesar 4,498,891.2 ton dimana mengalami kenaikan sebesar 33.779,2 ton atau 0,8 %. Pada tahun 2022 total volume ekspor sebesar 191,322 ton naik 6,8 % dari tahun 2021 dan nilai sebesar US\$ 397,787,706 naik 32,8 % dari tahun 2021.

Sejalan dengan peningkatan produktivitas usaha, maka tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan pada berbagai usaha sebagai berikut: Tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya ikan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 tercatat antara Rp. 17,199,570 sampai Rp. 94,933,751. Secara berurutan tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya di Sulawesi Selatan adalah di Budidaya Sawah/MinaPadi Rp. 17,199,570, Budidaya Kolam Rp. 24,215,698, Budidaya KJA Air Tawar Rp. 34,951,980, Budidaya Tambak Rp. 39,987,928, Budidaya KJA laut Rp. 58,410,109 dan Budidaya Rumput laut diLaut Rp. 94,933,751 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 29,132,262 dan nelayan perairan umum Rp. 72,015,838.

Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun masyarakat Sulawesi Selatan tahun 2022 tercatat sebanyak 69,7 kg/kapita/tahun (naik 2,1 %).

Sekaitan dengan pelayanan baik dalam memanfaatkan asset pemerintah maupun bentuk jasa yang dilakukan, maka dengan mengacu pada perda-perda yang ada, besarnya pendapatan asli daerah sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 tercatat Rp. 3,013,005,280 (112,19 %) dari target Rp. 2,685,630,000,-



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	<i>i</i>
RINGKASAN .....	<i>ii</i>
DAFTAR ISI .....	<i>iv</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>vi</i>
DAFTAR LAMPIRAN .....	<i>viii</i>
I. PENDAHULUAN.....	
1	
II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN.....	
3	
2.1. Keadaan Geografis .....	3
2.2. Demografi .....	
3	
2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan .....	
3	
a. Perikanan Tangkap .....	
3	
b. Perikanan Budidaya .....	
4	
c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan.....	4
d. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut.....	4
e. Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.....	
7	
f. Unit Pelaksana Teknis pelabuhan Perikanan Wilayah I.....	11
g. Unit Pelaksana Teknis pelabuhan Perikanan Wilayah II.....	
12	
III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	
21	
3.1. Struktur Organisasi.....	
20	
3.2. Kepegawaian.....	
24	
3.3. Keuangan.....	
26	

	a. Belanja Aparatur .....	26
	b. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
IV.	PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI SULAWESI SELATAN .....	28
4.1.	Kebijakan dan Program Strategis .....	28
	a. Kebijakan .....	28
	b. Program Strategis .....	28
4.2.	Sumber Pembiayaan .....	41
4.2.1.	Dana Dekonsentrasi .....	41
4.2.2.	Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	42
4.2.3.	Dana Daerah .....	42
	a. Belanja Daerah.....	43
4.3.	Kegiatan Pembangunan .....	43
4.3.1.	Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.....	43
4.3.2.	Perikanan Tangkap.....	48
4.3.3.	Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	77
4.3.4.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.....	99
4.3.5.	CDK Bosowasi.....	150
4.3.6.	CDK Mamminasata.....	160
4.3.7.	CDK Ajatappareng.....	177
4.3.8.	CDK Wilayah Selatan.....	184
4.3.9.	CDK Selayar.....	193
4.3.10.	CDK Pangkep dan Kepulauan.....	207
4.3.11.	CDK Luwu Raya.....	216
V.	HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN .....	225
5.1.	Ekonomi .....	225
	5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.....	225
5.1.2.	Produksi Perikanan.....	225
	a. Budidaya .....	225
	b. Penangkapan.....	227



5.1.3.	Konsumsi Ikan .....	228
5.1.4.	Volume dan Nilai Eksport .....	228
5.1.5.	Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya.....	228
5.1.6.	Tenaga Kerja .....	228



## **DAFTAR TABEL**

	<i>Halaman</i>
1. Tindak Lanjut Rekomendasi UPT PBAPL Atas Pengukuran Capaian Triwulan Tahun 2022.....	6
2. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan oleh UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	8
3. Daftar Jumlah Sertifikat Uji Dan Jumlah Hasil Uji Per Bulan, Tahun 2022.....	9

4.	Laporan Realisasi PAD UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2022.....	11
5.	Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.....	21
6.	Susunan Organisasi UPT dan CDK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.....	22
7.	Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan 2022.....	24
8.	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2022.....	25
9.	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2022.....	25
10.	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2022.....	25
11.	Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	26
12.	Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2022.....	42
13.	Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2021 – 2022.....	225

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1.	Wilayah Peta Penangkapan Udang, Tuna, dan Rumput Laut.....	230
----	--	-----

## LAPORAN TAHUNAN 2021

2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	231
3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2022.....	232
4. Data Produksi Perbenihan Udang Windu pada UPT Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut Tahun 2022.....	233
5. Rekapitulasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	235
6. Daftar Unit CBIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	239
7. Hasil Produksi Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya udang Windu Berbasis Kawasan (Sitto Bangkit) tahun 2022.....	240
8. Hasil Produksi Kegiatan 1.000 (Udang Windu) Ha Tahun 2022.....	241
9. Hasil Produksi Paket Bantuan Sarana Produksi Budidaya Rumput laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	241
10. Data Pokmaswas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	242
11. Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.....	251
12. Data kasus <i>illegal fishing</i> atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Bosowasi selama TA 2022.....	257
13. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Bosowasi TA 2022.....	259
14. Data Pembuatan Rumah Ikan/Apartemen Ikan yang dilakukan Oleh CDK Bosowasi TA 2022.....	259
15. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022.....	259
16. Data Transplantasi Karang yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022.....	260
17. Data Pembuatan Rumah Ikan/Apartemen Ikan yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022.....	260
18. Data Hasil Pemeriksaan Patroli IUU Fishing yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022.....	261
19. Data Hasil Bantuan Sarana Pengawasan yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022.....	262
20. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Ajatappareng TA 2022.....	262
21. Data kasus <i>illegal fishing</i> atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah CDK Wilayah Selatan selama TA 2022.....	262

22. Data kasus <i>illegal fishing</i> atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah CDK Kepulauan Selayar selama TA 2022.....	265
23. Capaian Indikator Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan CDK Kepulauan Selayar.....	266
24. Data Tindak Pidana Perikanan yang Ditemukan di Wilayah CDK Pangkep Tahun 2022.....	266
25. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Pangkajene dan Kepulauan TA 2022.....	267
26. Data Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Pembangunan Apartemen Ikan yang dilakukan Oleh CDK Pangkajene dan Kepulauan TA 2022.....	268
27. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Luwu Raya TA 2022.....	268
28. Daftar Unit Pengolahan Ikan/Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	268





## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah pula memberikan kewenangan otonomi bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai kebutuhan serta sumberdaya yang dimiliki demi kemakmuran rakyatnya.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonomi telah membenahi diri untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada diantaranya adalah sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan kedepan tetap diarahkan pada visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” sedangkan dari 5 (lima) Misi Provinsi Sulawesi selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan menjalankan 2 misi yaitu “ Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif dan Misi 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan. Hal ini untuk mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu *Pro-Poor* (Pengentasan kemiskinan), *Pro-Job* (Penyerapan Tenaga Kerja), *Pro-Growth* (Pertumbuhan) dan *Pro-Sustainability* (Keberlanjutan), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi dibidang kelautan dan perikanan (*Pro-Business*).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan melalui pendekatan sektor kegiatan yang meliputi (1) Perikanan Budidaya dan Daya Saing hasil Produk Perikanan, (2) Perikanan Tangkap (3) Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4) Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Sulawesi Selatan bersumber dari usaha perikanan penangkapan (Laut & Perairan Umum) dan usaha perikanan budidaya (Laut, Tambak, Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan upaya penangkapan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan ke depan akan menjadi usaha perikanan yang

berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu optimalisasi dan pengembangan kegiatan produksi, peningkatan daya saing melalui penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan, dan pengembangan mekanisme dan jaringan pemasaran. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.



## II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

### 2.1. Keadaan Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota di Makassar terletak antara  $0^{\circ} 12' - 8'$  Lintang Selatan dan di antara  $116^{\circ} 48' - 122^{\circ} 36'$  Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sulawesi Barat
Sebelah Timur	: Teluk Bone dan Prov. Sulawesi Tenggara
Sebelah Selatan	: Laut Flores
Sebelah Barat	: Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 46.083,94 Km<sup>2</sup>, secara administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 Kabupaten dan 3 kota yang terdiri dari 304 kecamatan. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.365,51 Km<sup>2</sup> atau luas kabupaten tersebut merupakan 15,98 % dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 sungai. Aliran sungai terbanyak terdapat di kabupaten Luwu, yaitu 25 aliran sungai. Sungai Saddang adalah sungai terpanjang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 Km.

Di Sulawesi Selatan terdapat 5 (lima) danau yakni Danau Tempe, Sidenreng dan Lapompak yang masing-masing berada di Kabupaten Wajo, Sidrap dan Soppeng serta Danau Matano dan Towuti di Kabupaten Luwu Timur.

### 2.2. Demografi

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2022 tercatat sebanyak 9,225,747 jiwa, dimana dari total jumlah penduduk Sulawesi selatan tersebut sekitar 500,538 jiwa yang terdiri dari 225,146 jiwa adalah nelayan, 275,392 jiwa adalah pembudidaya ikan.

### 2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan

#### a. Perikanan Tangkap

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah prasarana perikanan tangkap yang berfungsi untuk menunjang kegiatan bongkar muat hasil perikanan. Pada prasarana tersebut terdapat sarana penunjang yakni tempat pemasaran ikan, tempat kapal bersandar, perkantoran, gedung pertemuan dan tempat perbengkelan.

Sampai tahun 2022 terdapat 19 unit PPI yang terdapat di 16 Kabupaten/kota yang sudah diserahkan pengelolaannya ke Provinsi Sulawesi Selatan yang kondisinya rata-rata baik, namun pembangunan prasarana pelabuhan perikanan /pangkalan pendaratan ikan terus menerus

dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nelayan, yang merupakan kelanjutan pemasaran hasil tangkapan dan distribusi untuk mendukung kegiatan agribisnis pada sektor kelautan dan perikanan.

***b. Perikanan Budidaya***

Prasarana utama pada kegiatan budidaya adalah saluran irigasi baik untuk irigasi tambak maupun irigasi kolam/Mina Padi (sawah). Selama ini untuk membuat saluran irigasi dinas Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi dengan dinas Pengairan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

***c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan***

Di Sulawesi Selatan ada dua jenis sarana pengolahan/pengawetan hasil perikanan yakni bersifat modern dan tradisional (konvensional), kedua jenis usaha tersebut memiliki segmen pasar yang hampir sama. Untuk pengolahan modern hampir sebagian besar dipasarkan ke luar negeri (ekspor), sedangkan yang konvensional pasarnya dalam negeri dan luar negeri.

Pengolahan modern meliputi produk segar (udang, ikan dan kepiting), beku (Udang, ikan, kepiting, paha kodok), kering (sirip ikan hiu, rumput laut, telur ikan terbang dan teripang), olahan (rumput laut dan kepiting), sedangkan tradisional meliputi produk asap (ikan), kering (cumi, ikan dan rumput laut), pindang (ikan), terasi (ikan) dan peda (ikan).

***d. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut***

Indonesia adalah Negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, salah satunya adalah kekayaan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dari sector perikanan budidaya, potensi lahan budidaya laut seluas 11, 8 juta ha, lahan budidaya payau seluas 2,3 juta ha dan lahan budidaya air tawar seluas 2,5 juta ha, baru sebagian kecil dimanfaatkan. Potensi pengembangan perikanan budidaya yang masih luas, mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi perikanan dari produksi perikanan budidaya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan terhadap pengembangan kelautan dan perikanan termasuk sektor budidaya melalui penjabaran visi yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” sebagaimana yang dituangkan dalam rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Perubahan Tahun 2018-2023 dengan misi yang diamanatkan adalah misi ke-3 yaitu Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif dan Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Laut yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung visi



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan sejumlah upaya dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan budidaya perikanan khususnya budidaya air payau dan laut.

## REALISASI TARGET PRODUKSI, PAD DAN BANTUAN BENUR GRATIS

### 1. Realisasi Produksi Benur

NO	URAIAN	TARGET PRODUKSI (Ekor)	REALISASI	%
1	PENJUALAN	14.500.000	9.682.000	66,77
2	BANTUAN	7.500.000	7.590.000	101,20
JUMLAH		22.000.000	17.272.000	78,51

Sumber : UPT PBAPL Bojo Kab Barru, 2022

### 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan target PAD yang telah ditetapkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 282.000.000 dengan realisasi 100,51% atau sebesar Rp. 283.426.000.

NO	URAIAN	TARGET PRODUKSI (Ekor)	REALISASI	%
1	Perbenihan	257.000.000	271.176.000	105,52
2	Budidaya KJA	25.000.000	12.250.000	49,00
Jumlah		282.000.000	283.426.000	100,51

Sumber : UPT PBAPL Bojo Kab Barru, 2022

### 3. Realisasi Bantuan Benur Gratis melalui kegiatan Desiminasi Percontohan Budidaya Udang Windu di 15 Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JENIS KOMODITI	JUMLAH (EKOR)	KETERANGAN
1	16 Juni 2022	Ikbal Dewi	Maros	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
2	16 Juni 2022	Sahrul	Maros	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
3	17 Juni 2022	Olleng	Pangkep	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
4	17 Juni 2022	Mustafa	Pangkep	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
5	18 Juni 2022	Bung Tomo	Barru	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
6	21 Juni 2022	Ibrahim	Gowa	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
7	21 Juni 2022	Adam	Gowa	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
8	21 Juni 2022	Takauddin	Takalar	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
9	21 Juni 2022	Kamaruddin A	Takalar	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
10	22 Juni 2022	H. Muslimin	Makassar	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
11	24 Juni 2022	Samsuddin N	Jeneponto	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
12	24 Juni 2022	Asdir	Jeneponto	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
13	24 Juni 2022	Harmini	Jeneponto	Windu	30,000	Bantuan Gubernur
14	24 Juni 2022	Rustam	Pinrang	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
15	24 Juni 2022	Abd. Adir	Pinrang	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
16	7 Juli 2022	K. Dg. Palinga	Wajo	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
17	14 Juli 2022	H. Ruslan	Makassar	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
18	14 Juli 2022	Syaruddin/Rida	Makassar	Windu	30,000	Bantuan Gubernur
19	14 Juli 2022	M.Nawir/A. Agung	Pinrang	Windu	30,000	Bantuan Gubernur
20	20 Agus 2022	H. Agus	Barru	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
21	26 Agus 2022	Herman	Bone	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
22	26 Agus 2022	A. Rusman	Bone	Windu	250,000	Bantuan Gubernur

Lanjutan.....

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JENIS KOMODITI	JUMLAH (EKOR)	KETERANGAN
23	31 Agus 2022	H. Ahmad Said	Sinjai	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
24	31 Agus 2022	Saddang Husain	Sinjai	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
25	6 Sept 2022	Andi Musakkir	Luwu	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
26	6 Sept 2022	Tomi	Luwu	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
27	14 Sept 2022	Baharuddin	Luwu Timur	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
28	14 Sept 2022	Muh. Natsir	Luwu Timur	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
29	4 Okt 2022	Jufri	Wajo	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
30	6 Okt 2022	Abd Jalil	Luwu Utara	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
31	6 Okt 2022	Aris	Luwu Utara	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
32	12 Okt 2022	Zainuddin	Bulukumba	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
TOTAL					7,590,000	

Sumber : UPT PBAPL Bojo Kab Barru, 2022

#### 4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS PENGUKURAN CAPAIAN TRIWULAN TAHUN 2022

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Nota Dinas perihal Rekomendasi Hasil Monev Triwulan Tahun 2022, maka dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi atas pengukuran capaian triwulan tahun 2022 yaitu sebagai berikut

**Tabel 1. Tindak Lanjut Rekomendasi UPT PBAPL Atas Pengukuran Capaian Triwulan Tahun 2022**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Memperhatikan keseimbangan antara progres realisasi keuangan dan realisasi fisik.	Progres realisasi keuangan dan fisik mengalami peningkatan sebagai bentuk dari tindak lanjut UPT PBAPL atas rekomendasi triwulan yaitu 99,21% untuk realisasi keuangan dan 99,48% untuk realisasi fisik.
2.	Memantau dan mengevaluasi secara intens terkait kegiatan yang terindikasi mengalami keterlambatan dari jadwal kontrak untuk meminimalisir resiko/mitigasi resiko yang mungkin terjadi	Realisasi fisik telah mencapai 99,48%
3.	Pelaksanaan kontrak agar tidak terlambat dan mengalami perubahan jadwal di tahun depan yang dapat menyebabkan	Capaian realisasi keuangan yaitu 99,21% dan capaian realisasi fisik yaitu 99,48%.
4.	Membuat juknis pelaksanaan kegiatan dan pengadaan	UPT PBAPL telah melakukan koordinasi internal dalam pembuatan juknis

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan UPT PBAPL Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan ikan di laut yang memanfaatkan keramba jaring apung (KJA) mengandalkan kondisi dari alam, sehingga pada saat cuaca dalam kondisi yang ekstrim akan berpengaruh terhadap ikan yang dibudidayakan
2. Keamanan yang kurang baik sehingga terjadi pencurian ikan di KJA
3. Lokasi budidaya laut yang dekat dengan lokasi budidaya Mutiara oleh salah satu perusahaan swasta, sehingga limbah dari hasil kegiatan budidayanya mencemari lingkungan pemeliharaan di KJA dan menyebabkan kematian massal pada awal pemeliharaan
4. Belum adanya jaminan pasar, menyebabkan kesulitan dalam pendistribusian benur

5. Jadwal penyaluran bantuan benih tidak sejalan dengan waktu produksi benih di UPT PBAPL
6. Tidak tersedianya tahun ini anggaran obat-obatan larva udang, sehingga pengendalian penyakit susah dikendalikan
7. Fluktuasi suhu yang tidak stabil akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan kegagalan panen tidak terhindarkan
8. Sering terjadi gagal panen akibat serangan penyakit (kunang-kunang dan protozoa)
9. Belum maksimalnya dukungan operasional Laboratorium

#### Upaya Pemecahan

Melihat berbagai permasalahan yang muncul diatas, maka untuk kelancaran operasional kegiatan di UPT Perikanan Budidaya Air Payau/Laut kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan lingkungan budidaya KJA
2. Melakukan koordinasi terhadap pemilik usaha budidaya mutiara untuk melakukan pengolahan limbah dengan baik
3. Meningkatkan kualitas benur dan membuat jaminan bebas virus melalui hasil uji PCR sehingga dapat meningkatkan minat pembeli untuk menggunakan benur dari UPT PBAPL
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang masih memungkinkan untuk digunakan
5. Meningkatkan koordinasi kepada Sub Bagian Perencanaan agar anggaran obat-obatan dapat dianggar di anggaran perubahan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas secara priodik agar perubahan suhu dapat lebih cepat tertangani dan dikendalikan
7. Mengoptimalkan peran labororium sebagai sarana pendukung operasional perbenihan
8. Meningkatkan koordinasi terhadap pembudidaya calon penerima bantuan benur

#### ***e. Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan***

UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan kewananan produk perikanan, mengembangkan (diversifikasi) produk hasil perikanan, dan melaksanakan penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan. Dalam pelayanan pengujian, UPT BPMPP diharapkan dapat mengeluarkan hasil uji yang benar, teliti dan dapat dipercaya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan sertifikasi hasil uji, UPT BPMPP menghadirkan Inovasi Sejuta Ikan yang memudahkan pengurusan pelayanan Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan bagi eksportir ikan di Sulawesi Selatan dan menjadikan layanan menjadi cepat, ringkas, hemat, dan mudah. Upaya Pelayanan pengujian mutu untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan permintaan

standar negara tujuan menjadi enam hari kerja yang sebelumnya 12 hari kerja. Sistem memangkas waktu pelayanan administrasi dan penerbitan sertifikat di persingkat. Bahkan, petugas UPT BPMPP menyediakan layanan jemput sampel dan antar sertifikat tanpa tambahan biaya (gratis) serta menyiapkan layanan pengaduan pengguna jasa. Selain inovasi sejuta ikan, UPT BPMPP dituntut melakukan pelayanan sertifikat hasil uji secara online dengan menggunakan aplikasi, dengan inovasi tersebut UPT BPMPP telah menerbitkan sertifikat sejumlah 1.123 lembar bagi pelaku usaha eksportir dengan capaian PDA Rp. 741.297.100,- dari target Rp. 700.000.000,- (105,90%).

**Tabel 2. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan Oleh UPT BPMPP Sulawesi Selatan Tahun 2022**

No	Parameter	Jenis Pengujian		
		Test Result (TR)	Monitoring	Total Pengujian Tahun 2021
	<b>Kimia</b>			
1	Histamin	322	2	324
2	Chloramphenicol	114	-	114
3	Logam Berat : (Hg)	306	-	306
	(Pb)	313	-	313
	(Cd)	308	-	308
	Arsen	1	-	1
4	Tetracyclin	63	-	63
	Oxitetracyclin	67	-	67
	Chlotetracycline	59	-	59
5	- Formalin	32	65	97
6	TVB-N	66	-	66
7	Nitrofurantoin (AOZ)	98	-	98
	(AMOZ)	94	-	94
	(SEM)	45	-	45
	(AHD)	45	-	45
8	- Kadar Air	41	-	41
9	- Kadar Protein	33	8	41
	- Karbohidrat	3	-	3
10	- Kadar Lemak	11	-	11
11	- Bobot Tuntas	1	-	1
12	- Kadar Abu	22	-	22
13	- pH	14	-	14
14	- Filth	7	-	7
	<b>Mikrobiologi</b>			
1	- ALT	501	8	509
2	- <i>E. coli</i>	427	6	433
3	- Coliform	281	-	281
4	- Salmonella	294	6	300
5	- Vibrio Cholerae	818	-	818
6	- Vibrio parahaemolyticus	429	-	429
7	- Staphylococcus aureus	157	2	159
8	- Listeria monocytogenes	232	-	232
9	- Kapang dan Khamir	74	-	74



Lanjutan.....

No	Parameter	Jenis Pengujian		
		Test Result (TR)	Monitoring	Total Pengujian Tahun 2021
10	- Enterococci	177	-	177
	- Enterobacteriaceae	77	-	77
	Organoleptik			
11	- Uji Sensori	245	-	245
	Total	5840	97	5937

Sumber : Laporan tahunan UPT BPMPP Tahun 2022

Ket:

Test Result : Pengujian berdasarkan permintaan Pelanggan  
Monitoring : Pengujian monitoring Formalin di Kab/Kota

Tabel 3. Daftar Jumlah Sertifikat Uji Dan Jumlah Hasil Uji Per Bulan, Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Sertifikat Uji	Jumlah Hasil Uji
1	Januari	64	509
2	Februari	119	945
3	Maret	144	651
4	April	91	320
5	Mei	67	341
6	Juni	96	430
7	Juli	55	241
8	Agustus	147	1055
9	September	48	275
10	Oktober	60	335
11	November	72	508
12	Desember	160	230
	<b>Jumlah</b>	<b>1123</b>	<b>5840</b>

Sumber : Laporan tahunan UPT BPMPP Tahun 2022

#### Tindak lanjut Rekomendasi UPT BPMPP Atas Pengukuran Capaian Triwulan Tahun 2022

Capaian pengukuran kinerja UPT BPMPP tahun anggaran 2022 dengan realisasi keuangan 97,43% dan realisasi fisik 100% . Realisasi keuangan tidak tercapai 100% karena terdapatnya sisa anggaran kegiatan. Hal ini juga merupakan satu implementasi penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.

Capaian target realisasi sertifikat hasil uji tidak mencapai 100%, dimana realisasi capainnya 75,1% (1.123 dari target 1.500). Hal ini disebabkan karena :

1. Saat ini tidak ada penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) karena adanya pelimpahan kewenangan ke UPT. Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (BKIPM) KKP berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

2. Peralatan Pengujian banyak yang rusak dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan/customer. Peralatan yang dimiliki sebagian besar pengadaan tahun 2006 sedangkan UPT Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (BKIPM) KKP memiliki peralatan yang lebih modern dan sesuai kebutuhan pelanggan/customer. banyak yang rusak
3. Ketersediaan anggaran operasional pengujian sangat minim diantaranya bahan kimia, pemeliharaan peralatan, kalibrasi alat, dan validasi sehingga menghambat pelayanan sertifikasi pengujian.

### Permasalahan Dan Upaya Pemecahan

#### Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat/ pelaku usaha, serta tuntutan untuk tetap mempertahankan beberapa status akreditasi seperti : ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17065:2017 dan ISO/IEC 9001:2015 Namun, belum didukung sumberdaya yang memadai;
2. Pelaksanaan Surveiln ISO/IEC 9001:2015 tidak dilaksanakan pada tahun 2022 karena ketidaktersediaan anggaran.
3. Pelaku usaha UKM/UMKM belum seluruhnya menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB).
4. Alokasi dan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan mutu hasil perikanan belum memadai.

#### Upaya Pemecahan

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghadapi persoalan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. UPT BPMPP sebagai lembaga sertifikasi perlu melakukan peningkatan kompetensi aparatur seperti pelatihan, magang, dan in-house training;
2. Peningkatan SDM pelaku usaha UKM dan UMKM melalui kegiatan Sosialis dan pelatihansi dalam peningkatan mutu produk hasil perikanan.
3. Dalam penyusunan anggaran perlu dilakukan asistensi dan pelibatan tim perencanaan UPT BPMPP.

*f. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah I*

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Bone, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Pelayanan Teknis Operasional Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, serta Keselamatan Operasional Kapal Perikanan. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Bone Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut : a). Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan; b). Pelaksanaan teknis pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan; c). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan, d). Pelaksanaan Administrasi UPT; dan e). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. Adapun yang termasuk dalam wilayah kerja UPT pelabuhan Wilayah I yaitu :

PELABUHAN	DATA PRODUKSI (Kg)	NILAI PRODUKSI	ALAT TANGKAP	SOLAR (L)	AIR TAWAR (L)	ES BALOK (Batang)
PPI LONRAE KAB. BONE	907,724	20,640,050,500	Purse Seine, Hand Line			
PPI BONTU BAHARI KAB. MAROS	71,807	1,122,294,500	Jaring Kepiting, Jaring, Purse Seine, Pukat			
PPI MACCINI BAJI KAB. PANGKEP	507,394	12,579,868,500	Jaring, Sero, Bubun, Pancing	155,340	158,311	123,650
PPI SUMPANG BINANGAE KAB. BARRU	292,089	4,546,878,550	Purse Seine, Waring	144,410	58,400	206
PPI CEMPAE KOTA PARE PARE	212,016	3,327,288,300	Purse Seine, Hand Line	81,258	181,427	17,483
PPI UJUNG LERO KAB. PINRANG	111,362	2,009,551,900	Hand Line, Purse Sein	145,613	409,389	26,468

Sumber : Laporan tahunan UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2022

Selain mengerjakan Tupoksi sesuai dengan aturan, UPT pelabuhan Wilayah I juga berkontribusi terhadap PAD Dinas Kelautan dan Perikanan dimana pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 125,600,000 dengan realisasi pada akhir tahun sebesar 346,526,850 (275,9 %). Rincian PAD UPT Pelabuhan Wilayah I dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4 LAPORAN REALISASI PAD UPT PELABUHAN WILAYAH I TAHUN 2022**

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PPI LONRAE KAB. BONE			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	10,000,000	46,100,000	461.0
	- Sewa lahan	10,000,000	16,769,400	167.7
	- Kios/wisma	3,000,000	4,800,000	160.0
	- Jasa TPI	63,320,000	9,522,000	15.0
2	PPI BONTU BAHARI KAB. MAROS			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	-	600,000	-
	- Sewa lahan	-	7,374,000	-

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	PPI MACCINI BAJI KAB. PANGKEP			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	1,000,000	3,000,000	300.0
	- Sewa lahan	3,160,000	972,000	30.8
4	PPI POLEJIWA KAB. BARRU			
	- Sewa lahan	4,000,000	4,000,000	100
5	PPI SUMPANG BINANGAE KAB. BARRU			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	5,000,000	16,100,000	322.0
	- Sewa lahan	1,000,000	1,791,250	179.1
	- Kios/wisma	3,000,000	40,442,000	1,348.1
6	PPI CEMPAE KOTA PARE PARE			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	4,000,000	3,600,000	90.0
	- Sewa lahan	2,500,000	15,726,400	629.1
	- Kios/wisma	4,180,000	28,800,000	689.0
7	PPI UJUNG LERO KAB. PINRANG			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	-	1,000,000	-
	- Sewa lahan	-	480,000	-
	- Kios/wisma	-	450,000	-
8	PPI ULO ULO KAB. LUWU			
	- Sewa lahan	1,440,000	-	-
9	PPI BALAMBANG KAB. LUWU			
	- Sewa lahan	-	22,640,000	-
10	PPI PONTAP KOTA PALOPO			
	- Sewa lahan	-	120,000	
11	COLD STORAGE	10,000,000	25,000,000	250.0
12	PABRIK		47,000,000	
JUMLAH		125,600,000	346,526,850	275.9

Sumber : Laporan tahunan UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2022

#### g. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II

Kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan produksi di sektor perikanan sebagai input kontribusi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sehingga dibutuhkan pemikiran mendasar tentang percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan yang mampu mengakomodasikan sarana dan prasarana, pelayanan pada masyarakat dan pengembangan teknologi dan informasi melalui konsep pengembangan kelautan dan perikanan secara regional yang dilakukan di wilayah daerah yang memiliki potensi pengembangan kelautan dan perikanan dengan sejumlah potensi sumberdaya yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan dan kewenangan yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 sehingga dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan pemanfaatan, pengawasan serta pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan lebih terarah dan tepat sasaran.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II adalah untuk membantu fungsi teknis khususnya pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi

Selatan. Adapun tujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran bagi pihak terkait bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II berperan penting dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Memberikan data dan informasi serta pelayanan teknis di dalam penanganan hasil tangkapan mulai dari pra penangkapan sampai dengan pasca penangkapan.
3. Memberikan gambaran bagi pihak terkait bahwa dengan fungsi yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II meliputi penyediaan layanan dalam rangka memudahkan masyarakat dalam melakukan usaha kelautan dan perikanan di pelabuhan perikanan.
4. Membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Teknis yang dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II beralamat di Jalan Tokambang Kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba dengan wilayah kewenangan meliputi: Kota Makassar (PPI Paotere), Kabupaten Gowa (TPI Barombong), Kabupaten Takalar (PPI Be'ba), Kabupaten Jeneponto (PPI Tanrusampe), Kabupaten Bantaeng (PPI Birea), Kabupaten Bulukumba (PPI Bonto Bahari dan Kajang), Kabupaten Sinjai (PPI Lappa) dan Kabupaten Selayar (PPI Bonehalang).

Target yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan awalnya Januari 2022 sebesar Rp.178.730.000 tetapi di turunkan target bulan Oktober 2022 menjadi Rp. 125.000.000 dan berhasil melebihi target sebesar Rp 146.797.750 atau sebesar 117,43 persen dari UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II dengan rincian sebagai berikut :

No	Hasil Pendapatan Asli Daerah	Pelabuhan Perikanan
1.	Belum Ada	PPI Paotere
2.	Belum Ada	TPI Barombong
3.	Rp. 32.344.000	PPI Beba
4.	Belum Ada	PPI Tanrusampe
5.	Rp. 8.450.000	PPI Birea
6.	Rp. 35.100.000	PPI Lappa
7.	Rp. 11.500.000	PPI Bontohalang
8.	Rp. 17.900.000	PPI Bontobahari
9.	Rp. 41.503.750	PPI Kajang

Sumber : Laporan tahunan UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2022



**TINDAK LANJUT UPT PELABUHAN WILAYAH I ATAS REKOMENDASI  
PENGUKURAN CAPAIAN TRIWULAN TAHUN 2022**

■ **Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 2022**

- A. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perdin dalam daerah dalam rangka Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi Perencanaan, Pengawasan dan pengendalian DAK pagu sebesar Rp. 10,710.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), target keuangan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 51 %.
- B. Belanja Modal Alat Komunikasi lainnya, Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, pekerjaan Pengadaan Sarana Operasional Kesyahbandaran dan Keselamatan Pelayaran. Pagu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 0 % (sesuai anggaran kas).
- C. Belanja Modal Tempat Pelelangan Ikan berupa Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT.Provinsi), (1). Pekerjaan Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan PPI Beba, Kabupaten Takalar. Pagu sebesar Rp. 4.098.000.000,-, target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 0 % (sesuai anggaran kas). (2). Pengawasan Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan PPI Beba, Kabupaten Takalar. Pagu sebesar Rp. 94.000.000,- target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 0 % (sesuai anggaran kas).
- D. Belanja Modal Pembangkit Listrik lainnya berupa pekerjaan (1). Jaringan Instalasi Listrik (termasuk Travo) Pagu sebesar Rp. 300.000.000,- target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 0 % (sesuai anggaran kas). dan (2). pengawasan Jaringan Instalasi Listrik (termasuk Travo) Pagu sebesar Rp. 9.000.000,- target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 0 % (sesuai anggaran kas).

■ **Triwulan II (April, Mei, Juni) 2022**

- A. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perdin dalam daerah dalam rangka Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi Perencanaan, Pengawasan dan pengendalian DAK pagu sebesar Rp. 10,710.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), target keuangan

Rp.10.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.995.000,00 atau 49,95 %, dengan realisasi fisik 49,95 %.

- B. Belanja Modal Alat Komunikasi lainnya, Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, pekerjaan Pengadaan Sarana Operasional Kesyahbandaran dan Keselamatan Pelayaran. Pagu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 100 % (sesuai anggaran kas).
- C. Belanja Modal Tempat Pelelangan Ikan berupa Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan(UPT.Provinsi), (1). Pekerjaan Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan PPI Beba, Kabupaten Takalar. Pagu sebesar Rp. 4.098.000.000,-, target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 0 % (sesuai anggaran kas). (2). Pengawasan Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan PPI Beba, Kabupaten Takalar. Pagu sebesar Rp. 94.000.000,- target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 0 % (sesuai anggaran kas).
- D. Belanja Modal Pembangkit Listrik lainnya berupa pekerjaan (1). Jaringan Instalasi Listrik (termasuk Travo) Pagu sebesar Rp. 300.000.000,- target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 0 % (sesuai anggaran kas). dan (2). pengawasan Jaringan Instalasi Listrik (termasuk Travo) Pagu sebesar Rp. 9.000.000,- target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 0 % (sesuai anggaran kas).

■ Triwulan III (Juli, Agustus, September) 2022

- A. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perdin dalam daerah dalam rangkaPerjalanan Dinas ke dan dari lokasi Perencanaan, Pengawasan dan pengendalian DAK pagu sebesar Rp. 10,710.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), target keuangan Rp. 10,710.000, realisasi keuangan sebesar Rp. 9.805.000,00 atau 91,5% dengan realisasi fisik 91,5 %.
- B. Belanja Modal Alat Komunikasi lainnya, Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, pekerjaan Pengadaan Sarana Operasional Kesyahbandaran dan Keselamatan Pelayaran. Pagu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), target keuangan Rp. 200.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 199.000.023,00 atau 99,5% dengan realisasi fisik 100 % (sesuai anggaran kas).

- C. Belanja Modal Tempat Pelelangan Ikan berupa Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT.Provinsi), (1). Pekerjaan Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan PPI Beba, Kabupaten Takalar. Pagu sebesar Rp. 4.098.000.000,-, target keuangan Rp. 0,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 655.670.000,00 atau 16 % dengan realisasi fisik 30,5 % (sesuai anggaran kas). (2). Pengawasan Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan PPI Beba, Kabupaten Takalar. Pagu sebesar Rp. 94.000.000,- target keuangan Rp. 94.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi fisik 30,5 % (sesuai anggaran kas).
- D. Belanja Modal Pembangkit Listrik lainnya berupa pekerjaan (1). Jaringan Instalasi Listrik (termasuk Travo) Pagu sebesar Rp. 300.000.000,- target keuangan Rp. 300.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 85.041.452,00 atau 28,3 % dengan realisasi fisik 71,4 % (sesuai anggaran kas). dan (2). pengawasan Jaringan Instalasi Listrik (termasuk Travo) Pagu sebesar Rp. 9.000.000,- target keuangan Rp. 9.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 71,4% (sesuai anggaran kas).

■ Triwulan IV (Oktober, November, Desember) 2022

- A. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perdin dalam daerah dalam rangka Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi Perencanaan, Pengawasan dan pengendalian DAK pagu sebesar Rp. 10.710.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), target keuangan Rp. 10.710.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 10.705.000,00 atau 99,96% dengan realisasi fisik 100 %.
- B. Belanja Modal Alat Komunikasi lainnya, Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, pekerjaan Pengadaan Sarana Operasional Kesyahbandaran dan Keselamatan Pelayaran. Pagu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), target keuangan Rp. 200.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 199.000.023,00 atau 99,5% dengan realisasi fisik 100 % (sesuai anggaran kas).
- C. Belanja Modal Tempat Pelelangan Ikan berupa Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT.Provinsi), (1). Pekerjaan Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan PPI Beba, Kabupaten Takalar. Pagu sebesar Rp. 4.098.000.000,-, target keuangan Rp. 3.278.350.000,00 atau 80% dengan realisasi fisik 100 % (sesuai anggaran kas). (2). Pengawasan Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan PPI Beba, Kabupaten Takalar. Pagu sebesar Rp. 94.000.000,- target keuangan Rp. 94.000.000,00 realisasi keuangan sebesar

Rp. 93.950.000,00 atau 99,9 % dengan realisasi fisik 100 % (sesuai anggaran kas). (3). Perencanaan Drainase PPI Birea, Kabupaten Bantaeng. Pagu sebesar Rp. 15.000.000,- target keuangan Rp. 15.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi fisik 100 % (parsial 2023 (utang).

D. Belanja Modal Pembangkit Listrik lainnya berupa pekerjaan (1). Jaringan Instalasi Listrik (termasuk Travo) Pagu sebesar Rp. 300.000.000,- target keuangan Rp. 300.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 283.471.507,00 atau 94,5 % dengan realisasi fisik 100 % (sesuai anggaran kas). dan (2). pengawasan Jaringan Instalasi Listrik (termasuk Travo) Pagu sebesar Rp. 9.000.000,- target keuangan Rp. 9.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 8.996.326,00 atau 99,95 % dengan realisasi fisik 100 % (sesuai anggaran kas).

#### ■ Pelayanan Kesyahbandaran UPT PP Willayah II

##### ✦ Pelabuhan Perikanan Paotere

Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dipaotere sudah berjalan sejak tanggal 24 September 2022 dengan jumlah SPB yang keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 75 Lembar SPB.



##### ✦ Pelabuhan Perikanan Beba Takalar

Pelayanan Kesyahbandaran sudah berjalan selama tahun 2018 sampai sekarang dan jumlah SPB yang keluar untuk tahun 2022 sebanyak 1680 lembar SPB





➤ **Pelabuhan Perikanan Birea Bantaeng**

Pelayanan Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan Birea mulai dibuka lagi pada tanggal 20 September 2022 dengan jumlah SPB yang terbit sampai 31 Desember 2022 sebanyak 6 Lembar SPB.



➤ **Pelabuhan Perikanan Bonto Bahari Bulukumba**

Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Bontobahari Bulukumba sudah berjalan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang terbit untuk Tahun 2022 sebanyak 640 lembar SPB



➤ **Pelabuhan Perikanan Kajang Bulukumba**

Pelayanan Kesyahbandaran PPI Kajang 2021 sudah berjalan dgn jumlah SPB yang terbit sebanyak 236 SPB, tetapi untuk Tahun 2022 SPB belum diterbitkan lagi berhubung petugas SLO yg dikeluarkan oleh PSDK-KKP Satker Takalar Belum siap



➤ **Pelabuhan Perikanan Lappa Sinjai**

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki daerah yang dijadikan salah satu pelabuhan yang cukup besar sebagai bongkar muat hasil-hasil perikanan, Untuk Pelayanan Kesyahbandaran PPI Lappa sudah menerbitkan SPB di Tahun 2022 sebanyak 4469 lembar SPB.



#### ✦ Pelabuhan Perikanan Bonehalang Selayar

Pelayanan Kesyahbandaran Sudah berjalan semenjak Tahun 2020, dan sempat terhenti selama 9 Bulan dikarenakan didalam SK Dirjen Perikanan tangkap tidak adanya syahbandar Di PP Bonehalang dan pada Tanggal 24 Sepember maka baru dibuka lagi pelayanan kesyahbandaran dan SPB yang terbit sampai 31 Desember 2022 sebanyak 18 Lembar SPB.



#### Permasalahan dan Upaya Pemecahan

1. Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Perikanan yang ada di UPT PP Wil 2 yang tidak memadai (tidak operasi). Fasilitas Pokok dan Penunjang di pelabuhan perikanan banyak yang rusak dan tidak berfungsi , bahkan sudah ada yang mau rubuh dan tidak layak pakai.
2. Kurangnya Sumberdaya Manusia yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan, sehingga pengelolaan Pelabuhan perikanan belum bisa berjalan seperti yang diharapkan.
3. Dalam hal Pelayanan, di PPI Kajang sudah melakukan pelayanan ijin berlayar (SPB), tapi terkendala di Surat Laik Operasional (SLO) karena di terbitkan di PPI Bontobahari dan Sertifikat Kelayakan & Operasional Kapal Perikanan yang diterbitkan per-3 bulan oleh syahbandar umum (PP. Leppe) di Kota Bulukumba,
4. Perlu adanya dukungan dari pengawas perikanan untuk melakukan patroli laut untuk tertib dokumen kapal perikanan.

#### Upaya Pemecahan Masalah :

1. Pengajuan usulan anggaran melalui Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan Wilayah II DKP Prov. Sul-Sel untuk membangun/merehabilitasi sarana prasarana urgen dan penting di pelabuhan perikanan PPI kajang termasuk Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang di pelabuhan Perikanan.



2. Mencoba mengusulkan penambahan petugas atau tenaga kontrak di pelabuhan masing PPI ke UPT. Pelabuhan Perikanan wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel, sehingga jika ada penambahan personil, dengan syarat orang lokal disetiap pelabuhan.
3. Dalam masalah Pelayanan dokumen kapal, PPI Kajang sesuai arahan syahbandar Perikanan Kab. Bulukumba, plt. Operasional Pelabuhan & Kesyahbandaran dan KTU UPT. PPW2 DKPSS harus tetap membuka pelayanan sesuai dengan fungsi pelabuhan perikanan yakni pelayanan dan pengusahaan (Jadi tetap harus melayani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai ketentuan yang berlaku, sambil menunggu koordinasi dan konsolidasi dari Pihak pimpinan UPT. PPW2 DKPSS ke Pangkalan Satwas PSDKP di Kab. Takalar. (Tapi sampai sekarang belum ada realisasi).
4. Dalam hal Pengawasan Kapal Perikanan (Patroli Laut), koordinasikan dengan pihak pengawasan CDK. Wilayah Selatan untuk segera melakukan patroli diwilayah perairan Kab Bantaeng dan Kab Bulukumba.

### III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

#### 3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Struktur Organisasi Dinas dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan susunannya sebagai berikut :

**Tabel 5. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022**

No.	Jabatan	Nama	Nip.	Pangkat/Golongan
1	Kepala Dinas	Dr. MILYAS, S.T., M.Sc.	197006061996031006	Pembina Tk. I, IV/b
2	Sekretaris	SUHARTONO NURDIN, S.Pi., M.P., Ph.D.	198207072008031001	Pembina, IV/a
3	Kasubag UKH	SUWEIDY SURIADY, S.E.	197707132010011003	Penata Tk. I, III/d
4	Kasubag Keuangan	SITTI NURDJIHAD, S.Pi., M.P.	196908231999032005	Pembina, IV/a
5	Kasubag Program	A. WAHYU DWI SAPUTRA, S.STP	199303152015071001	Penata, III/c
6	Kabid Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dr. Hj. SITTI MASNIAH DJABIR, S.Pi., M.P.	197305022005012010	Pembina Tk. I, IV/b
7	Kabid Perikanan Tangkap	ANDI MEI AGUNG, S.ST.Pi.	197805302003121006	Pembina, IV/a
8	Kabid Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Ir. HARDI, M.M.	196508161994031008	Pembina Tk. I, IV/b
9	Kabid Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Ir. HARY RUSTAM TAWAINELLA, M.M	196703051999031004	Pembina Tk. I, IV/b
<b>Jabatan Fungsional</b>				
1	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap – Ahli Madya	Ir. MIFTAHUDDIN	196305311989031015	Pembina Tk. I, IV/b
2	Analisis Pasar Hasil Perikanan – Ahli Madya	Ir. ADHY CAHYA SLAMET, M.Si.	196509071993121001	Pembina Tk. I, IV/b
3	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – Ahli Madya	Ir. Hj. ARNI MAHMUD, M.M.	196403161992032004	Pembina, IV/a
4	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – Ahli Madya	Ir. ROSDIANA, MM	196701161995032002	Pembina, IV/a

Lanjutan.....

No.	Jabatan	Nama	Nip.	Pangkat/Golongan
6	Analisis Pasar Hasil Perikanan – Ahli Madya	Ir. IGNATIUS EKO SUSETYO, MM	196601011995031005	Pembina, IV/a
7	Perencana - Ahli Madya	MARHAMAH, ST., M.Si.	197604202001122001	Pembina, IV/a
8	Arsiparis - Ahli Muda	NURLAILA SANGKALA SIRATE, S.Sos.	197309031993032005	Penata Tk. I, III/d

Sumber : Subag Kepegawaian

Susunan organisasi tersebut di atas juga dilengkapi dengan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 7 (Tujuh) Cabang Dinas Kelautan yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana langsung kegiatan teknis di daerah. Adapun UPT dan CDK yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Susunan Organisasi UPT dan CDK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**

No.	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I	Ir. H. Bachtiar Lewa, MT	19640816 199003 1 013	Pembina TK. I, IV/b
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Hamsinah, S.Pi	19681208 200701 2 014	Penata, III/c
	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Ir. Husni Husain	19651112 199212 1 001	Penata TK. I, III/d
	Kepala Seksi Tata Kelola Pelabuhan	Ir. Muh. Usman, MM	19660418 199803 1 009	Pembina, IV/a
2.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II	IJAS FAJAR, S.STP, M.A.P.	198004302000121001	Pembina Tk. I, IV/b
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Febrian Budianto, S.Pi., MM	19730201 199903 1 008	Pembina, IV/a
	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	ADI BASTIAN, S.St.Pi	197905102008011008	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Tata Kelola Pelabuhan	Muh. Thamrin Nour, A.Pi	19750704 200701 1 013	Penata, III/c
3.	Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Ir. Basri Hamal, MP	19650508 199103 1 017	Pembina TK. I, IV/b
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Muhammad Noer Fajri, S.Pi	198405052006041016	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Produksi	Andi Mallombasang, S.Pi., M.Si	19720908 200003 1 007	Pembina, IV/a
	Kepala Seksi Pelayanan Teknologi dan Kesehatan Lingkungan	Deppalanna, S.Pi., MM	19740605 199803 1 007	Penata TK. I, III/d
4.	Kepala UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan	DR. Siti Zaleha Soebarini, A.Pi., M.Si	196709131991032016	Pembina Tk. I, IV/b
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ir. Sitti Syahtirah Syam	1965061719.98032002	Penata Tk. I, III/d

Lanjutan.....

No.	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
	Kepala Seksi Standarisasi Mutu	MUHAMMAD HASBY RASYAD, S.Pi., M.Si	198001142010011011	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Pengembangan Produk	MUHAMMAD RIDHA, S.Pi., M.Si.	196806151998031013	Pembina, IV/a
5.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar	MARZUKI BADOK, S.P., M.Sc.	196709041989031010	Pembina, IV/a
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	AMIR, S.Sos.	196812311989031033	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	SITTI SYAMSUARNI, S.Pi., M.Si.	197212102007012015	Penata, III/c
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	EMIRAT MAYASSIR, S.ST.Pi.	197711032003121008	Penata Tk. I, III/d
6.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan	ABDUL KADIR, S.Pi., M.Si	196712311999031031	Pembina, IV/a
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	ANDI ASHURNI SL, S.H.	197104191993031009	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	ARON ARFANDY PANANRANG, S.Pi.	198008272009041005	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	TENRI AR, S.Pi.	197604222008012013	Penata Tk. I, III/d
7.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya	Ir. ABD KHALIK, M.M.	196505091999031004	Pembina, IV/a
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ir. IBRAHIM, M.M.	196702231998031005	Pembina, IV/a
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	KELIK KAMARUDDIN	196807241990011001	Penata Muda Tk. I, III/b
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	IRWAN RAHIM, S.Pi.	197805102009011017	Penata Tk. I, III/d
8.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng	SUKMAWATI GAFFAR, S.ST.Pi., M.Si	197303311998032009	Pembina, IV/a
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	HANDAYANI PRATIWI BAHARUDDIN, S.Pi.	197006212007012019	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	FAIZAL K, S.Pi., M.Si.	196902032009021001	Pembina, IV/a
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	-	-	-

Lanjutan.....

No.	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
9.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Bosowasi	HERIMISNIATY, S.Pi., M.Si.	197309231993032006	Pembina, IV/a
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	TAUFIK, S.Pi., M.M.	196904161992031013	Pembina, IV/a
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	NURSALAM, S.Pi., M.Si.	196809042005021001	Pembina, IV/a
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Ir. ANDI MUSTAMIN, M.Si.	196512311998031033	Pembina, IV/a
10.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	A M SUHRIAWAN S, S.STP, MM	198601132006021002	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	ANDI YUSNERI, S.ST.Pi.	197611112003122009	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	NURSALAM, S.Pi.	197106012000031006	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	ROSLIAWATI ARFAH, S.Pi.	196803082007012022	Penata Tk. I, III/d
11.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Mamminasata	SAYYID ZAINAL ABIDIN, S.Pi.	198205182009031006	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	ISMAIL, S.Pi.	198408032011011003	Penata, III/c
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	ACHMAD SAENAL, A.Pi.	197301302007011009	Penata Tk. I, III/d
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	RIZKY SAPHARINA UTAMI, S.Pi.	198312042011012003	Penata, III/c

Sumber : Subag Kepegawaian

### 3.2. Kepegawaian

Pada tahun 2022 tercatat jumlah pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 189 orang naik 0,5 % bila dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun jumlah komposisi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 7. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 dan 2022**

Tingkat/Gol	Tahun				(%)
	2021	%	2022	%	
IV	38	20.2	37	19,6	(2,6)
III	133	70.7	136	71,9	2,3
II	15	7.9	14	7,4	(6,6)
I	2	1.2	2	1,1	-
<b>Jumlah</b>	<b>188</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>100</b>	

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian



Tabel 8. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2022

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama/ IV e	0	0	0
2	Pembina Utama Madya/ IV d	0	0	0
3	Pembina Utama Muda / IV c	0	0	0
4	Pembina Tingkat I / IV b	7	2	9
5	Pembina/ IV a	19	9	28
6	Penata Tingkat I/ III d	37	51	88
7	Penata/ III c	9	13	22
8	Penata Muda Tingkat I / III b	9	5	14
9	Penata Muda / III a	6	6	12
10	Pengatur Tingkat I / II d	7	2	9
11	Pengatur / II c	4	0	4
12	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1	0	1
13	Pengatur Muda/ II a	0	0	0
14	Juru Tingkat I / I d	0	1	1
15	Juru/ I c	1	0	1
16	Juru Muda Tingkat I / I b	0	0	0
17	Juru Muda/ I a	0	0	0
Total		100	89	189

Sumber : Subag Kepegawaian

Tabel 9. Rekapitulasi PNS Berdasar Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2022.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	3	2	5
2	S2	27	25	52
3	S1	49	59	108
4	Sarjana Muda	6	0	6
5	SMA	14	3	17
6	SMP	0	0	0
7	SD	1	0	1
Total		100	89	189

Sumber : Subag Kepegawaian

Tabel 10. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2022

No	Bidang/Unit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	19	24	43
3	Bidang PPRLP3K	4	8	12
4	Bidang Perikanan Tangkap	5	5	10
5	Bidang Pengawasan SDKP	6	5	11
6	Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP	6	7	13
7	CDK Kep. Selayar	4	1	5
8	CDK Pangkajene dan Kepulauan	7	3	10
9	CDK Luwu Raya	5	4	9



Lanjutan.....

No	Bidang/Unit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
10	CDK Ajatappareng	5	2	7
11	CDK Bosowasi	3	4	7
12	CDK Wilayah Selatan	2	4	6
13	CDK Mamminasata	6	3	9
14	UPT PP Wilayah I	4	3	7
15	UPT PP Wilayah II	10	0	10
16	UPT BPMPP	3	8	11
17	UPT PBAP	7	3	10
18	Jabatan Fungsional	3	4	7
19	Dipekerjakan	0	1	1
Total		100	89	189

Sumber : Subag Kepegawaian

### 3.3. Keuangan

#### a. Belanja Aparatur

Belanja aparatur digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tambahan Penghasilan dan Intensif Pungutan Retribusi Daerah pada tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebesar Rp. 22,791,590,530 ,- terjadi penurunan sebesar 4,2 % bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 23.797.388.020,- Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 22,533,006,538,- (99,9%).

#### b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan juga menangani PAD, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa obyek pajak.

Untuk tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 2,685,630,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,013,005,280 atau 112.19 %. Adapun sumber dan target besarnya PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 11. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pergub No 88 Tahun 2018)	942,700,000	932,942,180	98.96
	- Kerjasama Sewa Tambak	157,000,000	107,000,000	68.15
	- Kerjasama Sarana Sistem Rantai dingin ( Depo )	50,000,000	50,000,000	100.
	- Sewa Rumah Dinas	28,200,000	23,770,000	84.29
	- Koperasi Pegawai	-	-	-
	- Kerjasama Sewa Lahan	7,500,000	10,875,080	145.00
	- Pemakaian alat Menguji untuk Lab BPMPP	700,000,000	741,297,100	105.90

Lanjutan.....

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Perda No. 12 Tahun 2019)	304,330,000	488,649,600	160.57
	- Parkir R2, R4/Tambat Perahu	30,000,000	80,792,050	269.31
	- Coldstorage	60,000,000	82,092,000	136.82
	- Jasa Hasil Lelang	20,000,000	12,400,750	62.00
	- Sewa Parkir R2, R4 dan Tambat Perahu	137,830,000	179,100,000	129.94
	- Coldstorage	30,000,000	35,000,000	116.67
	- Pabrik dan Pengolahan	26,500,000	99,264,800	374.58
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Perda No. 12 Thn 2019)	432,000,000	435,026,000	100.70
	- Penjualan Hasil Benih dan Pembesaran (Ikan, Udang dan Rumput Laut)	432,000,000	435,026,000	100.70
4	Retribusi Penyelenggaraan Perizinan (Perda No.88 Thn 2018)	1,000,000,000	1,121,870,000	112.19
	- Retribusi izin Usaha	1,000,000,000	1,121,870,000	112.19
5	Hasil Sewa BMD	6,600,000	6,600,000	100
	- Kantin Pegawai	6,600,000	6,600,000	100
Total		2,685,630,000	3,013,005,280	112.19

Sumber : Subag Keuangan

## IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

### 4.1. Kebijakan dan Program Strategis

#### a. Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 pada RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada akhir periode sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun 2021 juga dilakukan review RPJMD sesuai OPD baru guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Berdasarkan tema pembangunan “Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumberdaya Alam untuk Kebangkitan Ekonomi”, maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sbb:

- Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Hilirisasi Perikanan dan peningkatan Sarana Prasarana dari Hulu ke Hilir dalam rangka penanganan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat pesisir pasca pandemik COVID-19;
- Pengembangan Inovasi Teknologi produk hasil perikanan sehingga dapat berkompetisi dan berdaya saing;
- Pengembangan hilirisasi produk kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkarakter;
- Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan.

#### b. Program Strategis Tahun 2022

Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2022 telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2023 dan telah dilakukan pemetaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri No. 90 tahun 2019.

Potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap dan mendukung *Marine Culture*. Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah kelompok prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan yaitu udang windu dan rumput laut dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi berbasis kawasan sampai tahun 2023. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya, 3) Pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global. Adapun produksi komoditas unggulan perikanan budidaya pada tahun awal kondisi tahun 2018 dan 2020 dan rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 dilakukan studi kelayakan terkait budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan dan diharapkan dapat diterapkan di beberapa kabupaten/kota pada tahun 2022 dan 2023.

Selain itu Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar di daerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Selain itu dilakukan pengembangan kampung pembudidaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, kampung ini diharapkan dapat memulihkan Ekonomi masyarakat dengan Corporate Farming dengan membangun Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau Dan Laut seperti *Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, Kerapu, Rumput Laut, dll.*

Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng dan komoditas ikan lainnya. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka implementasi program, kegiatan dan subkegiatan lebih diarahkan pada:

- a. Diseminasi pengembangan inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis Kawasan dan ramah lingkungan dengan kluster pengembangan terbagi atas 3 kluster yaitu 1) Kluster I : Pinrang, Bone, Maros, Takalar, Pangkep, 2) Kluster II : Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Jeneponto, Bulukumba, 3) kluster III : Wajo, Barru, Makassar, Gowa, Sinjai, Selayar, Palopo, Bantaeng.
- b. Pengembangan budidaya rumput laut dengan melakukan pengembangan dari hulu yaitu pengembangan bibit hasil kultur jaringan dan hilir yaitu penanganan pasca panen di 19

kabupaten/kota serta percontohan budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan di kabupaten/kota yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.

- c. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan untuk produksi benur yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan benur pada program prioritas dan permintaan masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya payau.
- d. Pengembangan budidaya air tawar sesuai kewenangan provinsi dan pemeliharaan sarpras instalasi Balai Benih Ikan Provinsi dalam rangka peningkatan produksi benih komoditas ikan air tawar dan memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pemulihan ekonomi.
- e. Revitalisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya payau dan air tawar dalam rangka peningkatan produksi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana alam dan pandemik global.
- f. Pengendalian dan pengelolaan Kesehatan lingkungan budidaya payau, tawar dan laut.
- g. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas daerah.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan, perluasan jejaring, kerjasama antar pemerintah, institusi, lembaga, swasta dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah.

Dalam rangka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diupayakan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Pada program, kegiatan dan sub kegiatan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan



ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam mini, penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen. Dalam rangka mendukung industrialisasi garam dilakukan kerjasama lintas sektor dimana peran yang akan dilakukan yaitu dapat menjamin ketersediaan stok/bahan baku garam untuk industrialisasi dan melakukan inovasi produk garam menjadi produk yang lebih berdaya saing.

Tahun 2021 – 2023 akan dilakukan upaya untuk mendukung hilirisasi produk perikanan dan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat untuk menghadapi masa pandemik dan menumbuhkan kembali usaha unit pengolah yang tahun 2020 mengalami masa sulit dalam berusaha akibat pandemik global maka optimalisasi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan fasilitasi bimbingan, pembinaan dan revitalisasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran dalam mendukung bahan baku industri serta melakukan inovasi olahan produk perikanan.

Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran diarahkan pada program hilirisasi perikanan dengan melakukan inovasi produk pengolahan agar produk perikanan memiliki nilai tambah produk sehingga memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu program ini mendukung pencapaian indikator SDGs untuk penurunan stunting dan pemulihan ekonomi. Selain itu dalam rangka mendukung industrialisasi, akan dilakukan pemetaan dan pemantauan bahan baku usaha pengolahan, pengujian sampel mutu produk, dan pengembangan informasi manajemen logistik ikan secara digitalisasi.

Program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta mendukung penurunan/emisi karbon. Adapun upaya yang dilakukan pada subkegiatan adalah :

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan inovasi pemanfaatan dan pengelolaan.
- e. Penyusunan kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang
- f. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan
- g. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses
- h. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- i. Pengembangan Wisata Bahari dan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dengan integrasi pengembangan lintas sektor serta edukasi kepada masyarakat.
- j. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi dan melakukan pembinaan kelompok.

Pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk system pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi

masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk kelancaran dan dukungan operasional kegiatan maka terdapat Program Penunjang untuk mendukung Program Utama yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program :

- a. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah
- b. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik
- c. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP

Untuk pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022, dalam mendukung Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional diuraikan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan prioritas antara lain : 1)Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI), 2) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan, 3) Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan, 4) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil, 5) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.
2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dengan kegiatan prioritas antara lain : 1) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan, 3) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, 4) Pengembangan Sistem Usaha Pembudi-dayaan Ikan, 5) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya.
3. Program Peningkatan daya saing produk perikanan, dengan kegiatan prioritas 1) Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, 2) Fasilitas Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 3) Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan, 4) Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan, 5) Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Peningkatan Daya Saing.

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, dengan kegiatan prioritas : 1) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis, 2) Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 3) Pendayagunaan Pesisir dan Lautan, 4) Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, 5) Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan prioritas : 1) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan, 2) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan, 3) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas, 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan, 5) Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan, 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2SDKP
6. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan prioritas : 1) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP, 2) Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP, 3) Pengembangan Data Statistik dan Informasi KP.

Untuk mendukung keberhasilan Program Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan beberapa kegiatan yang dananya bersumber dari dana Dekonsentrasi dan APBD.

***Dana Dekonsentrasi***

1. **Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN**
  - Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN
  - Data dan Informasi Publik
2. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**
  - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan pengawasan kapal perikanan
  - Program Dukungan Manajemen
3. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**
  - Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
  - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
  - Dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
4. **Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**
  - a. Pemantauan, Operasi, Armada dan Infrastruktur Pengawasan
  - b. Dukungan manajemen internal lingkup ditjen pengawasan SDKP

5. **Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan**

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan

- Pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan
- Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
- Investasi dan Keberlanjutan Usaha hasil Kelautan dan Perikanan
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DJPDSPK

6. **Program Kualitas Lingkungan Hidup**

- Perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut
- Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan
- Program Dukungan Manajemen

**Dana APBD**

1. **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PPK**

- Pengelolaan Ruang laut sampai dengan 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi
  - Pengelolaan Kawasan Konservasi diwilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
  - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
  - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2. **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
  - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
  - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
- Pengelolaan Penangkapan Ikan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kab/kota dalam 1 provinsi
  - Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
  - Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
  - Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
- Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT



- Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT,
- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT,
- Penyediaan data dan informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
- Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
  - Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil
  - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil
- Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
  - Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
  - Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
- Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
  - Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
  - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- Penerbitan Izin Pengadaan kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - Penetapan persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
- Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Rawa, Waduk dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT

- Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT
- Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Laut, Sungai, Rawa, Waduk, Danau dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.
  - Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT

### **3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

- Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
  - Penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
  - Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
  - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
  - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
  - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
  - Penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan
- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
  - Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
- Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
  - Penetapan persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
  - Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Penetapan persyaratan dan prosedur perbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
  - Penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
  - Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota
  - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
  - Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

- Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

#### **5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
  - Pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil
  - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
  - Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil
  - Penumbuhan dan Pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
- Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai kewenangannya
  - Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai kewenangannya
  - Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

#### **6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran
  - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Pengamanan Barang Milik daerah SKPD
  - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
  - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah tangga
  - Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## 4.2. Sumber Pembiayaan

### 4.2.1. Dana Dekonsentrasi

Pada tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola dana sebesar Rp. 2,984,728,000 atau terjadi kenaikan sebesar 16,4 % dari tahun anggaran 2021 Rp. 2,564,614,000. Tahun 2022 juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Dana Tugas Pembantuan (TP) untuk satuan kerja Perikanan Tangkap sebesar 1,197,027,000. Anggaran Dekonsentrasi tersebut dialokasikan pada Program kerja yaitu :

- ≡ Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN sebesar Rp. 228,420,000 dengan realisasi sebesar Rp. 227,033,000 (99,4 %),
- ≡ Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 726,555,000 dengan realisasi sebesar Rp. 724,169,000 (99,9 %),
- ≡ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 668,726,000 dengan realisasi sebesar Rp. 648,646,041 (97,0 %),
- ≡ Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 167,222,000 dengan realisasi sebesar Rp. 159,222,000 (95,2 %),
- ≡ Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 556,200,000 dengan realisasi sebesar Rp. 554,048,000 (99,6 %),
- ≡ Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 645,605,000 dengan realisasi sebesar Rp. 642,948,200 (99,6 %).

#### 4.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah penerima dana DAK untuk Tahun Anggaran 2022 sebanyak 14 kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 55,034,843,000, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 36,884,341,639,- mengalami kenaikan sebesar 49,21 %, sedangkan untuk DKP Provinsi mendapatkan dana DAK pada tahun 2022 sebesar Rp. 8,518,600,000 dengan realisasi dana DAK sebesar Rp. 7,154,266,756.

Tabel 12. Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2022

No	Kabupaten	DAK (Rp)	Realisasi	%	Ket
1	PROPINSI	8,518,600,000	7,154,266,756	83.98	Pekerjaan Selesai ( Beberapa pek. Mengalami Penawaran Terendah pada saat proses lelang)
2	BONE	3,634,015,000	3,549,645,988	97.7	Pekerjaan Selesai
3	BULUKUMBA	3,001,500,000	2,748,893,833	91.6	Pekerjaan Selesai
4	JENEPONTO	4,408,000,000	4,016,518,000	91.1	Pekerjaan Selesai
5	LUWU	4,504,000,000	4,471,810,000	99.3	Pekerjaan Selesai
6	LUWU UTARA	2,452,303,000	2,331,327,440	95.1	Pekerjaan Selesai
7	LUWU TIMUR	4,231,000,000	4,050,173,361	95.7	Pekerjaan Selesai
8	BANTAENG	3,742,103,000	3,624,427,500	96.9	Pekerjaan Selesai
9	PANGKEP	2,011,375,000	1,278,184,164	63.5	Pekerjaan Selesai (Terdapat Pekerjaan Pengadaan Perahu fiber 10 mtr 5 unit menjadi utang pemda dan pengawasannya Rp. 614.000.000
10	PALOPO	3,940,800,000	3,970,766,000	99.3	Pekerjaan Selesai
11	PINRANG	4,298,000,000	4,029,158,000	93.7	Pekerjaan Selesai
12	SELAYAR	3,039,739,000	2,862,529,452	94.2	Pekerjaan Selesai
13	SINJAI	3,124,981,000	3,112,576,850	99.6	Pekerjaan Selesai
14	TAKALAR	7,106,027,000	6,615,617,525	93.1	Pekerjaan Selesai
15	WAJO	5,541,000,000	4,540,123,638	81.9	Pengadaan perahu/kapal gagal lelang sebesar Rp. 608.650.000
Jumlah		63,553,443,000	58,356,018,507	91.82	

Sumber : Subag Perencanaan

#### 4.2.3. Dana Daerah

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selain di danai dekonsentrasi juga didukung pendanaan APBD, untuk tahun 2022 total anggaran sebesar Rp. 79,288,024,805,- ini berarti terjadi penurunan sebesar 19,3 % dari tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 98,186,281,309,

##### a. Belanja Daerah

Belanja daerah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 79,288,024,805,- dengan realisasi keuangan Rp. 74,350,572,447,- (93,8 %).

Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan. Alokasi dana tersebut terdapat pada Enam program kegiatan yaitu :

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK sebesar Rp. 14,180,411,130,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 13,532,203,193 (95,4%).
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 18,823,931,300,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 16,018,427,221 (85,1 %).
- c. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 1,392,063,300,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1,345,819,096,- (96,7 %).
- d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 8,367,213,050,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 7,973,125,034,- (95,3 %).
- e. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4,271,763,750,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 4,134,686,995 (96,8 %).
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 32,252,642,275,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 31,346,310,908,- (97,2 %).

### **4.3. Kegiatan Pembangunan**

#### **4.3.1. Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

##### **APBD**

Pembangunan sektor perikanan dan kelautan ke depan lebih di arahkan kepada pengembangan agribisnis dengan sasaran utamanya adalah pemberdayaan masyarakat pertanian pembudidaya, melalui pengembangan kerjasama antara petani pembudidaya dan dunia usaha.

Pengembangan usaha budidaya terus diupayakan untuk meningkatkan kotribusinya pada pembangunan perikanan budidaya. Pengembangan system usaha budidaya masih terbuka luas dengan adanya potensi sumberdaya lahan dan komoditas yang tersedia sesuai permintaan pasar yang semakin meningkat.

Berbagai upaya dan perhatian terhadap pembangunan perikanan budidaya telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti pembangunan dan pengembangan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan peluang usaha perikanan budidaya yang dapat diandalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 yakni “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”, maka disusun beberapa program unggulan diantaranya : Pengembangan sektor unggulan ekonomi berbasis wilayah : pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pariwisata; Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM petani dan nelayan yang menunjang sektor unggulan ekonomi dengan

membangun lembaga riset pertanian dan perikanan sebagai pusat pengembangan produk unggulan Sulawesi Selatan.

Beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan telah terlaksana pada Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Pokok dan setelah mengalami proses perubahan anggaran melalui Anggaran Perubahan TA. 2022, yakni:

## **APBD**

### **1. PROGRAM : Pengelolaan Perikanan Budidaya**

#### **✓ Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dilaut**

##### **A. Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut**

###### **■ Belanja Persediaan untuk Dijual / Diserahkan - Persediaan untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat**

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Luwu, Wajo, Pangkep, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kabupaten Sinjai.
- d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Penyerahan Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumpuk laut TA. 2022

###### **■ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Luwu, Wajo, Pangkep, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Sinjai
- d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Verifikasi Pokdakan Calon Penerima dan Monitoring Bantuan Sarana Budidaya Rumpuk laut TA. 2022

##### **B. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Provinsi dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.**

###### **B1. Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan**

Diseminasi Budidaya Udang Windu dan Pengembangan Budidaya Udang Windu 1.000 Ha (Pandawa 1.000) di Kec. Lanrisang Kab. Pinrang

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Pinrang, Barru, Pangkep, Maros, Bone, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai
- d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Penyaluran Paket Percontohan Budidaya Udang Windu di 15 Kabupaten/kota dan Pengembangan Budidaya Udang Windu 1.000 Ha di Kec. Lanrisang Kab. Pinrang

B2. Belanja Jasa. Belanja Jasa Kantor. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

Diseminasi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan

Jasa Tenaga Pendamping Lapangan :

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari -Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Pinrang, Barru, Pangkep, Maros, Bone, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai
- d. Hasil yang dicapai : Terbayarkannya Jasa Tenaga Pendamping Lapangan di 15 kab./kota

B3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya.

Pembangunan / Rehabilitasi Unit Perbenihan BBI Sentral Lajoa Kab. Soppeng.

Pemeliharaan Pematang Air 1 paket :

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : September -Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Lajoa Kab. Soppeng
- d. Hasil yang dicapai : terselesaikannya Pemeliharaan Pematang Air kolam ikan di BBI Lajoa.

B4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari - Juni
- c. Tempat Pelaksanaan : Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Pinrang, Pangkep, Maros, Bone, Makassar, Takalar, Jeneponto.
- d. Hasil yang dicapai :Terlaksananya Verifikasi Calon Penerima Bantuan Percontohan Budidaya Udang Windu serta monitoring budidaya udang windu TA. 2022.

C. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari - Juni
- c. Tempat Pelaksanaan : Makassar, Gowa dan Kabupaten Sinjai.
- d. Hasil yang dicapai :Terlaksananya Temu Koordinasi dan Temu Lapang Budidaya Udang di kabupaten tersebut di atas TA. 2022.

APBN

1. Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan

- ✓ Sampel Monitoring penyakit ikan di kawasan budidaya baik laut, payau dan tawar yang terdapat di Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan sebanyak 10 Sampel.
- ✓ Monitoring dan Pengujian Residu, Obat Ikan, Bahan Kimia dan Kontaminasi pada Ikan, Udang dan kekerangan yang terdapat di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.



- ✓ Telah dilakukan Pembelian sampel, Pengiriman sampel sebanyak 180 sampel yang telah terkirim ke Lab Uji SGS, Angler, MAL, BBBAT Sukabumi dan BBAP Takalar.
- 2. Pengelolaan Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya
  - ✓ Penilaian dan pembinaan CBIB dapat dilaksanakan dengan target sertifikat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebanyak 41 Sertifikat CBIB bagi pembudidaya, dan telah terbit sebanyak 61 sertifikat CBIB pada Tahun 2022 yang berarti melebihi dari target yang diberikan oleh DJPB-KKP RI.
- 3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
  - ✓ Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban keuangan pelaksanaan kegiatan telah terlaksana dengan baik selama 1 (satu) tahun anggaran.
  - ✓ Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pada masing-masing kegiatan sebagai salah satu bagian dari pertanggung jawaban.
  - ✓ Terlaksananya Forum Data Statistik Perikanan Budidaya Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 kali di Hotel Almadera – Makassar Tanggal 30 - 31 Mei 2022
  - ✓ Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dilakukan setiap bulan dan semesteran.
  - ✓ Terlaksananya Perjalanan menghadiri Rapat, Koordinasi & Konsultasi serta Supervisi dan Monitoring kegiatan Perikanan budidaya

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

### **➔ Safari Gemarikan**

Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan gizi di masyarakat. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, sebanyak 30,8% anak balita (bawah lima tahun) mengalami pertumbuhan *stunting* atau kerdil akibat kekurangan gizi kronis. Walaupun pada tahun 2019 prevalensi *stunting* turun menjadi 27,67% (Survei Status Gizi Balita Indonesia, 2019), namun demikian masih diatas angka toleransi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20%. Angka prevalensi *stunting* ini berpotensi meningkat dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. *Stunting* pada anak Balita merupakan dampak dari kekurangan gizi kronis selama 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK).

Gangguan perkembangan fisik anak ini tidak dapat diubah kembali (*irreversible*), dan akan menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan motorik serta penurunan performa kerja anak.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2004 telah melaksanakan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Kampanye peningkatan konsumsi ikan melalui Gemarikan menyoasar target kelompok Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak berusia 0-59 bulan. Kegiatan berupa edukasi manfaat ikan bagi Kesehatan, pemberian makanan berbahan baku ikan, pemeriksaan Kesehatan ibu dan anak, penimbangan balita/baduta dan pemberian paket Gemarikan (isi olahan ikan).

Lokasi Kegiatan Gemarikan di Provinsi Sulawesi selatan dilaksanakan di 2 (Dua) kabupaten yaitu Kabupaten Maros dan Enrekang

- 1) Lokasi pelaksanaan kegiatan Safari Gemarikan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Bappenas No. KEP. 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022. Mekanisme penentuan lokasi melalui koordinasi dengan Dinas Provinsi dengan kriteria merupakan kab/kota dengan angka *stunting* tinggi dan tidak pernah diintervensi KKP; dan
- 2) Penetapan wilayah kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 412/KEP/IV Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Enrekang Tahun 2022).
  - a) Peserta  
Target peserta sebanyak 370 untuk di Kabupaten Enrekang sementara di kabupaten Maros target peserta sebanyak 250 orang yang terdiri dari kelompok target pencegahan *stunting* yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak berusia 0-59 bulan
  - b) Pelaksanaan Kegiatan  
Pelaksanaan Safari Gemarikan secara umum terdiri dari
    1. Distribusi Paket GEMARIKAN beserta sosialisasi dan edukasi Gemarikan sebanyak 2 kali. Distribusi Paket Edukasi GEMARIKAN dilaksanakan di 15 Desa se Kecamatan Baraka. Desa tersebut adalah desa yang terdapat anak-anak penderita *stunting* dan gizi buruk. Desa tersebut adalah Desa Balla, Desa Banti, Desa Baraka, Desa Bone-Bone, Desa Bontongan, Desa Janggurara, Desa Kadingeh, Desa Kendenan, Desa, Pandung Batu, Desa Parinding, Desa Pepandangan, Desa Perangian, Desa Salukanan, Desa Tirowali dan Desa Tomenawa. Secara topografi beberapa dari Desa terbut terletak di ketinggian dan tentunya memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah terkait dan stake holder dalam memenuhi asupan protein. Salah satu contoh adalah Desa Bone-Bone. Beberapa anak di desa tersebut menderita

stunting. Meskipun secara berat badan balita tersebut terpenuhi atau normal, tapi anak-anak tersebut nampak kekurangan protein dilihat dari ukuran tinggi badan yang tidak sesuai usia, sering sakit dan beberapa tanda-tanda fisik lainnya. Pelaksanaan Safari GEMARIKAN di Kabupaten Enrekang juga sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Pemkab Enrekang yang senantiasa masif dalam melakukan percepatan penanggulangan stunting di wilayahnya, untuk mewujudkan Enrekang zero stunting. Sementara untuk distribusi paket di Kabupaten Maros yaitu terletak di Kecamatan Bontoa.



#### **4.3.2. Perikanan Tangkap**

Pembangunan perikanan tangkap pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan sekaligus untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta lingkungannya. Tujuan tersebut dewasa ini diperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan, tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi Sektor Perikanan Tangkap terhadap pembangunan perekonomian nasional (pro growth), dan membantu mengatasi krisis multidimensi yang sedang melanda negara kita, baik dalam bentuk penyediaan lapangan kerja (pro job), penerimaan devisa melalui ekspor, penerimaan negara bukan pajak, maupun untuk pengentasan kemiskinan (pro poor).

Solusi pembangunan perikanan saat ini belum dapat memecahkan berbagai permasalahan yang muncul, yaitu minimnya kesejahteraan nelayan dan indikasi hasil tangkap yang berlebih (over fishing) disebagian wilayah perairan Indonesia. Eksploitasi sumberdaya ikan secara berlebih sebagai salah satu cara dalam menambah pundi-pundi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadikan penangkapan sumberdaya ikan secara tidak terkendali karena tanpa mempertimbangkan konsep sustainable development.

Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan pemberian bantuan kepada nelayan di tahun 2022, mulai dari asuransi nelayan, bantuan kapal perikanan, sertifikasi hak atas tanah nelayan, merevitalisasi pelabuhan perikanan.

Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ke depan, selain berfungsi sebagai tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna mendaparatkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan juga diarahkan untuk pengembangan Industrialisasi Pengembangan Perikanan Tangkap untuk mendukung pengembangan sentra ekonomi perikanan berbasis kawasan.

Paket kebijakan peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan meliputi : (1) Peningkatan kualitas pelayanan ; (2) Revitalisasi pelabuhan perikanan; dan (3) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana.

Peningkatan peran dan fungsi pelabuhan perikanan di masa yang akan datang mutlak diperlukan. Disamping menciptakan iklim usaha yang kondusif, pelayanan yang cepat, juga harus memberikan rasa aman bagi setiap pelaku usaha dan dalam pelaksanaannya menuntut partisipasi aktif segenap stakeholder.

Masih rendahnya tingkat operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dilokasi masing masing pelabuhan. Evaluasi kinerja pelabuhan perikanan merupakan sebagian dari kegiatan manajemen, untuk menilai kinerja pelabuhan perikanan secara terukur dan hasilnya sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga keberadaanya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh nelayan dan stakeholders lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada lampiran pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dinyatakan bahwa penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan kewenangan provinsi, sehingga perlu dilakukan percepatan Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).



➤ **Kegiatan APBN**

**I. Sosialisasi Pendaftaran Kapal Kewenangan Daerah**

**TUJUAN :**

Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Daerah dimaksudkan untuk memberikan informasi dan membangun kesadaran masyarakat nelayan tangkap khususnya pemilik kapal akan kewajiban untuk memiliki dan mengurus dokumen kapalnya sebagai identitas kapal perikanan.

**Dasar Pelaksanaan :**

- a. Pelaksanaan kegiatan “ Sosialisasi Dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Daerah” dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523 /20/ PKPK/TKP/II/DKP Tanggal 15 Februari 2022 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Daerah.
- b. Kegiatan Pertemuan “Sosialisasi Dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Daerah ” dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 di aula Kantor Desa Tamasaju Beba Kabupaten Takalar yang dihadiri oleh nelayan dan pemilik kapal yang berdomisili di sekitar PPI Beba kabupaten Takalar, Syahbandar Perikanan dan personil dari Posal AL dengan peserta sebanyak 50 orang.
- c. Narasumber pertemuan ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kab. Takalar, Sub Koordinator Rancang Bangun dan Standarisasi Kapal Perikanan DJPT KKP, dan Kepala Desa Tamasaju Beba Kabupaten Takalar.
- d. Jumlah PPKP yang terbit sampai pada tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 1.007 kapal.





## II. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan

### TUJUAN :

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah memberikan status hukum atas kekayaan (aset) milik nelayan dan meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil.

### SASARAN :

Sasaran dari kegiatan ini adalah nelayan dan yang sesuai kriteria calon peserta bidang tanah sertifikasi hak atas tanah nelayan.

### Dasar Pelaksanaan :

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2022 Nomor : SP DIPA-032.03.3.199033/2022 tanggal 17 November 2021 dan Revisi DIPA Nomor : SP DIPA-032.03.3.199033/2022 tanggal 24 Desember 2021.
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523/10/SeHAT/TKP/I/DKP tanggal 25 Januari 2022 tentang panitia Sosialisasi, Identifikasi, Inventarisasi dan Koordinasi Program Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan.

### ➤ Kabupaten Bulukumba

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba Pukul 10.00 s/d selesai yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta.

### Materi dan Narasumber terdiri dari :

- Arahan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba oleh Drs. Asrar A. Amir.
- Mekanisme pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan oleh A. Mei Agung, S.St.Pi, M.Si Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Sulawesi Selatan.
- Petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan oleh Drs. Muhammad Yusri AM, MH Kepala Badan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba.

Alokasi calon penerima lokasi Kab. Bulukumba sebanyak 182 bidang tanah.



➤ Kabupaten Jeneponto

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 di di Aula Kantor Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Pukul 10.00 Wita s/d selesai yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta.

Materi dan Narasumber terdiri dari :

Narasumber pertemuan ini adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Hasil Perikanan Kabupaten Jeneponto, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Jeneponto dan Badan ATR / BPN Kabupaten Jeneponto.

Alokasi calon penerima calon lokasi Kab. Jeneponto sebanyak 88 bidang tanah



➤ Kabupaten Wajo

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Aula Kantor Kelurahan Akkajeng Kabupaten Wajo Pukul 09.00 s/d selesai yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta.

Materi dan Narasumber terdiri dari :

- Arahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo oleh Bapak Ir. Nasfari;

- Mekanisme Penerbitan Sertipikasi secara Teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo;
- Sertipikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Alokasi calon penerima calon lokasi Kab. Wajo sebanyak 69 bidang tanah



➤ Kabupaten Pinrang

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertipikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di Aula Kantor Kelurahan Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Pukul 09.00 s/d selesai yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta.

Materi dan Narasumber terdiri dari :

- Arahan Kepala Bidang Perikanan Tangkap mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang;
- Mekanisme Penerbitan Sertipikasi secara Teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang;
- Sertipikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Alokasi calon penerima calon lokasi Kab. Pinrang sebanyak 57 bidang tanah





➤ Kabupaten Bone

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di Aula Kantor Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare Kabupaten Bone Pukul 09.00 s/d selesai yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta.

Materi dan Narasumber terdiri dari :

- Arahan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone;
- Mekanisme Penerbitan Sertifikasi secara Teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone;
- Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Alokasi calon penerima calon lokasi Kab. Bone sebanyak 40 bidang tanah



➤ Kabupaten Sinjai

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di Aula Kantor Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Pukul 10.00 s/d selesai yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta.

Materi dan Narasumber terdiri dari :

- Arahan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai;
- Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Sinjai;
- Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Alokasi calon penerima calon lokasi Kab. Sinjai sebanyak 57 bidang tanah



➤ Kabupaten Takalar

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2022 di Aula Kantor Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Pukul 10.00 s/d selesai yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta.

Materi dan Narasumber terdiri dari :

- Arahan dan Pembukaan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. M. Ilyas, S.T, M.Sc;
- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Takalar oleh H. Baso, S.Pd, M.Si;
- Kepala Seksi PHP Badan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kab. Takalar oleh Ipa Masnaeni;
- Moderator oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam oleh H. Zainuddin, S.Pt.

Alokasi calon penerima calon lokasi Kab. Takalar sebanyak 107 bidang tanah.





### III. Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (Percepatan Perizinan Kapal Perikanan)

#### TUJUAN :

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah untuk mempercepat proses pengurusan dokumen bagi nelayan terutama perizinan kapal perikanan.

#### SASARAN :

Sasaran dari kegiatan ini adalah nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 5 s/d 30 GT.

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523/231/PPVM/TKP/VIII/DKP tanggal 08 Agustus 2022 tentang panitia pelaksana Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan.

Kegiatan Pertemuan “Monitoring Kegiatan dalam rangka Percepatan Perizinan Kapal Perikanan” dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 di aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Syahbandar Utama Makassar, UPT Pelabuhan Wilayah I dan II, KSU, CDK Dinas Kelautan Provinsi SulSel, dan Kasatpel Pelabuhan Perikanan sebanyak 30 orang peserta.



### IV. Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap

#### TUJUAN :

Pelaksanaan kegiatan Validasi data statistik perikanan tangkap Semester I tahun 2022 dimaksudkan untuk tercapainya kesesuaian data dan statistik perikanan tangkap di Sulawesi Selatan yang akurat, tepat waktu, konsisten, terpercaya, dengan tujuan :

- a. Melakukan sinkronisasi data statistik perikanan tangkap tahun 2022 dengan petugas statistik kabupaten/kota;
- b. Koordinasi, komitmen, sinergitas, integrasi antara provinsi dan kab/kota dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kelautan dan perikanan;

- c. Mengintegrasikan sistem aplikasi LK satu data KKP.
- d. Terwujudnya data yang akurat dan terpercaya

**SASARAN :**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Validasi data statistik perikanan tangkap Semester I tahun 2022 adalah meningkatnya kesesuaian dan keakuratan data dan informasi kelautan dan perikanan serta integrasi sistem aplikasi LK satu data KKP yang berorientasi pada keseragaman hasil pengumpulan dan pengolahan data di Kabupaten/Kota.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Surat Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan Nomor : 523/1205/TKP/VALIDASI/VIII/DKP Tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Pertemuan Validasi Statistik Perikanan Tangkap di Provinsi pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (03) Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat, tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Hotel Almadera Jl. Somba Opu No. 235 Makassar.

Materi dan narasumber dari kegiatan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap antara lain :

1. Penguatan Definisi, Klasifikasi, Methodologi dan Alur pendataan Statistik Perikanan Tangkap;
2. Exel to LK Lembar Kerja Pelabuhan;
3. Exel to LK Lembar Kerja Non Pelabuhan;
4. Exel to LK Lembar Kerja PUD;
5. Rambu-Rambu Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap;
6. Pengantar Apdes Validasi Nasional Satu Data;
7. Tutorial Modul Exel Terformat non Pelabuhan (Video);
8. Tutorial Modul Exel Terformat Pelabuhan (Video).

Narasumber : Hariyanto Adhi Prabowo (Dirjen Perikanan Tangkap)



## **V. Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (FGD Telaah Teknis Alat Penangkapan Ikan - API Perre-Perre)**

### **TUJUAN :**

Dokumen telaah teknis bertujuan sebagai rekomendasi teknis dalam pengambilan kebijakan pada kegiatan penangkapan ikan dengan penggunaan API perre perre.

### **SASARAN :**

Untuk mendapatkan deskripsi API perre perre (sifat, bentuk baku, cara pengoperasian dan target tangkapan), nomenklatur serta pengaturan yang meliputi (selektifitas dan kapasitas) untuk :

1. Menjamin kesetaraan akses (skala kecil VS skala industri) melalui pembagian jalur dan pembatasan kapasitas penangkapan; -
2. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) melalui penerapan selektivitas penangkapan dan pengembangan *eco-friendly fishing gear* meliputi :
  - Menjaga kelestarian stok yang menjadi target penangkapan;
  - Mengurangi tertangkapnya ikan non target (*reduction by-catch*);
  - Mengurangi kerusakan dasar perairan (*reduction seabed destruction*).

Pelaksanaan kegiatan “Petemuan Evaluasi dan Monitoring FGD Telaah Teknis Alat Penangkapan Ikan (API) Perre-Perre” dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523/231/PPVM/VIII/DKP Tanggal 08 Agustus 2022 tentang Pelaksana Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan dan Surat Perintah Kerja Nomor : 012/SPK/19.03/11/2022 tanggal 22 November 2022.

Kegiatan Pertemuan “Petemuan Evaluasi dan Monitoring FGD Telaah Teknis Alat Penangkapan Ikan (API) Perre-Perre ” dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022 s/d 01 Desember 2022 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Narasumber pertemuan ini adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat KAPI KKP, BBPI Semarang, Akademisi, Pakar Perikanan / Alat Tangkap. Peserta Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan FGD Telaah Teknis Alat Penangkapan Ikan (API) Perre-Perre adalah Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Kepala CDK dan UPT Pelabuhan Perikanan Lingkup DKP SulSel, HNSI, Akademisi, petugas teknis DKP SulSel dan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap



## VI. Pertemuan Perlindungan Nelayan melalui Fasilitas Asuransi Mandiri dan Jaminan Hari Tua

### TUJUAN :

Maksud pelaksanaan program asuransi mandiri bertujuan untuk mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

Tujuannya terdiri dari :

1. Melindungi, melayani dan menyejahterakan pekerja dan keluarga;
2. Memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta;
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik.

### SASARAN :

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Pertemuan Perlindungan Nelayan melalui Fasilitas Asuransi Mandiri dan Jaminan Hari Tua, antara lain :

1. Penyuluh perikanan dan atau koordinator penyuluh perikanan yang bertugas dilokasi nelayan untuk membantu nelayan binaan agar termotivasi dalam pencapaian program asuransi nelayan mandiri sebagai tindak lanjut dari program bantuan asuransi nelayan diseluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi serta membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri.

Dasar pelaksanaan adalah Keputusan Kepala Dians Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523/257/PN/TKP/X/DKP tanggal 25 Oktober 2022 tentang Panitia Pelaksana Pertemuan Perlindungan Nelayan melalui Fasilitas Asuransi Mandiri dan Jaminan Hari Tua dan Surat Perintah Kerja Nomor : 011/SPK/19.03/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pertemuan Perlindungan Nelayan melalui Fasilitas Asuransi Mandiri dan Jaminan Hari Tua.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pertemuan Perlindungan Nelayan melalui Fasilitas Asuransi Mandiri dan Jaminan Hari Tua sebanyak 50 (Lima puluh) orang, terdiri dari Koordinator Penyuluh Perikanan/Penyuluh Perikanan dan Petugas Teknis Asuransi Nelayan yang ada di Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pertemuan Perlindungan Nelayan melalui Fasilitas Asuransi Mandiri dan Jaminan Hari Tua ini dilaksanakan pada tanggal hari Senin tanggal 07 November 2022 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.



Motode pelaksanaan terdiri dari : Pemaparan, diskusi dan tanya jawab. Berikut materi pelaksanaan Pertemuan Perlindungan Nelayan melalui Fasilitas Asuransi Mandiri dan Jaminan Hari Tua :

- a. Kebijakan dan Arah Pembangunan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Perlindungan Nelayan dan Petunjuk Teknis Asuransi Nelayan.



## **VII. Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat**

TUJUAN :

Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan "Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat" adalah untuk memperoleh data pemanfaatan sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan (danau) untuk membangun prinsip pengelolaan perikanan perairan umum daratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti prinsip keberlanjutan.

Dasar pelaksanaan kegiatan " Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat" dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523 /256/ PKPP/TKP/X/DKP Tanggal 03 Oktober 2022 tentang Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat.

Kegiatan Pertemuan "Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat" dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2022 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.





➤ Kegiatan APBD

I. Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap

I. Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

a. Target OutPut Kegiatan :

- 1) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil (unit) : 287
- 2) Jumlah Nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah (Kelompok) : 287
- 3) Jumlah Kapal Yang Dibangun (unit) : 17
- ❖ Jumlah Anggaran : Rp. 11.343.275.800,-

b. Realisasi OutPut Kegiatan :

- 1) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil (unit) : 9
- 2) Jumlah Nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah (Kelompok) : 9
- 3) Jumlah Kapal Yang Dibangun (unit) : 9
- ❖ Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 5.886.847.700,-

c. Hasil Kegiatan :

*Belanja Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat*

1. Pengadaan Kapal 5 GT dan Alat Tangkap dan Mesin Kelompok Nelayan KUB Sipatuo Kel. Kalukuang Kec. Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep

- Jumlah Anggaran : Rp. 350.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 284.820.000,- (81,38 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan, (81,38%) dan Dokumen Pengawasan, dan Perencanaan Kapal secara realisasi fisik kapal sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022.



2. Pengadaan Kapal 5 GT dan Alat Tangkap dan Mesin Kelompok Nelayan Estira Bajang Jaya Dusun Bajang, Herlang Gunturu Kabupaten Bulukumba

- Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 197.378.000,- (98,69 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



3. Pengadaan Kapal 5 GT Kelompok Mammiri Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kabupaten Pangkep

- Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 198.614.000,- (99,31 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan,(99,31%) Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengawasan, secara realisasi fisik kapal sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022



4. Pengadaan Kapal 5 GT Kelompok Mekar Jaya Kabupaten Maros.

- Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 199.000.000,- (99,50 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan (99,50%) dan Fisik Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengawasan, secara realisasi fisik kapal sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022



5. Pengadaan Kapal 5 GT Kelompok Zam Zam Jaya Kel. Suli Kec. Suli Kabupaten Luwu

- Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 198.094.000,- (99,05%)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan (99,05) dan Fisik , Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengawasan, secara realisasi fisik kapal sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022



6. Pengadaan Kapal 5 GT Kelompok KUB Doang Lobster Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba

- Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 185.120.000,- (99,56 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan dan Fisik , Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengawasan, secara realisasi fisik sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022



7. Pengadaan Kapal Perikanan 5 GT KUB Reski Ilahi Kec. Bua Kabupaten Luwu

- Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 191.667.000,- (95,83 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan (99,83%) dan Fisik, Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengawasan, secara realisasi fisik kapal sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022



8. Pengadaan Kapal Perikanan 5 GT KUB Sumber Hidup Kel. Barrang Caddi Kec. Sangkarrang Kota Makassar.

- Jumlah Anggaran : Rp. 192.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 191.031.000,- (99,50 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan (99,50) dan fisik , Dokumen Pengawasan, secara realisasi fisik kapal sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022





9. Pengadaan Kapal Perikanan 5 GT KUB Sumber Rejeki Kec. Bontoa Kab. Maros

- Jumlah Anggaran : Rp. 200.00.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 193.953.000,- (96,98%)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan (96,98%) dan Fisik, Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengawasan, secara realisasi fisik kapal sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022



Pembayaran Utang Tahun 2021 Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Berikut :

1. Pengadaan Kapal Perikanan 15 GT Alat Tangkap Kelompok KUB Bambara Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

- Jumlah Anggaran : Rp. 404.040.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 404.040.000,- (100 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



2. Pengadaan Kapal Perikanan 15 GT dan Alat Tangkap Kelompok Nelayan Opu Karadjeng Desa Barat Lambongan Kec. Bontomatene Kabupaten Selayar

- Pengadaan Kapal Perikanan 15 GT dan Alat Tangkap Kelompok Nelayan Balang Nipa Desa Barat Lambongan Ke. Bonto Matene Kabupaten Selayar
- Pengadaan Kapal Perikanan 15 GT dan Alat Tangkap Kelompok Nelayan Era Poso Desa Barat Lambongan Ke. Bonto Matene Kabupaten Selayar

- Jumlah Anggaran : Rp. 1.171.363.200,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 1.171.363.200,- (100 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan dan Fisik sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022



3. Pengadaan Kapal Perikanan 20 GT dan Alat Tangkap Kelompok Mutiara Putih Kabupaten Pangkep.

- Jumlah Anggaran : Rp. 390.530.000,-

- Realisasi Anggaran : Rp. 390.530.000,- (100 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan dan Fisik sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022



4. Pengadaan Kapal Perikanan 25 GT dan Alat Tangkap Kelompok KUB. Bahari Mandiri Desa. Massangkae Kec. Kajuara Kabupaten Bone

- Jumlah Anggaran : Rp. 875.028.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 875.028.000,- (100 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan dan fisik sudah 100 % per laporan akhir Desember 2022



5. Pengadaan Kapal Perikanan 25 GT Alat Tangkap Kelompok Nelayan Opu Bullik, Desa Barat Lambongan Kec. Bontomate'ne, Kabupaten Selayar.

- Jumlah Anggaran : Rp. 918.186.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 918.186.500,- (100 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan dan fisik 100% per laporan akhir Desember 2022



6. Pengadaan Kapal Perikanan 5 GT dan Alat Tangkap Kelompok Sunu Merah, Desa Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep.

- Jumlah Anggaran : Rp. 185.700.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 185.700.000,- (100 %)
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi keuangan dan fisik sudah 100 % per laporan Akhir Desember 2022

## II. Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha PerikananTangkap

### I. Target OutPut Kegiatan :

- Jumlah Alat Bantu Tangkap (unit) : 53
- Jumlah Mesin Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia erintah (Kelompok) : 39
- Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis pningkatan produksi perikanan tangkap (orang) : 150



- Jumlah Peserta/Nelayan difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan (orang): 550

- Jumlah Sarana alat tangkap (unit): 439

❖ Jumlah Anggaran : Rp. 6.288.662.300,-

2. Realisasi OutPut Kegiatan :

- Jumlah Alat Bantu Tangkap (unit) : 53

- Jumlah Mesin Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia erintah (Kelompok) : 39

- Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis pningkatan produksi perikanan tangkap (orang) : 150

- Jumlah Peserta/Nelayan difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan (orang): 550

- Jumlah Sarana alat tangkap (unit): 439

❖ Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 5.867.167.100,-

3. Hasil Kegiatan :

➤ Belanja Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat

1. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan ,Fish Finder Kelompok Mitra Laut KUB Mattirobaji, Kabupaten Takalar

➤ Jumlah Anggaran : Rp. 90.000.000,-

➤ Realisasi Anggaran : Rp. 88.540.000,-(98,38%)

➤ Realisasi Fisik : 100 %



2. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan , Rumpon Kelompok Reski Abadi ,Kel. Bontokamase , Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

➤ Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-

➤ Realisasi Anggaran : Rp. 197.625.150,- (98,81 %)

➤ Realisasi Fisik : 100 %



3. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan ,Fish Finder Kelompok KUB Kaisar Kel. Barrang caddi Kec.Ujung tanah Kota Makassar.

➤ Jumlah Anggaran : Rp. 195.000.000,-

➤ Realisasi Anggaran : Rp. 190.476.000,- (97,68 %)

➡ Realisasi Fisik : 100 %



4. Pengadaan Alat bantu penangkapan ikan ,Rumpon Kelompok KUB Kembali Muda ,Kel. Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-

➡ Realisasi Anggaran : Rp. 198.370.000,- (99,19)

➡ Realisasi Fisik : 100 %



5. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan KUB Rahmat, Kel. Barrangcaddi Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar.

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 175.000.000,-

➡ Realisasi Anggaran : Rp. 172.692.000,- (98,68 %)

➡ Realisasi Fisik : 100 %



6. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Rumpon KUB Sunu Merah Desa Mekar Indah, Kec. Buki, Kab. Kepulauan Selayar.

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 175.000.000,-

➡ Realisasi Anggaran : Rp. 172.470.000,- (98,55 %)

➡ Realisasi Fisik : 100 %



7. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Rumpon KUB Assirappung , Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kab. Kepulauan Selayar

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-

➡ Realisasi Anggaran : Rp. 196.650.000,-(98,33%)

➡ Realisasi Fisik : 100%



8. Pengadaan Alat Penangkap Ikan Jaring Ikan Terbang Kelompok Mamminasata, Kelompok Samudera Jaya, Kelompok Veri Sejahtera, Alat Tangkap Jaring Gill Net Kec. Galesong Utara Kab. Takalar

➤ Jumlah Anggaran	: Rp. 200.000.000,-
➤ Realisasi Anggaran	: Rp. 198.312.000,- (99,16 %)
➤ Realisasi Fisik	: 100 %



9. Pengadaan Alat Tangkap Jaring Lipat KUB Mario dan KUB Pasulori Kel. Lembae Kec. Barru Kabupaten Barru.

➤ Jumlah Anggaran	: Rp. 200.000.000,-
➤ Realisasi Anggaran	: Rp. 194.799.000,- (97,40 %)
➤ Realisasi Fisik	: 100 %



10. Pengadaan Alat Penangkap Ikan Bahan Alat Tangkap Jaring Purseine Kelompok Adidas 02, Desa Turunan Beru Kec. Herland Kabupaten Bulukumba.

➤ Jumlah Anggaran	: Rp. 200.000.000,-
➤ Realisasi Anggaran	: Rp. 198.100.000,- (99,05 %)
➤ Realisasi Fisik	: 100 %



11. Pengadaan Bahan Jaring Lipat Kelompok Bajipamai Kel. Buloa, Kelompok Rajungan Buloa, Kelompok Biring Bangkoa Kelurahan Buloa Ke, Tallo Kota Makassar

➤ Jumlah Anggaran	: Rp. 200.000.000,-
➤ Realisasi Anggaran	: Rp. 197.917.440,- (98,58 %)
➤ Realisasi Fisik	: 100 %



12. Pengadaan Alat Tangkap Pancing Kelompok Makkarana Bersatu Desa. Sabalana Kec. Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep

➤ Jumlah Anggaran	: Rp. 70.000.000,-
➤ Realisasi Anggaran	: Rp. 68.438.000,- (97,77 %)
➤ Realisasi Fisik	: 100 %





13. Pengadaan Jaring Purseine Kelompok Marannu Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kabupaten Barru

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-  
 ➡ Realisasi Anggaran : Rp. 199.100.000,- (99,55 %)  
 ➡ Realisasi Fisik : 100 %



14. Pengadaan Alat Tangkap Kepiting KUB Sipakaya Desa Minasaupa , KUB Paraikatte Desa Tunikamaseng, KUB Bina Bahari Desa Bontobahari

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 195.000.000,-  
 ➡ Realisasi Anggaran : Rp. 193.400.000,- (99,18 %)  
 ➡ Realisasi Fisik : 100 %



15. Pengadaan Alat Tangkap Gillnet Kelompok Kompak Desa Bontosunggu, Kelompok Kassi Lompo Jaya Desa Mappakalombo, Kelompok Abbulosibatang, Kelompok Pamminasata Desa Boddia Kabupaten Takalar

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-  
 ➡ Realisasi Anggaran : Rp. 198.000.000,- (99,00 %)  
 ➡ Realisasi Fisik : 100 %



16. Pengadaan Alat Tangkap Kepiting Rakkang Kelompok Nelayan Laiya Bersatu Desa Mattiro Labangeng Kabupaten Pangkep

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-  
 ➡ Realisasi Anggaran : Rp. 94.350.000,- (94,35 %)  
 ➡ Realisasi Fisik : 100 %



17. Pengadaan Alat Tangkap Pancing Kelompok Nelayan Manunggal Kel. Lumpung Kec. Bacokiki Barat Kota Pare pare

➤ Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-  
➤ Realisasi Anggaran : Rp. 98.380.000,- (98,38 % )  
➤ Realisasi Fisik : 100 %



18. Pengadaan Alat Tangkap Bahan Jaring Purseine Kelompok Nelayan Tanda Daerah Desa Tamalate Kec. Galesong Utara Kab. Takalar

➤ Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-  
➤ Realisasi Anggaran : Rp. 198.500.000,- (99,25 % )  
➤ Realisasi Fisik : 100 %



19. Pengadaan Alat Tangkap Jaring Lingkar Kelompok Nelayan Zuyatri Ghalib Utama Kec. Malangke Kab. Luwu Utara

➤ Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-  
➤ Realisasi Anggaran : Rp. 197.550.000,- (98,78 % )  
➤ Realisasi Fisik : 100 %



20. Pengadaan Alat Tangkap Kelompok Sambori Indah, Kelompok Kale bajuanyara Kelompok Kanaeng Sipappaccei Kabupaten Takalar

➤ Jumlah Anggaran : Rp. 150.000.000,-  
➤ Realisasi Anggaran : Rp. 148.697.000,- (99,13 % )  
➤ Realisasi Fisik : 100 %



21. Pengadaan Alat Tangkap Kepiting (Rakkang) Kelompok Usaha Berasama Cahaya Laut Pulau Balang Lompo, Desa Mattiro Sompe Kab. Pangkep

➤ Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-  
➤ Realisasi Anggaran : Rp. 49.260.000,- (98,52 % )  
➤ Realisasi Fisik : 100 %





22. Pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Gill Net KUB Baji Dakka Desa Bontosunggu Kec. Tamalate Kab. Jeneponto

- Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 98.834.000,- (98,83 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



23. Pengadaan Alat Tangkap Bubu KUB Buana Indah Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo

- Jumlah Anggaran : Rp. 199.980.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 197.593.000,- (98,81 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



24. Pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Gill Net ,KUB Cahaya Baru Desa Bontosunggu Kec. Tamalate Kabupaten Jeneponto

- Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 99.056.000,- (99,06 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



25. Pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Lingkar KUB Hati Sabar, Kel. Bontokamase Kec. Herlang Kabupaten Bulukumba

- Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 198.873.000,- (99,44 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



26. Pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Gill Net KUB Kawan Muda Desa Pangi Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng

- Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 99.000.000,- (99,00 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



27. Pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Gill Net KUB, Cahaya Berkah Desa Bontosunggu Kec. Tamalate Kab. Jeneponto

- Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 99.300.000,- (99,30 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



28. Pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Gill Net KUB, Laut Biru I Desa Pabbaringeng Kec. Binamu Kab. Jeneponto

- Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 98.907.000,- (98,91 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



29. Pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Gill Net KUB, Magfirah Libukang Desa Bonto Rannu Kec. Bangkala Kab. Jeneponto

- Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 99.303.000,- (99,30 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



30. Pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Gill Net KUB, Usaha Nelayan Desa Baroa Kec. Bua Kabupaten Luwu

- Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 99.400.000,- (99,40 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



31. Pengadaan Alat Tangkap Pancing Rawai KUB Pannara Jaya Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-  
 ➡ Realisasi Anggaran : Rp. 96.342.000,- (96,34 % )  
 ➡ Realisasi Fisik : 100 %



32. Pengadaan Alat Tangkap Perangkap Kepiting (Rakkang) ,KUB Laut Biru Pulau Barang Lompo Desa Mattiro Sompe Kabupaten Pangkep

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-  
 ➡ Realisasi Anggaran : Rp. 46.786.500,- (93,57 % )  
 ➡ Realisasi Fisik : 100 %



33. Pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Gill Net KUB, Surya Abadi Desa Lowa Kec. Tanasipolo, KUB Barang mamase Desa Lautang Kec. Belawa, KUB Yamasel Desa Lautan Kec. Belawa Kabupaten Wajo

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-  
 ➡ Realisasi Anggaran : Rp. 197.935.000,- (98,97 % )  
 ➡ Realisasi Fisik : 100 %



34. Pengadaan Mesin Kapal Perikanan 22 – 25 PK Kelompok Balipesu Desa Majannang Kec. Maros Baru Kabupaten Maros

➡ Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-  
 ➡ Realisasi Anggaran : Rp. 134.340.000,- (67,17 % )  
 ➡ Realisasi Fisik : 100 %





35. Pengadaan Mesin Kapal Perikanan 24 PK Merk Cangfawang Kelompok Nelayan Bone Malonjo Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kabupaten Takalar

- Jumlah Anggaran : Rp. 56.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 55.675.000,- (99,42 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



36. Pengadaan Mesin Kapal Perikanan 22 - 25 PK Kelompok Laut Biru Kec. Mappakasunggu, Kelompok Julupamai Desa Mattirobaji Kabupaten Takalar.

- Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 150.510.000,- (75,26 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



37. Pengadaan Mesin Kapal Perikanan 10 - 15 PK Kelompok Pasir Putih Kabupaten Takalar

- Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 49.395.000,-
- Realisasi Fisik : 100 %



38. Pengadaan Mesin Kapal Perikanan 10 - 15 PK Kelompok Nelayan Pasir Pantai Indah Desa Munte Kec. Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara

- Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 99.000.000,- (99,00 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



39. Pengadaan Mesin Kapal Perikanan 24 PK Merk Cangfawang Kelompok Mega Buana Desa Galesong baru Kec. Galesong Kabupaten Takalar

- Jumlah Anggaran : Rp. 56.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 55.675.000,- (99,42 %)
- Realisasi Fisik : 100 %



- Bimbingan Teknis Mesin Kapal Perikanan dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng pada Tanggal 9-10 Juni 2022 di Hotel Kirei Bantaeng JL. Raya Lanto No. 69 Bantaeng

➤ Jumlah Anggaran	: Rp. 50.000.000,-
➤ Realisasi Anggaran	: Rp. 50.000.000,- (100 %)
➤ Realisasi Fisik	: 100 %



- Bimbingan Teknis Penangkapan dan Penanganan Ikan dilaksanakan di Makassar pada Tanggal 22-23 November 2022 di Hotel Grand Palace JL. Tentara Pelajar No.50 Makassar

➤ Jumlah Anggaran	: Rp. 88.609.900,-
➤ Realisasi Anggaran	: Rp. 85.309.900,- (98 %)
➤ Realisasi Fisik	: 98 %



### III. Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

#### Target OutPut Kegiatan :

- ❖ Jumlah Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Dokumen) : 5
- ❖ Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-

#### Realisasi OutPut Kegiatan :

- ❖ Jumlah Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Dokumen) : 5
- ❖ Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-

#### Hasil Kegiatan :

- Temu Koordinasi Teknis Pelabuhan Perikanan dilaksanakan di Makassar pada Tanggal 22-23 Maret 2022 di Hotel Wthree Premier Hotel Makassar JL. Lagaligo No.34 Mangkura Kota Makassar



- Jumlah Anggaran : Rp. 50.00.900,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 50.000.900,- (100 %)
- Realisasi Fisik : 100 %

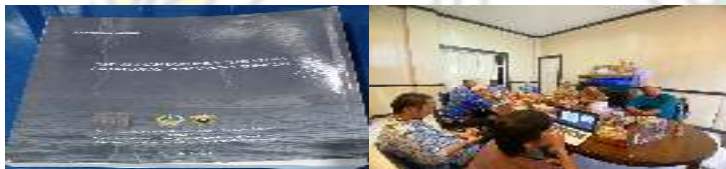


➤ **Penyusunan Dokumen Calon Lokasi Penempatan Rumpon 1 Paket Dokumen**

- Jumlah Anggaran : Rp. 75.000.000.
- Realisasi Anggaran : Rp. 74.580.000
- Realisasi Fisik : 100 %

Posisi dan Predikasi Calon Lokasi Rumpon diPerairan Sulawesi adalah sebagai berikut :

Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar,



## PERMASALAHAN DAN UPAYA PENCEGAHAN

### 1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah :

- Lemahnya data perikanan terkait jumlah armada, hasil produksi serta jumlah nelayan, sehingga penyaluran bantuan tidak berdasarkan pada azas pemerataan.
- Masih adanya nelayan yang belum membuat izin usaha terhadap kegiatan yang mereka lakukan, sehingga terdapat permasalahan dalam melakukan aktivitas penangkapan.
- Kurangnya sosialisasi kepada nelayan terkait penggunaan alat tangkap ramah lingkungan serta penanganan hasil tangkapan ikan yang memiliki mutu nilai jual tinggi.

### 2. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain :

- Melibatkan penyuluh perikanan Kabupaten/Kota agar aktualisasi serta update data perikanan (jumlah armada, jumlah produksi dan jumlah nelayan) dapat memberikan informasi yang akurat.

- Memperbaharui informasi tentang regulasi atau aturan yang baru kepada nelayan.
- Melakukan sosialisasi kepada nelayan terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta penanganan hasil tangkapan yang bermutu tinggi.

#### 4.3.3. Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan adalah ” *Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 2028*” (Dokumen RZWP-3-K Sulsel). Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan. Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan untuk dapat memanfaatkan nilai dan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan serta menjamin kepentingan umum secara luas, maka dibutuhkan adanya penataan ruang laut yang bertujuan agar wilayah laut dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Faktor pertumbuhan penduduk dan eksploitasi terhadap sumber daya alam secara terus menerus menyebabkan wilayah laut dan pesisir memerlukan pengelolaan, perlindungan terhadap sumber daya alamnya dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya untuk keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalkan kepentingan antar pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan jasa-jasa kelautan, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan. Pada Tahun 2022 Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengelolah anggaran yang berasal dari APBD dan APBN.

### Kegiatan APBD

- Program : Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- A. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PPK
- Sub Kegiatan : *Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan*
1. Bimbingan Tehnis Mata Pencaharian Alternatif (MPA) Bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
    - ✓ Bimbingan Tehnis Mata Pencaharian Alternatif (MPA) Bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan sebanyak 4 (empat) pertemuan yaitu pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2022, 13 – 15 Juni 2022, 27 – 29 Juni 2022 yang ketiganya dilaksanakan di Hotel Lynt Makassar, dan pada tanggal 27 – 28 November 2022 dilaksanakan di Hotel Grand Palace Makassar.
    - ✓ Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada para peserta dalam upaya pengembangan mata pencaharian alternatif sebagai upaya peningkatan hasil pendapatan dan kesejahteraan hidup mereka.
    - ✓ Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya 4 (empat) paket pertemuan Bimbingan Tehnis MPA Bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diikuti oleh 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta yang memiliki keterampilan dalam memanfaatkan produksi garam dan juga mangrove sebagai bahan dalam menghasilkan MPA bagi sumber perekonomian mereka.
    - ✓ Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta yang terdiri dari Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan, KUGAR yang berasal dari kabupaten Pangkep, Maros, Takalar, Jeneponto dan Selayar, Pelaku Usaha Masyarakat P3K dari Kota Makassar.
    - ✓ Narasumber dan Materi yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain untuk MPA I, II, III adalah Dr. Hj. Masnia Djabir Kepala Bidang (Kepala Bidang PPRLP3K DKP Sulsel) / Kebijakan Pengembangan Usaha Garam di Sulawesi Selatan ; H. Abd. Malik Faisal, SH., MAdm. Pemb (Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulsel) / Strategi Membangun Kemitraan Usaha KUGAR Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut DKP Sulsel; Ir. Ahmad (Pakar/Praktisi) / Optimalisasi Pemanfaatan Alat Iodisasi Garam dan Penghalus Garam dan praktek iodisasi garam, membuat garam halus; Pelaku Usaha CV. Bulan Bintang / Pemberdayaan Pelaku Usaha Garam Kosmetika; M. Ruslan SP (Yayasan Mattirotasi),

Anwardin Arjunaid (Konsultan Keuangan) / Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KUGAR; A. Aldiana (Dinas Perdagangan Prov. Sulsel) / Fasilitasi Pemasaran Usaha Garam; Hj. Kusmawati, SH (Dinas Perikanan Kab. Pangkep / Kebijakan Pengembangan Usaha Garam di Kab. Pangkep (MPA I); Narasumber dan Materi pada pertemuan MPA IV adalah, Dr. Hj. Masnia Djabir (Kepala Bidang PPRLP3K DKP Sulsel) / Kebijakan Pelestarian Mangrove di Sulawesi Selatan; Ratnasari (CV. Bulan Bintang) / Bimtek MPA praktek pembuatan Sabun dan Pembuatan lotion dengan bahan dasar mangrove.

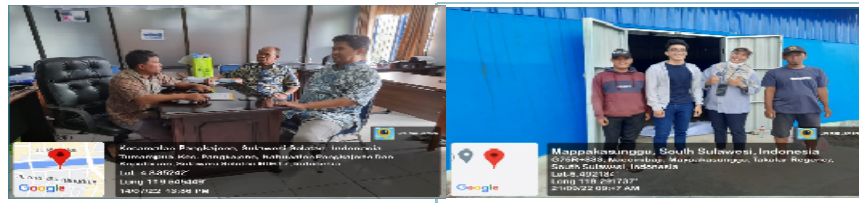
- ✓ Rekomendasi yang diberikan yaitu perlu dukungan dari berbagai stakeholders dalam memberikan akses dalam pengembangan MPA bagi masyarakat pesisir.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat P3K yang memiliki kemampuan dalam menjalankan MPA.



2. Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan teknis peningkatan produksi Kelompok Usaha Garam (KUGAR)

- ✓ Pelaksanaan Perjalanan pada bulan Juli dan September 2022 di Kabupaten Pangkep dan Takalar.
- ✓ Keluaran dari kegiatan adalah adanya informasi bagi KUGAR terkait peningkatan produksi dengan berbagai teknologi serta cara mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas produksi usaha garam rakyat yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petambak garam.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi.





*Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan PPK*

3. Sarana Iodisasi Garam

- ✓ Pelaksanaan kegiatan di bulan November dan Desember 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar, Takalar dan Pangkep.
- ✓ Keluaran dari kegiatan adanya bantuan Mesin iodisasi 3 (tiga) paket untuk kelompok usaha garam Saribattang (Selayar), Saro Biring (Takalar) dan Hidayatullah (Pangkep).
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas produksi usaha garam rakyat yang memiliki daya saing tinggi.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai jual tinggi.



4. Sarana Prasarana Inovasi Usaha Garam

- ✓ Pelaksanaan kegiatan pada bulan November dan Desember 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar, Takalar dan Pangkep
- ✓ Keluaran dari kegiatan adanya bantuan Geomembran 90 (Sembilan puluh) rol kepada kelompok usaha garam Bunga Garam Bannara / Kab. Jeneponto (23 Rol), Subur Jaya / Kab. Takalar (23 Rol), Toddopuli / Kab. Takalar (23 Rol) dan Forum Peduli Laut / Kab. Kepulauan Selayar (21 Rol).
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas produksi usaha garam rakyat.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya produksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam.



5. Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi/ Konsultasi/ Verifikasi/ Monitoring/ Pembinaan KUGAR/ Menghadiri Undangan

- ✓ Pelaksanaan Perjalanan pada bulan April dan Desember 2022 di Kabupaten Pangkep, Takalar dan Jeneponto.
- ✓ Keluaran dari kegiatan adanya informasi dari kelompok yang diidentifikasi dan juga terverifikasi untuk dapat menerima bantuan dan adanya dukungan terhadap produksi usaha garam rakyat.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas produksi usaha garam rakyat.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi.



*Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha garam (DAK) Revitalisasi dan Pengawasan Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton)

- ✓ Pelaksanaan Kegiatan pada bulan Agustus dan November 2022 di Kabupaten Takalar, Jeneponto dan Pangkep.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya kegiatan pengawasan (7 paket) dan pelaksanaan pembangunan gudang garam (7 paket) masing-masing kapasitas 100 Ton di kabupaten Takalar, Jeneponto dan Pangkep.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan produksi garam rakyat/industri yang memberi jaminan persediaan dan harga garam.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.

- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi.



7. Perjalanan dinas ke dan dari lokasi perencanaan, pengawasan, dan Pengendalian DAK

- ✓ Pelaksanaan Perjalanan pada bulan September dan Desember 2022 di Kabupaten Pangkep, Takalar dan Jeneponto dan Selayar.
- ✓ Keluaran dari kegiatan adanya informasi dari kelompok yang diidentifikasi dan juga terverifikasi untuk dapat menerima bantuan DAK dan adanya dukungan terhadap produksi usaha garam rakyat.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pekerjaan terkait bantuan DAK yang sesuai dengan perencanaan pelaksanaan baik waktu maupun spesifikasinya.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi.



8. Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Verifikasi Monitoring Sarana Garam Rakyat

- ✓ Pelaksanaan Perjalanan pada bulan Agustus - September 2022 di Kabupaten Pangkep, Takalar dan Jeneponto.
- ✓ Keluaran dari kegiatan adalah adanya informasi dari kelompok yang telah menerima bantuan terkait pemanfaatan sarana yang telah diterima dan dampak bagi pengembangan hasil produksi usaha garam rakyat.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas produksi usaha garam rakyat.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.



- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi.



B. Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

*Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat*

- Konsultasi Publik Percepatan Penetapan KKD Kabupaten Barru dan Kepulauan Selayar
  - ✓ Pertemuan di Kabupaten Barru untuk KKD Pannikiang dilaksanakan pada Hari Jum'at, Tanggal 11 November 2022 bertempat di Kafe Fadhil RM, untuk pertemuan di Kabupaten Selayar untuk KKD Pulo Pasi Gusung pada Hari Kamis, Tanggal 24 November 2022 di Aula Kantor Kelurahan Benteng dan untuk KKD Pulo Kauna-Kayuadi pada tanggal 25 November 2022, di Aula Kantor Desa Bontosungu.
  - ✓ Tujuan kegiatan adalah melakukan pertemuan sebagai upaya koordinasi dan koreksi/perbaikan terhadap Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di perairan Pulau Pannikiang, Pulo Pasi Gusung dan Pulo KAuna-Kayuadi sebagai upaya percepatan penetapan KKD di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah di cadangkan.
  - ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 150 (seratus lima puluh) peserta dalam 3 paket kegiatan Konsultasi Publik Percepatan Penetapan KKD Kabupaten Barru dan Kepulauan Selayar yang selanjutnya melahirkan kesepahaman dan komitmen bersama untuk mendorong percepatan keberadaan KKD di perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
  - ✓ Kegiatan Pertemuan diikuti keseluruhannya oleh 150 (seratus lima puluh) peserta, yaitu untuk Kabupaten Barru diikuti oleh Dinas Perikanan Kab. Barru, Dinas Perhubungan Kab. Barru, Dinas Pariwisata Kab. Barru, Dinas Bappelitbangda Kab. Barru, Kepala Kecamatan Balusu dan Barru, Kepala Desa Madello, Takkalasi, Lampoku, Sumpang Binangae, Coppo dan Mangempang, Serta nelayan yang memiliki Daerah Penangkapan Ikan di perairan sekitar Pulau Pannikiang, untuk di Kab. Selayar diikuti oleh CDK Wilayah Selayar, BPSPL Makassar, Dinas Perikanan Kab. Selayar, Dinas Pariwisata Kab. Selayar, Dinas Bappelitbangda Kab. Selayar, Penyuluh Perikanan, Camat Bontoharu, Camat Bontomanai,



Camat Buki, Camat Bontomatene, Camat Bonto Sikuyu, Camat Takabonerate, Camat Pasi Masunggu, Camat Pasi Masunggu Timur, Desa Kahu-Kahu, Desa Barugaya, Desa Buki, Desa Pamatata, Desa Tambolongan, Desa Bahuluang, Kepala Desa Kayuadi, Desa Padang, Desa Bontolebang, Selayar Marine, Selayar Paradise, Pokdarwis Bontolebang, serta nelayan yang memiliki Daerah Penangkapan Ikan di perairan sekitar Pulau Pasi Gusung.

- ✓ Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan di Kabupaten Barru adalah Akselerasi Kebijakan Pembangunan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Hj. Masniah Djabir, S.Pi., M.Si (DKP Sulsel), Tahapan Pengusulan Kawasan Konservasi Sesuai Permen KP 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi., M.Si, (BPSPL Makassar), Kondisi dan Isu Pemanfaatan Sumberdaya Laut pada KKD oleh Dr. Syafyudin Yusuf, ST., M.Si (Akademisi), dan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pannikiang Kabupaten Barru oleh Dr. Sutia Budi, S.Pi., M.Si (Akademisi), untuk pertemuan di Kabupaten Selayar antara lain Akselerasi Kebijakan Pembangunan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Hj. Masniah Djabir, S.Pi., M.Si (DKP Sulsel), Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pasi Gusung dan Kauna-Kayuadi Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Dr. Sutia Budi, S.Pi., M.Si (Akademisi), Tahapan Pengusulan Kawasan Konservasi Sesuai Permen KP 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Munandar Jakasukmana, S.Pi., M.Si (BPSPL Makassar), dan Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir dalam Implementasi Kawasan Konservasi Perairan oleh Muh. Dalvi Mustafa, S.Pi., M.Sc (Akademisi)
- ✓ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah aktif melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait KKP, BPSPL Makassar guna percepatan penetapan KK di Provinsi Sulawesi Selatan.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ekosistem di kawasan konservasi yang ada di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya meningkatkan fungsi ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.



- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Publik di Kabupaten Barru dan Selayar
  - ✓ Pelaksanaan Perjalanan pada bulan September dan Desember 2022 di Kabupaten Barru dan Kepulauan Selayar.
  - ✓ Keluaran dari kegiatan ini adanya pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik Percepatan Penetapan KKD yang memberi informasi rencana zonasi dalam pemanfaatan KKD yang akan ditetapkan oleh KKP.
  - ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Konsultasi Publik Percepatan Penetapan KKD yang memberi arahan zonasi bagi pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
  - ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan.



3. Temu Koordinasi Kawasan Konservasi dan Identifikasi Kawasan Pencadangan
  - ✓ Pertemuan dilaksanakan pada Hari Kamis – Sabtu, Tanggal 17 – 19 November 2022, bertempat di Hotel Grand Palace, Makassar.
  - ✓ Tujuan kegiatan adalah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah Kawasan Konservasi Perairan yang sudah dicadangkan di Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk menerima masukan dari stakeholders terkait tentang lokasi dan arahan pengelolaan kawasan konservasi yang akan dibentuk di Provinsi Sulawesi Selatan.
  - ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 50 (lima puluh) peserta dalam 1 paket kegiatan Temu Koordinasi Kawasan Konservasi dan Identifikasi Kawasan Pencadangan yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
  - ✓ Kegiatan Pertemuan diikuti keseluruhannya oleh 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, CDK Lingkup Provinsi selatan, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan Kelompok Konservasi.
  - ✓ Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan oleh Dr. Hj.

Masniah Djabir, S.Pi., M.P (DKP Sulsel), Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Konservasi laut oleh Bachrianto, Bachtiar, M.Si (TGUPP Prov. Sulsel), Potensi Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Kawasan Konservasi Laut oleh Dr. Ir. Assir Marimba, M.Si (Akademisi), Akselerasi Penetapan dan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Sulawesi oleh Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi., M.Si (BPSPL Makassar), Rasionalisasi Kondisi Ekologi Pengembangan Kawasan Konservasi oleh Dr. Syaifuddin Yusuf, ST., M.Si (Akademisi).

- ✓ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah untuk dapat aktif melakukan koordinasi juga sosialisasi terkait kawasan konservasi ditingkat pusat, provinsi maupun daerah serta masyarakat.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan berkelanjutan dan memberi jaminan bagi peningkatan kualitas lingkungan.



4. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Kawasan Pencadangan

- ✓ Pelaksanaan Perjalanan pada bulan Maret dan Desember 2022 di Kabupaten Bone, Bantaeng, Pangkep, Barru, Bulukumba dan Kepulauan Selayar.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ke Kab.Bone, Pangkep, Barru, Bantaeng, Bulukumba dan Kepulauan Selayar dalam rangka Pembinaan, Monitoring, Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Kawasan Pencadangan.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman SDM tentang manfaat dari suatu kawasan konservasi sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan berkelanjutan dan memberi jaminan bagi peningkatan kualitas lingkungan.



## 5. Penataan dan Pengelolaan WP3K

- ✓ Pelaksanaan kegiatan pada hari Senin – Rabu, tanggal 21 – 23 November 2022 bertempat di Hotel Gammara, Makassar.
- ✓ Tujuan kegiatan adalah melakukan pertemuan sebagai untuk meminimalkan laju kerusakan ekosistem perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penataan ruang laut sesuai Perda No. 03 Tahun 2022, meminimalkan konflik antar masyarakat dan juga pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut, serta meningkatkan fungsi penataan ruang laut untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat di WP3K.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 100 (seratus) peserta dalam 1 paket kegiatan pertemuan Penataan dan Pengelolaan WP3K yang selanjutnya mendukung pemanfaatan ruang laut, P3K berdasarkan Perda 03 Tahun 2022 tentang RTRWP Sulawesi Selatan.
- ✓ Kegiatan ini diikuti oleh 100 (seratus) peserta, yaitu Bappelitbangda Prov. Sulsel, DKP Prov. Sulsel, Disbudpar Prov. Sulsel, Dinas ESDM Prov. Sulsel, DPBPTSP Prov. Sulsel, Dinas PLH Prov. Sulsel, BPSPL Makassar, Dinas Perikanan Kab/Kota, Bappelitbangda Kab/Kota, Dinas ATR-BPN Kab/Kota, Dinas Budpar Kab/Kota, CDK DKP Prov. Sulsel, NGO, Perguruan Tinggi, TGUPP Prov. Sulsel.
- ✓ Materi dan Narasumber pada pertemuan ini adalah Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Prosedur Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Laut oleh Ir. Balok Budiyanto, MM (KKP), Peran Perda No. 03 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Blue Economy Nasional oleh Prof. Dr. Ir. Rochmin Dahuri, MS (Staf Ahli Menteri KKP), Prospek Cerah RTRWP Sulawesi Selatan Pasca terbitnya Perda 03 Tahun 2022 tentang RTRWP Sulawesi Selatan oleh Dr. Yurnita, ST., M.Si (Dinas PUTR Prov. Sulsel), Survey Pemetaan dan Hydro Oceanografi untuk Mendukung PRL di Sulawesi Selatan oleh Ir. Muh. Irfan, M.Eng (Peneliti BRIN), Prosedur Survey Kabel Jalur Bawah Laut oleh Ir. Rahadian, MT (Peneliti BRIN), dan Tata Ruang



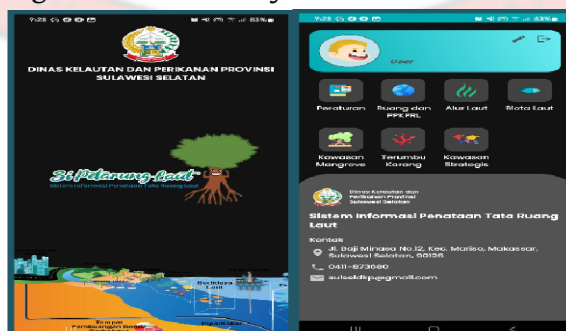
Laut dan Keberlanjutan Ekologi-Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dr. Sutia Budi, S.Pi., M.Si (Unibos).

- ✓ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah untuk lebih aktif mensosialisasikan berbagai aturan terkait dengan pemanfaatan ruang darat dan laut untuk dapat memaksimalkan pemahaman berbagai stakeholder dan masyarakat umum.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan berkelanjutan dan memberi jaminan bagi peningkatan kualitas lingkungan.



#### 6. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemanfaatan dan Penataan Ruang Laut

- ✓ Pelaksanaan pengadaan peta di bulan November – Desember 2022.
- ✓ Tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan aplikasi dalam upaya pemanfaatan ruang/zona yang tepat sesuai arahan pemanfaatan zona.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adanya aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan pemanfaatan ruang laut.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bijaksana sesuai zona dan arahan pemanfaatannya serta memberi jaminan pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan



#### 7. Penyusunan Dokumen RPZ KKPD

- ✓ Pelaksanaan pengadaan dokumen RPZ KKPD pada bulan Juli – November 2022.

- ✓ Tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen Rencana Zonasi dari Kawasan Konservasi Daerah sebagai satu syarat untuk penetapan KKP.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adanya Dokumen RPZ KKP yang merupakan pembagian zona pada suatu kawasan konservasi.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bijaksana sesuai zona dan arahan pemanfaatannya serta memberi jaminan pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan.



#### 8. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/koordinasi ke Pusat/Instansi terkait

- ✓ Pelaksanaan Perjalanan pada bulan Maret – Juli 2022 di Bandung dan Jakarta.
- ✓ Keluaran dari kegiatan adanya Adanya kegiatan konsultasi dan koordinasi terkait Integrasi RZWP3K dengan RTRW Prov. Sulsel.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah berjalannya pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan arahan pemanfaatannya.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan berkelanjutan dan memberi jaminan bagi peningkatan kualitas lingkungan



#### 9. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/koordinasi/menghadiri rapat dan penyusunan dokumen integrasi RZWP3K

- ✓ Pelaksanaan Perjalanan pada bulan Maret – Desember 2022 di Makassar.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya konsultasi dan koordinasi terkait kegiatan di BPPRLP3K DKP Sulsel dan Integrasi RZWP3K dengan RTRW Prov. Sulsel.

- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah berjalannya konsultasi dan koordinasi yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah persisir, laut dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan arahan pemanfaatannya.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan berkelanjutan dan memberi jaminan bagi peningkatan kualitas lingkungan.



## PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

### Permasalahan

- ✳ Masih minimnya pengetahuan masyarakat dan stakeholder terkait tentang Perda No. 03 Tahun 2022 tentang RTRWP Sulawesi Selatan.
- ✳ Pemahaman masyarakat tentang konservasi perairan yang masih minim.
- ✳ Adanya kegiatan yang pembiayaannya tidak mencukupi pelaksanaannya sehingga kegiatannya tidak dilaksanakan dan anggarannya dialihkan kegiatan di anggaran perubahan.
- ✳ Proses administrasi kegiatan yang terhambat dan memerlukan waktu konsultasi yang cukup panjang dan membutuhkan revisi anggaran.
- ✳ Pelaksanaan kegiatan pada semester IV untuk kegiatan yang menggunakan anggaran perubahan, dimana pemanfaatan anggaran tambahan pada bulan November sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan hanya 35 (tiga puluh lima) hari kerja.

### Upaya Pemecahan

Dalam memaksimalkan pencapaian target program kerja yang telah di rencanakan, beberapa upaya pemecahan permasalahan yang dilaksanakan antara lain:

- ✳ Mengadakan sosialisasi tentang perda 03 Tahun 2022 tentang RTRWP Sulawesi Selatan dan membuat aplikasi “Si Petarung Laut” sebagai bentuk keterbukaan publik terhadap data dan informasi tentang penataan ruang laut Sulawesi Selatan.
- ✳ Mengadakan sosialisasi dan pengadaan alat informasi konservasi.

- \* Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan tahapan proses administrasi dan output kegiatan.
- \* Memaksimalkan output yang diinginkan dalam perencanaan kegiatan tambahan yang ada setelah perubahan anggaran.

### Kegiatan APBN

Program : Pengelolaan Ruang Laut  
 A. Kegiatan : Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

#### *Sub Kegiatan : Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut*

##### 1. Inisiasi Jejaring dan Kemitraan

- ✓ Pertemuan Inisiasi dan Kemitraan dilaksanakan pada Hari Kamis – Sabtu, Tanggal 19 – 21 Mei 2022 bertempat di Hotel Travellers Phinisi Makassar Prime, Jl. Lamadukelleng Buntu, No. 36, Makassar.
- ✓ Tujuan kegiatan adalah mendukung pelaksanaan jejaring dalam pengelolaan kawasan konservasi di lingkup perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
- ✓ Output dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 35 (tiga puluh lima) peserta dalam 1 paket Pertemuan Inisiasi Jejaring dan Kemitraan yang akan mendukung terwujudnya Jejaring dan terbentuknya kemitraan KKP di Provinsi Sulawesi Selatan.
- ✓ Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) peserta yang terdiri dari UPTD KKP, DKP Kabupaten/Kota, Instansi terkait, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat dan LSM.
- ✓ Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah adanya suatu komitmen bersama di tingkat provinsi dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam menjalin kerjasama membentuk suatu Jejaring dan kemitraan Kawasan Konservasi Perairan yang mengedepankan koordinasi dan pengawasan bersama.
- ✓ Materi dan Narasumber pada pertemuan ini yaitu, Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Provinsi Sulawesi Selatan oleh H. Suhartono Nurdin, S.Pi., M.P., Ph.D (Kabid PPRLP3K, DKP Sulsel), Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi dan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan oleh Ihsan Ramli, S.Kel., M.Si (Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI), Identifikasi Isu-Isu Pengelolaan dan Potensi Kegiatan Jejaring dan Kemitraan Kawasan Konservasi oleh Andi Muh. Ibrahim, ST. (Yayasan Konservasi Laut), Model Kerjasama dan Identifikasi Mitra Potensial untuk Kemitraan Kawasan Konservasi oleh



Dr. Ir. Rijal Idrus, MSc (Akademisi UNHAS), Draft Kesepakatan Bersama / Perjanjian Kerjasama Jejaring / Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Dr. Ahmad Bahar, S.Kel., MSc (Akademisi UNHAS)

- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bijaksana dengan mengedepankan lestari dan keberlanjutan.



***Sub Kegiatan : Kawasan Konservasi Perairan, P3K yang Operasional***

**2. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Kawasan (Perjalanan Dinas)**

- ✓ Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Kawasan dilaksanakan dengan menghadiri undangan dari pusat (KKP) yaitu menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah) di Yogyakarta pada tanggal 28 – 30 Maret 2022, dan di Bogor pada tanggal 23 – 25 Oktober 2022 menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan tentang KKD Liukang Tupabbiring dan Liukang Tangaya.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah informasi terkait kawasan konservasi perairan dan adanya progress keluarnya SK KKD Liukang Tangaya dan Liukang Tupabbiring.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas SDM terkait konservasi perairan dan keluarnya SK Menteri KPP untuk KKD Liukang Tangaya dan Liukang Tupabbiring.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah terjaganya sumberdaya alam perairan yang menjamin pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.



Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

B. Kegiatan : Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

***Sub Kegiatan : Lahan Garam yang Difasilitasi***

### 3. Pendampingan Program PUGAR

- ✓ Pelaksanaan kegiatan pendampingan Program PUGAR berjalan dari bulan Maret hingga Desember 2022 yang mencakup kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Konsultasi ke Pusat pada tanggal 2 - 25 Maret 2022, Sosialisasi Nasional dan Review di Yogyakarta, serta Monitoring dan evaluasi dan Pembinaan Pugar ke Kabupaten Pangkep, Maros, Takalar dan Jeneponto, dan Publikasi Pugar di Media Cetak dan Online.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya informasi terkait pelaksanaan program PUGAR di Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat, terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta kegiatan Monev dan Pembinaan PUGAR.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pengelola (SDM) terkait pelaksanaan program PUGAR di Provinsi Sulawesi Selatan.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya produksi dan kualitas garam di Sulawesi Selatan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pengelola garam.



### 4. Penyusunan Tata Kelola Pergaraman

- ✓ Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Tata Kelola Pergaraman berjalan di Bulan Juli - Oktober 2022 yang mencakup kegiatan Pertemuan dalam rangka Riview Penyusunan Tata Kelola Pergaraman (Roadmap) Sentra Ekonomi Garam (SEGAR) pada tanggal 18 - 19 Agustus 2022 di Hotel Gammara Makassar, dan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke Kabupaten Pangkep, Takalar dan Jeneponto.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen Tata Kelola Pergaraman sebagai kelengkapan dari Ranpergub yang mendukung pengelolaan dan pengembangan pergaraman di Sulawesi Selatan.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah pedoman bagi pelaksanaan pergaraman di Provinsi Sulawesi Selatan dari produksi hingga ke pemasaran yang mendukung peningkatan perekonomian pelaku usaha garam.
- ✓ Pertemuan Review Tata Kelola Pergaraman diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta yang terdiri dari DKP Sulsel, Dinas Perindustrian Sulsel, Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Dinas

Perikanan Kabupaten Pengembangan Garam (Pangkep, Maros, Takalar, Jenepono dan Selayar), Penyuluh Pendamping Garam, KPPU Sulawesi Selatan, Koperasi Garam dan Kelompok Pelaku Usaha Garam.

- ✓ Materi dan narasumber pada pertemuan Review Tata Kelola Pergaraman adalah Kebijakan Pengembangan Sentra Ekonomi Garam (SEGAR) di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Hj. Sitti Masniah Djabir, S.Pi., MP (Kabid PPRLP3K DKP Sulsel), Harmonisasi Program Pengembangan Usaha Garam oleh Dr. Ir. Miftahul Huda, MS (Direktur Jasa Kelautan PRL KKP), Review Rencana Induk Tata Kelola Sentra Ekonomi Garam Sulawesi Selatan oleh Dr. Sutia Budi, S.Pi., M.Si (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan), Dr. Kahar Lahae, SH., MH (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan), Potensi Pergaraman di Provinsi Sulawesi Selatan oleh M. Hamsir Lasikada (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan).
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah berjalannya regulasi terkait pergaraman yang mendukung meningkatnya produksi dan kualitas garam di Sulawesi Selatan dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.



#### 5. Penyusunan Ranperda Penyerapan Garam Lokal

- ✓ Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Ranperda Penyerapan Garam Lokal di Bulan Juli – Desember 2022 yang mencakup kegiatan FGD Ranpergub Sentra Ekonomi Garam (SEGAR) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 – 21 Agustus 2022 dan 21 – 22 November 2022 di Hotel Gammara, Makassar.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Ranpergub Sentra Ekonomi Garam (SEGAR) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu landasan hukum bagi pengelolaan dan pengembangan pergaraman di Sulawesi Selatan.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah pedoman bagi pelaksanaan pergaraman di Provinsi Sulawesi Selatan dari produksi hingga ke pemasaran yang mendukung peningkatan perekonomian pelaku usaha garam.
- ✓ Pertemuan FGD Penyusuna Ranpergub Sentra Ekonomi Garam (SEGAR) Provinsi Sulawesi Selatan Review Tata Kelola Pergaraman diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta yang terdiri



dari DKP Sulsel, Dinas Perindustrian Sulsel, Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Dinas Perikanan Kabupaten Pengembangan Garam (Pangkep, Maros, Takalar, Jeneponto dan Selayar), Penyuluh Pendamping Garam, KPPU Sulawesi Selatan, Koperasi Garam dan Kelompok Pelaku Usaha Garam.

- ✓ Materi dan narasumber pada pertemuan Review Tata Kelola Pergaraman adalah Kebijakan Pengembangan Usaha Pergaraman di Provinsi Sulawesi Selatan pada FGD Pertama, oleh Dr. Hj. Sitti Masniah Djabir, S.Pi., MP (Kabid PPRLP3K DKP Sulsel), Penerapan Inovasi Teknologi dalam Peningkatan Produksi Garam oleh Dr. Ridwan, M.Sc (Akademisi), Aspek Hukum Pengembangan Garam di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Kahar Lahae, SH., MH (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan), Potensi Pergaraman di Provinsi Sulawesi Selatan oleh M. Hamsir Lasikada (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan), Industrialisasi dan Peluang Pasar Produk Garam Rakyat Sulawesi Selatan oleh Dr. Meyke (Dinas Perindustrian Sulsel), dan Penetapan Potensi Pergaraman di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Muhammad Hamsir Lasikada, S.Pi., M.Si Pada (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan). FGD Kedua, Kebijakan Pengembangan Usaha Pergaraman di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Hj. Sitti Masniah Djabir, S.Pi., MP (Kabid PPRLP3K DKP Sulsel), Rencana Induk Tata Kelola Sentra Ekonomi Garam Sulawesi Selatan oleh Dr. Sutia Budi, S.Pi., M.Si (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan), Draft Ranpergub Sentra Ekonomi Garam Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Kahar Lahae, SH., MH (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan), Penerapan Inovasi dan Teknologi dalam Peningkatan Usaha Pergaraman Rakyat Sulawesi Selatan oleh Prof. Dr. Ir. Metusalach, M.Sc., (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan), dan Sebaran Potensi Pergaraman di Provinsi Sulawesi Selatan oleh M. Hamsir Lasikada (Tim Teknis Garam Sulawesi Selatan).
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah berjalannya regulasi terkait pergaraman yang mendukung meningkatnya produksi dan kualitas garam di Sulawesi Selatan dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.





Kegiatan : Perencanaan Ruang Laut

*Sub Kegiatan : Rekomendasi Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Persetujuan dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut*

6. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

- ✓ Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tanggal 21 Juni 2022 di Aula DKP Sulsel.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 (satu) paket pertemuan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang kepada 40 (empat puluh) peserta yang akan meningkatkan pemahamannya dan mendukung adanya pemanfaatan ruang laut yang sesuai alokasi ruang peruntukannya.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah laut, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan zona peruntukan pemanfaatannya.
- ✓ Pertemuan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari BPSPL Makassar, DKP Sulsel, instansi-instansi terkait di tingkat provinsi, CDK DKP Sulawesi Selatan, kabupaten/kota, Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Pesisir Kota Makassar, Perseroda Sulsel, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero) PT. Yasmin Bumi Asih dan Pelaku Usaha Budidaya laut.
- ✓ Materi dan narasumber pada Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2042 oleh Dr. H. Suhartono Nurdin, S.Pi., MP., Ph.D (Sekretaris DKP Sulsel), Arah Kebijakan Maritim dan Investasi Indonesia dalam Mendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut oleh Yogi Yanuar, ST., M.Si (Kepala Bidang Penataan Ruang dan Zonasi Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) dan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Tata Cara Permohonan dan Pengajuan KKPRL pada OSS oleh Muhandis Sidqi, S.Pi., M.Si (Koordinator Kelompok Perizinan Pemanfaatan Ruang Direktorat PRL KKP)
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah berjalannya kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan alokasi ruangnya dan turunnya kasus konflik pemanfaatan ruang di wilayah P3K.



7. Perizinan/Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Perjalanan Dinas)

- ✓ Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada bulan Maret - November 2022 di Kabupaten Maros, Jeneponto, Parepare, Pinrang dan Barru.
- ✓ Keluaran dari kegiatan adalah adanya perjalanan dinas terkait pemanfaatan ruang di wilayah perairan prov. Sulawesi Selatan.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah adanya informasi pemanfaatan ruang yang saat ini eksisting di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Prov. Sulawesi Selatan.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah terwujudnya pemanfaatan ruang WP3K yang sesuai peruntukannya (zona pemanfaatannya).



Program : Dukungan Manajemen

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut

*Sub Kegiatan : Layanan Data dan Informasi*

8. Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan

- ✓ Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 4 - 7 April 2022 ke Bekasi yaitu menghadiri Undangan Validasi Nasional Produksi Garam Tahun 2021.
- ✓ Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya validasi produksi garam di tingkat pusat.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah tervalidasinya data garam secara nasional yang dapat mendukung bagi perencanaan pengembangan produksi garam secara nasional.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini berjalannya perencanaan pengembangan garam usaha garam dengan tepat yang dapat memberikan dampak peningkatan produksi garam yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



*Sub Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran*

9. Layanan Perencanaan Program dan Anggaran

- ✓ Pelaksanaan kegiatan dan perjalanan dinas pada tanggal 3 - 8 November 2022 ke Bandung dalam rangka menghadiri undangan Finalisasi Penganggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bandung.
- ✓ Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi ke Dirjen PRL KKP terkait program kegiatan dan anggaran Tahun 2023 di DKP Sulawesi Selatan.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah adanya pelaksanaan program yang pelaksanaannya sesuai dengan tahapan perencanaan pencapaian target dan output.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya perencanaan dan penganggaran yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang maksimal outputnya dan memiliki manfaat bagi pengelolaan dan pemanfaatan WP3K yang lestari berkelanjutan.

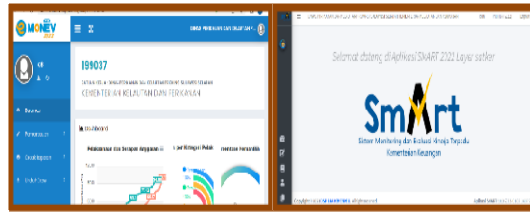


*Sub Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi*

10. Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- ✓ Pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari – Desember 2022 di Makassar.
- ✓ Output dari kegiatan adalah adanya monitoring dan evaluasi kegiatan PRL, dan adanya pelaporan on-line bulanan terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Hasil dari kegiatan adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan wilayah dan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta terlaksananya pelaporan on-line E-Monev/E-Smart ke Kementerian Kelautan (KKP) dan Perikanan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.

- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berjalan yang mendukung bagi perencanaan program dan anggaran tahun selanjutnya.



#### Sub Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan

##### 11. Layanan Manajemen Keuangan

- ✓ Pelaksanaan kegiatan Layanan pada bulan Januari – Desember 2022 di Makassar, dan Perjalanan dalam rangka Konsultasi Penyusunan Sistem Akuntansi pada tanggal 1 – 3 Desember 2022.
- ✓ Output dari kegiatan ini adalah adanya layanan administrasi keuangan kegiatan dan pelaporan bulanan terkait pemanfaatan barang dan anggaran kegiatan TA. 2022 di Bidang PPRLP3K.
- ✓ Hasil dari kegiatan adalah berjalannya layanan administrasi keuangan dan pelaporan pemanfaatan barang dan anggaran ke KKP dan Kemenkeu terkait dengan pelaksanaan kegiatan .
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya kontrol terhadap pengeluaran dan pemanfaatan anggaran sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang berjalan.



#### 4.3.4. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan-DKP Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat memberikan solusi melalui tugas pokok dan fungsi teknis yang diemban selama tahun 2022. Bidang ini bertanggung jawab melaksanakan program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan lebih khusus lagi melaksanakan kegiatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, serta kegiatan Pengawasan sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya, yang bebabankan oleh organisasi (DKP Provinsi Sulsel). Pelaksanaan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk



mendukung peningkatan peran dan kemampuan operasional aparat pengawasan di bidang perikanan agar dapat mewujudkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Beberapa permasalahan penting yang masih dijumpai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya adalah minimnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya; minimnya ketaatan dan kesadaran hukum para pelaku usaha; minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan dan plestarian; maraknya peraktek *destructive fishing*, penangkapan ikan secara berlebih (*over fishing*), pencemaran perairan dan pembuangan limbah secara *illegal*, *degradasi* habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuari); minimnya peran kelembagaan pengawasan di daerah serta lemahnya koordinasi dan kerjasama pengawasan serta penegakan hukum di daerah.

Pelaksanaan kegiatan dalam program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2022 masih menyisahkan beberapa permasalahan *destructive fishing* dan *illegal fishing* yang kini telah menjadi isu nasional yang menimbulkan kerugian negara atau pemerintah. Kondisi tersebut tentunya melegitimasi pemerintah daerah provinsi akan pentingnya pelaksanaan tugas dan peran dalam seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan sebagaimana diamanatkan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004, serta UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Mengakhiri pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tahun 2022, terdapat beberapa rencana program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan akan tetap dilanjutkan dalam melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2022 sesuai arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Salah satu bentuk keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan oleh Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan selama tahun 2022, diantaranya adalah : 1) Meningkatnya jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Meningkatnya jumlah aparaturnya pengawasan perikanan dan kemampuan teknis SDM aparaturnya dalam peran pengawasan dan penegakan hukum; 3) Terdatanya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku

## Kegiatan APBD

### A. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mill

#### 1. Sub Kegiatan Pengawasan Ruang Laut sampai dengan 12 Mill

##### a. Pertemuan Koordinasi Teknis Pengawasan dan Pengendalian SDKP

- Waktu Pelaksanaan : Tanggal 29-30 Juni 2022
- Tempat Pelaksanaan : Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard Raya No. 10 Makassar
- Hasil yang dicapai :
  - Dalam rangka mewujudkan wilayah perairan Sulawesi Selatan yang bebas dari kegiatan illegal fishing dan merusak sumberdaya kelautan dan perikanan maka diperlukan dukungan dari semua pihak baik ditingkat pusat maupun daerah dengan meningkatkan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lapangan.
  - Kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang ilegal dan merusak menjadi tugas kita semua, seperti pemboman ikan, pemanfaatan (terumbu karang, mangrove, species langka, dll), penambangan pasir, penambangan tanpa ijin (PETT), dan kegiatan ilegal dan merusak lainnya, harus dapat dicegah dan ditanggulangi. Hal tersebut penting untuk dilakukan, mengingat sumberdaya kelautan sebagian besar merupakan komponen penyusun ekosistem perairan yang memiliki nilai dan fungsi ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan perairan
  - Polairud Polda SulSel telah melaksanakan upaya penanggulangan kegiatan destructif fishing di wilayah kerjanya dengan melaksanakan patroli pengawasan, sosialisasi regulasi di laut, penegakan hukum, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan memberi pendampingan terhadap nelayan dan pelaku usaha di laut. Instansi tersebut berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam bentuk gelar operasi sepanjang tahun maupun gelar operasi sepanjang tahun. Polairud juga melakukan sosialisasi tertib administrasi terhadap nelayan.
  - Langkah langkah yang telah ditempuh pihak Syahbandar Perikanan dalam mendukung percepatan penerbitan SPB adalah dengan membuka pelayanan perizinan secara online. Selain itu, Syahbandar Perikanan juga telah mengupayakan penambahan personil SDM dalam membantu pengurusan SPB.



b. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Biota Langka, Peminaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas

■ Perdin Pengawasan Biota Langka, Pembinaan dan Pemberdayaan Pokmaswas Kab. Takalar

- Waktu pelaksanaan : 15-16 Maret 2022

- Hasil yang dicapai :

- Wilayah Kabupaten Takalar berbatasan langsung dengan wilayah perairan Kab. Jeneponto dan Kota Makassar, sehingga rentan terjadi konflik mengenai batasan wilayah penangkapan ikan, sehingga memerlukan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.
- Pokmaswas aktif di Kab. takalar sebanyak 19 kelompok yang tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan Illegal Fishing.
- Pembinaan Pokmaswas dilakukan dengan mengunjungi Pokmaswas Tubarania Desa Bunaga Kac. Mangarabombang dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang dan diketuai oleh Bapak Syamsu Alam. Keterangan yang diperoleh dari ketua Pokmaswas Tubarania tidak terdapat biota langka pada daerah tersebut namun masih kerap terjadi aktifitas illegal fishing yaitu pemboman dan pembiusan ikan. Dalam hal ini, untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pemantauan Pokmaswas Tubarania mengharapkan adanya bantuan operasional berupa sarana dan prasarana pengawasan.
- Diperlukan adanya Pengawas Perikanan/PPNS yang dapat mendukung upaya pengawasa SDKP di daerah ini serta lebih aktif melakukan sosialisasi Illegal Fishing. Selain itu diperukan juga adanya penggantian alat tangkap alternatif yang diharapkan dapat mengurangi Illegal Fishing namun tetap dapat memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkesinambungan



- Perdin Pengawasan Biota Langka, Peminaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat pengawas di Kab. Barru
- Waktu Pelaksanaan : 29-30 Maret 2022
- Hasil yang dicapai :
- Jumlah Pokmaswas di Kab. Barru sebanyak 5 Pokmaswas yaitu Pokmaswas Batu Loange, Pokmaswas Nirwana Bahari, Pokmaswas Bunga Nelayan, Pokmaswas Balanak dan Pokmaswas Polejiwa, namun yang aktif melakukan pengawasan adalah Pokmaswas Bunga Nelayan dan Pokmaswas Nirwana Bahari.
- Tidak terdapat biota langka yang terdapat di Perairan Kab. Barru dan sekitarnya, sehingga Pengawasan berfokus pada kegiatan Illegal Fishing.
- Pokmaswas yang dikunjungi adalah Pokmaswas Bunga Nelayan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru yang jumlah anggotanya sebanyak 10 orang. Dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa Pokmaswas Bunga Nelayan sampai saat ini terus berperan aktif dalam melakukan pengawasan, khususnya Illegal Fishing. Namun diduga pelaku berasal dari luar wilayah Kab. Barru dan menggunakan kapal-kapal bagang/cantrang yang mengeksploitasi perairan Barru dan merugikan nelayan sekitarnya. Selain itu terdapat pula dugaan pelanggaran berupa penggunaan bius ikan yang pada umumnya beroperasi pada malam hari.
- Selanjutnya kunjungan ke Pokmaswas Nirwana Bahari Kelurahan Mallawa, Kec. Mallusetasi yang diketuai oleh Pak Bowo Prihanto. Sejalan dari keterangan Pokmaswas Bunga Nelayan, Pokmaswas Nirwana Bahari juga mengeluhkan aktifitas pembiusan ikan oleh nelayan luar. Hal ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah dan aparat setempat, dan berakhir damai. Namun pada prakteknya, tetap ditemui adanya kegiatan pembiusan ikan dan kegiatan destruktif fishing lainnya.
- Hal lain yang menjadi kendala oleh Pokmaswas Kab, Barru adalah kesulitan biaya operasional khususnya bahan bakar yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan. Mereka juga mengharapkan adanya semacam Unit Reaksi Cepat yang dapat merespon Laporan dugaan Pelanggaran.





■ **Perdin Pengawasan Biota Langka, Peminaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat pengawas di Kab. Selayar**

- Waktu Pelaksanaan : 22 s/d 24 Maret 2022
- Hasil yang Dicapai :
- Perjalanan Dinas ini diawali dengan turut serta dalam kegiatan Direktorat Jendral PSDKP berupa Kampanye dan Edukasi Penanggulangan Destructive Fishing di Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar
- Pokmaswas yang dikunjungi adalah Pokmaswas Harayya di Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyu dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang yang diketuai oleh Bapak Yudi Ansar dan Pokmaswas Julu Siri di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai dengan jumlah anggota 12 orang yang diketuai oleh Bapak Andi Suryanto. Terkait dengan aktifitas pengawasan dan pemantauan di wilayah perairan Kabupaten Selayar yang dilakukan oleh kedua pokmaswas di atas menurut informasi masih sering terjadi atau dijumpai para oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan illegal fishing seperti pengeboman atau pembiusan ikan, di wilayah pengawasan masing-masing Pokmaswas.
- Dengan masih seringnya dijumpai bahkan hampir setiap hari ditemukan pelaku destruktif fishing yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, pokmaswas yang ada biasanya melaporkan dan menyampaikan/berkoordinasi dengan CDK yang terdekat serta kepada pihak yang terkait (polairud) untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan aktifitas monitoring pengawasan dilaut masih minimnya peralatan yang dimiliki dan mengharapkan pihak dinas kelautan dan perikanan kabupaten maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk memfasilitasi demi kelancaran pengawasan dilaut khususnya di wilayah perairan kabupaten Kepulauan Selayar.



■ **Pengawasan Biota Langka, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Jeneponto**

- Waktu Pelaksanaan : 29-30 Juli 2022
- Hasil yang dicapai :

- Kabupaten Jeneponto memiliki 11 Kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Binamu, Kecamatan Turatea, Kecamatan Kelara, Kecamatan Batang dan Kecamatan Arungkeke.
- Sebelum melakukan kunjungan pengawasan ke unit Budidaya Rumput Laut, tim terlebih dahulu melakukan koordinasi ke Dinas Perikanan Kabupaten Jeneponto dan diterima Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- Kabupaten Jeneponto dikenal dengan penghasil nener dan benur ikan bandeng yang banyak digunakan untuk budidayakan di daerah Sulawesi selatan. Wilayah pesisir Kabupaten Jeneponto yang merupakan sentra produksi garam satu satunya di Pulau Sulawesi. Produksi Garam tidak hanya mencukupi kebutuhan garam yodium untuk provinsi Sulawesi Selatan saja tetapi juga menyuplai kebutuhan kawasan timur Indonesia.
- Kabupaten Jeneponto juga memiliki potensi Rumput laut yang sangat besar, baik itu Rumput laut jenis *Euchema cottonii* ataupun jenis *Gracillaria*. Yang tersebar di daerah pesisir di 5 Kecamatan di yaitu Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan bangkala, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Binamu dan Kecamatan Arungkeke.
- Selanjutnya kunjungan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut yang berada di kecamatan Bangkala yang sedang mengalami Sengketa lahan budidaya dengan pengusaha resort yang mengambil alih lahan budidaya Rumput Laut mereka menjadi lokasi surfing, sehingga para pembudidaya merasa mata pencaharian mereka terganggu dengan adanya surfing tersebut, oleh sebab itu diadakan pertemuan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini, dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Pihak kepolisian, DKP Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi.



- Pengawasan Biota Langka, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Sinjai
- Waktu Pelaksanaan : 18 – 20 Juli 2022
- Hasil yang dicapai :

- Kab. Sinjai memiliki 9 Pokmaswas Aktif yaitu Pokmaswas Sipakainge, Pokmaswas Mamminassae, Pokmaswas Adapi Nagau, Pokmaswas Tunreng Tellue, Pokmaswas Seasseri, Pokmaswas Mattiro Deceng, Pokmaswas Karang Merah, Pokmaswas Batu Maccidong, dan Pokmaswas Mabbulo Sipeppa.
- Pokmaswas yang dikunjungi adalah Pokmaswas Mabbulo Sipeppa yang terletak di Kec. Sinjai Timur desa Pasimarannu. Ketua Pokmaswas adalah Rustam, S.Pi yang juga merupakan aparat desa setempat. Informasi yang diperoleh dari ketua kelompok, bahwa ditemukan biota langka yaitu Dugong dengan berat sekitar 1 ton, yang terdampar di sekitar perairan Sinjai Pasi Labingkung, sekitar 4 mill dari kecamatan Mare Kabupaten Bone. Ketika ditemukan, dugonig sudah dalam keadaan mati dan kemungkinan terbawa arus sampai terdampar di perairan Sinjai.
- Pokmaswas lain yang dikunjungi di Kab. Sinjai adalah Pokmaswas Tunreng Tellue beranggotakan 16 orang yang diketuai oleh Bapak Amar Ma'ruf yang berlokasi di daerah Tongke Tongke kecamatan Sinjai Timur. Dengan berkurangnya jumlah anggota yang dimiliki dikarenakan adanya anggota yang meninggal dunia dan pindah ke daerah lain, maka anggota kelompok tersebut tersisa 4 orang dan saat ini kurang aktif dalam melakukan kegiatan pengawasan.
- Dibutuhkan sinergitas dan koordinasi antara Cabang Dinas Kelautan Bosowasi dengan DKP Kab. Sinjai dalam melakukan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing. Selanjutnya diharapkan adanya pembinaan dan pendampingan terhadap Pokmaswas agar senantiasa termotivasi untuk terus dapat berperan aktif dalam kegiatan pengawasan



- **Perdin Pengawasan Biota Langka, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas di kabupaten Bulukumba.**
  - Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 Juli 2022
  - Hasil yang dicapai :
    - Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ka. CDK Wilayah Selatan, dan Kadis DKP Kab. Bulukumba, diketahui bahwa yang menjadi perhatian mereka adalah aktivitas wisata bahari di Pulau Liukang yang sifatnya mengeksploitasi penyu/tukik. Aparat setempat telah

beberapa kali memberikan arahan agar tidak lagi mengeksploitasi tukik dan disarankan untuk melakukan penanganan, serta mengurus perizinannya di instansi terkait. Kedepannya diharapkan untuk melakukan pembentukan Pokmaswas di Pulau Liukang melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya biota langka di daerah tersebut.

- Pembinaan dilakukan terhadap Pokmaswas Lumba lumba putih Desa Tana jaya Kec. Kajang yang beranggotakan 12 orang. Pokmaswas tersebut telah memperoleh bantuan perahu dan perlengkapan Pokmaswas pada tahun 2017 dan 2021. Permasalahan yang disampaikan adalah pengurusan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang memerlukan waktu yang lama dan dokumen yang dianggap memberatkan yaitu keanggotaan BPJS ketenagakerjaan bagi pemilik kapal dan ABK. Selanjutnya Pokmaswas tersebut sangat membutuhkan pendampingan dari Penyuluh Perikanan khususnya dalam pengurusan perizinan Usaha Perikanan dan Fasilitas Akses Bantuan Permodalan, serta sarana dan prasarana usaha perikanan.



■ **Perdin Pengawasan Biota Langka , Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kota Pare Pare dan Kab. Pinrang**

- Waktu Pelaksanaan : 20 – 22 Oktober 2022
- Hasil yang dicapai :
- Pokmaswas aktif di Kab. Pinrang tahun 2022 hanya terdiri dari 2 kelompok yaitu : Pokmaswas Bina Bahari yang diketuai oleh Bapak Basir Basiru dan Pokmaswas Bina Bahari yang diketuai oleh Bapak Alimuddin. Pokmaswas Sinar Bahari, yang merupakan Pokmaswas kurang aktif, mengemukakan alasannya bahwa tidak-aktifan mereka berangkat dari kekawatiran kelompok yang tidak dapat membuktikan legalitas mereka karena belum memegang SK Pembentukan kelompok.
- Pokmaswas yang dikunjungi di Kota Pare Pare adalah Pokmaswas Bagan Lolo yang diketuai oleh Ai Hafid. Tahun 2020 Pokmaswas ini memperoleh bantuan perahu Pokmaswas dan Perlengkapan Pok maswas, yang terdiri dari Rompi, GPS, teropong, HT, senter dan kamera digital, untuk menunjang kegiatan pengawasan. Akan tetapi sejak diberikan,



perahu Pokmaswas tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal karena terkendala biaya operasional bahan bakarserta spesifikasi perahu yang tidak efektif digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan. Untuk itu diharapkan perlunya koordinasi yang baik dalam pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan/Pokmaswas



2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mill

■ Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Barru

- Waktu Pelaksanaan : 22-23 September 2022
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan pengawasan budidaya laut mengacu pada Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- Usaha budidaya laut Kabupaten Barru belum berkembang seperti daerah lainnya, yang mana untuk budidaya rumput laut baru mulai dikembangkan pada tahun 2021 dengan skala kecil di wilayah Soppeng Riaja sedangkan Keramba Jaring Apung yang ada saat ini berada di Mallusetasi dengan komoditas ikan kerapu/sunu pun masih skala kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembesaran ikan kerapu/sunu masuk dalam standar usaha pembesaran pisces/ikan bersirip laut (KBLI 03211) dan budidaya rumput laut masuk dalam standar usaha pembesaran tumbuhan air laut (KBLI 03217) yang mana kedua usaha tersebut masih skala mikro dan kecil yang tidak membutuhkan persyaratan umum, namun tetap harus memperhatikan persyaratan khusus, yakni :
  - a. Menerapkan cara budidaya yang baik, membutuhkan :
    - Sarana;
    - Struktur organisasi dan SDM;
    - Persyaratan proses;
    - Sistem manajemen usaha.
  - b. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

- Selain itu, di Kabupaten Barru juga terdapat usaha budidaya kerang Mutiara yang dilakukan oleh PT Timut Otsuki Mutiara (PT TOM) dengan jumlah rakit sebanyak 9 rakit di perairan dekat Pulau Dukungan, budidaya ini masuk dalam standar usaha pembesaran Mollusca laut (KBLI 03215) dan skala usaha menengah dan besar yang mana wajib memiliki persyaratan umum
- Pada saat tim mendatangi tempat budidaya kerang Mutiara PT TOM hanya ada petugas jaga sehingga tim tidak dapat mendapatkan dokumen usaha untuk di cek list. Namun, dari informasi dari petugas jaga bahwa PT TOM telah memiliki dokumen perizinan berusaha dan memiliki lokasi di Batupute, Mangkoso dan Pinrang, sedangkan kantor cabangnya berada di Labuange. Pada kesempatan ini tim, melakukan pemantauan terhadap sarana usaha berupa keramba jaring apung, alat pembersihan dan sarana pengelolaan lingkungan. Dari hasil pemantauan didapatkan bahwa PT TOM telah memenuhi persyaratan khusus sarana dan persyaratan proses produksi. Diharapkan ke depannya tim dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh.



■ Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Jeneponto

- Waktu Pelaksanaan : 10-11 November 2022
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan Pengawasan Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Jeneponto diawali dengan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto, diperoleh informasi bahwa kegiatan pembudidayaan ikan, di Kabupaten Jeneponto pada umumnya pembudidayaan di dominasi oleh pembudidayaan rumput laut, sedangkan pembudidayaan ikan menggunakan karamba belum terlaksana karena nelayan terkendala dari segi permodal.
- Hari I kunjungan ke Pokdakan “Segar” yang diketuai oleh Bapak Nasrun yang beralamat di Kelurahan Biring Kasi Kecamatan Binamo Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kegiatan pokdakan ini adalah pada umumnya usaha budidaya rumput laut yang digeluti petani adalah jenis *cottoni sp.* Adapun permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pokdakan kelompok Segar adalah adanya tambak intensif yang pembuangan limbahnya di diarahkan kelaut, maka petani yang ada disekitar pembuangan limbah

tambak insentif berdampak terhadap budidaya rumput laut yang ada disekitarnya terserang dengan penyakit, sehingga tanaman rumput laut dahangnya mengalami patah patah dan beransur ansur layu. Petani rumput laut mengeluh dan hasil produksinya tidak maksimal.

- Hari ke II kunjungan berlanjut ke Pokdakan “Biring Tanjung” yang diketuai oleh Bapak Sarifuddin yang beralamat di Kelurahan Pabiring Kecamatan Binamo Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Pokdakan kelompok Biring Tanjung sepakak membudidayakan rumput laut yang jenis *cottoni sp.* Permasalahan yang dialami oleh pokdakan Biring Tanjung ini adalah munculnya penyakit rumput laut menurunnya kualitas produksi rumput laut yang diakibatkan oleh penyakit (sejenis jamur yang menempel pada rumput laut) pada saat mengalami perubahan musim di daerah ini, hal ini sangat berpengaruh terhadap harga rumput laut tersebt, sehingga petani rumput laut mengalami pendapatan menurun seiring rendah kualitas produksinya yang dihasilkan.



■ Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Bantaeng

- Waktu Pelaksanaan : 22-23 September 2022
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil di Kabupaten Bantaeng umumnya didoinasi oleh kegiatan budidaya rumput laut. Untuk kegiatan Karamba Jaring Apung, pada saat perdin dilakukan untuk sementara tidak beroperasi karena alasan teknis.
- Dilakukan kunjungan ke Pokdakan “Paraikatte Sikapaccei” yang diketuai oleh Bapak Sarifuddin, di Kel. Lamalaka Kecamatan Bantaeng. Kegiatan Pokdakan ini adalah rumput laut jenis *spinosum sp* dan *cottoni sp.*Selain itu Pokdakann ini juga menyediakan bibit rumput laut yang pemasarannya di sekitar wilayah Bantaeng dan beberapa kabupaten yang ada di Prov. Sulsel.
- Pokdakan lain yang dikunjungi adalah “Bonto Lempangan” yang diketuai oleh Bapak Budi di Desa Lempangan Kecamatan Pajukukang yang mengembangkan budidaya rumput laut jenis *cottoni sp.* Permasalahan yang dihadapi oleh Pokdakan ini adalah menurunnya kualitas produksi rumput laut yang diakibatkan oleh penyalit (sejenis jamur yang

menempel pada rumput laut) dan perubahan musim. Hal ini berakibat pada harga rumput laut yang mengalami penurunan seiring dengan penurunan kualitas.

- Pokdakan Kab. Bantaeng masih membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya pendampingan dari Penyuluh Perikanan, juga permodalan dalam pengadaan bibit, serta bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan rumput laut.



■ Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Bulukumba

- Waktu Pelaksanaan : 10-11 November 2022
- Hasil yang dicapai :
- Aktivitas petani budidaya ikan di Kab. Bulukumba menggunakan proses budidaya rumput laut menggunakan rumpon (Karamba Jaring Apung)/Long Line dengan bentangan tali panjang jarak rata-rata 15m, 20m, 21m dan karamba laut yang dimodifikasi dengan menggunakan pipa paralon dimana salah satu program dari bupati Bulukumba dalam rangka pengembangan dan meningkatkan produktivitas rumput laut. Dari tahun 2021, Pemkab Bulukumba telah menyerahkan bantuan sebanyak 4 unit dan sudah diuji coba di sekitar perairan Kel. Gantarang Kec. Bontobahari namun kurang berhasil digunakan pipa paralon yang digunakan 2 inci yang menyebabkan tidak bertahan lama. Disarankan agar petani budidaya rumput laut menggunakan karamba laut dengan pipa paralon dibanding keramba jaring apung. Karamba laut dinilai lebih efektif sebab dapat menghemat biaya produksi sebab tidak perlu lagi biaya untuk mengikat rumput laut dengan tali, serta tidak mengotori laut oleh botol plastik yang terbentang di laut. Selain itu pertumbuhan rumput laut juga lebih baik karena tidak mudah patah bila diterjang ombak dan tidak mudah dimakan ikan karena dilindungi oleh jaring sehingga tidak perlu sering dipantau.
- Dari hasil kegiatan budidaya, terdapat beberapa cemaran yang ditemukan berupa kotoran plastik, kayu/bambu, sampah sampah dan tumpahan minyak/sisa oli yang berasal dari perlintasan perahu nelayan penangkap ikan.
- Dilakukan kunjungan ke kelompok pembudidaya ikan “Pokdakan Sejahtera” dan “Pokdakan Messe’e”. Aktivitas kedua Pokdakan tersebut masih menggunakan budidaya



rumput laut baik dengan cara long line/keramba jaring apung, maupun dengan inovasi baru yaitu karamba rumput laut dengan menggunakan pipa paralon.



■ Perdin Pengawasan Budidaya Ikan Laut di Pulau Sabutung dan Sabangko Kab. Pangkep

- Waktu Pelaksanaan : 7-9 November 2022
- Hasil yang dicapai :
- Pulau yang dikunjungi yaitu Pulau Salemo dan Sabangko yang terletak di Desa Mattiro Bombang. Kondisi pulau tersebut cukup luas untuk pengembangan budidaya laut dan didukung kebijakan Pemda Kab. Pangkep untuk pengoptimalan potensi sumberdaya laut.
- Di Pulau Salemo dilakukan kunjungan terhadap pembudidaya Rumput Laut jenis *euchema cottoni* yang merupakan budidaya rumah tangga yang dimiliki oleh Bapak Rahman. Usaha perseorangan tersebut melibatkan sekitar 40 orang petani rumput laut di Pulau Salemo, dimana pak Rahman selaku pengumpul sekaligus pembudidaya memberikan modal berupa bentangan budidaya rumput laut. Bibit rumput laut diperoleh di Maccini Baji dengan waktu panen 4 kali dalam setahun. Adapun harga jual rumput laut kering milik pak Rahman saat ini sebesar Rp. 32.000/kg dan masih berfluktuatif tergantung musim dan ketersediaan pasokan. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya tanda tanda jalur untuk pembudidaya rumput laut agar tidak bersinggungan dengan jalur penangkapan nelayan pencari ikan.
- Pulau kedua yang dikunjungi adalah Pulau Sabangko yang mayoritas penduduknya melakukan usaha budidaya Bandeng. Pak Arman, salah satu pemilik tambak budidaya Bandeng seluas kurang lebih 8 Ha, mempekerjakan 4 orang dengan masa panen 3 kali dalam setahun. Harga jual Bandeng per ekor berkisar antara Rp.8.000 – Rp.20.000 bergantung pada ukuran ikan. Kendala yang dihadapi adalah datangnya pasang air laut, dimana tambak akan meluap dan ikan budidaya menjadi hanyut. Solusi yang dilakukan oleh pembudidaya terhadap hal tersebut adalah membuat tanggul penggalang air pasang. Hingga saat ini pembangunan tanggul tersebut masih dalam tahap penyelesaian.

- Kegiatan budidaya yang dilakkan di Pulau Salemo & Sabangko bersifat perorangan dan skala kecil, sehingga belum mempunya kelengkapan dokumen perizinan.



■ Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Pulau Saugi dan Satando Kabupaten Pangkep

- Waktu Pelaksanaan : 7-9 November 2022
- Hasil yang Dicapai :
- Pelaksanaan pengawasan budidaya laut mengacu pada Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- Menurut Penyuluh Perikanan Wilayah Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Makmur, S.Pi bahwa untuk usaha budidaya laut Kabupaten Pangkep belum berkembang seperti daerah lainnya, yang mana untuk budidaya rumput laut dan Keramba Jaring Apung (sunu, lobster dan cepa) baru mulai dikembangkan pada tahun 2021 dengan skala kecil di wilayah Liukang Tupabbiring, dan usaha perikanan tersebut merupakan Mata Pencapaian Alternatif bagi nelayan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembesaran ikan masuk dalam standar usaha pembersan pisces/ikan bersirip laut (KBLI 03211) dan budidaya rumput laut masuk dalam standar usaha pembesaran tumbuhan air laut (KBLI 03217) yang mana kedua usaha tersebut masih skala mikro dan kecil yang tidak membutuhkan persyaratan umum
- Pulau Satando merupakan salah satu gugusan kepulauan Spermonde yang memiliki luas wilayah  $\pm 55.668,8 \text{ m}^2$  yang mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Di pulau ini tim melakukan pemantauan terhadap keramba jaring apung (cepa dan lobster) dan rumput laut yang mana kedua usaha perikanan tersebut merupakan mata pencapaian alternative bagi nelayan tangkap di wilayah tersebut. Pembesaran ikan cepa dan lobster dalam keramba jaring apung dilakukan secara perorangan yang mana bibitnya berasal dari alam atau bukan bibit yang berasal dari pembenihan. Pemantauan terhadap keramba jaring apung milik Ahmad Sanusi, didapati bahwa usaha perikanan ini telah dijalani sejak 3 tahun terakhir dan masih berskala kecil yang menggunakan tenaga

kerja anggota keluarga dengan jumlah produksi/panen  $\pm$  1.000 ekor ikan cepa yang dipasarkan kepenampung, didapati juga bahwa pelaku usaha tidak menyediakan tempat khusus untuk pakan ikan atau pun sarana produksi lainnya, dan lahan yang digunakan merupakan area public berupa dermaga. Pemilik usaha saat ini mengupayakan pengadaan bibit ikan cepa yang berasal dari pembenihan ikan di Surabaya dengan harapan dapat mengatasi permasalahan bibit ikan yang mana selama ini bibit ikan diperoleh melalui penangkapan di alam.

- Selanjutnya pemantauan dilakukan terhadap pelaku usaha budidaya rumput laut milik Arman Joleng dimana lahan usahanya berada  $\pm$  100 meter dari pinggir pantai dan pada saat dilakukan pemantauan baru dilakukan penyebaran bibit rumput laut di area seluas  $\pm$  5 Ha.
- Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha rumput laut berasal dari anggota keluarga sedangkan bibitnya diperoleh dari alam atau perairan sekitar Pulau Satando, hal ini disebabkan sampai saat ini belum ada kebun bibit rumput laut di sekitarnya. Usaha budidaya rumput laut ini merupakan mata pencaharian alternatif dan baru dilakukan sejak setahun terakhir sehingga belum kelihatan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Namun demikian, pelaku usaha telah memiliki sarana pasca panen yang memadai berupa para-para penjemuran rumput laut yang mana penjualan rumput laut masih dalam bentuk setengah kering ke penampung.
- Pulau Saugi merupakan induk dari Desa Mattiro Baji dan merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan kepulauan Spermonde, serta memiliki luas wilayah  $\pm$  38.173,32 m<sup>2</sup>. Pulau ini merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pemantauan di pulau ini dilakukan terhadap usaha perikanan keramba jaring apung ikan cepa dan lobster, serta budidaya rumput laut. Pemantauan pertama dilakukan pada keramba jaring apung ikan cepa milik Damang, usaha ini telah dilakukan sejak 2 tahun terakhir dengan jumlah produksi/panen  $\pm$  500 kg dan dipasarkan kepenampung lokal. Keramba ini berada di pinggir pantai tidak jauh dari pemukiman yang mana sarana prasarannya seadanya, sedangkan bibit ikan diperoleh dari hasil penangkapan di alam dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga.
- Selanjutnya pemantauan dilakukan di keramba jaring apung lobster milik Mansyur Balo yang berada di dermaga Pulau Saugi dengan jumlah petak 6 unit berkapasitas 50 ekor lobster. Usaha ini dilakukan sejak 3 tahun terakhir dan bibitnya berasal dari hasil

penangkapan di alam. Tidak ada sarana dan prasarana khusus yang disediakan untuk menyimpan pakan dan alat produksi lainnya, tenaga kerja yang mengelola usaha ini berasal dari anggota keluarga.

- Pemantauan berikutnya dilakukan terhadap keramba jarring apung lobster milik Muhayyang yang mana profil usaha ini hamper sama dengan usaha sebelumnya yang dikunjungi, perbedaannya hanya terletak dari jumlah petak keramba yang dimiliki, dimana usaha ini memiliki 4 petak keramba yang masing-masing berkapasitas 50 ekor.
- Pemantauan terakhir dilakukan terhadap pelaku usaha perikanan rumput laut yang mana pada saat pemantauan sedang dilakukan pengikatan bibit rumput laut. Didapati bahwa bibit rumput laut berasal dari alam dan pada saat diikat masih terdapat trisipan/kerang yang menempel pada bibit, terindikasi bibit tersebut belum cukup baik dalam standar budidaya yang baik. Rata-rata pelaku usaha rumput laut memiliki 500 bentangan, seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha, Paharuddin. Untuk tenaga kerja mengikat bibit berasal dari ibu-ibu rumah tangga yang disewa per bentangan dengan upah 5.000 rupiah. Usaha budidaya rumput laut di Pulau Saugi telah ada sejak 2 tahun terakhir sebagai salah satu mata pencaharian alternatif.



■ **Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Maros**

- Waktu Pelaksanaan : 5-6 Desember 2022
- Hasil yang dicapai :
- Ruang lingkup kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan adalah melakukan pengawasan/identifikasi adanya aktifitas pembudidayaan ikan di perairan laut dibawah 12 mill dengan melakukan pengawasan langsung terhadap kepatuhan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan cara budidaya ikan yang baik. Pada umumnya petani/pembudidaya ikan di tambak dan dilaut dengan metode Karamba Jaring Apung/Longline, utamanya petani yang berada di Kelurahan/Desa Bori Masunggu Kecamatan Maros Baru dengan melakukan bentangan rumput laut yang dibudidayakan dengan cara mengikat bibit rumput dijadikan selama masa tanam.



- Dilakukan kunjungan ke Pokdakan Abbulosibattang yang berlokasi di desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru. Bidang budidaya yang dilakukan adalah budidaya rumput laut, baik di tambak maupun di laut. Ketuanya yaitu Bapak Abdul Azis dengan jumlah anggota 25 orang. Berdasarkan informasi dari ketua kelompok, di wilayah Desa Borimasunggu pada umumnya pembudidaya melakukan budidaya tambak dan perairan dibanding metode bioflok, dikarenakan masyarakat masih memiliki lahan yang cukup luas dan sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun.
- Pokdakan Abbulosibattang menanam bibit rumput laut dengan panjang bentangan 200m. Jarak bentangan maksimal 20m, selama masa tanam bibit harus selalu dipantau apakah pelampung botol perlu ditambah atau jika talinya bermasalah/putus, dimana prosesnya cukup lama dan tidak efisien serta biaya operasional bertambah karena membutuhkan tenaga erja untuk mengikat rumput. Dengan cara budidaya rumput metode long line/karamba jaring apung rata rata masa pertumbuhan kurang lebih 40-45 hari sudah bisa dipanen yang rata rata setahun bisa dipanen sebanyak 3-4 kali tergantung kondisi iklim selama pembibitan dengan rata rata produksi rumput laut jenis gracilaria 2 ton (3x panen) sedangkan *cottoni* 250gr, disebabkan pertumbuhan yang kurang bagus sehingga hasil produksi berkurang dikarenakan kondisi iklim.
- Pokdakan Abbulosibattang masih memerlukan pendampingan dan bantuan khususnya sarana dan prasarana pembudidayaan rumput laut



- Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)  
Temu Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pengawas
  - a. Waktu Pelaksanaan : 1-2 September 2022
  - b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Grand Imawan, Jln.Pengayoman No.36 Makassar
  - c. Pelaksana Kegiatan : Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
  - d. Peserta : Peserta Temu Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pengawas terdiri perwakilan dari Cabang

Dinas Kelautan, Pengawas Perikanan Prov. Sulsel, dan Perwakilan dari Kelompok Masyarakat Pengawas yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan.

- e. Narasumber : 1. Kolonel Laut Dofir (Asrena Danlantamal VI)  
2. Ir. Sitti Chadidjah, M.Si (Kepala Balai Besar KIPM Makassar)  
3. Burhanuddin, S.Pi (Koordinator Satker PDKP Makassar)
- f. Hasil Yang Dicapai :
- Dalam rangka mewujudkan wilayah perairan Sulawesi Selatan yang bebas dari kegiatan illegal fishing dan merusak sumberdaya kelautan dan perikanan maka diperlukan dukungan dari semua pihak baik ditingkat pusat maupun daerah, khususnya Masyarakat Pengawas, dengan meningkatkan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lapangan.
  - Kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang ilegal dan merusak menjadi tugas kita semua, seperti pemboman ikan, pemanfaatan (terumbu karang, mangrove, species langka, dll), penambangan pasir, penambangan tanpa ijin (PETI), dan kegiatan ilegal dan merusak lainnya, harus dapat dicegah dan ditanggulangi. Hal tersebut penting untuk dilakukan, mengingat sumberdaya kelautan sebagian besar merupakan komponen penyusun ekosistem perairan yang memiliki nilai dan fungsi ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan perairan
  - Lantamal VI Makassar, telah melaksanakan upaya penanggulangan kegiatan destructife fishing di wilayah kerjanya dengan melaksanakan patroli pengawasan, sosialisasi regulasi di laut, penegakan hukum, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan memberi pendampingan terhadap nelayan dan pelaku usaha di laut. Instansi tersebut berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam bentuk penempatan Pos Pengawasan Angkatan Laut di beberapa lokasi kabupaten dalam rangka melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat, khususnya nelayan.
  - Langkah langkah yang telah ditempuh pihak BKIPM dalam meminimalkan kegiatan destructiive fishing adalah melakukan pengujian terhadap produk perikanan untuk mendeteksi adanya residu dari kegiatan illegal fishing (penggunaan bom dan bius pada kegiatan penangkapan)
  - Dalam melakukan tugasnya, hendaknya Pokmaswas dibekali pengetahuan mengenai Sistem Pengawasan yang Berbasis Masyarakat, termasuk didalamnya tugas dan peran Pokmaswas,

perlindungan hukum bagi pokmaswas, membangun jaringan antar pokmaswas, dan mekanisme mengajukan bantuan sarana dan prasarana pengawasan



**B. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya**

**1. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya**

**■ Perdin Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap PUD di Kab. Wajo**

Hasil yang dicapai :

- Raung lingkup kegiatan pengawasan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan adalah mengidentifikasi adanya kegiatan penangkapan ikan di perairan umum seperti sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya. Selain itu melakukan pengamatan dan mencatat kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan.
- Informasi yang diperoleh dari penyuluh perikanan, rata-rata nelayan penangkap ikan melakukan penangkapan ikan di waduk dan danau karena adanya Perda No. 4 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang dilakukan oleh bupati Wajo, yang berisi antara lain : terdapat batasan dan syarat-syarat khusus untuk pengelolaan badan sungai, waduk atau danau.
- Sebagian besar kelompok nelayan penangkapan ikan di sekitar danau tempe kabupaten Wajo mendapatkan bantuan mesin perahu yang berbahan bakar gas sebagai motor penggerak perahu penangkap ikan. Jenis mesin perahu motor ini dianggap sangat efisien oleh masyarakat sekitar untuk melakukan penangkapan ikan, sebab dapat menghemat biaya dan tahan lama.
- Panjang jaring merupakan aturan dari pemerintah untuk membatasi penangkapan ikan yang berlebihan. Terkhusus alat tangkap *Bungku*, pemerintah Kab. Wajo sudah mengatur jarak kira-kira 150 meter. Selain menggunakan jaring, masyarakat sekitar juga memanfaatkan alat tangkap lain seperti Ja'bah. Ja'bah diletakkan di dasar danau terutama di bawah rimbunan enceng gondok untuk menangkap biota dasar danau.

- Pemanfaatan wilayah perairan pada danau tempe sampai saat ini masih tergolong aman dan jauh dari kegiatan Illegal Fishing. Menurut tokoh masyarakat adat, nelayan sekitar danau tempe tunduk dan patuh terhadap aturan adat di wilayah tersebut dan masih menggunakan alat tangkap tradisional yang sesuai dengan aturan pemerintah setempat.



## 2. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya

### ■ Perdin Pengawasan Usaha Bidang Perikanan Budidaya di Wilayah PUD Kab. Sidrap

- Waktu Pelaksanaan : 31 Maret- 1 April 2022
- Hasil yang dicapai :

- Pengawasan usaha perikanan budidaya di PUD dilakukan terhadap Pokdakan Semoga Jaya dengan jenis usaha pembudidayaan ikan lele.
- Pokdakan ini tergolong usaha mikro dan kecil dan telah menerapkan cara pembenihan ikan yang baik, memiliki sarana, struktur organisasi yang sederhana, persyaratan proses dan sistem manajemen usaha. Wadah pembenihan berupa kolam dengan peralatan sederhana untuk melaksanakan proses produksi, dapat menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk dan memiliki pencatatan usaha sederhana yang mampu tertelusur.
- Pokdakan Semoga Jaya melakukan panen dengan durasi selama 3 – 4 bulan dengan menerapkan sistem sortir setiap 2 (dua) minggu. Dalam menjalankan usaha pemasaran terdapat pola kemitraan dengan UPR Maraja dimana Pokdakan mengambil bibit ikan lele pada UPR Maraja dan hasil panen dijual Kembali ke UPR Maraja. Pokdakan juga dapat menjual hasil panennya ke tempat lainnya, salah satunya ke daerah Toraja.





■ **Perdin Pengawasan Usaha Bidang Perikanan Budidaya di Wilayah PUD Kab. Gowa**

- Waktu Pelaksanaan : 28 April 2022

- Hasil yang dicapai :

- Pelaksanaan Pengawasan Usaha Budidaya di Wilayah Perairan Umum Daerah, di Kabupaten Gowa diawali dengan kunjungan ke Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, diperoleh data dan informasi bahwa terdapat 3 (tiga) Kelompok Pengawas Perikanan di Kabupaten Gowa, antara lain: Pokmaswas Beroangin dan Pokmaswas Jeneberang di Kecamatan Parangloe dan Pokmaswas Sinar Moncongloe di Kecamatan Manuju.
- Hari I kunjungan ke Pokmaswas Jeneberang di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe dengan jumlah anggotanya sebanyak 16 orang yang diketuai oleh Bapak Hadi Mile, S.Sos dan Pokmaswas Beroangin di Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe dengan jumlah anggota 26 orang yang diketuai oleh Bapak Hasyim Dg. Janji, terkait dengan aktifitas pengawasan dan pemantauan di wilayah perairan Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh kedua pokmaswas di atas menurut informasi yang diperoleh bahwa masih sering terjadi atau di jumpai para oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan illegal fishing seperti penggunaan alat tangkap ikan (Bubu) dengan mata jaring yang dapat menangkap ikan yang belum layak konsumsi (bibit ikan) sehingga mengancam ketersediaan bibit ikan di perairan. Dalam mendukung dan menjaga pelestarian ekosistem waduk serta mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan sangat mengharapkan bantuan operasional berupa sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan pengawasan.
- Hari ke II kunjungan ke Pokmaswas Sinar Moncongloe di Desa Bilalang Kecamatan Manuju dengan jumlah anggotanya 15 orang yang diketuai oleh Bapak Johannis, permasalahan yang dialami juga terkait dengan masih sering terjadi atau di jumpai penggunaan alat tangkap ikan (Bubu) dengan mata jaring yang dapat menangkap ikan yang belum layak konsumsi (bibit ikan) sehingga mengancam ketersediaan bibit ikan di perairan.
- Dengan masih seringnya dijumpai kegiatan destruktif fishing yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, maka pokmaswas yang ada bisanya melaporkan dan menyampaikan/berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa serta kepada pihak yang terkait untuk di tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam

melakukan aktifitas monitoring pengawasan di perairan Waduk Bili-bili masih terkendala dengan minimnya peralatan yang dimiliki dan mengharapkan pihak dinas perikanan kabupaten maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk memfasilitasi demi kelancaran pengawasan yang dilakukan.

- Masih perlu adanya tambahan personil dan prasarana yang memadai untuk mendukung upaya kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perairan umum di daerah, serta lebih aktif melakukan sosialisasi ke nelayan dan stake holder lainnya tentang pengalihan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.
- Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan sangat diperlukan guna memelihara kelestarian sumberdaya perairan umum yang ada dari berbagai aktifitas yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran ekosistem sehingga dapat dikelola secara berkelanjutan dimasa yang akan datang.



■ Perdin Pengawasan Usaha Bidang Perikanan Budidaya di Wilayah PUD Kab. Soppeng

- Waktu Pelaksanaan : 19-21 September 2022
- Hasil yang dicapai :
- Pengawasan usaha perikanan budidaya dilakukan terhadap usaha bioflok di Kecamatan Lajupang milik Bapak Efu Tahir, Balai Pembenihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPPBIAT) Ompo, usaha budidaya milik Bapak Andi Tanra dan Pokdakan Saleppe'e Abbatanangge.
- Usaha bioflok milik Efu Tahir mulai berjalan pada bulan Maret 2022 yang terdiri 6 (enam) kolam bioflok dengan jenis ikan yang dibudidayakan berupa ikan mas dan nila. Usaha budidaya ini dilakukan secara perorangan dengan modal usaha sendiri, telah memiliki tempat khusus penyimpanan pakan maupun obat-obatan dan memiliki sarana prasarana penunjang lainnya. Usaha budidaya ini belum mendapatkan legalitas sertifikat CBIB.
- Balai Pembenihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPPBIAT) Ombo berlokasi di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata. BPPBIAT Ombo telah melakukan

pembenihan ikan air tawar sesuai CBIB dan pembinaan Pokdakan di wilayahnya. BPPBIAT Ombo dilengkapi sarana untuk memproduksi benih ikan unggul dan bermutu sesuai kaidah CBIB berupa kolam induk ikan mas 6 (enam) buah, 1 (satu) kolam lele, 5 (lima) kolam penampungan dan 1 (satu) bangsal pemijahan tertutup. Jenis ikan yang dibudidayakan ikan nila merah, nila hitam dan ikan mas. Pemantauan terhadap limbah sudah ditangani dengan baik dialirkan ke arah tanah persawahan yang ada di sekitarnya sehingga tidak berdampak/mempengaruhi sekitarnya.

- Usaha budidaya milik Bapak Andi Tanra yang berlokasi di Kelurahan Cabenge Kecamatan Lili Rilau. Usaha ini dikelola secara mandiri dengan memanfaatkan perairan rawa seluas 100 m<sup>2</sup> sebagai lahan budidaya ikan nila, mas dan bawal dengan jumlah 7 (tujuh) karamba. Berdasarkan pengawasan dan pemantauan didapatkan bahwa aspek pemenuhan persyaratan khusus, yaitu lokasi yang tata letak telah memenuhi namun masih memungkinkan kontaminasi dimana alur pengelolaan air satu arah masih beresiko menyebarkan penyakit ikan, pemberian pakan ikan, serta obat sudah sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan sudah terdaftar, tempat penyimpanan obat belum layak dan tidak higienis, penggunaan sarana prasarana masih minim saat panen dan pasca panen. Dengan melihat kondisi di lapangan bahwa pembudidaya ini belum menerapkan cara budidaya yang baik dan benar.
- Pokdakan Saleppe'e Abbatanangnge Kecamatan Lalabata diketuai Bapak Yusri beranggotakan 10 orang. Pokdakan ini menggunakan 2 (dua) metode, yaitu bioflok dan karamba di rawa seluas 40 m<sup>2</sup>. Adapun jenis ikan yang dibudidayakan berupa ikan nila, mas dan lele. Pokdakan ini belum mendapatkan sertifikat CBIB



- Perdin Pengawasan Usaha Bidang Perikanan Budidaya di Wilayah PUD Kab. Wajo
  - Waktu Pelaksanaan : 19-21 September 2022
  - Hasil yang dicapai :
- Jenis budidaya yang banyak diminati saat ini oleh masyarakat di Kabupaten Wajo adalah bioflok, yaitu salah satu teknologi budidaya ikan, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaat

mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai pencernaan pakan. Sistem bioflok menggunakan kolam yang menggunakan terpal dengan kapasitas 5 – 8 m<sup>3</sup> dan dikenal ramah lingkungan.

- Pengawasan budidaya dilakukan terhadap usaha budidaya Bapak H. Sukardi di Kecamatan Tanasitolo dan Pokdakan Sepakat Kelola Kecamatan Maniangepajo.
- Usaha budidaya Bapak H. Sukardi memiliki 2 (dua) kolam dengan kapasitas 5 m<sup>3</sup> dan 8 m<sup>3</sup>. Pembuangan limbah cari atau pergantian air untuk per siklus budidaya sebanyak 4 kali yang mana air pembuangannya aman untuk lingkungan karena teknologinya dapat mengurangi limbah beracun dan memanfaatkan mikroorganisme. Penggunaan obat hanya digunakan pada saat penebaran pertama guna mencegah terserang penyakit. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan terhadap usaha budidaya tersebut didapatkan bahwa pada usaha budidaya tersebut telah memenuhi Sebagian besar persyaratan umum usaha, yaitu perencanaan usaha, tahapan kegiatan, teknologi, volume produksi, pembiayaan dan legalitas usaha. Sedangkan persyaratan khusus masih harus dibenahi, antara lain sarana penyimpanan pakan dan obat-obatan, serta kesesuaian struktur organisasi dan SDM. Usaha budidaya bioflok H. Sukardi dapat disimpulkan telah patuh menerapkan cara berbudidaya yang baik dan mengikuti persyaratan budidaya ikan.
- Pokdakan Sepakat Kelola diketuai Bapak Arianto merupakan usaha budidaya ikan dengan pola minapadi dengan skala usaha mikro dan sistem manajemen rumah tangga yang mana tidak memiliki struktur organisasi yang jelas dan hanya dikelola secara mandiri oleh ketua dan anggota keluarganya (istri dan anak). Usaha budidaya ikan nila ini telah meliputi setiap tahanan siklus budidaya, yaitu pembenihan, pendederan sampai pembesaran. Berdasarkan pengawasan dan pemantauan didapatkan bahwa persyaratan umum dan khusus pada usaha budidaya ini belum memenuhi persyaratan budidaya yang baik.



### 3. Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan

#### ■ Perdin Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kab. Wajo

- Waktu Pelaksanaan : 7-9 Maret 2022
- Hasil yang dicapai :



- Kegiatan pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 07 – 09 Maret 2022.
- Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Wajo dilakukan terhadap Kelompok SIPAKALEBBI Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo dan UD RATU.
- Kelompok SIPAKALEBBI Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo beranggotakan 12 orang diketuai Ibu Sintawati dan didirikan tahun 2008. Adapun jenis olahan berupa ikan kering katambak, bete-bete dan kerapu dengan area pemasaran Kabupaten Wajo dan luar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan pengawasan/pemantauan terhadap kepatuhan teknis usaha yang berbasis resiko tingkat rendah dan menengah sesuai KBLI 10211 – industri penggaraman/pengeringan ikan dengan pemenuhan persyaratan umum usaha, kelompok ini sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 2912210024279 dengan kode KBLI nomor 10211 – industri penggaraman/pengeringan ikan, klasifikasi resiko menengah rendah dengan nomor sertifikat standar 29122100242790001.
- UD. Ratu diketuai Ibu A. Misda M didirikan tahun 2006 dengan jumlah tenaga pengolah sebanyak 10 orang dan jenis produk berupa abon ikan patin, udang dan gabus dengan area pemasaran Kabupaten Wajo dan luar Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pengawasan/pemantauan terhadap kelompok ini didapati bahwa usaha ini telah memiliki ijin usaha sesuai dengan KBLI 10211 – industri penggaraman/pengeringan ikan dengan pemenuhan persyaratan umum usaha KBLI 10211 – industri penggaraman/pengeringan ikan dengan pemenuhan persyaratan umum usaha



- **Perdin Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kab. Sidrap**
  - Waktu Pelaksanaan : 31 Maret-1 April 2022
  - Hasil yang dicapai :
- Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Sidrap dilaksanakan pada tanggal 31 Maret – 01 April 2022.
- Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dilakukan terhadap kelompok usaha pengolahan hasil perikanan yang mengolah bahan baku dari ikan

tenggiri menjadi abon ikan dengan nama usaha Ivo Karya yang kurang lebih telah beroperasi selama 10 tahun yang memiliki 4 karyawan tetap. Bahan baku usaha ini diperoleh dari Palu dan Rappang dan tujuan pemasarannya ke Soroako dan Poso dengan volume olahan produksi sebanyak 500 bungkus perbulan dengan berat tiap bungkusnya seberat 200 gram.



■ Perdin Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kab. Sinjai

- Waktu Pelaksanaan : 18 – 20 Juli 2022
- Hasil yang dicapai :
- Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Sinjai dilakukan terhadap KSM Tenggiri dan unit usaha Bintang Laut.
- KSM Tenggiri dikelola oleh Ibu Risda merupakan unit usaha pengolahan hasil perikanan berupa bakso ikan, amplang, siomay, nuget, abon ikan dan empek-empek dengan total produksi  $\pm$  40 kg per minggu. Unit usaha ini memiliki 19 orang tenaga kerja dan legalitas usaha berupa SIUP, NIB dan SKP yang masih dalam proses. Berdasarkan hasil pengawasan/pemantauan terhadap unit usaha ini dapat disimpulkan bahwa unit usaha ini telah memenuhi kepatuhan teknis sesuai yang dipersyaratkan.
- Unit usaha Bintang Laut dikelola Ibu Farida dengan hasil produk berupa ikan asin. Berdasarkan hasil pengawasan/pemantauan didapatkan bahwa unit usaha ini belum memenuhi persyaratan teknis, termasuk perijinan berusaha yang belum dimiliki



■ Perdin Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kab.

Bulukumba

- Waktu Pelaksanaan : 20-22 Juli 2022
- Hasil yang dicapai :

- Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2022.
- Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Bulukumba dilakukan terhadap Unit Usaha Jutsuka Desa Balleangin Kecamatan Ujung Loe dan Kelompok Harapan Jaya Kecamatan Kajang.
- Unit Usaha Jutsuka dimiliki oleh Bapak Rizki Awalfindy dengan jumlah tenaga kerja 10 orang dan telah beroperasi sejak tahun 2021. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan didapatkan bahwa SKP dari unit usaha ini masih dalam proses, sertifikat halal telah diperoleh untuk produk ikan kering dan ikan kanasa. Dokumen perizinan yang sudah diperoleh berupa NIB, IUMK, PIRT, NPWP dan BPJS ketenagakerjaan. Produk unit usaha Jutsuka berupa ikan kering, ikan kanasa, bakso ikan dan frozen yang dipasarkan melalur reseller, toko-toko di sekitar Bulukumba, tempat wisata dan pemasarannya sampai kota Makassar dan Jayapura. Produk yang dihasilkan mencapai 200 kg setiap bulan dengan omzet ± Rp. 240.000.000,- per tahun.
- Unit usaha Harapan Jaya dikelola oleh Ibu Ni'ma dengan jenis produk berupa ikan pindang yang mana bahan bakunya adalah ikan layang dan ikan cakalang yang diperoleh dari PPI Kajang. Unit usaha ini mengelola ikan pindang 120 ekor per minggu atau ± 4.800 ekor setiap bulan yang dipasarkan ke wilayah Bulukumba dan Sinjai. Unit usaha ini belum memiliki dokumen perizinan dan dari segi pengemasan produk belum memiliki kemasan guna menjaga kualitas produk.



- **Perdin Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kab. Bantaeng**
  - Waktu Pelaksanaan : 1-12 November 2022
  - Hasil yang dicapai :
- Kegiatan pengawasan usaha dan produk perikanan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa negara atas kegiatan perikanan yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha perikanan. Untuk itu, kegiatan perikanan harus dilakukan mengikuti

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

- Berdasarkan hal tersebut diatas pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang dilaksanakan di kab. Bantaeng selama 2 hari yang diawali dengan koordinasi dengan Dinas Perikanan kab. Bantaeng. Adapun sebagai bahan informasi yang di sampaikan Nurzainuddin, S.Pi yang menjabat sebagai kepala bidang tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menyampaikan bahwa di kab. Bantaeng terdapat 24 usaha pengolah aktif dan 9 kelompok usaha pemasaran hasil perikanan terdaftar dan tersebar masing-masing kecamatan di kab. Bantaeng.
- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) : Berorientasi pada Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kegiatan Penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dengan target peningkatan pengolahan volume ikan termasuk rumput laut dan kapasitas unit pengolahan ikan serta peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita, Unit Pengolahan dan Pemasaran berupa Kelompok Pengolahan yang sudah terbentuk sebanyak 56 Kelompok namun yang aktif memproduksi sebanyak 24 dan kelompok pemasar sebanyak 9 kelompok, dengan total produksi kelompok pengolah sebesar 20,0 Ton (Data Potensi Perikanan Bantaeng tahun 2021).



■ Perdin Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kab. Maros

- Waktu Pelaksanaan : 17-18 November 2022
- Hasil yang dicapai :

- Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dilakukan terhadap Kelompok Padaelo Kecamatan Bantimurung dan Kelompok Azzakhra Kecamatan Mandai.
- Kelompok Padaelo Desa Alatengngae Kecamatan Bantimurung memiliki jumlah anggota 14 orang dan berdiri sejak tahun 2018 dengan hasil olahan berupa roti abon ikan, abon ikan tuna, bakso ikan, nugget ikan, selai rumput laut dan otak-otak. Kelompok ini telah memiliki NIB 0203220029048 untuk hasil olahan hasil perikanan yang dioperasikan tergolong



dalam KBLI Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan (47245), klasifikasi resiko usaha masih rendah. Demikian pula untuk pembuatan roti isi abon ikan sudah memiliki NIB yang sama dengan KBLI 10710 Industri Produk Roti dan Kue dengan klasifikasi resiko rendah. Berdasarkan hasil pengawasan/pemantauan didapatkan bahwa kelompok ini sudah dapat dikategorikan pelaku usaha yang patuh terhadap persyaratan perijinan usaha berbasis resiko.

- Kelompok pengolah Azzakhra Desa Bontoa Kecamatan Mandai didirikan pada tahun 2008 dan beranggotakan 22 orang. Produk olahan yang dihasilkan adalah frozen bakso ikan, abon ikan tuna dan nugget ikan, namun yang memiliki sertifikat SKP dari KKP hanya untuk produk abon ikan dan bakso ikan. Kelompok ini telah memiliki NIB 0220003590049 untuk olahan abon ikan yang tergolong dalam KBLI Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan (10219), klasifikasi resiko usaha menengah rendah. Demikian pula untuk produk bakso ikan sudah memiliki NIB yang sama dengan KBLI 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi dengan klasifikasi resiko menengah rendah. Berdasarkan hasil pengawasan/pemantauan didapatkan bahwa kelompok ini sudah dapat dikategorikan pelaku usaha yang patuh terhadap persyaratan perijinan usaha berbasis resiko.



#### 4. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

##### ■ Studi Tiru Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pengawas

- Waktu Pelaksanaan : 23-25 November 2022
  - Pelaksana Kegiatan : Pokmaswas, Pengawas Perikanan, Staf Bidang PSDKP
  - Hasil yang dicapai :
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam arahannya kepada peserta sebelum keberangkatan ke Provinsi Bali bahwa peserta POKMASWAS diharapkan dapat belajar sebaik-baiknya kepada POKMASWAS berprestasi Provinsi Bali terkait keterampilan teknis dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selanjutnya, bagi Pengawas Perikanan diminta untuk berbagi informasi dengan Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Bali terkait kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya, serta pengembangan sinergitas antara Pengawas Perikanan, POKMASWAS dan instansi penegak hukum. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas POKMASWAS dan Pengawas Perikanan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan peran serta POKMASWAS dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

- Hari pertama kegiatan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dilakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang mana diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, MAgb dan didampingi oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan, I Putu Masdika, S.Pi.,M.Si beserta jajarannya. Pada kesempatan ini, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyampaikan bahwa Provinsi Bali tidak memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar seperti Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun potensi budidaya rumput laut  $\pm 10.000$  Ha di Nusa Penida, budidaya kerapu di Buleleng dan budidaya  $\pm 10\%$  dari potensi perikanan yang ada. Pada saat pandemic Covid 19 sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas penggerak ekonomi di provinsi ini. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memiliki 4 (empat) bidang teknis dan 3 (tiga) seksi setiap bidang teknis. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan bidang teknis yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pembinaan POKMASWAS. Adapun tugas dan fungsi teknis Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan, yaitu :

- Melaksanakan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dengan instansi/Lembaga terkait.
- Melaksanakan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Melaksanakan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pergaraman, pengolahan dan pengolahan hasil perikanan.
- Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kemampuan teknis Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- Melaksanakan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memiliki 22 orang Pengawas Perikanan dan 72 Pokmaswas.

- Selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bahwa pembinaan POKMASWAS tahun 2022 dilakukan terhadap 38 kelompok yang mana pembinaannya meliputi :

- Pembinaan administrasi, yaitu dalam bentuk pemberian bimbingan dan pedoman dalam membentuk POKMASWAS, serta standar pelaksanaan POKMASWAS.
  - Pembinaan teknis, yaitu pemberian bimbingan, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan POKMASWAS.
  - Pembinaan personil, yaitu pembinaan yang bersifat stimulus diberikan dalam rangka peningkatan keinginan dan kompetensi/kemampuan anggota POKMASWAS.
- Adapun dalam pelaksanaan pembinaan POKMASWAS metode yang digunakan sebagai berikut :
- Pertemuan rutin
  - Diskusi
  - Bimbingan teknis pengawasan SDKP
- Selanjutnya, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menjelaskan bahwa tahun 2015 dan 2018 Pokmaswas Mina Werdhi Batu Lumbang menjadi juara tingkat nasional Pokmaswas berprestasi dan Pokmaswas Penimbang Lestari Buleleng menjadi juara nasional Pokmaswas berprestasi di tahun 2022. Sebagian besar Pokmaswas aktif yang ada di Provinsi Bali sudah mandiri untuk membiayai operasionalnya dan membuka usaha penyewaan perahu untuk wisatawan yang berkunjung di wilayahnya. Pokmaswas ini memfokuskan pada kegiatan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, serta penangkaran penyu.
- Sinergitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dilakukan dengan melibatkan unsur Pengawas Perikanan, Pokmaswas, Dinas Perikanan kab/kota dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, rehabilitasi terumbu karang dan rehabilitasi mangrove. Pengawas Perikanan juga terlibat dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap Pokmaswas dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pokmaswas ataupun masyarakat lainnya. Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali secara aktif melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan pelanggaran di wilayah tersebut.
- Kunjungan Hari ke 2 (dua) tanggal 24 November 2022 dilakukan ke Pokmaswas “Mina Werdhi” Batu Lumbang Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali yang mana peserta diterima langsung oleh Wakil Ketua, Made Murdita dan Koordinator Seksi Informasi dan Komunikasi, A.A. Ngurah Yudana, Penyuluh Perikanan dan anggota Pokmaswas. Dalam Diskusi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pokmaswas “Mina Wedhi” dibentuk pada tahun 2006 sebagai kelompok pemula dan kemudian berkembang menjadi kelas kelompok utama yang mana sejak pembentukannya Pokmaswas ini telah didampingi

oleh Penyuluh Perikanan. Selain itu, Pokmaswas ini memiliki 50 orang anggota yang mana merupakan Pokmaswas terpadu dengan KUB “Segara Guna Batu Lumbang” dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) “Mina Lestari”. Sekretariat Pokmaswas ini berada dalam ekowisata mangrove “Batu Lumbang” dan juga memiliki Pos Pengamanan Hutan Terpadu. Tahun 2015 Pokmaswas ini pernah melakukan studi tiru di Pokmaswas Provinsi Jawa Timur, dan sejak itu mulai melakukan pembenahan dalam Pokmaswas khususnya pada kelembangaan serta pengembangan informasi dan komunikasi yang diawali dengan membangun “kesadaran” dalam diri setiap anggota Pokmaswas, tunduk kepada hukum adat dan ketaatan terhadap “Sang Pencipta Alam Semesta” serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan Penyuluh Perikanan di wilayahnya. Bagi mereka evaluasi dan juara Pokmaswas berprestasi tingkat nasional bukanlah menjadi prioritas bagi kelompok tapi bagaimana membangun “kesadaran” pada setiap anggota kelompok untuk menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya yang merupakan sumber mata pencaharian mereka. Sejak tahun 2015 dan sampai saat ini Pokmaswas “Mina Wedhi” dan KUB “Segara Guna Batu Lumbang” telah menorehkan prestasi tingkat nasional, pada saat G20 tahun 2022 di Bali, ekowisata mangrove yang dikelola Pokmaswas mendapatkan kunjungan dari delegasi G20.

- Tahun 2012 Pokmaswas ini diberikan bantuan sarana dan prasarana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berupa speedboat Pengawas “Marlien 1” yang sampai saat ini masih dalam kondisi baik. Selain itu, pada tahun 2009 dan 2015 Pokmaswas ini juga mendapatkan bantuan sarana prasarana dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar berupa perlengkapan Pokmaswas, papan nama sekretariat, papan larangan Pokmaswas, GPS, perlengkapan penanganan sampah, senter, kamera digital, rompi pengawasan, dan di tahun 2010 mendapatkan bantuan HT dan teropong dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengurus dan anggota Pokmaswas “Mina Wedhi” juga berswadaya untuk mengadakan REG Refiter, Antena Refiter, teropong, kano, dayung kano, papan sekretariat dan laptop. Sampai saat ini, semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pokmaswas masih dalam keadaan baik dan dapat digunakan.
- Pokmaswas ini juga melakukan patroli terpadu dengan Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Polairud, TNI AL dan PSDKP Benoa. Selain itu, setiap anggota Pokmaswas yang melaut membawa misi pengawasan sumber daya



kelautan dan perikanan. Secara mandiri, Pokmaswas ini juga mengagendakan bersih pantai 1 (satu) kali dalam sebulan.

- Ditambahkan oleh Wakil Ketua Pokmaswas “Mina Wedhi”, Made Murdita bahwa dengan modal “kesadaran” untuk menjaga kelangsungan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya, sehingga semuanya bukan lagi menjadi suatu keharusan untuk dinilai, kerjasama tim dalam melakukan kegiatan termasuk dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi, serta sering berkoordinasi dan berkomunikasi dengan instansi terkait menjadi poin penting dalam keberlangsungan keaktifan Pokmaswas.
- Bachtiar Baso, Ketua Pokmaswas Kuda Laut Kabupaten Luwu Utara mempertanyakan kiat-kiat Pokmaswas “Mina Wedhi” menambah jumlah asset, khususnya jumlah kano yang disewakan kepada wisatawan. Menanggapi hal yang ditanyakan tersebut, Koordinator Seksi Pembangunan Informasi dan Komunikasi Pokmaswas “Mina Wedhi” menyampaikan bahwa untuk keberlanjutan operasional Pokmaswas, mereka menyewakan kano kepada wisatawan atau pun pemancing yang berkunjung ke ekowisata mangrove yang mana pada awalnya jumlah kano hanya 10 unit dan kemudian berkembang menjadi 75 unit. Pengelolaan penyewaan kano diserahkan kepada Koperasi “Serba Usaha” yang merupakan anak usaha dari Pokmaswas ini dengan pembagian sebagai berikut :

- Sewa kano	Rp. 25.000,-
- Pengelola	Rp. 11.000,-
- Simpanan Koperasi	Rp. 3.000,-
- Pokmaswas	Rp. 11.000,-
- Selanjutnya, Pokmaswas ini juga mengandalkan KUB “Segara Guna” dan Poklahsar “Mina Lestari” untuk memfasilitasi modal usaha bagi anggota kelompoknya. Adapun produk yang dihasilkan Poklahsar “Mina Lestari” berupa cemilan stik mangrove dan kopi mangrove yang mana ruang pengolahannya berada di lokasi sekretariat Pokmaswas. Produk tersebut telah dipasarkan dalam Kota Denpasar sebagai oleh-oleh Bali dan telah mendapatkan label halal dari MUI.
- Pada akhir pertemuan tersebut, Wakil Ketua Pokmaswas “Mina Werdhi” menyampaikan bahwa Pokmaswas ini telah melakukan perjanjian kerjasama yang meliputi :
  - Kerjasama pengawasan
  - Pengawasan perairan : PSDKP Benoa dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
  - Pengawasan bencana di laut : BPBD Kota Denpasar

- Kerjasama pengelolaan
  - Pengelolaan wilayah : Camat Denpasar Selatan
  - Wisata bahari : Dinas Pariwisata Kota Denpasar
  - Kerjasama konservasi
  - Pembibitan dan pengelolaan mangrove : Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Program kerja Pokmaswas “Mina Werdhi”, yaitu :
- Pertemuan rutin kelompok : 1 kali / 2 bulan
  - Pertemuan dengan penyuluh : 10 kali / bulan
  - Pertemuan rutin pengurus : 1 kali / bulan
  - Rapat besar kelompok : 2 kali / tahun
  - Bersih pantai : 1 kali / bulan.
- Setelah melakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Pokmaswas “Mina Werdhi” Kota Denpasar dilanjutkan dengan diskusi antara peserta yang dilaksanakan di Hotel J Four Legian. Dalam diskusi tersebut dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :
- Pengurus dan anggota Pokmaswas di Sulawesi Selatan harus mampu membangun “kesadaran” untuk berperan dalam keberlangsungan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya.
- Mendorong kemandirian Pokmaswas untuk melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan upaya membenahi kelembagaan, pengelolaan kelompok serta membangun informasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait.
- Pokmaswas Sulawesi Selatan harus dapat membangun informasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak-pihak diluar instansi pemerintah dengan difasilitasi oleh Penyuluh Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perikanan kabupaten/kota sehingga Pokmaswas dapat membuka unit usaha yang dapat membantu perekonomian anggota Pokmaswas dan masyarakat sekitarnya.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi harus secara rutin mendorong Pokmaswas untuk mampu berperan aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mampu melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan mangrove secara mandiri.

- Pengawas Perikanan secara aktif mampu menindaklanjuti laporan dari Pokmaswas dan masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta dapat membangun sinergitas dengan Pokmaswas, Polairud dan TNI AL terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Pengawas Perikanan dan Pokmaswas secara bersama-sama melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan guna membangun “kesadaran” masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian.
- Pengawas Perikanan dan Pokmaswas melakukan patroli terpadu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Pengawas Perikanan, Bidang Pengawasan SDKP dan Pokmaswas Provinsi Sulawesi Selatan secara rutin melakukan komunikasi dan koordinasi yang dibarengi dengan pertemuan teknis guna meningkatkan kapasitas dan kualitas personal dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Setelah melakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pokmaswas “Mina Werdhi” Batu Lumbang Kota Denpasar, peserta dan panitia Studi Tiru Peningkatan POKMASWAS melakukan city tour di tempat wisata Ulun Danu Beratan dan Tanah Lot



## Kegiatan APBN

Program Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

### 1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan

#### a. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan SDKP, dengan output/keluaran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan. Target Kinerja untuk Sulawesi Selatan, yaitu 44 kelompok.

#### b. Pelaksana, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan

- Pelaksana : Pengawas Perikanan / PPNS
- Waktu : Januari s/d Desember 2022
- Tempat Pelaksanaan : Sulawesi Selatan

#### c. Hasil Kegiatan

##### 1) Konsolidasi Data Pokmaswas di Kab Pangkep

- a) Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b) Waktu pelaksanaan : 07 – 08 Februari 2022
- c) Hasil yang dicapai :

- ✓ Pokmaswas aktif yang berada di wilayah Pangkep berjumlah 37 kelompok dengan sebaran sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Liukang Tupabbiring sebanyak 11 kelompok dengan jumlah anggota 133 orang;
- 2) Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara sebanyak 8 kelompok dengan jumlah anggota 92 orang;
- 3) Kecamatan Liukang Tangayya sebanyak 9 kelompok dengan jumlah anggota 141 orang;
- 4) Kecamatan Bungoro sebanyak 1 kelompok dengan jumlah anggota 9 orang;
- 5) Kecamatan Ma'rang sebanyak 3 kelompok dengan jumlah anggota 197 orang;
- 6) Kecamatan Mandale sebanyak 3 kelompok dengan jumlah anggota 63 orang;
- 7) Kecamatan Liukang Kalmas sebanyak 2 kelompok dengan jumlah anggota 33 orang.

- ✓ Sejak tahun 2017 – 2021 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pangkep telah memberikan bantuan kepada Pokmaswas berupa HP android, perlengkapan Pokmaswas (HT, GPS, rompi, senter, kamera digital dan teropong) dan perahu Pokmaswas yang sampai saat ini masih berfungsi baik dan dimanfaatkan dalam pengawasan SDKP.



- ✓ Penganggaran tahun 2022 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pangkep mengalokasikan pengadaan perahu Pokmaswas untuk 2 (dua) kelompok, yaitu Pokmaswas Sahabat Bahari Desa Mattiro Labangeng Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Pokmaswas Balanga Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro.

2) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Pangkep

- a) Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b) Waktu pelaksanaan : 07 – 08 Februari 2022
- c) Hasil yang dicapai :

- ✓ Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Pangkep dilaksanakan di Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pangkep pada tanggal 8 Februari 2022.
- ✓ Peserta Pembinaan Pokmaswas dihadiri oleh 20 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, penyuluh perikanan dan staf Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pangkep.
- ✓ Kabupaten Pangkep memiliki 37 Pokmaswas dengan jumlah anggota 668 orang yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.
- ✓ Materi pembinaan berupa memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi selaku anggota Pokmaswas, mekanisme pelaporan serta kegiatan-kegiatan pengawasan yang perlu diawasi oleh Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai kewenangan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang Perikanan dimana dijelaskan pada pasal 67 bahwa masyarakat ikut membantu melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- ✓ Permasalahan yang disampaikan oleh Ketua Pokmaswas Komando yang terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di wilayahnya adalah aktivitas nelayan bius dan bom yang berasal dari luar Pulau Bontosua, pada musin tertentu nelayan dari luar juga melakukan pelanggaran berupa penggunaan bom dan potasium dalam melakukan penangkapan ikan. Aktivitas-aktivitas pelanggaran tersebut sangat meresahkan pengurus dan anggota Pokmaswas Komando yang sebagian besar adalah nelayan karena berimbas terhadap hasil tangkapan ikan yang semakin menurun, sehingga diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan dan pemantauan di perairan Kabupaten Pangkep dengan melibatkan aparat penegak hukum, serta memberikan tindak tegas terhadap pelaku pelanggaran guna memberikan efek jera.

- ✓ PPNS Perikanan Cabang Dinas Wilayah Pangkep menyampaikan bahwa Pokmaswas dalam melakukan pengawasan/pemantauan berpegang pada prinsip melihat, mencatat dan melaporkan tindakan pelanggaran kepada aparat yang berwenang, tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan main hakim kepada pelaku.

### 3. Konsolidasi Data Pokmaswas di Kota Palopo

- a. Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b. Waktu pelaksanaan : 14 – 16 Februari 2022
- c. Hasil yang dicapai :

Melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 523/215/SK/PGS/POKMASWAS/DKP tanggal 08 Mei 2019 telah menetapkan 6 (enam) Pokmaswas di wilayah Kota Palopo, yaitu :

No.	Pokmaswas	Alamat	Sarana dan Prasarana
1.	Retona	Desa Sampoddo Kec. Wara Selatan	Perlengkapan Pokmaswas (rompi, senter, GPS, kamera, HT dan teropong) dan HP android
2.	Salotanga	Kel. Songka Kec. Wara Selatan	Perahu Pokmaswas
3.	Salu Karo	Desa Takkalala Kec. Wara Selatan	Perlengkapan Pokmaswas (rompi, senter, GPS, kamera, HT dan teropong), HP android dan perahu Pokmaswas
4.	Salu Tompotika	Kel. Benteng Kec. Wara Timur	Perlengkapan Pokmaswas (rompi, senter, GPS, kamera, HT dan teropong)
5.	Wahana Lingkungan	Kel. Sarutanga Kec. Wara Timur	Perlengkapan Pokmaswas (rompi, senter, GPS, kamera, HT dan teropong), HP android dan perahu Pokmaswas
6.	Baja Pole	Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur	Perlengkapan Pokmaswas (rompi, senter, GPS, kamera, HT dan teropong) dan HP android

### 4. Pembinaan Pokmaswas di Kota Palopo

- a. Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b. Waktu pelaksanaan : 14 – 16 Februari 2022
- c. Hasil yang dicapai :

- ✓ Melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 523/215/SK/PGS/POKMASWAS/DKP tanggal 08 Mei 2019 telah menetapkan 6 (enam) Pokmaswas di wilayah Kota Palopo, yaitu :

- 1. Pokmaswas Retona Desa Sampoddo Kec. Wara Selatan
- 2. Pokmaswas Salotanga Kel. Songka Kec. Wara Selatan
- 3. Pokmaswas Salu Karo Desa Takkalala Kec. Wara Selatan

4. Pokmaswas Salu Tompotika Kel. Benteng Kec. Wara Timur
5. Pokmaswas Baja Pole Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur
6. Pokmaswas Wahana Lingkungan Kel. Sarutanga Kec. Wara Timur

✓ Pembinaan Pokmaswas di Kota Palopo dilaksanakan di Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Luwu Raya dan diikuti oleh pengurus dan anggota Pokmaswas Wahana Lingkungan dan Pokmaswas Salu Tompotika dengan jumlah peserta 20 orang.

5. Konsolidasi Data Pokmaswas di Kabupaten Wajo

- a. Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b. Waktu pelaksanaan : 07 - 09 Maret 2022
- c. Hasil yang dicapai :

✓ Kabupaten Wajo memiliki 13 Pokmaswas dengan jumlah anggota 289 orang.

✓ Adapun data Pokmaswas tersebut sebagai berikut :

No.	Pokmaswas	Alamat	Sarana dan Prasarana
1.	Sipakainge	Desa Pantai Timur Kec. Takkalala	HP android dan perahu Pokmaswas
2.	Sipakainge	Desa Maniangpajo Kec. Maniangpajo	-
3.	Kompas	Desa Siwa Kec. Pitumpanua	-
4.	Basma Community	Desa Siwa Kec. Pitumpanua	Perlengkapan Pokmaswas (rompi, senter, GPS, kamera, HT dan teropong)
5.	Mappideceng	Desa Pantai Timur Kec. Takkalala	-
6.	Wahana Bahari	Desa Doping Kec. Penrang	HP android
7.	Mappasitujue	Desa Pasir Putih Kec. Bola	-
8.	Bina Lestari	Desa Akkajeng Kec. Sajoanging	Perlengkapan Pokmaswas (rompi, senter, GPS, kamera, HT dan teropong) dan perahu Pokmaswas
9.	Siwa Bahari	Desa Siwa Kec. Pitumpanua	HP android
10.	Maruddanie	Desa Kera Kec. Kera	HP android
11.	Suka Maju	Desa Pammana Kec. Pammana	-
12.	Massedie	Desa Tanasitolo Kec. Tanasitolo	Perlengkapan Pokmaswas (rompi, senter, GPS, kamera, HT dan teropong) dan HP android
13.	Siparingerrang	Desa Wattalipue Kec. Tempe	Perlengkapan Pokmaswas (rompi, senter, GPS, kamera, HT dan teropong) dan perahu Pokmaswas
14.	Tosagena	Desa Limporilau Kec. Belawa	-

6. Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Wajo

- a. Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b. Waktu pelaksanaan : 07 - 09 Maret 2022
- c. Hasil yang dicapai :

✓ Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Wajo dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Wajo.

- ✓ Peserta pembinaan Pokmaswas berjumlah 20 orang terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas Tosagena dan Pokmaswas Kompas, Penyuluh Perikanan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Staf Dinas Perikanan Kabupaten Wajo.
- ✓ Pokmaswas Tosagena terbentuk pada tahun 2019 dengan jumlah anggota 11 orang dan Pokmaswas Kompas terbentuk pada tahun 2021 dengan jumlah anggota 21 orang. Kedua Pokmaswas tersebut merupakan calon penerima bantuan perahu Pokmaswas tahun anggaran 2023 melalui APBD/DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
- ✓ Ketua Pokmaswas Kompas menyampaikan bahwa wilayah perairan laut yang selama ini mereka awasi sering didapati penggunaan bom yang dilakukan oleh nelayan yang berasal dari Kabupaten Bone dan Kabupaten Luwu. Pengawasan SDKP dengan melibatkan Polairud Pos Siwa dan memberikan sosialisasi kepada nelayan setempat untuk tidak menggunakan alat tangkap yang merusak dan melaporkan kasus pelanggaran yang didapati. Guna memudahkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, Pokmaswas Kompas membangun Pos Pengawas yang berasal dari swadaya pengurus dan anggota kelompok yang mana Pos Pengawas ini dijadikan basecamp kelompok.
- ✓ Pokmaswas Tosagena juga menyampaikan bahwa wilayah pengawasan mereka adalah perairan Danau Tempe – Sungai Sidenreng yang mana wilayah tersebut sedang marak penggunaan tuba/racun dalam menangkap ikan. Selain itu, ada juga penggunaan jaring berbahan logam yang ditancap di Danau Tempe sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan residu logam berbahaya di perairan Danau Tempe. Khusus penggunaan tuba/racun di Sungai Sidendreng oleh nelayan dari Kabupaten Sidrap telah beberapa kali diadakan pertemuan antara pelaku dan aparat desa setempat, namun tidak menghentikan aktivitas penggunaan tuba/racun dalam penangkapan ikan. Selain itu, ada juga penggunaan alat tangkap terlarang, yaitu perangkap dasar dan setrum.
- ✓ Kedua Pokmaswas telah melaksanakan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk tidak menggunakan alat tangkap yang merusak atau terlarang.
- ✓ Materi pembinaan berupa memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi selaku anggota Pokmaswas, mekanisme pelaporan serta kegiatan-kegiatan pengawasan yang perlu diawasi oleh Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai kewenangan Undang-Undang 45 tahun 2014 tentang Perikanan



dimana dijelaskan pada pasal 67 bahwa masyarakat ikut membantu melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

7. Pembinaan Pokmaswas di Kab. Takalar

- a. Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b. Waktu pelaksanaan : 15 – 16 Maret 2022
- c. Hasil yang dicapai :
  - ✓ Pelaksanaan pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Takalar dilaksanakan dengan mengunjungi 2 (dua) Pokmaswas, yaitu Pokmaswas Tubarania dan Pokmaswas Tumulilia.
  - ✓ Pembinaan Pokmaswas Tubarania Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang dihadiri oleh Ketua Pokmaswas, Syamsu Alam dan 10 anggota kelompok. Pokmaswas ini masih aktif di wilayahnya dan melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Mamminasata.
  - ✓ Pembinaan Pokmaswas Tumulilia dihadiri ketua Pokmaswas Abdur Rahman dan anggota kelompok. Pokmaswas ini masih aktif melakukan pengawasan di wilayahnya, namun sangat jarang berkoordinasi dengan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Mamminasata maupun Bidang PSDKP DKP Sulsel dikarenakan kendala sarana komunikasi.

8) Pembinaan Pokmaswas di Kab. Bantaeng

- a) Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b) Waktu pelaksanaan : 21 – 22 Maret 2022
- c) Hasil yang dicapai :
  - ✓ Pokmaswas aktif yang berada di Kabupaten Bantaeng berjumlah 12 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 131 orang. Pada kesempatan Pembinaan Pokmaswas ini difokuskan pada Pokmaswas yang telah mendapatkan bantuan perlengkapan Pokmaswas yang mana Pokmaswas tersebut merupakan Pokmaswas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan Nomor 523/215/POKMASWAS/PGS/V/DKP tanggal 08 Mei 2019.
  - ✓ Pokmaswas yang dimaksud adalah Pokmaswas Marina Indah Desa Borong Loe Kecamatan Pajukukang. Pembinaan Pokmaswas dilaksanakan di sekretariat Pokmaswas/rumah ketua kelompok. Pokmaswas ini telah mendapatkan bantuan pada tahun 2017 dan 2021 berupa perlengkapan Pokmaswas dan HP Android. Berdasarkan

hasil diskusi dengan kelompok, diketahui bahwa HP Android sampai saat ini masih digunakan oleh Ketua Pokmaswas, H. Nurung, sedangkan perlengkapan Pokmaswas yang diperoleh pada tahun 2017 berupa teropong, senter, kamera dan HT telah rusak dan tidak digunakan lagi. Untuk tahun 2021 bantuan perlengkapan Pokmaswas berupa kamera digital, teropong, senter dan GPS belum pernah digunakan karena pengurus/anggota tidak mengetahui cara pemakaiannya sehingga pada kesempatan ini kami memberikan latihan kepada pengurus/anggota cara pemakaian perlengkapan tersebut. Diharapkan setelah ini, perlengkapan tersebut dapat digunakan kelompok untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya.

- ✓ Pokmaswas Marina Indah menyampaikan bahwa sejak tahun 2020 di wilayah laut Kabupaten Bantaeng tidak lagi terdapat aktivitas illegal fishing dan destruktif fishing, dan saat ini usaha budidaya rumput laut dan penangkapan lobster semakin meningkat. Untuk penangkapan lobster nelayan menggunakan jaring udang yang dirakit sendiri. Pengurus/anggota kelompok Sebagian besar merupakan pembudidaya rumput laut dan penangkap lobster.
- ✓ Berdasarkan diskusi dengan pengurus/anggota Pokmaswas Marina Indah didapati bahwa kelompok tersebut belum memiliki manajemen administrasi yang baik yang mana agenda surat menyurat, buku tamu dan arsip dokumen masih disatukan dengan KUB yang kebetulan pengurus/anggota merupakan anggota Pokmaswas tersebut. Selain itu, Pokmaswas ini sangat jarang melaporkan kegiatan yang mereka lakukan, khususnya yang terkait dengan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan baik laporan melalui WAG Forum Pokmaswas Sulsel maupun ke pejabat Pembina di CDK Wilayah Selatan.
- ✓ Sebagai Pokmaswas yang telah lama dikukuhkan, pengurus/anggota kelompok telah cukup memahami fungsi dan tugas Pokmaswas, namun kami tetap memberikan materi pembinaan yang dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

g) Pembinaan Pokmaswas di Kab. Barru

- a) Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b) Waktu pelaksanaan : 29 – 30 Maret 2022
- c) Hasil yang dicapai :

- ✓ Pokmaswas aktif yang berada di Kabupaten Barru berjumlah kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 119 orang. Pada kesempatan Pembinaan Pokmaswas ini dilakukan terhadap Pokmaswas Nirwana Bahari Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi dan Pokmaswas Bunga Nelayan Kelurahan Palanro Kecamatan Palanro.
- ✓ Pokmaswas Bunga Nelayan menyampaikan bahwa sampai saat ini mereka masih aktif melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya karena sampai saat ini masih sering terjadi aktivitas penggunaan trawl mini dan bagan rambo yang masuk ke wilayah perairan di bawah 4 mil sehingga menimbulkan konflik antar nelayan. Dalam melaksanakan tugas, kelompok ini belum ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti teropong infrared, kamera digital, GPS, HP android dan perahu pengawasan. Biaya operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditalangi bersama antara pengurus dan anggota Pokmaswas Bunga Nelayan.
- ✓ Sampai saat ini Pokmaswas Bunga Nelayan telah menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berupa HP android pada tahun 2018 yang mana HP tersebut telah rusak dan masih disimpan oleh ketua kelompok. Pada kesempatan ini, pengurus kelompok berharap dapat difasilitasi bantuan sarana dan prasana guna menunjang pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya.
- ✓ Pokmaswas Nirwana Bahari telah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana berupa perlengkapan Pokmaswas, HP android dan perahu Pokmaswas di tahun 2018. Saat ini Perahu Pokmaswas sedang rusak dan tidak lagi digunakan sejak tahun 2020, sedangkan perlengkapan Pokmaswas masih dalam kondisi baik dan masih digunakan oleh kelompok.
- ✓ Pokmaswas Nirwana Bahari dan Pokmaswas Bunga Nelayan merupakan Pokmaswas yang aktif terlibat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyelesaian konflik nelayan yang dilaksanakan oleh CDK Ajatappareng.
- ✓ Berdasarkan diskusi dengan pengurus/anggota Pokmaswas Nirwana Bahari dan Bunga Nelayan didapati bahwa kelompok tersebut belum memiliki manajemen administrasi yang baik yang mana agenda surat menyurat, buku tamu dan arsip dokumen. Pokmaswas ini aktif melaporkan kegiatan yang mereka lakukan, khususnya yang terkait dengan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui WAG Forum Pokmaswas Sulsel dan pejabat Pembina di CDK Wilayah Ajatappareng.

10) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Maros

a) Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP

b) Waktu pelaksanaan : 24 - 25 Mei 2022

c) Hasil yang dicapai :

- ✓ Pokmaswas aktif yang berada di Kabupaten Maros berjumlah 8 (delapan) kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 118 orang. Pada kesempatan Pembinaan Pokmaswas ini dilakukan terhadap Pokmaswas Rajawali Dusun Kalokko Desa Marannu Kecamatan Lau dan Pokmaswas Samudra Bahari Jaya Dusun Kuri Caddi Desa Nisombalia Kecamatan Marusu.
- ✓ Pokmaswas Rajawali merupakan pecahan dari Pokmaswas Sejahtera Kelurahan Soreang Kecamatan Lau yang mana Pokmaswas tersebut tidak lagi aktif. Pokmaswas Rajawali beranggotakan 13 orang yang mana semua anggota berprofesi sebagai nelayan tangkap. Pada kesempatan ini, pengurus Pokmaswas Rajawali melaporkan pelanggaran yang ada di wilayah, yaitu penguasaan lahan mangrove oleh oknum tertentu untuk memperluas lahan tambaknya yang mana dari pihak aparat desa setempat telah melakukan teguran kepada oknum tersebut tapi belum ada tindak lanjutnya. Sampai saat ini di wilayah perairan Desa Marannu dan sekitarnya masih marak penangkapan ikan menggunakan trawl mini yang mana dalam prakteknya trawl mini sering kali merusak bubu rajungan milik nelayan setempat dan telah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pemerintah setempat antara nelayan trawl dan nelayan bubu tapi tidak menghasilkan kesepakatan. Sehingga diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat melakukan pengawasan di wilayah Marannu dan sekitarnya guna meminimalisir penggunaan trawl. Saat ini pengurus/anggota Pokmaswas Rajawali berharap mendapatkan bantuan berupa perlengkapan Pokmaswas dan Perahu pengawas guna memudahkan Pokmaswas melaksanakan tugas pengawasan SDKP di wilayahnya.
- ✓ Terkait kelengkapan administrasi, Pokmaswas Rajawali telah memiliki sekretariat yang ditempatkan di rumah Ketua Pokmaswas, sedangkan buku laporan kejadian/kegiatan, buku agenda surat dan buku tamu belum dimiliki oleh Pokmaswas ini.
- ✓ Pokmaswas Samudra Bahari Jaya merupakan Pokmaswas yang baru terbentuk pada bulan Januari 2021 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan



Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 523/152/POKMASWAS/PGS/XI/DKP tanggal 25 November 2021.

- ✓ Pokmaswas Samudra Bahari Jaya beranggotakan 13 orang dan secara aktif melakukan pengawasan SDKP di wilayahnya. Dari laporan pengurus/anggota Pokmaswas dan Penyuluh Perikanan didapatkan bahwa perairan Kuri Caddi marak terjadi penangkapan ikan menggunakan trawl mini yang mana pelakunya ditenggarai berasal dari Bontoa Maros. Upaya menghalau nelayan trawl telah berulang kali dilakukan oleh Pokmaswas Samudra Bahari Jaya, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Menurut anggota Pokmaswas bahwa kerugian nelayan bubu yang disebabkan oleh trawl mencapai jutaan rupiah karena pada saat trawl beroperasi bubu juga ikut terangkut dan rusak atau tidak dapat digunakan lagi.
- ✓ Tahun 2022 Pokmaswas Samudra Bahari Jaya telah mengajukan proposal bantuan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang berisi permintaan bantuan perahu pengawas.
- ✓ Meskipun Pokmaswas Samudra Bahari Jaya merupakan kelompok yang baru terbentuk, namun pengurus/anggota Pokmaswas telah memahami tugas dan fungsi Pokmaswas, hal ini dikarenakan kelompok ini mendapatkan pembinaan dari Penyuluh Perikanan (Bapak Asmuri) yang secara rutin melakukan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan. Dari segi kelengkapan administrasi, kelompok ini telah memiliki sekretariat di rumah Ketua, buku agenda, buku tamu, buku kegiatan dan buku laporan kejadian.

11) Pembinaan Pokmaswas di Kab. Bantaeng

- a) Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b) Waktu pelaksanaan : 28 – 30 Juli 2022
- c) Hasil yang dicapai :

- ✓ Kabupaten Bantaeng memiliki 12 Pokmaswas aktif dengan jumlah anggota 131 orang.
- ✓ Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Bantaeng dilakukan terhadap Pokmaswas Pantai Batunu Desa Bontojai Kecamatan Bisapu yang diketuai Bapak Subhan Yusuf dengan jumlah anggota 10 orang.
- ✓ Dalam melaksanakan tugas pengawasan SDKP Pokmaswas Pantai Batunu mendapatkan pengarahan dan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bantaeng.

- ✓ Sampai saat ini Pokmaswas Pantai Batunu belum pernah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari Dinas Perikanan Kabupaten Bantaeng.
- ✓ Guna meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota Pokmaswas dalam melaksanakan tugas pengawasan SDKP dibutuhkan pembinaan peningkatan kapasitas Pokmaswas, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan SDKP.

12) Pembinaan Pokmaswas di Kab Bulukumba

a) Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP

b) Waktu pelaksanaan : 27 – 28 Juli 2022

c) Hasil yang dicapai :

- ✓ Kabupaten Bulukumba memiliki 6 (enam) Pokmaswas yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bontobahari. Adapun Pokmaswas tersebut, yakni :

- Pokmaswas Ujung Baru Desa Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari
- Pokmaswas Cakalang Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontobahari
- Pokmaswas Batu Mesu Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari
- Pokmaswas Lumba-Lumba Putih Desa Tana Jaya Kecamatan Kajang
- Pokmaswas Lombok Desa Pantama Kecamatan Kajang
- Pokmaswas Katinroang Jangang-Jangang Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang.

- ✓ Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah Selatan dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba didapatkan informasi bahwa saat ini yang menjadi perhatian mereka adalah aktivitas wisata bahari di Pulau Liukang yang sifatnya mengeksploitasi penyu/tukik, aparat setempat telah beberapa kali memberikan arahan agar tidak lagi mengeksploitasi tukik dan disarankan untuk melakukan penangkaran tukik, serta mengurus perijinannya di instansi terkait. Pada kesempatan ini juga diharapkan adanya penganggaran di tahun depan untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat di Pulau Liukang dan membentuk Pokmaswas di wilayah tersebut sebagai salah satu upaya pelestarian tukik yang semakin terancam populasinya akibat penangkapan liar yang dilakukan masyarakat.

- ✓ Pada kesempatan kali ini, disampaikan oleh Kepala Seksi Pengawasan SDKP CDK Wilayah Selatan bahwa Pokmaswas Lombok Desa Pantama Kecamatan Kajang sudah tidak aktif membantu melakukan pengawasan SDKP dalam kurun waktu  $\pm$  3 tahun. Dengan difasilitasi oleh CDK Wilayah Selatan, kami melakukan kunjungan ke kelompok perikanan ‘Jutsuka’ yang diketuai oleh Rizki Awalfindy yang mengusulkan untuk membentuk Pokmaswas di Desa Ballengiang Kecamatan Ujung Loe, hal ini didasari oleh pemantauan SDKP yang dilakukan oleh kelompok tersebut yang mana didapati bahwa di wilayah tersebut masih terdapat aktivitas destruktif fishing yang dikhawatirkan setiap saat dapat mengancam kelangsungan keberadaan sumber daya ikan di wilayahnya. Sebagai informasi tambahan bahwa kelompok perikanan “Jutsuka” bergerak di jenis usaha pengolahan ikan kering, bakso ikan dan frozen fish dengan wilayah pemasaran di Pulau Jawa dan Jepang.
- ✓ Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Bulukumba juga dilakukan terhadap Pokmaswas Lumba-Lumba Putih Desa Tana Jaya Kecamatan Kajang yang diketuai H. Muh. Judar dengan jumlah anggota 12 orang. Pada saat diskusi, ketua Pokmaswas menyampaikan bahwa pada tahun 2017 dan 2021 mereka telah menerima bantuan sarana prasarana perahu dan perlengkapan Pokmaswas berupa GPS, rompi, teropong, kamera, senter dan HT. Selain itu, beberapa permasalahan juga disampaikan bahwa untuk pengurusan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) nelayan di Kajang harus ke Kantor PTSP Sulsel di Kabupaten Sinjai dikarenakan pengurusan di Kabupaten Bulukumba memerlukan waktu yang lama dibandingkan di Kabupaten Sinjai. Kemudian nelayan merasa keberatan atas persyaratan dokumen yang wajib dilampirkan dalam pengurusan BPKP, yakni keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemilik kapal dan ABK. Melalui kesempatan ini, Ketua Pokmaswas berharap kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan kembali dan nelayan dapat difasilitasi asuransi nelayan sebagai pengganti BPJS Ketenagakerjaan.
- ✓ Permasalahan lain yang disampaikan bahwa nelayan di Desa Tana Jaya masih membutuhkan pembinaan dari penyuluh perikanan yang bertugas di Kecamatan Kajang, terutama terkait pengurusan perijinan usaha perikanan dan fasilitasi akses bantuan permodalan baik berupa dana maupun sarana dan prasarana usaha perikanan yang berasal dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.

- ✓ CDK Wilayah Selatan secara rutin bersama-sama dengan penyuluh perikanan telah berupaya melakukan pembinaan ke kelompok perikanan dan Pokmaswas yang ada di Kabupaten Bulukumba, serta memberikan pengarahan apabila kelompok menemui kendala/permasalahan di lapangan.

13) Pembinaan Pokmaswas di Kab. Sinjai

- a. Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b. Waktu pelaksanaan : 27 – 28 Juli 2022
- c. Hasil yang dicapai :
  - ✓ Kabupaten Sinjai memiliki 8 (delapan) Pokmaswas aktif dengan jumlah anggota 117 orang.
  - ✓ Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Sinjai dilakukan terhadap Pokmaswas Mabbulo Sipeppa Desa Pasir Marannu Kecamatan Sinjai Timur yang diketuai Bapak Rustan, S.Pi dengan jumlah 14 orang, dan Pokmaswas Tunreng Tellue Desa Tongke Tongke Kecamatan Sinjai Timur dengan jumlah anggota 16 orang.
  - ✓ Anggota Pokmaswas Mabbulo Sipeppa menyampaikan bahwa dalam mendukung dan menjaga kelestarian ekosistem laut dan sekitarnya, serta mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan SDKP sangat mengharapkan bantuan operasional berupa sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan pengawasan di perairan Sinjai Timur dan sekitarnya. Selain itu, jumlah anggota Pokmaswas yang semula 14 orang berkurang menjadi 8 orang dikarenakan ada yang meninggal dan pindah domisili.
  - ✓ Pada saat kunjungan ke Pokmaswas Tunreng Tellue diperoleh informasi bahwa Pokmaswas ini sudah tidak aktif lagi dikarenakan Ketua Pokmaswas Bapak Amar Ma'ruf sudah meninggal, serta anggota Pokmaswas yang semula 16 orang berkurang tersisa 4 orang.

14) Pembinaan Pokmaswas di Kab. Soppeng

- a. Pelaksana kegiatan : Bidang Pengawasan SDKP
- b. Waktu pelaksanaan : 26 – 28 September 2022
- c. Hasil yang dicapai :
  - ✓ Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Soppeng dilakukan terhadap Pokmaswas Salomate Desa Attang Salo Limpomajang Kecamatan Marioriawa.
  - ✓ Pokmaswas Salomate diketuai oleh Bapak Mude dengan jumlah anggota 5 (lima) orang secara aktif melakukan pengawasan di perairan umum daratan.



- ✓ Pada tahun 2021 Pokmaswas Salomate telah menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bosowasi berupa perlengkapan Pokmaswas, yaitu : rompi, pelampung, teropong, senter dan HT.
  - ✓ Materi pembinaan berupa memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi selalu anggota Pokmaswas, mekanisme pelaporan, serta kegiatan-kegiatan pengawasan yang perlu diawasi oleh Pokmaswas dalam membantu pengawasan SDKP sesuai kewenangan Undang-Undang 31 Tahun 2009 tentang perikanan.
  - ✓ Permasalahan dan kendala Pokmaswas Salomate dalam melaksanakan pengawasan di perairan umum daratan, yaitu :
    - Terbatasnya kemampuan Pokmaswas mengusir/menghentikan tindakan pelaku pelanggaran.
    - Terbatasnya kemampuan Pokmaswas melakukan pencatatan dan pelaporan kejadian pelanggaran kepada aparat terkait ataupun pejabat Pembina Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bosowasi.
    - Minimnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya ikan di perairan umum daratan
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- a. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP adalah :
- Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
  - Nilai SAKIP DJPSDKP
  - Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Pelaksana, Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- Pelaksana: Pengelola kegiatan
  - Waktu : Januari s/d Desember 2022
  - Tempat : Sulawesi Selatan

c. Hasil Kegiatan

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP telah dilaksanakan selama tahun 2022 berupa :

- 1) Pengelolaan arsip dan persuratan
  - Terlaksananya operasional program dan kegiatan
  - Terlaksananya rapat
  - Tersedianya ATK dan bahan komputer
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran
  - Terlaksananya penggandaan RPD, TOR, RAB dan RKA/KL
  - Perdin Rakernis
  - Perdin Finalisasi
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan
  - Tersusunnya laporan bulanan, triwulan dan tahunan
  - Perdin money sem 1 tahun 2021
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan
  - Terlaksananya operasional program/kegiatan
  - Tersusunnya laporan keuangan
  - Perdin ke KPPNL
  - Perdin Rekon sem II tahun 2021
  - Perdin Rekon sem I tahun 2022

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS PENGUKURAN CAPAIAN TAHUN 2022**

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, yaitu :

- Mengoptimalkan pembinaan POKMASWAS di wilayah kab/kota terutama pada daerah rawan pelanggaran
- Menyediakan sarana dan prasarana Pokmaswas yang berada di wilayah rawan pelanggaran, serta melakukan pembinaan secara rutin baik melalui kunjungan/tatap muka langsung ataupun melalui WAG Forum Pokmaswas Sulsel.
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempertahankan sinergitas dengan Cabang Dinas Kelautan

#### 4.3.5. CDK BOSOWASI

Cabang Dinas Kelautan Bosowasi yang berkedudukan di kabupaten Bone pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Bosowasi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
2. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
3. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, dan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Bosowasi, DKP Sulawesi Selatan Tahun 2022 salah satunya adalah kegiatan Pengawasan SDKP di Wilayah Laut Flores . Kegiatan tersebut memprioritaskan penanganan pengendalian *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Yaitu kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan atau pelaku usaha dengan cara merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida/pembiusan dan penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* (pukat harimau) serta eksploitasi habitat laut yang dilindungi. *Destructive fishing* merupakan malpraktek dalam kegiatan penangkapan ikan yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

Selain kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, Cabang Dinas Kelautan Bosowasi mempunyai tugas dalam hal penataan dan pengelolaan kawasan perairan di Bosowasi. Salah satu contohnya adalah menata dan mengelola daerah konservasi. Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetic termasuk mendorong penguatan fungsi otoritas pengelola konservasi sumberdaya ikan. Pada tahun 2022 luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 21,55 Ha atau hanya 60 % dari target 67,30 %.

Dalam melaksanakan tupoksinya, CDK Bosowasi melakukan beberapa program/kegiatan antara lain :

➤ **Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**

a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil

No	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi output Kegiatan
1	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas) sebanyak 88,73 %	88,71 %
	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.	Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan sebanyak 20 unit kapal perikanan	61 unit kapal perikanan
	Uraian : Patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, CDK Bosowasi	5 kali	5 kali

Alokasi anggaran belanja kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (Spesifikasi pertamax dan oli pelumas) dengan Kode Nomor Rekening (5.1.02.01.01.0004) dengan alokasi senilai Rp. 67.124.700. Secara keseluruhan jumlah realisasi keuangan pada belanja bahan bakar minyak dan pelumas sebesar 94,03%. Nilai nominal realisasi keuangan belanja bahan bakar minyak dan pelumas adalah Rp. 63.119.150,- (*Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*). Uraian tersebut sebagai berikut :
  - Bahan bakar minyak (pertamax) senilai Rp. 62.004.700,-. Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 92,35%. Nilai nominal realisasi keuangan adalah Rp. 61.992.450,- (*Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - Belanja Pelumas (Spesifikasi bahan bakar) sebanyak 64 liter senilai Rp. 5.120.000,- Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 22,01%. Nilai nominal realisasi keuangan adalah Rp. 1.126.700,- (*Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
2. Belanja perjalanan dinas biasa dalam rangka pelaksanaan patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, CDK Bosowasi dengan Kode Nomor Rekening (5.1.02.04.01.0001), telah dilaksanakan sebanyak 5 kali di perairan Bone, Wajo dan Sinjai. Alokasi anggaran senilai



Rp.28.380.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*). Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,58%. Nilai nominal realisasi keuangan adalah Rp. 28.260.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*). Hasil pelaksanaan Patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, CDK Bosowasi (output) sebagai berikut :

Kegiatan Patroli Pengawasan SDKP, CDK Bosowasi dalam tahun anggaran 2022 dilaksanakan sebanyak 5 kali guna mendukung terwujudnya Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan tangkap Sampai dengan 12 Mill, dengan uraian hasil pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Cdk Bosowasi di wilayah perairan pedalaman Kecamatan Tanete Riattang Timur, Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra, Salomekko Kab Bone Tanggal 28-29 Maret 2022. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 6 unit. Terdapat 5 unit kapal perikanan taat aturan (antara lain memiliki dokumen perizinan yang lengkap sah dan masih berlaku) dan 1 unit kapal perikanan lainnya tidak membawa SIPI/BPKP yang asli diatas kapal sehingga diberikan teguran dan diperintahkan untuk melengkapi dokumen. Berdasarkan hitungan aplikasi google map, Luas wilayah patroli pengawasan mencapai sebesar 1.546,21 Km<sup>2</sup>, dengan jarak tempuh lintasan patroli pengawasan sejauh 202.79 Nautical Mile atau 375,56 Km, dengan Kecepatan Rata Rata Speedboat Kapal Pengawas Perikanan yaitu 16.49 Knot atau 30,54 Km/Jam.



- b) Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Cdk Bosowasi di wilayah perairan pedalaman Tenete Riattang Timur, Barebbo, Sibulue, Awangpone, Tellussiattinge, Cenrana Kabupaten Bone Tanggal 23-24 Mei 2022. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 9 unit. Terdapat 8 unit kapal perikanan taat aturan (antara lain memiliki dokumen perizinan yang lengkap sah dan masih berlaku) dan 1 unit kapal perikanan lainnya menggunakan alat tangkap yang dilarang sehingga diberikan peringatan, diperintahkan membuat pernyataan, mengganti alkap ramah lingkungan dan diberikan ancaman pidana bila mengulangi perbuatan

tersebut. Berdasarkan hitungan aplikasi google map Luas wilayah patroli pengawasan mencapai sebesar 975,11 Km<sup>2</sup>.



- c. Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Cdk Bosowasi di wilayah perairan pedalaman kecamatan tanete riattang timur, barebbo, sibulue dan perairan pulau sembilan kab. Sinjai tanggal 15-17 Agustus 2022. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 13 kapal. Terdapat 11 unit kapal perikanan taat aturan (antara lain memiliki dokumen perizinan yang lengkap sah dan masih berlaku) dan 2 unit kapal perikanan lainnya menggunakan alat tangkap trawls sehingga diberikan peringatan dan diperintahkan mengganti alat tangkap yang digunakan. Berdasarkan hitungan aplikasi google map total luas wilayah patroli pengawasan mencapai  $197,46 + 112,53 + 221,99 = 531,98 \text{ km}^2$ , dengan jarak tempuh operasional pengawasan sejauh  $135,59 + 127,98 + 134,6 = 398,17 \text{ km}$



- d. Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Cdk Bosowasi di wilayah perairan pedalaman kecamatan tanete riattang timur, awangpone, tellu siattinge, cernana kab. Bone, perairan kec. Bola, takkalalla, penrang dan kecamatan sajoanging kab. Wajo tanggal 10-12 oktober 2022. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 10 unit. Terdapat 9 unit kapal perikanan taat aturan (antara lain memiliki dokumen perizinan yang lengkap sah dan masih berlaku), dan 1 unit kapal perikanan lainnya menggunakan alat tangkap trawls sehingga diberikan peringatan dan diperintahkan mengganti alat tangkap yang digunakan. Berdasarkan hitungan aplikasi google map Luas wilayah patroli pengawasan mencapai sebesar 1.910 km<sup>2</sup> dengan total jarak tempuh patroli pengawasan selama tiga hari sejauh 444,96 km.



- e. Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, CDK Bosowasi di wilayah perairan pedalaman Kecamatan Tanete Riattang Timur, Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra, Salomekko, Kajuara Kab Bone Dan Perairan Kecamatan Pulau Sembilan, Sinjai Utara, Sinjai Timur, Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Tanggal 2 - 4 November 2022. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 13 unit. Terdapat 9 unit kapal perikanan taat aturan (antara lain memiliki dokumen perizinan yang lengkap sah dan masih berlaku), dan 2 unit kapal perikanan lainnya yang masih menggunakan alat tangkap trawls sehingga diberikan peringatan dan diperintahkan mengganti alat tangkap yang digunakan. Berdasarkan hitungan aplikasi google map Luas wilayah patroli pengawasan mencapai sebesar 2.694,56 Km<sup>2</sup>, dengan Total jarak tempuh patroli pengawasan selama tiga hari sejauh 516,55 km.



➤ **Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi**

- a. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

➤ **Rehabilitasi Mangrove Kecamatan Tanete riattang Timur Kabupaten Bone**

Kegiatan rehabilitasi mangrove Kelurahan Pallette Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yaitu kegiatan bibit mangrove sebanyak 38.000 batang dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp. 190.000.000 Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Novi Anggaraeni Putri dengan nilai SPK sebesar Rp. 189.885.000,- Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 189.885.000,- (99,94 %).



- Rehabilitasi Mangrove Di Desa Pasir Putih Kec. Bola dan Desa Pantai Timur Kec Takalla Kab Wajo
  - ✓ Kegiatan rehabilitasi mangrove Di Desa Pasir Putih Kec. Bola dan Desa Pantai Timur Kec Takalla Kab Wajo yaitu kegiatan bibit mangrove (3 daun) sebanyak 38.000 batang dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.190.000.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Bumi Karya Manipi dengan nilai SPK sebesar Rp. 189.720.000,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 189.720.000,- (99,85 %)



- Penanaman Mangrove di Kelurahan Pancaitana Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone
  - ✓ Kegiatan penanaman mangrove di Kelurahan Pancaitana Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu kegiatan bibit mangrove 38.000 batang dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.190.000.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Cahaya Kairo dengan nilai SPK sebesar Rp.189.620.000,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 189.620.000,- (99,80 %).



- Penanaman Mangrove di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo



- ✓ Kegiatan penanaman mangrove di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo yaitu kegiatan bibit mangrove 40.000 batang dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.200.000.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Soppaindo Sinergi Engineering dengan nilai SPK sebesar Rp.195.955.000,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.955.000,- (97.98 %).



- Penanaman Mangrove di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone
  - ✓ Kegiatan penanaman mangrove di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yaitu kegiatan bibit mangrove 5.353 batang dengan bibit disediakan oleh pihak Cabang Dinas Kelautan Bosowasi dan BKAD dalam rangka Hari Jadi Sulsel yang ke 353 Tahun.



b. Pengadaan Rumah ikan/Apartemen ikan

- Pengadaan Apartemen ikan di Desa Bangsalae Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo  
Kegiatan Pengadaan Apartemen ikan di Desa Bangsalae Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yaitu sebanyak 27 Modul dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.200.000.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Bumi Karya Manipi dengan nilai SPK sebesar Rp.199.889.910,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.889.910,- (99.95 %).



- Pengadaan Apartemen ikan di Gusung Tangkulara Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone
- ✓ Kegiatan Pengadaan Apartemen ikan di Gusung Tangkulara Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yaitu sebanyak 23 Modul dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.200.000.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. CITRA CELEBES MANDIRI dengan nilai Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.700.000,- (99.85 %).



c. Pengadaan Tambat Kapal/Perahu

Kegiatan Pengadaan Tambat Perahu di Desa Barangmamase Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo yaitu sebanyak 1 Unit dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.214.200.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. CENRANA KARYA KONSULTAN dengan nilai Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan Rp. 213.485.000,- (99.67 %).



d. Bahan Cetak Bosowasi (Brosur) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan Brosur Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu sebanyak 2666 Eksemplar dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.79.980.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk

sebagai rekanan pengadaan adalah CV. CITRA CELEBES MANDIRI dengan nilai SPK sebesar Rp. 77.680.000,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.680.000,- (97.12 %).



#### TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS PENGUKURAN CAPAIAN TRIWULAN TAHUN 2022

##### ■ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Target Output Sub Kegiatan	Realisasi Output Sub Kegiatan
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis	3 jenis
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2 jenis
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2 jenis

Berdasarkan hasil pengukuran target yang telah direncanakan yang diikuti dengan capaian kinerja yang telah diperoleh pada setiap triwulan dalam kalender kegiatan Tahun Anggaran 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan Sub Bagian Tata Usaha, CDK Bosowasi pada setiap triwulan telah mengalami peningkatan nilai secara kuantitatif dengan capaian nilai kinerja secara signifikan. Namun demikian secara kualitatif, tingkat perencanaan capaian kinerja rata-rata mencapai 95,85 %.

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas pada tiap triwulan dalam tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1) Perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi provinsi dan instansi daerah
- 2) Perlu diadakan pelatihan dalam membangun skill para pegawai dalam hal pengadministrasian

##### ■ Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

Berdasarkan hasil pengukuran target yang telah direncanakan yang diikuti dengan capaian kinerja yang telah diperoleh pada setiap triwulan dalam kalender kegiatan Tahun Anggaran 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan patroli pengawasan SDKP, CDK Bosowasi pada setiap triwulan telah mengalami peningkatan nilai secara kuantitatif dengan capaian nilai kinerja secara signifikan. Namun demikian secara kualitatif, tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas) belum sepenuhnya mencapai 88,73% sebagai target prioritas. Capaian tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang diperoleh hingga hari ini, baru dapat mencapai

sebesar 88,71%. Artinya ada selisih capaian yang masih kurang sebanyak 0,02%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel . Capaian Target Output Kegiatan/Sub Kegiatan/Patroli Pengawasan SDKP CDK  
Bosowasi Tahung Anggaran 2022

No	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi output Kegiatan
1	Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas) sebanyak 88,73 %	88,71 %
2	Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.	Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan sebanyak 20 unit kapal perikanan	61 unit
3	Uraian : Patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, CDK Bosowasi	5 kali	5 kali

Oleh karena itu sebagai tindaklanjut rekomendasi atas hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas pada tiap triwulan dalam tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya dukungan organisasi secara prioritas untuk meningkatkan frekuensi/volume kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyadaran hukum secara konsisten dan berkelanjutan melalui kegiatan/sub kegiatan/ patroli pengawasan SDKP di wilayah Bosowasi.
- 2) Penguatan kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat di daerah melalui kunjungan pembinaan masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah kerja Bosowasi.
- 3) Perlu adanya penegakan hukum terhadap para pelaku destructive fishing untuk memberikan efek jera kepada mereka.

■ Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi

No	Kegiatan	Target Output Sub Kegiatan	Realisasi Output Sub Kegiatan
1	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	550.000 Batang	159.353 Batang
2	Rehabilitasi Ekosistem Laut (Rumah Ikan/Apartement)	2 Unit	2 Unit
3	Tambat Kapal / Perahu	1 Unit	1 Unit
4	Bahan Cetak Bosowasi (Brosur)	2666 Exemplar	2666 Exemplar

Berdasarkan hasil pengukuran target yang telah direncanakan yang diikuti dengan capaian kinerja yang telah diperoleh pada setiap triwulan dalam kalender kegiatan Tahun Anggaran 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan Seksi Pengelolaan Ruang laut CDK Bosowasi pada setiap triwulan telah mengalami peningkatan nilai secara kuantitatif dengan capaian nilai kinerja secara signifikan. . Namun demikian secara kualitatif, tingkat perencanaan capaian kinerja rata-rata mencapai 99,27 %.



Oleh karena itu sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas pada tiap triwulan dalam tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1) Perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi provinsi dan instansi daerah
- 2) Perlu adanya koordinasi antara pegawai pemerintah dengan kelompok masyarakat pecinta lingkungan agar kita sama-sama menjaga kelestarian Kawasan pesisir terutama mangrove
- 3) Perlu dilakukan kajian mengenai cara menjaga mangrove yang baru ditanam agar lebih banyak tumbuh dan tak tergerus dengan ombak
- 4) Perlu adanya Sanksi tegas terhadap para pelaku Penebang liar dan perusak lingkungan untuk memberikan efek jera kepada mereka

#### **4.3.6. CDK MAMMINASATA**

Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari dan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan, petani ikan dan pengolah ikan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan. Oleh karena itu perlu perhatian terhadap kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Kebijakan pengawasan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan secara teratur, sistematis dan komprehensif yang ditempuh dengan mengacu kepada Rencana Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 serta Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2018 - 2023 yang pelaksanaannya dilakukan selama 5 tahunan.

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018, tentang organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana salah satu Cabang Dinas Kelautan yang dibentuk adalah Cabang Dinas Kelautan MAMMINASATA yang berkedudukan di Kab. Gowa dengan wilayah pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar. Dengan ditetapkannya CDK Mamminasata sebagai organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal urusan pemerintah di bidang kelautan, maka pada tahun 2022 CDK MAMMINASATA dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.695.365.844 untuk mendukung beberapa program diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 313.572.588

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.124.603.630
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan teralokasikan anggaran sebesar Rp. 1.997.574.150

Adapun program yang dilaksanakan oleh CDK Mamminasata selama tahun 2022 antara lain :

➤ **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

■ **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil**

Kegiatan Patroli Pengawasan *IUU Fishing* Mamminasata merupakan salah satu kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Cabang Dinas Kelautan Mamminasata yang bertujuan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan khususnya bidang perikanan tangkap. Tujuan Patroli Pengawasan *IUU Fishing* ini adalah pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap dokumen yang wajib dimiliki oleh kapal-kapal penangkap ikan seperti: SIUP, SIPI/SIKPI, TDKP, SLO dan SPB.

Kegiatan Patroli Pengawasan *IUU Fishing* Mamminasata tahun anggaran 2022 dilaksanakan di perairan Makassar, Takalar dan Maros. Sampai bulan Desember Jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 78 kapal, dan 2 Kapal melakukan pelanggaran berupa dokumen SIPI yang habis masa berlakunya dan sedang dalam masa pengurusan.

Tahun Anggaran 2022 ini Sub Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil, berupa Patroli Pengawasan Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terdiri dari Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas dengan pagu anggaran sebesar Rp.120.551.750,- dengan realisasi keuangan Rp.117.431.759,- dan realisasi fisik 100%. Sedangkan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.51.600.000,- dengan pencapaian realisasi keuangan Rp.51.600.000 dan realisasi fisik 100%. telah dilaksanakan sebanyak 9 kali patroli, dengan rincian di perairan Makassar 4 kali, perairan Takalar 4 kali dan perairan Maros 1 kali.



■ Sosialisasi IUU Fishing di Kota Makassar

Kegiatan Sosialisasi *IUU Fishing* dilakukan dalam rangka rangkaian pembinaan terhadap nelayan di wilayah CDK Mamminasata untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai *illegal, Unreported and Unregulated Fishing yang (IUU Fishing)* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang.

- 1) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Sosialisasi *IUU Fishing* CDK Mamminasata dengan lokasi di Pulau Barrang Lompo dan Pulau Kodingareng Kota Makassar dengan pagu Rp. 1.472.600, sampai bulan Desember terlaksana dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
- 2) Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak, Sosialisasi *IUU Fishing* CDK Mamminasta dengan lokasi Pulau Barrang Lompo dan Pulau Kodingareng dengan pagu Rp.5.150.000, sampai bulan Desember terlaksana dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
- 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sosialisasi *IUU Fishing* dengan pagu Rp.6.000.000, sampai bulan Desember terlaksana dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
- 4) Belanja Pakaian Olahraga Sosialisasi *IUU Fishing* dengan pagu Rp.18.750.000, sampai bulan Desember terlaksana dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
- 5) Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dengan nilai pagu Rp. 14.000.000, sampai bulan Desember terlaksana dengan capaian realiasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
- 6) Belanja perjalanan dinas biasa sosialisasi *IUU Fishing* Pulau Barrang Lompo dan Pulau Kodingareng dengan pagu Rp.55.076.000, dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.



#### ■ Pengadaan Perahu POKMASWAS

Pengadaan Perahu POKMASWAS dilakukan dalam rangka pengembangan dan pembinaan dan peningkatan kapasitas serta kelembagaan POKMASWAS di wilayah Mamminasata, yang merupakan salah satu upaya pelibatan masyarakat nelayan dalam menjaga serta mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan *IUU Fishing*.

- a) Pengadaan Perahu Pokmaswas 1 Unit untuk Kelompok Pokmaswas Bahari Nusantara Pulau Lanjukang Kelurahan Barrang Caddi Kec. Sangkarrang Kota Makassar sebagai penerima manfaat, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 197.330.000,-



- b) Pengadaan Perahu Pokmaswas 1 Unit untuk Kelompok Pokmaswas Barrang Lompo, Kel. Barrang Lompo Kec, Sangkarrang di Kota Makassar sebagai penerima manfaat, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.744.500,-



- c) Pengadaan Perahu Pokmaswas 1 Unit untuk Kelompok Pokmaswas Hiu Kel.Lae-Lae Kec. Ujung Pandang Kota Makassar sebagai penerima manfaat, dengan Pagu Anggaran senilai Rp.200.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.680.000,-



- d) Pengadaan Perahu Pokmaswas 1 Unit untuk Kelompok Pokmaswas Kuda Laut Desa Ampekale Kec. Bontoa Kabupaten Maros sebagai penerima manfaat, dengan Pagu



Anggaran senilai Rp.200.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.783.250,-

- e) Pengadaan Perahu Pokmaswas 1 Unit untuk Kelompok Pokmaswas Rajawali Desa Marannu Kec.Lau Kabupaten Maros sebagai penerima manfaat, dengan Pagu Anggaran senilai Rp. 200.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.078.500,-



- f) Pengadaan Perahu Pokmaswas 1 Unit untuk Kelompok Pokmaswas Samudra Bahari Jaya Kuri Caddi Desa Nisombalia Kec. Marusu Kabupaten Maros sebagai penerima manfaat, dengan Pagu Anggaran senilai Rp.200.000.000, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.661.250,



- g) Pengadaan Perahu Pokmaswas 1 Unit untuk Kelompok Pokmaswas Bahari Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa kabupaten Maros sebagai penerima manfaat, dengan Pagu Anggaran senilai Rp.200.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.411.500,-



- h) Pengadaan Perahu Pokmaswas 1 Unit untuk Kelompok Pokmaswas Tubarani Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar sebagai penerima manfaat, dengan Pagu Anggaran senilai Rp. 200.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.199.600.000,-



i) Dokumen Perencanaan Perahu Pokmaswas

1. Perencanaan Perahu Pokmaswas Bahari Nusantara dengan Pagu Anggaran senilai Rp.8.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.992.000,-
2. Perencanaan Perahu Pokmaswas Barrang Lompo di Kota Makassar dengan Pagu Anggaran senilai Rp.8.000.000, - dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.936.500,-
3. Perencanaan Perahu Pokmaswas Hiu Kel. Lae-Lae Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dengan Pagu Anggaran senilai RP.8.000.000,- dan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.992.000,-
4. Perencanaan Perahu Pokmaswas Rajawali Desa Marannu Kec.Lau Kabupaten Maros dengan Pagu Anggaran senilai Rp.8.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.992.000,-
5. Perencanaan Perahu Pokmaswas Tubarani Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan Pagu Anggaran senilai Rp.8.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.992.000,-

j) Dokumen Pengawasan Perahu Pokmaswas

1. Pengawasan Perahu Pokmaswas Bahari Nusantara Pulau Barrang Lompo Kota Makassar dengan Pagu Anggaran senilai Rp. 6.200.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.079.250,-
2. Pengawasan Perahu Pokmaswas Kelompok Pokmaswas Barrang Lompo, Kel. Barrang Lompo, Kec. Sangkarrang di Kota Makassar dengan Pagu Anggaran senilai Rp.6.200.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.6.079.250,-
3. Pengawasan Perahu Pokmaswas Hiu Kel. Lae-Lae Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dengan Pagu Anggaran senilai Rp.6.200.000, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.079.250,-

4. Pengawasan Perahu Pokmaswas Kuda Laut Desa Ampekale Kec. Bontoa Kabupaten Maros dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.6.200.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.079.250,-
5. Pengawasan Perahu Pokmaswas Rajawali Desa Marannu Kec. Lau Kabupaten Maros dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.6.200.000, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.079.250,-
6. Pengawasan Perahu Pokmaswas Samudra Bahari Jaya Kuri Caddi Desa Nisombalia Kec. Marusu Kabupaten Maros dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.6.200.000 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.079.250,-
7. Pengawasan Perahu Pokmaswas Bahari Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa Kabupaten Maros dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.6.200.000, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.079.250,-
8. Pengawasan Perahu Pokmaswas Tubarani Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar senilai Rp. 6.200.000, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.079.250,-

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 2028". Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan.

Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan.

Luas wilayah pesisir dan laut Sulawesi Selatan kurang lebih 94.399,85 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai sebesar 1.993,66 km serta memiliki pulau-pulau kecil sekitar 313 pulau. Khusus untuk wilayah Mamminasata total jumlah pulau 21 yang terbagi 9 pulau di kabupaten Takalar

dan 12 pulau di Kota Makassar. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ekosistem yang cukup lengkap seperti ekosistem mangrove, dimana terdapat 19 spesies mangrove dengan luas sekitar 77.135 ha. Biomas hutan mangrove di wilayah Sulawesi diperkirakan berkisar 122 – 245 ton/ha.

UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki wilayah pesisir wajib untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang kemudian dilegalkan kedalam Peraturan Daerah (Perda). Penyusunan rencana Zonasi WP-3-K Provinsi merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk mengintegrasikan sektor yang berkepentingan di wilayah pesisir melalui pengalokasian ruang WP-3-K untuk aktivitas/sektor tertentu berdasarkan daya dukung dan kesesuaian peruntukannya.

Secara normatif, kekayaan sumberdaya pesisir dan pulau- pulau kecil dikuasai oleh negara. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki hak untuk mengelola kawasan perairan yurisdiksi hingga batas 12 mil dari garis pantai. Terkait dengan pemanfaatannya, diperlukan suatu acuan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, yang mengatur atau mengarahkan kegiatan pengelolaan sumberdaya dalam konteks keruangan (spasial) untuk menjaga keseimbangan antara aspek konservasi dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (*sustainable*).

- a. Kegiatan ini merupakan upaya pengembangan terhadap pemanfaatan SDKP secara langsung di laut di Wilayah Perairan Mamminasata untuk pengelolaan konservasi secara berkelanjutan.
- b. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menekan jumlah kerusakan pada wilayah pesisir.

#### I. Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman

Wilayah pesisir Sulawesi Selatan dihuni oleh 19 spesies mangrove dengan cakupan vegetasi cukup luas. Propinsi Sulawesi Selatan memiliki areal hutan mangrove yang terluas di Pulau Sulawesi. Selain itu, pada wilayah yang berbatasan dengan laut, hutan mangrove didominasi oleh *Avicennia* dan *Sonneratia*. Di bagian belakang zona tersebut ditemui *Bruguiera* dan *Rhizophora*. Sedang pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan daratan ditemukan pandan, Ficus, Nypa dan biota lain yang menjadi ciri peralihan antara wilayah laut dan daratan. Biomas hutan mangrove di wilayah Sulawesi diperkirakan berkisar 122 – 245 ton/ha, walaupun dengan laju pembukaan lahan tambak dan pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan



bakar dan lainnya dewasa ini diyakini tingkat penutupannya sudah jauh berkurang. Selain jenis-jenis ikan pemakan detritus, mangrove juga diketahui dihuni oleh kekerangan, udang, kepiting serta beberapa jenis burung dan fauna seperti tikus, babi dan kelelawar. Di wilayah mamminasata luas hutan mangrove untuk 3 daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Kabupaten	LuasMangrove	Kondisi(Ha)		
		Baik	Rusak	Rusak Berat
Makassar	232.8	58.8	131	43
Maros	740.5	292.5	-	448
Takalar	5,608.6	823.6	1316	3469

Hutan Mangrove wilayah Mamminasata dengan kondisi Baik untuk Kota Makassar seluas 58.8 Ha, Kab. Maros seluas 292.5 Ha, dan Kab. Takalar seluas 823.6 Ha. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata melakukan penanaman mangrove secara berkelanjutan dan terpadu bertujuan untuk menjamin keberadaan mangrove lestari yang dapat dinikmati oleh semua generasi dan mengintegrasikan perencanaan hulu dan hilir dan kepentingan seluruh stake holders. Pengelolaan ini bukan semata berorientasi ekologis, namun harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi karena menyangkut manusia yang hidup disekitarnya yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan sosial dan ekonomi tersebut.

1. Penanaman Mangrove 38.000 Batang di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kab.Maros dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.190.000.000,- sampai dengan bulan Desember realisasi Fisik 100% dan realisasi Keuangan (nilai kontrak) 99.69% atau sebesar Rp. 189.412.000,- dengan luasan penanaman 1,8 Ha.



2. Penanaman Mangrove 39.000 Batang di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan pagu anggaran sebesar Rp195.000.000,- yang telah di realisasikan pada bulan Desember realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan (nilai kontrak) sebesar 99.95% atau sebesar Rp. 194.900.000,- dengan Luasan Penanaman 1,8 Ha.



3. Penanaman Mangrove 38.000 Batang di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp190.000.000, yang telah direalisasikan pada bulan Desember realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan (nilai kontrak) 99.89% atau sebesar Rp 189.782.250.- dengan Luasan Penanaman 1,8 Ha.



4. Penanaman Mangrove 38.000 Batang di Kec. Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp190.000.000, sampai dengan bulan Desember realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan (nilai kontrak) 99.93% atau sebesar Rp. 189.867.000.-



5. Penanaman Mangrove 38.000 Batang di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp190.000.000, yang telah direalisasikan pada bulan Desember sebesar Rp 190.000.000, atau 100% dan reealisasi keuangan (nilai kontrak) 99.72% atau sebesar Rp. 189.471.450.- dengan Luasan Penanaman 1,8 Ha.



6. Penanaman Mangrove 38.000 Batang di Dusun Binanga Sangkara Desa Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros dengan Pagu Anggaran sebesar Rp190.000.000, yang telah direalisasikan pada bulan Desember sebesar Rp 190.000.000, atau 100% dan reealisasi keuangan (nilai kontrak) 99.45% atau sebesar Rp. 188.966.400.- dengan Luasan Penanaman 1,8 Ha.



7. Penanaman Mangrove 40.000 Batang di Dusun Borimasunggu Kec. Maros Baru Kab. Maros dengan Pagu Anggaran sebesar Rp200.000.000, yang telah direalisasikan pada bulan Desember sebesar Rp 200.000.000, atau 100% dan realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,45% atau sebesar Rp. 198.912.000,- dengan Luasan Penanaman 2 Ha.



## II. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

### Artificial Reef

- a) Artificial Reef 1 Paket di Pulau Satangnga Kab. Takalar dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.000.000,- Sampai dengan bulan Desember telah realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,59% atau sebesar Rp. 184.237.000,-



- b) Artificial Reef 1 Paket di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.000.000,- Sampai dengan bulan Desember telah realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan (nilai kontrak) 98,93% atau sebesar Rp. 183.012.915,-



- c) Artificial Reef 1 Paket di Pulau Kodingareng Keke Kota Makassar dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.000.000,- Sampai dengan bulan Desember telah realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,50% atau sebesar Rp. 184.085.000,-



- d) Artificial Reef 1 Paket di Pulau Lae-Lae Kota Makassar dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.000.000,- Sampai dengan bulan Desember telah realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,60% atau sebesar Rp. 184.268.880,-





- e) Artificial Reef 1 Paket di Pulau Sanrobengi Kabupaten Takalar dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.000.000,- sampai bulan Desember telah realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,74% atau sebesar Rp. 184.518.075



- f) Artificial Reef 1 Paket di Perairan Pulau Samalona Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.000.000,- sampai bulan Desember telah realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,78% atau sebesar Rp. 184.600.000.-



- g) Artificial Reef 1 Paket di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.000.000,- sampai bulan Desember telah realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,67% atau sebesar Rp. 184.400.000.-



- h) Artificial Reef 1 Paket di Pulau Lanjukung Kota Makassar dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.000.000,- sampai bulan Desember telah realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,62% atau sebesar Rp. 184.300.000.



### III. Belanja Bahan-Bahan Lainnya

Pantai Berseri CDK Mamminasata yang berlokasi di PPI Beba Kabupaten Takalar

- Kantong Plastik Sampah 600 Sheet Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.000.000 sampai dengan bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,90% (Rp. 20.979.000)



- Masker 60 Dos dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.8000.000 sampai dengan bulan Desember realisasi keuangan 99,81 (Rp. 7.785.540)
- Pakaian Pelatihan Kerja 600 pcs dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 90.000.000 sampai dengan bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,69% (Rp. 89.721.522)
- Sarung tangan 44 dos dengan Pagu Anggaran sebesar RP.8.800.000 sampai dengan bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 98,79% (Rp.8.693.520)



#### IV. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor –Bahan Cetak

Cetak Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Pantai Berseri CDK Mamminasata  
Cetak Spanduk 2 Lembar dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 600.000 sampai bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 98,79% (Rp. 592.740)

- a) Cetak Papan Informasi Pengelolaan Mangrove dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.800.000,- sampai bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,60% atau sebesar Rp. 49.800.000,-



- b) Cetak Leaflet Kawasan Konservasi Pesisir dan PPK dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.800.000,- sampai bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,89% atau sebesar Rp. 49.750.000,-



- c) Cetak Papan Informasi Pelestarian Lingkungan Pesisir dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- sampai bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,60% atau sebesar Rp. 49.800.000,-



V. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor

Pantai Berseri CDK Mamminasata, Sapu Lidi Pakai Gagang 600 Buah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.000.000 sampai bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,90% (Rp. 20.979.000)



VI. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

- Apartemen Ikan 1 Unit di Kep. Sangkarrang Kota Makassar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- sampai bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,50% (Rp.199.000.000)



- Apartemen Ikan 1 Paket di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- sampai bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,75% (Rp.199.500.000)



- Apartemen Ikan 1 Paket di Pulau Sanrobengi Kabupaten Takalar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- sampai bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,80% (Rp.199.600.000)



- Pekerjaan Tambatan Perahu di Pulau Samalona Kota Makassar ( Utang Tahun 2021) , dengan Pagu anggaran sebesar Rp.293.293.630,- sampai bulan Desember realisasi fisik dan keuangan (nilai kontrak) 76,32 % ( Rp. 223.841.698).



**VII. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**

Pada Kegiatan ini berupa Makan dan Minum Nasi Dos Pantai Berseri CDK Mamminasata sebanyak 600 Dos dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 28.800.000 sampai dengan bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,90% (Rp. 28.771.200)



**VIII. Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film dan Pemotretan**

Pada Kegiatan Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film dan Pemotretan Pantai Berseri CDK Mamminasata berupa Media Elektronik Belanja Publikasi pada Media Online 2 Kali dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000 sampai bulan Desember realisasi keuangan (nilai kontrak) 99,90% (Rp. 9.990.000).



**IX. Belanja Perjalanan Dinas Biasa**

Belanja Perjalanan Dinas Biasa CDK Mmminasata Identifikasi Lokasi, Monitoring Penanaman Mangrove dan Pembinaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.18.950.000 sampai bulan Desember realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100% (Rp. 18.950.000), pada Anggaran Perubahan sebesar Rp. 36.900.000,- sampai bulan Desember realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100% atau sebesar Rp. 36.900.000,- dan Perjalanan Dinas Biasa Pantai Berseri CDK Mamminasata dengn Pagu Anggaran sebesar Rp.12.000.000 sampai dengan bulan Desember realisasi fisik 98,58% dan realisasi keuangan 98,58% (Rp. 11.830.000).



**TINDAKLANJUT REKOMENDASI ATAS PENGUKURAN CAPAIAN TRIWULAN  
TAHUN 2022**

Dalam menindaklanjuti hasil rapat Monev triwulan tahun 2022 yang menekankan pada keseimbangan progress realisasi fisik dan realisasi keuangan, maka Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terlebih dahulu melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang membuat progress capaian realisasi fisik berada di angka 65,08%, adapun beberapa kendala/permasalahan tersebut yaitu:

- a. Pembangunan tambatan perahu di Desa Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya dokumen perencanaan kegiatan.
- b. Pembangunan tambatan perahu di Pulau Sanrobengi Kab Takalar tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya dokumen perencanaan kegiatan.
- c. Penanaman mangrove di Dusun Kalupenrang Desa Minasa Upa Kec. Bontoa Kab. Maros tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai kewenangan Cabang Dinas Kelautan Provinsi Sulsel.
- d. Pelaksanaan Pekerjaan Pos Pengawas (belanja Aset/Modal) tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya lahan asset milik provinsi sehingga kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan.
- e. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 8 Perahu Pokmasawas (Kontrak Tgl : 07 September 2022) sehingga pada bulan Oktober masih dalam tahap pelaksanaan Pekerjaan fisik,

Berdasarkan hasil identifikasi kendala/permasalahan tersebut, maka Cabang Dinas Kelautan Mamminasata melakukan tindak lanjut agar terjadi keseimbangan pada progress realisasi fisik dan realisasi keuangan, adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

- a. Melakukan pergeseran kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam Pagu anggaran ke anggaran perubahan.
- b. Mempercepat penyelesaian kontrak dan memulai pengerjaan realisasi fisik perahu.
- c. Intens melakukan pemantauan pada pengerjaan fisik perahu yang terindikasi mengalami keterlambatan pengerjaan, supaya pengerjaan tidak mengalami keterlambatan yang signifikan.
- d. Menyiapkan kelengkapan dokumen sejak awal agar realisasi keuangan kegiatan pengadaan perahu yang telah selesai dapat dibayarkan tepat waktu dan tidak bergeser ke tahun depan.



**PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN**

**1. PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Pelaksanaan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Mamminasata akan semakin baik dengan tambahan armada kapal pengawas bagi pokmaswas yang tersebar di beberapa lokasi. Namun sampai saat ini proses pengadaan kapal pengawas mulai dari tahapan perencanaan, pembangunan fisik kapal dan pengawasan belum berjalan. Proses Perencanaan Kapal pengawas, saat ini baru dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal inilah yang mempengaruhi sehingga pekerjaan fisik kapal pengawas dan dokumen pengawasannya belum dapat dilaksanakan.
- b. Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di wilayah Mamminasata belum dapat dilakukan pembinaan secara maksimal. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran biaya operasional untuk melakukan kunjungan pembinaan terhadap Kelompok Pengawas di wilayah pesisir atau pulau, khususnya di Kota Makassar, Takalar dan Maros.
- c. Masih rendahnya kemampuan SDM Pokmaswas dalam pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat, baik secara individual (keanggotaan) maupun secara berkelompok (kelembagaan).
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di daerah, serta minimnya ketaatan dan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan, termasuk surat pencatatan atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) di daerah.

**2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

- a. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terus menerus melakukan pembinaan, sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat nelayan di Wilayah Mamminasata guna menyamakan persepsi terhadap aturan penggunaan alat tangkap dan jalur penangkapan juga dalam upaya mendukung sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
- b. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata aktif melakukan koordinasi penegakan hukum dengan aparat Polairud Polda Sulsel guna koordinasi dan kerjasama dalam penegakkan aturan pemanfaatan alat tangkap dan pasal pidana tentang aktivitas pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan.

- c. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian sebagai mitra dan Pembina Pokmaswas agar dapat merepon dengan baik laporan kejadian yang disampaikan masyarakat.
- d. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Mamminasata terus berupaya melakukan pengawasan untuk meminimalisir tindak *andestructive fishing* di seluruh perairan pedalaman pesisir wilayah Mamminasata secara bertahap dengan menggunakan sarana Pokmaswas yang ada.
- e. Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas diprioritaskan terhadap Pokmaswas wilayah pesisir yang memiliki daerah rawan *destructive fishing*, dan/atau Pokmaswas yang memiliki partisipasi aktif melakukan pengawasan atau pelaporan kepada aparat pengawas perikanan.
- f. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terus menerus melakukan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat pengawas dan masyarakat pelaku usaha lainnya di setiap waktu dan tempat termasuk di sentra-sentra nelayan, pelabuhan/PPI/TPI, di laut dan diatas kapal perikanan agar selalu taat hukum khususnya untuk memiliki dokumen perizinan usaha/BPKP.
- g. Penanggung Jawab Kegiatan harus lebih proaktif dalam mengkawal proses pengadaan barang / jasa agar proses pengadilan kapal pengawas dapat terselesaikan dengan baik.

#### 4.3.7 CDK Ajatappareng

Cabang Dinas Kelautan dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 106 tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Cabang Dinas Kelautan ini dibentuk dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Di dalam pembentukannya untuk daerah Sulawesi Selatan dibentuk 5 Cabang Dinas Kelautan. Salah satu diantaranya adalah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Ajatappareng yang membawahi 5 (lima) kabupaten/Kota Yaitu : Kabupaten Barru, Kota Pare Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang dengan berkedudukan di Kota Pare Pare. Adapun Fungsi dan tugas Cabang Dinas Kelautan diatur dalam Pergub no. 5 Tahun 2018. Untuk mendukung pencapaian target maka setiap Cabang Dinas Kelautan diberikan tugas yang intinya sebagai pengelola dan pengawasan perairan.

Sejak berdirinya pada tahun 2018 hingga sekarang, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng Pembinaan telah berfungsi sebagai Cabang Dinas yang berwenang memberikan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan perairan di 5 (lima) kabupaten/kota sebagai wilayah kerjanya. Adapun

wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng adalah Kabupaten Barru, Kota Pare Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang.

Dukungan dana dari APBD (*kinerja*) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 melalui program (1) Program Pengawasan, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir Laut, (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Program Pengawasan, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir Laut

a. Patroli Wilayah Ajatappareng

Pelaksanaan kegiatan patroli CDK Ajatappareng adalah pengawasan sumberdaya kelautan perikanan untuk mengawal tertib pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang kelautan dan perikanan oleh semua pelaku usaha perikanan.

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan secara ilegal (*Illegal Fishing*) tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara cara yang merusak (*Destructive Fishing*). Kegiatan ini dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Untuk itu Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng yang membawahi lima kabupaten sebagai wilayah pembinaannya yaitu Kab. Barru, Kota Pare Pare, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap dan Kab. Enrekang untuk menjaga laut dan perairan umum dari *Destructive Fishing*.



b. Penanaman Mangrove 38.000 Batang

Keberadaan ekosistem mangrove terbilang cukup penting khususnya bagi kawasan pesisir, baik sebagai benteng pertahanan terhadap resiko bencana maupun sebagai mata pencaharian alternatif melalui pengembangan pariwisata.

Tanaman mangrove berfungsi utama sebagai pencegah abrasi dan erosi (pengikisan tanah) di kawasan pantai. Ekosistem mangrove juga menjadi tempat hidup biota laut dan satwa satwa di sekitar area.

Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove dilakukan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebanyak 38.000 Batang.



#### c. Transplantasi Karang Buatan (*Artificial Reef*)

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting yang ada di wilayah pesisir. Terumbu karang juga mempunyai nilai ekonomis yang penting, dimana masyarakat pesisir sering kali memanfaatkannya dalam bidang perikanan maupun wisata. Di beberapa lokasi pesisir, banyak terjadi kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bahan peledak dan obat bius ikan. Kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian manusia lebih sulit untuk pulih dibandingkan dengan kerusakan yang disebabkan oleh alam.

Ekosistem terumbu karang yang rusak akibat ulah manusia seperti pengeboman ikan dan obat bius ikan perlu direhabilitasi dengan metode yang berkembang. Salah satu cara untuk mengembalikan kelestarian terumbu karang dengan cara melakukan transplantasi karang (*Artificial Reef*) metode yang dapat digunakan adalah metode jaring laba laba “*Spider*”. Pada tahun 2022 CDK Ajatappareng melakukan kegiatan *Artificial Reef* di Pulau Pute Angin Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Sebanyak 200 Unit *Spider*



#### d. Pantai Berseri

Menyikapi salah satu kegiatan prioritas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Penguatan ekonomi melalui hilirisasi pengelolaan berbasis sumberdaya alam, Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng melakukan kegiatan “*Pantai berseri*” sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dengan cara melakukan bersih pantai di sekitar Anjungan Cempae dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare. Kegiatan ini mengambil tema “*Meminimalisir sampah plastik dan menciptakan pantai berseri menuju Indonesia pulih Indonesia bangkit*”.



Dipilihnya lokasi sekitar Anjungan dan PPI Cempae karena lokasi tersebut merupakan salah satu tempat di kota Parepare yang kesehariannya banyak dikunjungi oleh manusia yang akan berwisata di Anjungan Cempae dan berbelanja di PPI Cempae maka otomatis volume sampahnya juga banyak utamanya sampah plastic.



e. Rumah Ikan (Apartemen Ikan)

Apartemen ikan atau yang dikenal dengan nama “Rumah Ikan” adalah hasil rekayasa teknologi penangkapan ikan yang dirancang dengan menggunakan komponen partisi plastik jenis *Polyproylene* yang ramah lingkungan. Apartemen atau sebuah rumah, yang terdiri dari 3.000 partisi yang bermanfaat untuk melindungi telur dan larva serta anak ikan, sekaligus menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan sehingga memudahkan para nelayan untuk menangkap ikan pada radius 100-200 meter diluar areal rumah ikan, dan daya tahan rumah ikan akan diperkirakan bisa mencapai 30-50 tahun. Pada tahun 2022 Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng melakukan kegiatan penyerahan bantuan kepada masyarakat berupa apartemen ikan sebanyak 2 paket yaitu masing-masing 1 paket di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang dan Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.



2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program pelayanan administrasi dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng berada di bagian Sub Tata Usaha yang menurut Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan no. 3 Tahun 2018 yaitu Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian tata usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT/CDK dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Cabang Dinas Kelautan, adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumberdaya Air dan Listrik dengan Jumlah Pagu Sebesar Rp. 18.034.545,- Realisasi Fisik 100 % Keuangan Sebesar Rp. 18.034.545 (100%).
- b. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum, Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Administrasi dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 94.444.704,- ini telah terealisasi dengan menyerap anggaran biaya realisasi keuangan dan fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya laporan administrasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dengan Jumlah pagu Anggaran Sebesar Rp. 741.000 Realisasi Fisik dan Keuangan 100%
- d. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 4.182.500 Realisasi Realisasi Fisik 100% dan Keuangan sebesar Rp. 4.182.500 (100%)
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 3.603.000 Realisasi Realisasi Fisik 100% dan Keuangan sebesar Rp. 3.602.000 (99,97%)
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat rapat Koordinasi dan Konsulktasi SKPD Dengan Jumlah Pagu sebesar Rp. 44.629.200 Realisasi Fisik 100% Keuangan Sebesar Rp. 44.436.400 (99,57%).
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Jumlah Pagu Sebesar Rp. 52.662.600,- Realisasi Fisik 100 % Keuangan Sebesar Rp. 44.086.884 (83,72%).



#### TINDAKLANJUT REKOMENDASI ATAS PENGUKURAN CAPAIAN TRIWULAN TAHUN 2022

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Nota Dinas tentang Rekomendasi Hasil Monev Triwulan tahun 2022, maka kami dari Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng menindaklanjuti hasil rekomendasi atas pengukuran capaian triwulan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sesuai hasil rekomendasi bahwa setiap unit kerja harus memperhatikan realisasi keuangan dan realisasi fisik, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan tindaklanjut atas rekomendasi diatas terbukti dengan tercapainya realisasi keuangan kami hingga akhir tahun sebesar 99,07% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Hal ini dapat menandakan bahwa kami telah melakukan tindaklanjut hasil rekomendasi tersebut.
2. Sesuai rekomendasi bahwa setiap unit kerja harus secara intens memantau dan mengevaluasi kegiatan yang terindikasi terlambat dari jadwal kontrak untuk meminimalisir resiko, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan tindaklanjut atas rekomendasi diatas terbukti dengan realialisasi fisik telah mencapai 100%.
3. Sesuai hasil rekomendasi bahwa setiap unit kerja pelaksanaan kontrak jangan ada yang terlambat dan bergeser ditahun depan sehingga pembayarannya lewat tahun depan, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan tindaklanjut atas rekomendasi diatas dengan capaian realisasi keuangan mencapai 99,07% dan capaian realisasi fisik mencapai 100%, sehingga tahun 2022 CDK Ajatappareng telah melakukan kegiatan secara menyeluruh.
4. Sesuai hasil rekomendasi bahwa untuk persiapan menghadapi penyusunan kegiatan 2023, agar unit kerja membuat juknis pelaksanaan kegiatan dan pengadaan, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan koordinasi internal dalam pembuatan juknis.

#### PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Pada tahun 2022 Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang hadir dalam rangka percepatan dan efesiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebagai pencapaian target dalam menangani illegal fishing, konservasi, dan pengelolaan perairan lainnya.

##### 1.1. PERMASALAHAN

Masalah yang dihadapi Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Keberadaan Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng yang belum menghasilkan kinerja yang optimal terhadap permasalahan utamanya pengelolaan dan pengawasan SDKP karena belum sepenuhnya sarana dan prasarana tersedia di lapangan serta Kapal Pengawas Perikanan (KM. Mangiwang 02) mengalami kerusakan mesin diakibatkan bencana alam yang melanda sehingga kapal yang awalnya dalam kondisi baik menjadi rusak.

- 2) Kemampuan SDM yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga lebih profesional dan permanen.
- 3) Kesadaran masyarakat perikanan yang masih kurang untuk memanfaatkan keberadaan Cabang Dinas Kelautan sebagai salah satu Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan yang siap selalu memberikan pembinaan tentang pengelolaan dan pengawasan di Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
- 4) Masih rendahnya koordinasi dan konsolidasi terhadap lembaga/masyarakat terkait tentang pengelolaan dan pengawasan SDKP karena masih terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi.
- 5) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan tambatan perahu terkendala persyaratan administrasi proposal, refocusing anggaran, ketidaksesuaian lokasi yang diusulkan dengan yang dipersyaratkan, konstruksi tambatan perahu yang dibutuhkan nelayan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- 6) Kasus IUU fishing yang ditangani penggunaan alat tangkap yang merusak (Destructive Fishing) seperti bom, bahan kimia (bias), illegal fishing tidak memiliki dokumen kapal (SPB, SIPI, SIUP).

#### 1.2 UPAYA PEMECAHAN

Berdasarkan beberapa masalah diatas Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng melakukan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

- 1) Dengan adanya kerusakan pada kapal pengawas perikanan (KM. Mangiwang 02), Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan upaya koordinasi dengan sub program terkait permasalahan kapal pengawas untuk penganggaran perbaikan dibutuhkan kelengkapan RAB perbaikan speed boat.
- 2) Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng saat ini masih memiliki 11 Orang pegawai diantaranya 7 Orang ASN dan 4 Orang Tenaga Kontrak sedangkan luas cakupan wilayah Ajatappareng meliputi 5 Kabupaten/Kota, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan untuk dilakukan penambahan pegawai dan memberikan program pelatihan kepada pegawai kami terkait teknis kelautan dan perikanan yang seluruhnya tenaga kontrak kami tidak memiliki latar belakang pendidikan kelautan dan perikanan.
- 3) Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan pendekatan melalui kegiatan/pembinaan yang dilakukan di seksi Penataan dan pengelolaan kawasan pesisir



maupun di seksi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, kami telah melaksanakan kegiatan dan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat pesisir sehingga keberadaan Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dapat bermanfaat bagi masyarakat pesisir.

- 4) Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng senantiasa melakukan koordinasi dengan masyarakat pesisir atau Kelompok konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan cara langsung maupun secara online melalui pembuatan Whatsapp Group sehingga dapat melakukan koordinasi terkait permasalahan pesisir di wilayah ajatappareng kapanpun dan dimanapun.
- 5) Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng tahun 2022 tidak dapat melaksanakan kegiatan tambatan perahu di Kabupaten Barru sesuai pada DPA anggaran 2022 dikarenakan tidak adanya anggaran perencanaan pada DPA 2022, Setelah berdiskusi dengan sub program terkait ini maka kami lebih baik tidak melaksanakan karena memiliki resiko yang tinggi.
- 6) Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng rutin setiap bulan melakukan operasi pengawasan illegal fishing baik patroli laut maupun patroli darat serta memberikan pembinaan kepada nelayan dengan bertujuan upaya penurunan illegal fishing di wilayah Ajatappareng

#### **4.3.8. CDK WILAYAH SELATAN**

Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan memiliki tugas sebagai berikut : 1) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 2) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 3) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, dan; 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Wilayah perairan Sulsel sebagai bagian dari WPP 713 terdiri dari 4 daerah potensial penangkapan ikan yaitu perairan Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone dan Perairan Bali, dimana pada umumnya telah menjadi daerah tujuan penangkapan ikan para nelayan Sulsel secara turun

temurun. Wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang meliputi kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, DKP Sulawesi Selatan Tahun 2022 salah satunya adalah kegiatan Pengawasan SDKP di Wilayah Laut Flores . Kegiatan tersebut memprioritaskan penanganan pengendalian *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Yaitu kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan atau pelaku usaha dengan cara merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida/pembiusan dan penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* (pukat harimau) serta eksploitasi habitat laut yang dilindungi. *Destructive fishing* merupakan mal praktek dalam kegiatan penangkapan ikan yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

Secara umum, maraknya kegiatan *destructive fishing* disebabkan oleh beberapa faktor : (1) Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di laut, (3) Orientasi keuntungan jangka pendek secara maksimal, (4) Kemiskinan, (5) Posisi tawar industri lebih tinggi dari pada kepentingan pelestarian lingkungan, (6) Bahan handak dan zat kimia mudah di dapat dan tidak mengenal musim, (7) Kurangnya alternatif alat tangkap yang produktif tapi ramah lingkungan, (8) Rendahnya penguasaan iptek dalam pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan dan menguntungkan, (9) Masih lemahnya penegakan hukum, serta ( 10 ) Lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum. Untuk itu diperlukan kebijakan dalam peran pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah kab/kota Sulsel. Saat ini untuk wilayah selatan hanya memiliki tiga pulau yaitu Pulau Liukang Loe dan Pulau Kambing di Kabupaten Bulukumba dan Pulau Libukang di Kabupaten Jeneponto. Kedua pulau ini belum terkelola dengan maksimal, sehingga dengan keberadaan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan diharapkan kedepan nantinya ketiga pulau ini bisa menjadi daerah konservasi.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh CDK Wilayah Selatan berdasarkan Tupoksinya antara lain:

#### A. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

##### ➤ Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil

- Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan melaksanakan tugas patroli pengawasan pengelolaan SDK dan lingkungan berada di Wilayah Laut Flores yang merupakan jalur penangkapan ikan yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) 713 yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali (sesuai Permen Kelautan

dan Perikanan No.71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)).

- Kegiatan Patroli Pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan yang dilakukan di Wilayah Selatan sebanyak 4 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp.45.278.450 dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.44.603.450 (98,51 %).
- ✓ Patroli Pertama dilaksanakan pada Bulan Maret 2022. Kegiatan patroli pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan CDK Wilayah Selatan terkait banyaknya laporan masyarakat bahwa nelayan penangkap ikan yang berasal dari bonto bahari, tana beru dan bira dalam melakukan penangkapan ikan di Laut tidak membawa dokumen kapal. Dalam kegiatan patroli tersebut di Pelabuhan Bira ditemukan barang bukti berupa ikan hiu pada salah satu kapal nelayan. Patroli pertama memeriksa 7 unit kapal nelayan dan dari hasil pemeriksaan. Dari 7 unit kapal tersebut 5 kapal tidak membawa dokumen dan 2 kapal tidak memiliki SLO dan SPB. Tim pengawas CDK wilayah selatan melakukan teguran kepada ketujuh nahkoda kapal tersebut dan memberikan peringatan apabila dikemudian hari ditemukan lagi melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dokumen maka tim pengawas bersama TNI-AL akan melakukan tindakan tegas menahan kapal mereka. Setelah melakukan pemeriksaan kapal kemudian tim melakukan pemeriksaan penyu sisik yang berada di Pulau Liukang. Ada 2 ekor penyu sisik di kolam tersebut. Tim menghimbau pengunjung bila berenang jangan melakukan kontak langsung dengan penyu sisik tersebut



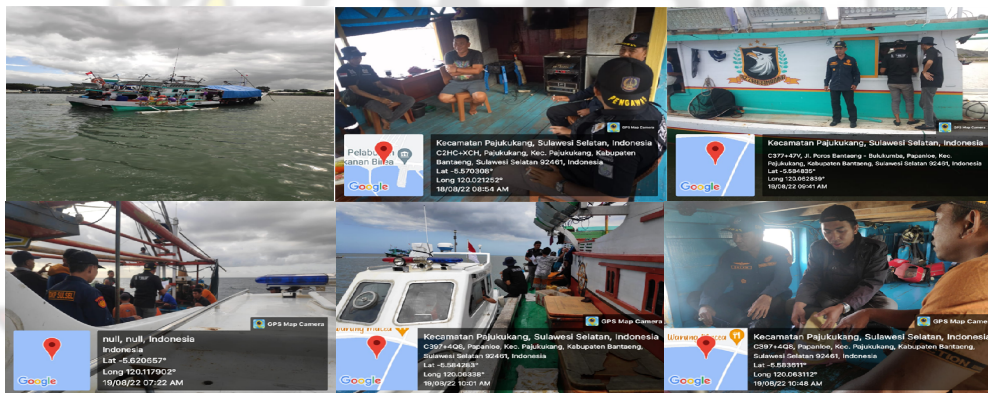


- ✓ Patroli Kedua dilaksanakan pada Bulan Juni 2022. Kegiatan patroli pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan CDK Wilayah Selatan terkait laporan masyarakat bahwa nelayan penangkap ikan dalam melakukan penangkapan ikan di Laut tidak membawa dokumen kapal, adanya masyarakat di Pulau Liukang yang menangkap tukik, adanya masyarakat di Pesisir Desa Dwi Tiro yang melakukan penambangan pasir laut secara ilegal. Tim melakukan patroli menggunakan kapal pengawas perikanan CDK Wilayah Selatan Mangiwang 06. Hasil operasi dari 3 kapal yang diperiksa ditemukan 2 kapal yang melakukan penangkapan ikan di laut tidak memiliki dokumen kapal dan dokumen SIPI sudah kadaluarsa. 1 unit kapal pemanah ikan dicurigai melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan bius, namun tim tidak menemukan bahan bius tersebut. Tim pengawas CDK wilayah selatan melakukan teguran kepada kedua nahkoda kapal tersebut dan memberikan peringatan apabila dikemudian hari ditemukan lagi melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dokumen maka tim pengawas bersama TNI-AL akan melakukan tindakan tegas menahan kapal mereka. Setelah tim melakukan pemeriksaan pada 3 unit kapal nelayan, kemudian tim menuju Pulau Liukang untuk melakukan pelepasan tukik ke laut yang ditangkap oleh nelayan setempat. Pada hari kedua tim menuju pesisir Desa Dwi Tiro Kab. Bulukumba untuk memeriksa penambang pasir laut secara ilegal. Tim pengawas CDK wilayah selatan bersama dengan Kades Dwi Tiro dan Ketua Pokmaswas Katinroang jangang-jangang menuju lokasi penambangan pasir laut secara ilegal. Tim kemudian memasang spanduk larangan penambangan pasir laut secara ilegal di tempat tersebut.





- ✓ Patroli Ketiga dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022. Kegiatan patroli pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan CDK Wilayah Selatan terkait kapal perre-perre dari Kab. Bantaeng yang dilarang melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Kab. Bulukumba. Dalam kegiatan patroli tersebut dalam perjalanan menuju PPI Birea Kab. Bantaeng tim melakukan pemeriksaan 5 unit kapal di sekitar perairan Kab. Bantaeng. Dari 5 kapal tersebut hanya 1 unit kapal yang lengkap dokumen kapalnya dan 4 lainnya tidak lengkap dokumen kapalnya. Tim pengawas CDK wilayah selatan melakukan teguran kepada keempat nahkoda kapal tersebut dan memberikan peringatan apabila dikemudian hari ditemukan lagi melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dokumen maka tim pengawas bersama TNI-AL akan melakukan tindakan tegas menahan kapal mereka. Setelah melakukan pemeriksaan pada 5 unit kapal tersebut, tim pengawas CDK wilayah selatan menuju PPI Birea di lokasi Punggawa Kapal Perre-Perre. Dari hasil wawancara dengan Dg. Situju selaku punggawa perre-perre di Kab. Bantaeng bahwa operasi penangkapan ikan kapal perre-perre tidak lagi melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Kab. Bulukumba dan lokasi penangkapan mereka hanya di sekitar perairan Kab. Bantaeng.

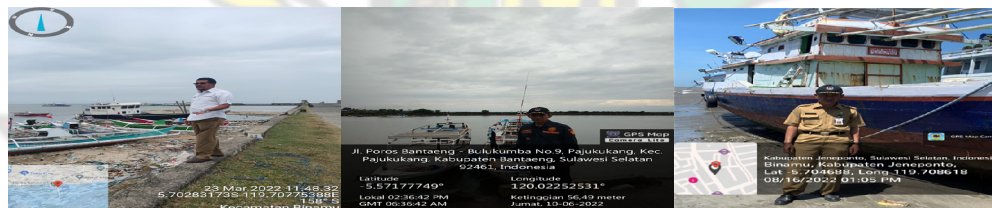


- ✓ Patroli Keempat dilaksanakan pada Bulan Nopember 2022. Kegiatan patroli pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan CDK Wilayah Selatan terkait laporan dari syahbandar perikanan PPI Kajang bahwa banyak nelayan dari kajang dalam melakukan penangkapan ikan di Laut tidak membawa dokumen kapal. Selain itu pula tim pengawas CDK wilayah selatan akan melakukan pemeriksaan ke kolam Pak Halim di Pulau Liukang untuk memastikan bahwa sudah dilepas penyu sisik sebanyak 5 ekor ke laut. Patroli keempat tim memeriksa 11 unit kapal nelayan dan dari hasil pemeriksaan semua kapal dalam melakukan penangkapan ikan ada yang tidak membawa dokumen dan ada pula

yang tidak memiliki dokumen SLO dan SIB. Tim pengawas CDK wilayah selatan melakukan teguran kepada kesebelas nahkoda kapal tersebut dan memberikan peringatan apabila dikemudian hari ditemukan lagi melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dokumen maka tim pengawas bersama TNI-AL akan melakukan tindakan tegas menahan kapal mereka. Setelah melakukan pemeriksaan kapal kemudian tim melakukan pemeriksaan penyusutan yang berada di Pulau Liukang. Dari hasil pemantauan di kolam milik Pak Halim sudah tidak ditemukan penyusutan.



- ✓ Pemantauan kapal perikanan dilaksanakan pada Bulan Maret s/d Desember 2022. Kegiatan pemantauan kapal perikanan dilaksanakan di dua lokasi yaitu PPI Birea Kabupaten Bantaeng dan PPI Tanru Sampe Kabupaten Jeneponto. Sasaran pemantauan kapal perikanan adalah memeriksa bahan dan alat tangkap yang dilarang digunakan dalam menangkap ikan di laut serta dokumen kapal.



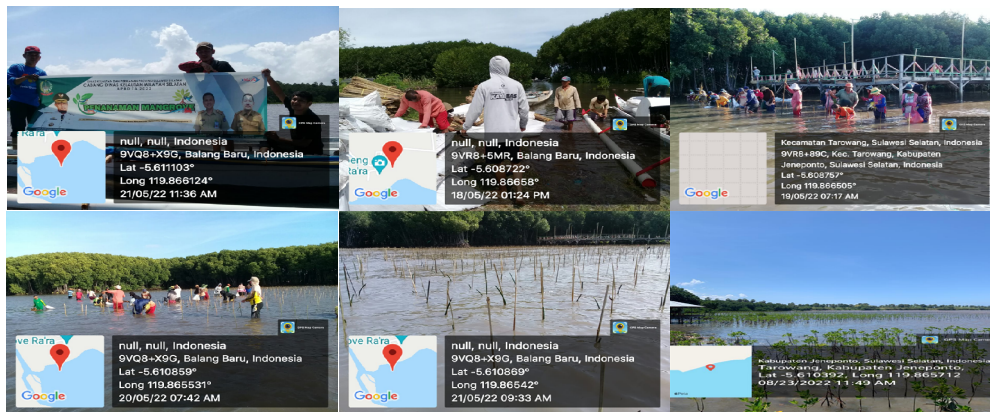
## B. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

### ➔ Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

#### ■ Penanaman Mangrove di Kabupaten Jeneponto (bakau murah)

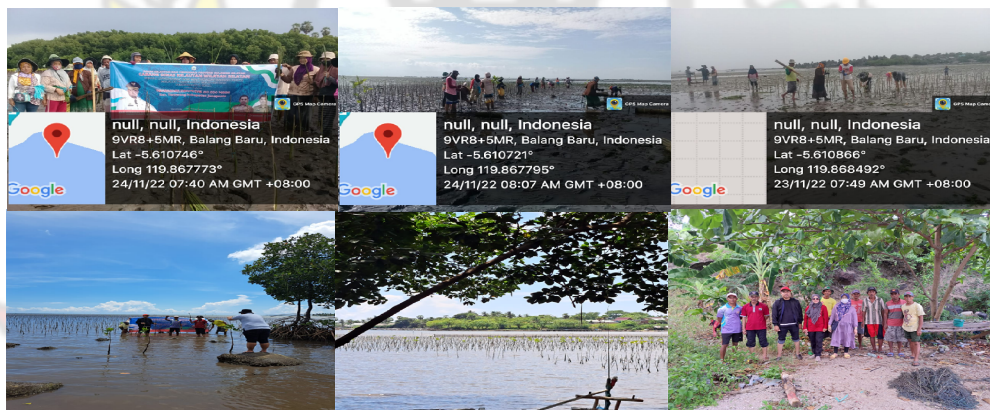
- ✓ Kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yaitu kegiatan bibit mangrove (bakau murah) sebanyak 38.000 batang dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.190.000.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Alfirah dengan nilai SPK sebesar Rp.189.500.000,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.189.500.000,- (100 %).





#### ■ Penanaman Mangrove di Kabupaten Jeneponto (bakau murah)

- ✓ Kegiatan penanaman mangrove anggaran perubahan dilaksanakan di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yaitu kegiatan bibit mangrove (bakau murah) sebanyak 30.000 batang dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.150.000.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Malaka Raya Anaogi dengan nilai SPK sebesar Rp.149.850.000,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.149.850.000,- (100 %).



#### ■ Pantai Berseri di Kabupaten Bulukumba

- ✓ Kegiatan pantai berseri CDK Wilayah Selatan adalah kegiatan membersihkan sampah di sekitar pesisir pantai.
- ✓ Salah satu tujuan dilaksanakan pantai berseri atau bersih-bersih pantai adalah untuk menumbuhkan sifat peduli, dan menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang penting menjaga kebersihan daerah pesisir, dan dapat meningkatkan nilai estetika pantai agar dapat menciptakan kegiatan wisata sehat yaitu tidak membuang sampah

sembarangan. Selain itu dengan diadakannya kegiatan ini, dapat menjadikan wadah masyarakat untuk mengkampanyekan aksi bersih-bersih di Pantai.

- ✓ Kegiatan pantai berseri di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan di Pantai Merpati.
- ✓ Pelaksanaan pantai berseri di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 pada jam 08.00 Wita sampai selesai.
- ✓ Peserta yang telah hadir di lokasi sudah disiapkan peralatan berupa sapu lidi pakai gagang, masker, sarung tangan, kantong plastik sampah dan tempat sampah.
- ✓ Jumlah peserta pantai berseri di Kabupaten Bulukumba sebanyak 300 orang yang terdiri dari :
  1. Aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulukumba.
  2. Aparat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
  3. Aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba.
  4. Aparat Kantor Camat Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
  5. Aparat Kantor Lurah Terang-Terang Kabupaten Bulukumba.
  6. Aparat Kantor Lurah Bentenge Kabupaten Bulukumba.
  7. Aparat Koramil Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
  8. Aparat Polsek Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
  9. Masyarakat Wilayah Pesisir Kelurahan Terang-Terang.
  10. Masyarakat Wilayah Pesisir Kelurahan Bentenge.
  11. Pemerhati Lingkungan Dego-Dego Kabupaten Bulukumba.
  12. Serikat Pelaut Kabupaten Bulukumba.
  13. Pesantren Babul Khaer Kalumeme Kabupaten Bulukumba.
  14. Penyuluh Perikanan Kabupaten Bulukumba.
- ✓ Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini, maka panitia telah menyiapkan door prize.
- ✓ Panitia juga telah menyiapkan nasi dos dan snack dos kepada seluruh peserta yang telah melaksanakan bersih-bersih pantai.
- ✓ Kegiatan pantai berseri disiarkan melalui media online yaitu Kompas TV Makassar.
- ✓ Kegiatan Pantai Berseri di Kabupaten Bulukumba dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.100.000.000. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.Rp.96.480.000,- (96,48 %).







#### ■ Pengadaan Apartemen Ikan di Kab. Jeneponto

Kegiatan Pengadaan Apartemen Ikan di Kab. Jeneponto dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.200.000.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Hersa Abadi dengan nilai SPK sebesar Rp.196.454.000,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.196.454.000,- (98,22 %).



#### ■ Transplantasi Karang Buatan (Artificial Reef) di Kabupaten Bulukumba

Kegiatan Transplantasi Karang Buatan (Artificial Reef) di Kabupaten Bulukumba sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.185.000.000. Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Bumi Raya Manipi dengan nilai SPK sebesar Rp.184.000.000,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.184.000.000,- (99,46 %).



### PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

#### 1.1. PERMASALAHAN

- Kegiatan patroli pengawasan CDK Wilayah Selatan di Laut Flores tidak berjalan maksimal disebabkan oleh keterbatasan anggaran BBM. Beberapa aduan masyarakat terkait adanya pelaku pembom dan pembius ikan tidak dapat diselesaikan.

- Pengadaan kapal speedboat pengawasan CDK Wilayah Selatan sangat membantu dalam kegiatan patroli pengawasan di Wilayah Selatan, namun masih terkendala dari sisi biaya operasional (BBM dan perawatan) dan honor driver kapal. Apabila pada tahun 2023 anggaran biaya operasional BBM kurang sudah tentu pengawasan tidak bisa berjalan optimal. Sedangkan kalau tidak ada biaya perawatan kapal, maka berdampak kepada kerusakan kapal.

#### 1.2. UPAYA PEMECAHAN

- Diupayakan Sub Bagian Program untuk memperhatikan terkait biaya operasional speedboat pengawasan dan honor driver kapal pada seluruh CDK lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 4.3.9. CDK Kepulauan Selayar

Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar memiliki tugas sebagai berikut :

- 1). Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
- 2). Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
- 3). Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya dan,
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terkait tugas dan fungsinya.

Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 332 buah, dengan garis pantai sepanjang 1.937 Km. Memiliki kawasan Ekosistem mangrove seluas 40.223,26 Ha., terumbu karang seluas 116.437,66 Ha. Dan padang lamun seluas 6.264,7 Ha. Kondisi alamiah tersebut diatas memberikan potensi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan khususnya dibidang tangkap dan budidaya tambak dan laut yang besar.

Menyikapi kompleksnya permasalahan dan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan luasnya wilayah administrasi sebagai wilayah pengelolaan perikanan Sulawesi Selatan, menuntut perlunya peran dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku usaha dan seluruh stakeholders terkait dalam membantu pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berbasis masyarakat.

Hasil pelaksanaan tersebut selama kurang waktu 1 (Satu) Tahun Anggaran 2021 pada Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar yang terdiri dari :

**1) Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut**

**■ Penanaman Mangrove**

Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar telah melaksanakan Kegiatan Penanaman Mangrove pada Lokasi Kelurahan Bonto Bangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan berupa Penanaman bibit mangrove.
- b. Mererehabilitasi sumberdaya hayati melalui untuk pemulihan ekosistem mangrove rusak sehingga dapat pulih kembali serta dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Stakeholders terkait

1. Nama Kegiatan : Penanaman Mangrove Di Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Lokasi Kegiatan : Wilayah Pesisir Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bonotoharu Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Koordinat Lokasi Penanaman : -6.136452, 120.447447
4. Tanggal Penanaman : 18 September 2022 – 20 Oktober 2022
5. Jumlah Peserta : 30 Orang
6. Instansi yang terlibat : Dinas Kelautan Perikanan Prov. Sulsel, Penyuluh Perikanan, Kelompok Masyarakat
7. Jumlah Bibit tertanam : 38.000 Bibit
8. Kondisi rata-rata bibit : Tinggi : 45 cm  
Diameter : 2 cm  
Jumlah Daun : 2-3 Daun  
Kondisi bibit : Baik
9. Sumber Dana : APBD CDK Selayar Dinas Kelautan Perikanan Prov. Sulsel
10. Jumlah Dana : Rp. 189.450.000





#### ■ APARTEMEN IKAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-pulau Kecil Wilayah Selayar berupa Apartemen Ikan di Kab. Kepulauan Selayar (CDK Selayar). kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian cabang dinas kelautan Kepulauan Selayar terhadap kelestarian ekosistem laut sebagai upaya dalam menjaga ekosistem laut dan menambah hasil tangkapan nelayan di wilayah Selayar.

Dalam pelaksanaan Kegiatan pengadaan Apartemen Ikan pada Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar mempunyai Maksud dan Tujuan sebagai berikut :

- a. Maksud pengadaan pekerjaan ini adalah Peningkatan Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-pulau Kecil Wilayah Selayar berupa Apartemen Ikan di Kab. Kepulauan Selayar (CDK Selayar), sebagai upaya untuk menjaga ekosistem laut dan menambah hasil tangkapan nelayan di wilayah Selayar.
- b. Tujuan pengadaan pekerjaan ini adalah Menciptakan perlindungan biota laut, khususnya ikan sehingga dapat berkembang biak dan hidup dengan aman, Sebagai tempat berlindung, tempat tinggal dan berkembangbiaknya ikan serta habitat laut lainnya, sebagai areal tempat berkumpulnya ikan sehingga mempermudah nelayan yang akan menangkap ikan dan meningkatkan sumber daya ikan dan peningkatan hasil tangkapan nelayan





#### ■ TRANSPLANTASI KARANG

Tingginya kerusakan yang dialami oleh ekosistem terumbu karang perlu diminimalisir dengan berbagai metode Transplantasi Karang adalah suatu upaya yang dapat dilakukan dengan metode Transplantasi menggunakan Metode Jaring Laba-laba (Web Spider). Transplantasi Karang adalah suatu metode penanaman dan penumbuhan suatu koloni karang dengan metode fragmentasi koloni tersebut diambil dari suatu induk koloni tertentu. Transplantasi Karang bertujuan untuk mempercepat regenerasi dan terumbu karang yang telah mengalami kerusakan atau sebagai cara untuk memperbaiki daerah terumbu Karang.

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-pulau Kecil Wilayah Selayar berupa Transplantasi karang di Kab. Kepulauan Selayar (CDK Selayar). kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian cabang dinas kelautan Kepulauan Selayar terhadap kelestarian ekosistem laut sebagai upaya dalam menjaga ekosistem laut dan menambah hasil tangkapan nelayan di wilayah Selayar.

Dalam pelaksanaan Kegiatan pengadaan Transplantasi karang pada Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar mempunyai Maksud dan Tujuan sebagai berikut :

##### a. Maksud

Maksud pengadaan pekerjaan ini adalah Peningkatan Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-pulau Kecil Wilayah Selayar berupa Transplantasi karang di Kab. Kepulauan Selayar (CDK Selayar), sebagai upaya untuk menjaga ekosistem laut dan menambah hasil tangkapan nelayan di wilayah Selayar.

##### b. Tujuan

Tujuan pengadaan pekerjaan ini adalah Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-pulau Kecil Wilayah Selayar berupa Transplantasi Karang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.



### ■ KEGIATAN PANTAI BERSERI

Perairan pesisir jika tidak dikelola secara berkelanjutan maka tidak akan menunjang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan) secara turun temurun, karena potensi yang dimiliki akan habis atau punah sehingga tidak akan dinikmati lagi oleh anak cucu di masa mendatang. Saat ini pengetahuan masyarakat masih rendah mengenai pentingnya menjaga kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Olehnya itu dibutuhkan sosialisasi yang massif dalam rangka membangun kesadaran masyarakat guna bersama-sama membantu memelihara kelestarian wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Salah satu bentuk dan upaya dalam rangka sosialisasi adalah pada TA 2022, CDK Kepulauan Selayar berencana melakukan kegiatan berupa Pantai Berseri di wilayah kerja CDK Kepulauan Selayar dimana kegiatan tersebut memiliki sumber dana dari APBD TA. 2022.

#### a. Maksud:

Pantai berseri adalah kegiatan yang melibatkan banyak stakeholders tentang pelestarian lingkungan pesisir dengan menjaga kebersihan lingkungan pesisir dimulai dari masyarakat pesisir itu sendiri.

#### b. Tujuan:

Kegiatan tersebut adalah untuk Sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan serta menjaga kebersihan Lingkungan Pesisir Pantai yang secara langsung akan menjaga kelestarian pesisir.



2) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan Perikanan di perairan Pulau Tarupa, Pulau Rajuni, dan Pulau Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 21 s/d 23 maret 2022.
1. Patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan Pulau Tarupa, Rajuni, dan Pasitallu kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dengan target operasi yaitu pengawasan tertib peraturan perundang-undangan perikanan dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.
  2. Pelaksanaan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar ke Pulau Tarupa, Pulau Rajuni, dan Pulau Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2022 dengan menggunakan armada speed boat mangiwang 05 yang merupakan operasi perdana speed boat pengawasan ini. Tim bergerak dari Dusun Padang ke lokasi pada pukul 10.00 Wita ke Pulau Tarupa. Pada koordinat S = 060 25' 5, 436" dan E = 1200 26' 44, 298" dilakukan pemeriksaan dokumen pada Kapal Motor Rajawali 02 dengan data hasil pemeriksaan ukuran GT 30 dengan ukuran Panjang 17,70 m, lebar 4,50 m, dan kedalaman 1,76 m; dengan nahkoda yang bernama Mustakim dan jumlah anak buah kapal 18 orang, alat tangkap yang digunakan adalah pancing/huhate (pole and line), Panjang Joran 3,5 m, Panjang tali pancing 2,5 m, ukuran mata pancing No.2,2: 2,5: 2,8 dan jumlah pancing 25 buah. Pemilik kapal motor Rajawali ini yaitu Nama Perusahaan Ikhsan Sunusi, dengan Nomor Induk Berusaha 9120103563211, yang beralamat di ponnori, dengan kode KBLI : 03111, telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan nomor : 02.0701 namun belum efektif masih harus melengkapi dokumen yang diminta oleh lembaga OSS, Pas Besar, surat ukur dalam negeri, dan SIPI dengan nomor SIPI 35.21.7398.56.93479. Juga telah memiliki BPJS ketenagakerjaan
  3. Terhadap KM Rajawali tim patroli melakukan pembinaan untuk melengkapi semua dokumen yang diminta dan ke gerai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat. Kapal kemudian diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan. Operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Pulau Tarupa, Rajuni, dan Pasitallu ini, memeriksa dokumen kapal pelaku usaha perikanan untuk melihat ketaatan/kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap aturan, sedangkan tujuan diadakannya kegiatan patroli

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.



➤ **Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Di Perairan Pulau Kayuadi, Pulau Rajuni, Dan Nyiur Indah Kabupaten Kepulauan Selayar Tanggal 13 S/D 15 Juni 2022**

1. Pelaksanaan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar ke Pulau Kayuadi, Pulau Rajuni, dan Nyiur Indah Kecamatan Taka Bonetare Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2022 dengan menggunakan armada speedboat Mangiwang 05 yang merupakan operasi kedua speed boat pengawasan ini. Tim bergerak dari Dusun Padang ke lokasi pada pukul 09 .00 Wita ke Pulau Kayuadi Pada koordinat S = 060 85'8, 831" dan E =1200 65' 4, 122". Pada posisi : lat-6.178377° Long- 120426126° di sekitar wilayah perairan Padang kami sudah melakukan pemeriksaan dokumen kapal, yaitu Kapal Nurfiti dengan data hasil pemeriksaan ukuran GT 20 dengan ukuran Panjang 21 m, lebar 2,85 m, dan kedalaman 1,25 m; dengan nahkoda yang bernama Marzuki dan jumlah anak buah kapal 5 orang, menurut Pak Marzuki dokumen kapal berupa surat izin penangkapan, pas besar, NIB, dan lain-lain sementara diproses/diurus di PTSP, dengan kata lain kami tidak menemukan dokumen yang harusnya mereka bawa setiap melakukan proses penangkapan. Kami menganjurkan supaya setiap kali melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut wajib membawa dokumen kapal berupa NIB, Sertifikat Standar, Izin Usaha Penangkapan ikan.
2. Setelah itu tim patroli lanjut menuju Pulau Kayuadi, di perairan Pulau Kayuadi pada posisi : Lat -6855123° Long 120.743028°, kami memeriksa kapal Perjuangan Jinato, 14 Gt, No.SIUP : 02.21.01.7398.0220 dengan nama pemilik kapal H.Juraeje.
  - ✚ Pemeriksaan di Perairan Nyiur Indah pada posisi : Lat -06.783188 Long 120.729783° Pemilik kapal motor Sinar Benua 02 Ini yaitu Juma , dengan Nomor Induk Berusaha 0111210007333,
  - ✚ Pemeriksaan Kapal Motor Herik jaya pada posisi : Lat- 6.585490° Long- 120°991440° No.SIUP. 2510210019270001, Nama Pemilik Kapal Burhanuddin tidal



lama mengelilingi pulau kami pun menjumpai kapal pada posisi: 06°32'06.9"S 120°26'43,98"E.

- ✦ Kapal Musdalifa Asis jumlah abk 5 orang, ala tangkap yang di gunakan pancing, nahkoda kapal Ali Ahmad Askar.
  - ✦ Perjalanan pulang menuju selayar tidak jauh dari Pulau Rajuni Besar kami memeriksa kapal pada posisi : Lat -6.526738° Long 120.691089° Askar Ilahi 01 pada posisi: Lat- 6.178377° Long- 120.426126° no.SIUP. 22092100374180001, nama pemilik kapal Eko Setiawan.
  - ✦ Kapal Rizki Ilahi Kayuadi pada posisi : Lat- 6.641978° Long- 120.912322° no SIUP.09092100373590001, dengan nama Pemilik Kapal Munir.
  - ✦ Kami menemukan kapal ukuran 20 GT yang kami dapati di perairan Pulau Kayuadi yang tidak membawa dokumen kapal yang diperlukan dalam melaksanakan operasi penangkapan ikan, alasannya Izin Usaha Perikanan, NIB maupun sertifikat standar, Adi dan lain-lain, mereka mengatakan sementara diproses oleh pemilik kapal. Nama Kapal ini yaitu Adi Jaya AB 02, sama halnya dengan Kapal ukuran 10 GT dengan nama Kapal Rinald dengan jumlah ABK 6 orang ini mengatakan kalau dokumen kapal ini masih diproses perpanjangan izin penangkapannya oleh pemilik kapal. Demikian pula dengan kapal yang kami temukan di perairan Dusun Padang Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar bahkan kapalnya belum ada namanya karena baru dibeli dari pemilik yang sebelumnya jadi mereka belum membawa dokumen kapal di atas kapal ketika beroperasi menangkap ikan.
3. Kapal yang belum memiliki dokumen/surat kapal berupa NIB, Sertifikat Standar, dan Izin Usaha Perikanan dan Pas Kecil maupun Pas Besar serta Nama Kapal maupun Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) kami lakukan pembinaan kemudian menganjurkan agar segera mengurus kelengkapan dokumen/surat kapal di gerai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat. Kapal kemudian diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan. Operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Pulau Kayuadi, Rajuni Besar, dan Nyiur Indah ini, memeriksa dokumen kapal pelaku usaha perikanan untuk melihat ketaatan/kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap aturan, sedangkan tujuan diadakannya kegiatan patroli pengawasan sumberdaya

kelautan dan perikanan adalah meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan baik dari kegiatan ilegal fishing maupun destruktif fishing.



➤ **Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Di Perairan Pulau Bahuluang, Pulau Tambolongan, Dan Pulau Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tanggal 26 S/D 28 Oktober 2022**

- 1) Patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan Pulau Bahuluang, Pulau Tambolongan dan Pulau Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan target operasi yaitu pengawasan tertib peraturan perundang-undangan perikanan dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.
- 2) Pelaksanaan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar ke Pulau Bahuluang, Pulau Tambolongan dan Pulau Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2022 dengan menggunakan armada speed boat mangiwang 05. Tim bergerak dari Pelabuhan Padang Lat -6.1787150 Long 120.4264290 menuju lokasi pada pukul 09:00 Wita ke Pulau Bahuluang. Pada koordinat Lat - 6.2464580 dan Long 120.4701460 di perairan Pulau Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu tanggal 26 Oktober 2022 dilakukan pemeriksaan dokumen kapal yang ketiga pada kapal “Surga Laut” yang merupakan Kapal jenis Penangkap Ikan dengan Nahkoda bernama Mustaqin sesuai NIB dengan nomor 0109210039305 nama pemilik usaha adalah Mustaqin yang beralamat di Jl Ahmad Yani Desa/Kelurahan Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep.Selayar dengan kode KBLI 0311, sudah memiliki SIUP dan SIPI namun sudah lewat izin berlaku dan harus segera diperpanjang. Pada saat pemeriksaan sekaligus juga dilakukan pembinaan agar segera mengurus SIPI dan SIUP di CDK kepulauan Selayar Gerai Izin Kapal Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di PPI Bonehalang Kabupaten Kepulauan Selayar.

- 3) Pada koordinat Lat -6.6510350 Long 120.4196720 di wilayah perairan Pulau Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu tanggal 27 Oktober 2022 dilakukan pemeriksaan dokumen pada Kapal “Sempurna K” dengan Nahoda bernama Nasmuddin Sahaming dan ABK sebanyak 8 orang yang berfokus pada teripang dengan menggunakan alat tangkap Ladung Teripang, berdasarkan NIB Nama Pemilik Usaha adalah Kasihani Sahaming yang beralamat di Dusun Butungan, Kelurahan Bonde Utara Kec Pamboang, Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan kode KBLI 0311, pada saat pemeriksaan dokumen tidak dapat menunjukkan SIPI, SIUP serta Surat Keterangan Andon, berdasarkan pernyataan Pak Namsuddin selaku Nahkoda mengatakan belum bisa mengurus SIPI dan SIUP karena sebelum itu harus dulu melakukan pengukuran kapal di Majene yang terkendala pada biaya bahan bakar karena lokasi tempat pengukuran kapal yang sangat jauh.
- 4) Pada koordinat Lat -6.6825650 dan Long 120.439220 di wilayah Pulau Polassi Kecamatan Bontosikuyu tanggal 28 Oktober 2022 dilakukan pemeriksaan dokumen kapal yang ketiga pada kapal “Kahlil” yang merupakan Kapal jenis Penangkap Ikan dengan Nahkoda bernama Asfar sesuai NIB dengan nomor 0909210040972 nama pemilik usaha adalah Asfar yang beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa/Kelurahan Jinato, Kec. Taka Bonerate Kab.Kep.Selayar dengan kode KBLI 0311, sudah memiliki SIUP dan SIPI namun sudah lewat izin berlaku dan harus segera diperpanjang. Pada saat pemeriksaan sekaligus juga dilakukan pembinaan agar segera mengurus SIPI dan SIUP di CDK kepulauan Selayar Gerai Izin Kapal Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di PPI Bonehalang Kabupaten Kepulauan Selayar.



- Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Di Perairan Pulau Polassi Dan Pulau Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tanggal 07 S/D 09 November 2022
- 1) Patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan Pulau Polassi dan Pulau Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan target operasi yaitu pengawasan tertib peraturan perundang-undangan perikanan dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.

- 2) Pelaksanaan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar di Pulau Polassi dan Pulau Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan pada tanggal 07 sampai dengan 09 November 2022 dengan menggunakan armada speed boat mangiwang 05. Tim bergerak dari Pelabuhan Padang Lat -6.1787150 Long 120.4264290 menuju lokasi pada pukul 09:15 Wita ke Pulau Polassi. Pada titik koordinat Lat -6.70646° Long 120.41753 tanggal 07 November 2022 dilakukan pemeriksaan dokumen kapal pada kapal Erlin Jinato dengan Nahkoda bernama Muhlis yang beralamat di Dusun Lantigian, Desa/Kelurahan Jinato, Kec. Taka Bonerate, Kab. Kep.Selayar. Pada saat pemeriksaan pemilik kapal tidak bisa menunjukkan SIUP dan SIPI Kapal dengan alasan ketinggalan di rumah, mereka hanya membawa dokumen Sertifikat Standar dengan nomor 09082100143510001 dan NIB 0908210014351. Selanjutnya diberikan arahan untuk selalu membawa dokumen-dokumen kapal pada saat pengoperasian kapal.
- 3) Pada titik koordinat Lat -6.68733 Long 120.42157 tanggal 08 November 2022 di wilayah perairan Polassi dilakukan pemeriksaan kapal pada Kapal Jabal Tsur 01 dengan nahkoda bernama Muh. Jufri yang beralamat di Dusun Pasi Timur, Desa/Kelurahan Batang, Kec. Taka Bonerate, Kab. Kep.Selayar dengan nomor SIUP 02.1801.7398.0314 dan Nomor SIPI 45.21.7398.101.01780. Kapal Jabal Tsur memiliki ukuran 14GT yang merupakan kapal jenis pengangkap ikan dengan KBLI 0311 yaitu Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di laut.
- 4) Pada titik koordinat Lat -6.47528 Long 120.41600 tanggal 09 November 2022 di wilayah perairan Bahuluang dilakukan pemeriksaan kapal pada Kapal Kohlil berdasarkan NIB dengan nomor 0909210019155 nahkoda bernama Tajuddin yang beralamat di Dusun Jinato, Desa/Kelurahan Jinato, Kec. Taka Bonerate, Kab. Kep.Selayar. Pada saat pemeriksaan pemilik kapal tidak bisa menunjukkan SIUP dan SIPI Kapal dengan alasan ketinggalan di rumah. Selanjutnya diberikan arahan untuk selalu membawa dokumen-dokumen kapal pada saat pengoperasian kapal.





➤ Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Di Perairan Pulau Pasi Gusung Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tanggal 23 S/D 25 November 2022

- 1) Patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan Pulau Pasi Gusung Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan target operasi yaitu pengawasan tertib peraturan perundang-undangan perikanan dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.
- 2) Pelaksanaan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar ke Pulau Pasi Gusung Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 November 2022 dengan menggunakan armada speed boat mangiawang 05. Tim bergerak dari Pelabuhan Padang Lat -6.1787150 Long 120.4264290 menuju lokasi pada pukul 09:00 WITA ke Pulau Gusung Desa Kahu-Kahu. Pada titik koordinat Lat -6.168295 Long 120.420259 tanggal 23 November 2022 dilakukan pendataan kapal yang berlabuh di Desa Kahu-Kahu dan didapatkan 7 (tujuh) buah kapal berukuran < 2 GT yang berlabuh di Desa Kahu-Kahu, alat tangkap yang digunakan bermacam-macam diantaranya yaitu Jaring, Pancing, dan Bubu

No.	Nama	Alat Tangkap	Alamat
1	Musmain	Jaring	Kahu-Kahu Selatan
2	Andi Arfianto	Jaring/Pancing	Kahu-Kahu Selatan
3	Arsing	Rawe/Pancing	Kahu-Kahu Selatan
4	Udin	Rawe/Gurita	Kahu-Kahu Selatan
5	Rais	Gurita/Pancing	Kahu-Kahu Selatan
6	Syamsuddin	Pancing/Rawe	Kahu-Kahu Tengah
7	Raising	Bubu Kepiting	Kahu-Kahu Tengah

- 3) Pada titik koordinat Lat -6.165515 Long 120.419559 tanggal 24 November 2022 dilakukan pendataan kapal yang berlabuh di Desa Kahu-Kahu dan di dapatkan 6 (enam) kapal berukuran < 2GT yang berlabuh di Desa Kahu-Kahu yang diantaranya menggunakan alat tangkap berupa Pancing, Jaring, Rawe dan Pukat Jaring.

No.	Nama	Alat Tangkap	Alamat
1	Nirwan	Pancing	Kahu-Kahu Tengah
2	Faisal	Jaring	Kahu-Kahu Tengah
3	Tamuring	Rawe	Kahu-Kahu Utara
4	Muliadi	Rawe	Kahu-Kahu Selatan
5	Sirjayadi	Jaring	Kahu-Kahu Selatan
6	Iwan	Pukat Jaring	Kahu-Kahu Utara

- 4) Pada titik koordinat Lat -6.164315 Long 120.419451 tanggal 25 November 2022 dilakukan pendataan kapal yang berlabuh di Desa Kah-Kahu dan didapatkan 5 (lima) kapal berukuran < 2GT yang berlabuh di Desa Kahu-Kahu, alat tangkap yang digunakan antara lain yaitu Pancing/Rawe, Jaring, Tombak dan Pocong-Pocong.

No.	Nama	Alat Tangkap	Alamat
1	Takbir	Pocong-Pocong	Dusun Dopa
2	Denrimonsong	Pancing/Rawe	Kahu-Kahu Selatan
3	Darwis	Tombak	Dusun Dopa
4	H. Ramulu	Jaring	Kahu-Kahu Utara
5	Nurdin	Bubu	Kahu-Kahu Utara
6	Tasmir	Rawe	Kahu-Kahu Selatan



- Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Di Perairan Pulau Pasi Gusung Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tanggal 07 S/D 09 Desember 2022
- 1) Patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan Pulau Pasi Gusung Desa Bontoborusu kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan target operasi yaitu pengawasan tertib peraturan perundang-undangan perikanan dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.
  - 2) Pelaksanaan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar ke Pulau Pasi Gusung Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan pada tanggal 07 sampai dengan 09 Desember 2022 dengan menggunakan armada speed boat mangiawang 05. Tim bergerak dari Pelabuhan Padang Lat -6.1787150 Long 120.4264290 menuju lokasi pada pukul 09:00 WITA ke Pulau Pasi Gusung Desa Bontoborusu. Pada titik koordinat Lat -6.176825 Long 120.421429 tanggal 07 Desember 2022 dilakukan pendataan kapal yang berlabuh di Perairan Pulau Pasi Gusung Desa Bontoborusu dan didapatkan 8 (delapan) buah kapal berukuran < 2GT yang berlabuh di Perairan Pulau Pasi Gusung Desa Bontoborusu, alat tangkap yang digunakan bermacam-macam diantaranya yaitu Jaring, Pancing dan Pocong-Pocong.

No.	Nama	Alat Tangkap	Alamat
1	Nursang	Pancing	Dusun Dopa
2	Luwah	Jaring	Dusun Dopa
3	Asriadi J	Jaring	Kahu-Kahu Utara
4	Densi Pattang	Jaring	Kahu-Kahu Utara
5	Andi Anas	Pocong-pocong	Kahu-Kahu Selatan
6	Darwis	Tombak	Dusun Dopa
7	Hasba	Bagang	Kahu-Kahu Tengah
8	Agus	Rawe/Jaring	Kahu-Kahu Selatan

- 3) Pada titik koordinat Lat -6.177525 Long 120.420469 tanggal 08 Desember 2022 dilakukan pendataan kapal yang berlabuh di Desa Bontoborusu dan didapatkan 6 (enam) buah kapal berukuran <2GT yang berlabuh di Perairan Pulau Pasi Gusung Desa Bontoborusu yang diantaranya menggunakan alat tangkap berupa Pancing, Jaring, Rawe dan Tombak.

No.	Nama	Alat Tangkap	Alamat
1	Hamansa	Jaring	Kahu-Kahu Tengah
2	Pariono	Sambak	Kahu-Kahu Utara
3	Sapiuddin	Rawe	Kahu-Kahu Utara
4	Dermawan	Tombak	Dusun Dopa
5	Bakri	Tombak	Dusun Dopa
6	Darjat	Pancing	Dusun Dopa

- 4) Pada titik koordinat Lat -6.180055 Long 120.419969 tanggal 09 Desember 2022 dilakukan pendataan kapal yang berlabuh di Perairan Pulau Pasi Gusung Desa Bontoborusu dan didapatkan 7 (tujuh) buah kapal berukuran <2GT yang berlabuh di Perairan Pulau Pasi Gusung Desa Bontoborusu, alat tangkap yang digunakan antara lain yaitu Rawe, Jaring, dan Bubu.



- Kegiatan Pengadaan Perahu Pengawas POKMASWAS Julu Siri dan Pokmaswas Purnama



#### 4.3.10. CDK Pangkajene dan Kepulauan

Pembangunan perikanan berkelanjutan (Sustainable Fisheries) harus berlangsung secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan. Upaya Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia Dilakukan melalui tiga pilar, yaitu Kedaulatan (Sovereignty) yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga Pilar ini dimaksudkan dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan disulawesi selatan., namun sampai saat ini upaya tersebut dirasakan masih belum optimal, disamping karena keterbatasan sarana dan prasarana, penyebab lainnya adalah belum adanya pemahaman yang menyeluruh tentang aturan dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk menjawab hal tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2018 tanggal 12 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan yang lebih bersifat Teknis dan operasional serta mandiri, hal ini dimaksudkan untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Kelautan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan Pelimpahan Kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah cabang dinas kelautan pangkajene dan kepulauan, Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan kepulauan mempunyai dua tugas utama yaitu pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Penataan dan Pengelolaan kawasan perairan di wilayah Pangkajene dan Kepulauan.

##### I. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

##### A. Kegiatan Pengelolaan Ruang laut sampai dengan 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi

##### 1. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

##### ■ Penanaman Mangrove



Penanaman Mangrove di Kabupaten Pangkep sebanyak 20.000 batang dengan realisasi keuangan sebesar Rp 99.800.000,- (persentase 99,80 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 100.000.000,-

Output Kegiatan ini yaitu Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, sebagai upaya pemulihan ekosistem mangrove rusak sehingga dapat pulih kembali di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



#### ■ Tambat kapal / Perahu di Pulau-pulau kecil

Tambat kapal / Perahu di Pulau-pulau kecil di Pulau Polewali Desa Mattiro Labangeng, Kec. Liukang Tupabbiring Utara Panjang 45 Meter dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 198.944.000,- (persentase 99,47 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp. 200.000.000,-. Output Kegiatan ini yaitu meningkatnya pembangunan/rehabilitasi sarana/prasarana kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil berupa bantuan tambatan perahu di wilayah Pangkajene dan Kepulauan dalam memudahkan sekaligus memperpanjang aktivitas ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



#### ■ Transplantasi Terumbu Karang

■ Transplantasi Karang Buatan/ Artificial Reef di Pulau Pejenakang Desa Mattiro Deceng Kec. Liukang Tupabbiring sebanyak 200 Reef star dengan Jumlah bibit karang sebanyak 3000 bibit realisasi keuangan sebesar Rp 183.990.000,- (persentase 99,45 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 185.000.000,-



- ➡ Transplantasi Karang Buatan/ Artificial Reef di Pulau Salebbo Desa Mattiro Walie Kec. Liukang Tupabiring Utara sebanyak 200 Reef star dengan Jumlah bibit karang sebanyak 3000 bibit realisasi keuangan sebesar Rp 184.348.000,- (persentase 99,65 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 185.000.000,-



- ➡ Transplantasi Karang Buatan/ Artificial Reef di Pulau Samatellu Pedda Desa Mattiro Walie Kec. Liukang Tupabiring Utara sebanyak 200 Reef star dengan Jumlah bibit karang sebanyak 3000 bibit realisasi keuangan sebesar Rp 183.900.000,- (persentase 99,41 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 185.000.000,-

Kegiatan ini bertujuan untuk Pemulihan Terumbu Karang yang telah rusak, Pemanfaatan Terumbu Karang secara lestari, Perluasan Terumbu Karang dan terumbu karang sendiri memiliki fungsi ekologi dan manfaat ekonomi, fungsi ekologis terumbu karang diantaranya pelindung pantai sebagai pemecah ombak, tempat memijah, dan berkembang biak bagi biota laut. manfaat dari segi ekonomi terumbu karang itu sendiri diantaranya sebagai sumber pendapatan masyarakat pulau sebagai dive site penyelaman dalam kegiatan dunia pariwisata dan sebagai tempat mata pencaharian bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.



#### ■ Apartemen Ikan

- ➡ Apartemen Ikan di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabiring, Kab. Pangkep sebanyak 12 Unit Kolom berbentuk Piramida dengan Jumlah Apartemen berbentuk gorong - gorong sebanyak 180 buah dengan realisasi keuangan sebesar Rp 199.550.000,- (persentase 99,78 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 200.000.000,-



- ➡ Apartemen Ikan di Pulau Salebbo Desa Mattiro Walie, Kec. Liukang Tupabbiring Utara, Kab. Pangkep sebanyak 12 Unit Kolom berbentuk Piramida dengan Jumlah Apartemen berbentuk gorong - gorong sebanyak 180 buah dengan realisasi keuangan sebesar Rp 199.000.000,- (persentase 99,50 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 200.000.000,-  
Tujuan Apartemen / Rumah Ikan yaitu untuk menjaga keberlanjutan Pemanfaatan sumberdaya Ikan melalui introduksi struktur buatan sebagai area khusus, yang diharapkan dapat mempengaruhi atau menggantikan sebagian peran/Fungsi Ekologis alami sumberdaya Ikan.



#### ■ Pantai Berseri CDK Pangkep

Kegiatan Pantai berseri dilaksanakan di Pulau Balang Lmpo, Desa Mattiro Sompe, Kec. Liukang Tupabbiring Utara, Kab. Pangkep, Jumlah total peserta sebanyak 200 orang, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 72.370.000,- (persentase 96,60 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 173.792.500,-

Output Kegiatan ini yaitu meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pantai Berseri, serta pemahaman masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dari sampah di wilayah kabupaten pangkajene dan kepulauan.



#### ■ Temu pengelolaan Kawasan Mangrove Wilayah Pangkep

Kegiatan Temu pengelolaan Kawasan Mangrove Wilayah Pangkep dilaksanakan di Pulau Sagara, Desa Mattiro Bombang, Kec. Liukang Tupabbiring Utara, Kab. Pangkep, Jumlah total peserta sebanyak 75 orang, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 36.980.000,-



(persentase 95,94 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 38.544.000,

Output dari Pelaksanaan kegiatan ini yaitu Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat tentang upaya mererehabilitasi sumberdaya hayati melalui pemulihan ekosistem mangrove rusaksehinggadapat pulih kembali.



#### ■ Cetak Liflet dan Papan Informasi

- Kegiatan Cetak Leaflet Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil CDK Pangkep, sebanyak 1650 eks, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.335.000,- (persentase 99,67 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 49.500.000,-

Output Kegiatan ini yaitu tersedianya Tersedianya Sarana dan Prasarana sosialisasi bagi masyarakat dan nelayan di Pangkajene dan Kepulauan berupa Cetak Leaflet Kawasan Konservasi Pesisir dan PPK

- Kegiatan Cetak Papan Informasi Pelestarian Lingkungan Pesisir, sebanyak 10 buah, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.800.000,- (persentase 99,60 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 50.000.000,-

Output Kegiatan ini yaitu tersedianya Tersedianya Sarana dan Prasarana sosialisasi bagi masyarakat dan nelayan di Pangkajene dan Kepulauan berupa Papan Informasi Pelestarian Lingkungan Pesisir

- Kegiatan Cetak Papan Informasi Pengelolaan Mangrove CDK Pangkep, sebanyak 10 buah, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.850.000,- (persentase 99,70 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 50.000.000,-

Output Kegiatan ini yaitu tersedianya Tersedianya Sarana dan Prasarana sosialisasi bagi masyarakat dan nelayan di Pangkajene dan Kepulauan berupa Cetak Papan Informasi Pengelolaan Mangrove CDK Pangkep





## II. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

### B. KEGIATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI 12 MIL

#### 2. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai 12 Mil

##### ■ Perlengkapan Pokmaswas

- ✦ Perlengkapan Perlengkapan Pokmaswas Bina Laut, Desa Mattiro Langi, Kec. Liukang Tupabbiring, Kab. Pangkep.  
Perlengkapan Perlengkapan Pokmaswas Bina Laut, Desa Mattiro Langi, Kec. Liukang Tupabbiring, Kab. pangkep berupa Kamera, GPS, Teropong, Senter dan Pelampung dengan realisasi keuangan sebesar Rp 29.950.000,- (persentase 99,83 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 30.000.000,-
- ✦ Perlengkapan Pokmaswas Passamaturukang Desa Balo-Balo, Desa Balo-baloang, Kec. Liukang Tangayya, kab. Pangkep  
perlengkapan Pokmaswas Passamaturukang Desa Balo-Balo, Desa Balo-baloang, Kec. Liukang Tangayya, kab. Pangkep berupa Kamera, GPS, Teropong, Senter dan Pelampung dengan realisasi keuangan sebesar Rp 29.950.000,- (persentase 99,83 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 30.000.000,-
- ✦ Perlengkapan Pokmaswas Balanga Desa Bulu Cindea, Kec. Bungoro Kab. Pangkep.  
Perlengkapan Perlengkapan Pokmaswas Balanga Desa Bulu Cindea, Kec. Bungoro Kab. Pangkep berupa Kamera, GPS, Teropong, Senter dan Pelampung dengan realisasi keuangan sebesar Rp 29.850.000,- (persentase 99,50 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 30.000.000,-
- ✦ Perlengkapan Pokmaswas Barakuda Perkasa Desa Sailus, Desa Sailus, Kec. Liukang Tangayya, Kab. pangkep  
Perlengkapan Pokmaswas Barakuda Perkasa Desa Sailus, Desa Sailus, Kec. Liukang Tangayya, Kab. pangkep berupa Kamera, GPS, Teropong, Senter dan Pelampung dengan realisasi keuangan sebesar Rp 29.850.000,- (persentase 99,50 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 30.000.000,-

Output kegiatan ini yaitu meningkatnya sarana dan prasarana pengawasan bagi Pokmaswas berupa Perlengkapan Pokmaswas Balanga Desa Bulu Cindea Kec Bungoro

Kabupaten Pangkep dalam menunjang aktivitas pengawasan kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) untuk mencegah destructive fishing di kabupaten pangkajene dan kepulauan



#### ■ Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sebanyak 13 kali dalam setahun di wilayah kepulauan pangkep dengan realisasi keuangan sebesar Rp 220.046.250,- (persentase 96,48 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 212.310.000,-

Output Kegiatan ini yaitu meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pangkajene dan kepulauan dalam mencegah IUU Fishing dan Destrutive Fishing



#### ■ Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan SDKP

Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan SDKP dilaksanakan di Hotel Grand Palace Makassar, Jumlah total peserta sebanyak 66, yang berasal dari perwakilan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), mahasiswa dan masyarkat nelayan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan orang, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 65.225.900,- (persentase 96,16 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp Rp 67.831.900,-,

Output Kegiatan ini yaitu Penguatan kelembagaan Pokmaswas dalam membantu pengawas perikanan dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pangkajene dan kepulauan



■ Gerakan Pemuda Cinta Bahari Anti Bom Bius SDKP

Gerakan Pemuda Cinta Bahari Anti Bom Bius SDKP di Pulau Polewali Desa Matittiro Labangeng Kec. Liukang Tupabbiring Utara Kab. Pangkep, Jumlah total peserta sebanyak 200 yang berasal dari Pemuda dan masyarakat Nelayan dan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 68.800.000,- (persentase 96,16 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp Rp 76.228.000,-,

Output Kegiatan ini yaitu Pemberdayaan masyarakat utamanya pendayagunaan pemuda dalam mencegah aktivitas penangkapan ikan dengan bom dan bius ikan



■ Cetak Liflet dan Papan Informasi

- ✚ Kegiatan Cetak Leaflet Pencegahan IUU Fishing CDK Pangkep, sebanyak 1650 eks, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.252.000,- (persentase 99,50 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 49.500.000,-

Output Kegiatan ini yaitu tersedianya Tersedianya Sarana dan Prasarana sosialisasi bagi masyarakat dan nelayan di Pangkajene dan Kepulauan berupa Leaflet Pencegahan IUU Fishing CDK Pangkep

- ✚ Kegiatan Cetak Leaflet Pengelolaan dan Pengawasan SDKP, sebanyak 1650 eks, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.335.000,- (persentase 99,67 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 49.500.000,-

Output Kegiatan ini yaitu tersedianya Tersedianya Sarana dan Prasarana sosialisasi bagi masyarakat dan nelayan di Pangkajene dan Kepulauan berupa Cetak Leaflet Pengelolaan dan Pengawasan SDKP

- ✚ Kegiatan Cetak Papan Informasi Pencegahan dan Penanggulangan IUU CDK Pangkep, sebanyak 10 buah, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.850.000,- (persentase 99,70 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 49.500.000,-

Output Kegiatan ini yaitu tersedianya Tersedianya Sarana dan Prasarana sosialisasi bagi masyarakat dan nelayan di Pangkajene dan Kepulauan berupa Cetak Papan Informasi Pencegahan dan Penanggulangan IUU CDK Pangkep



### ■ Video Edukasi Pengawasan SDKP CDK Pangkep

Kegiatan Video Edukasi Pengawasan SDKP CDK Pangkep, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.395.000,- (persentase 98,79 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 50.000.000,-

Output Kegiatan ini yaitu tersedianya Tersedianya Sarana dan Prasarana sosialisasi bagi masyarakat dan nelayan di Pangkajene dan Kepulauan berupa Leaflet Pencegahan IUU Fishing CDK Pangkep



## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan kepulauan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Nelayan senantiasa mengutamakan pelayanan Prima dalam rangka menghadirkan pemerintah ditengah masyarakat untuk memberikan layanan terbaik, sebagai wujud nyata reformasi birokrasi
2. Kegiatan Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan kepulauan yang berasal dari APBD pada Tahun Anggaran 2023 terlaksana dengan baik dengan tingkat pencapaian realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %

### B. SARAN

Untuk pelaksanaan Kinerja Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan kepulauan pada Tahun 2022, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Namun dalam pelaksanaan Kinerja yang lebih baik diperlukan SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya agar lebih memudahkan dalam pelaksanaannya.

Hal lain yang menjadi kendala adalah masih belum seimbangnya antara rasio anggaran dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengupayakan semaksimal mungkin agar rasio anggaran sesuai dengan beban tugas yang harus dilaksanakan pada Cabang Dinas Kelautan dan perikanan Pangkajene dan Kepulauan.



#### 4.3.11. CDK Luwu Raya

Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya memiliki tugas sebagai berikut : 1) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 2) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 3) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, dan; 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya, DKP Sulawesi Selatan Tahun 2021 salah satunya adalah kegiatan Pengawasan SDKP di Wilayah Laut Flores. Kegiatan tersebut memprioritaskan penanganan pengendalian *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Yaitu kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan atau pelaku usaha dengan cara merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida/pembiusan dan penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* (pukat harimau) serta eksploitasi habitat laut yang dilindungi. *Destructive fishing* merupakan malpraktek dalam kegiatan penangkapan ikan yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

Selain kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya mempunyai tugas dalam hal penataan dan pengelolaan kawasan perairan di Luwu Raya. Salah satu contohnya adalah menata dan mengelola daerah konservasi. Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetic termasuk mendorong penguatan fungsi otoritas pengelola konservasi sumberdaya ikan

Saat ini untuk Luwu Raya hanya memiliki beberapa pulau-pulau kecil yaitu Pulau Libukang, Pulau Onrongalang, Pulau Mori, Pulau Loeha, Pulau Lanipanipa, Pulau Langkara, Pulau Kalasipo, Pulau Caria Lampe, Pulau Caria, Pulau Bulupoloe, Pulau Bete dan Pulau Balantang. Pulau-pulau

tersebut belum dikelola secara maksimal sehingga dengan keberadaan Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya diharapkan nantinya pulau-pulau ini bisa menjadi daerah konservasi.

Hal tersebut diatas merupakan acuan bagi Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya dalam menyusun program kegiatannya dalam Tahun Anggaran 2023. Hal ini juga merupakan bagian dari tupoksi Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur No.03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.

■ **Pelaksanaan Tugas Seksi Penataan Dan Pengelolaan Kawasan Perairan**

Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan merupakan salah satu seksi dari Cabang Dinas Kelautan Luwu Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan dan pengelolaan kawasan perikanan meliputi seluruh wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mendukung tugas operasional Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan dalam Tahun Anggaran 2022 dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.1.088.500.000,- yang terdiri dari Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Tanaman sebesar Rp.860.000.000,-, Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp.214.200.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.14.300.000,.

Hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi penataan dan pengelolaan kawasan perairan diuraikan sebagai berikut:

1. **Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (Penanaman Mangrove)**

- ✚ Kabupaten Luwu Timur dianggarkan sebesar Rp.190.000.000,- dengan realisasi Fisik 100% dan Keuangan Rp.189.875.490,-



- ✦ Kelurahan Suli Kabupaten Luwu dianggarkan sebesar Rp.140.000.000,- dengan realisasi Fisik 100% dan Keuangan Rp.139.920.000,- atau 99,93% dengan jumlah orang yang terlibat sebanyak 30 orang.



- ✦ Kelurahan Larompong Kabupaten Luwu dianggarkan sebesar Rp. 140.000.000,- dengan realisasi Fisik 100% dan Keuangan Rp. 139.897.000,- atau 99,93% dengan jumlah orang yang terlibat sebanyak 35 orang



- ✦ Dusun Buntu Siapa Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Fisik 100% dan keuangan Rp. 199.905.000,- atau 99,95% dengan jumlah orang yang terlibat sebanyak 100 orang.



- ✦ Kelurahan Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000,- dengan realisasi Fisik 100% dan Keuangan Rp. 189.671.000,- atau 99,83% dengan jumlah orang yang terlibat sebanyak 100 orang.



2. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Pembangunan Tambatan Perahu) Dusun Toro Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

- ✦ Tambat Kapal/Perahu di Pulau-Pulau Kecil 40 Meter dianggarkan sebesar Rp.200.000.000 dengan realisasi Fisik 100% dan Keuangan Rp.199.568.150 atau 99,78% dengan output terbangunnya tambatan perahu untuk nelayan sebanyak 1 unit.





### 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Dinas Biasa)

Dana perjalanan dinas dalam daerah diperuntukkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Identifikasi Lokasi, Monitoring, Penanaman Mangrove dan Pembinaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya, sehingga dari pagu anggaran perjalanan sebesar Rp. 14.300.000,- realisasi sampai 30 Desember 2022 sebesar Rp. 14.150.000 atau 98,95 %,-



#### ■ Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya melaksanakan tugas patroli pengawasan pengelolaan SDK dan lingkungan berada di Wilayah Teluk Bone yang merupakan jalur penangkapan ikan yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) 713 meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali (sesuai Permen Kelautan dan Perikanan No.71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Kegiatan Pengawasan SDKP Sampai Dengan 12 Mil memiliki anggaran sebesar Rp.358.069.250,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.355.071.900,- (99.16%).

Hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Bahan bakar yang digunakan adalah jenis Dexlite (800 liter), Pertamina (997 liter) dan pelumas (32 liter) dengan jumlah pagu anggar sebesar Rp.24.692.250,- dan yang dipergunakan/realisasi keuangan sebesar Rp.23.556.900,- (95,65 %).



2. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.304.200.000,-, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.302.580.000,- (99,47%), dengan rincian sebagai berikut:

a. Perahu Pokmaswas

Pokmaswas Teluk Mutiara Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, kab. Luwu dengan anggaran sebesar Rp.214.200.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.212.730.000,- (99,31%).



b. Perlengkapan POKMASWAS (Sarana dan Prasarana)

- Pokmaswas Pejuang Muda Wija To Cerekang, Desa Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,- , realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.29.950.000,- (99.83%).



- Pokmaswas Pao Raja Desa Pao, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- , realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.29.950.000,- (99.83%).



- Pokmaswas Pengawas Danau, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- , realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.29.950.000,- (99.83%).



### 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Patroli Pengawasan)

Kegiatan patroli pengawasan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan sebanyak tujuh kali dengan rincian biaya pagu anggaran sebesar Rp.20.640.000,- , realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Dokumentasi kegiatan patrol selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



Patroli pengawasan di Kab. Luwu (Teluk Bone) tanggal 10 s/d 11 Februari 2022



Patroli pengawasan di Kab. Luwu Timur (Teluk Bone) tanggal 16 s/d 17 Februari 2022



Patroli pengawasan di Kab. Luwu (Teluk Bone) tanggal 23 s/d 24 Maret 2022



Patroli pengawasan di Palopo (Teluk Bone) tanggal 25 Agustus 2022



Patroli pengawasan di Kab. Luwu (Teluk Bone) tanggal 26 Agustus 2022



Patroli pengawasan di Kab. Luwu Utara (Teluk Bone) tgl 13 s/d 14 September 2022



Patroli pengawasan di Kab. Luwu Timur (Teluk Bone) tanggal 4 s/d 5 Oktober 2022

4. Perdin dalam daerah dalam rangka perjalanan dinas dari lokasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian DAK

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.8.600.000,-, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.295.000,- (96,45%). Hasil dokumentasi kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka perjalanan dinas dari lokasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian DAK adalah sebagai berikut:



Kunjungan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung ke DKP Prov. Sul-Sel dalam rangka koordinasi pengawasan pada Maret 2022



Pertemuan Koordinasi Teknis Pengawasan dan Pengendalian SDKP Prov. Sul-Sel tanggal 29 Juni 2022



FGD dan MAD Khusus, Kajian Sosial Ekonomi dan Sebaran Ekosistem Kawasan Pesisir dan Olahan Hasil Laut tanggal 3 November 2022



Monitoring pengerjaan perahu Pokmaswas tanggal 19 November 2022



## PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

### PERMASALAHAN

- Pengadaan ATK yang tidak terpenuhi secara maksimal dikarenakan penganggaran baru dilakukan pada DPA Perubahan tahun 2022.
- Kegiatan patroli pengawasan CDK Luwu Raya di Teluk Bone tidak berjalan maksimal disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Beberapa aduan masyarakat terkait adanya pelaku pengeboman dan pembiusan ikan tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
- Dari beberapa kegiatan patroli pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 di wilayah perairan Luwu Raya, masih banyak ditemukan kapal-kapal nelayan usaha perikanan tangkap yang tidak memiliki dokumen perizinan usaha dan dokumen kapal penangkap/pengangkut ikan.
- Ditemukan beberapa nelayan yang masih melakukan penangkapan menggunakan alat tangkap mini *trawl*.
- Pelaksanaan patroli pengawasan PSDKP kurang maksimal dikarenakan tidak adanya armada *speedboat* pada CDK Luwu Raya.
- Banyaknya aduan dari masyarakat terkait aktivitas jual beli lahan laut untuk keperluan budidaya rumput laut serta pengalihan lahan laut menjadi tambak.
- Kegiatan Pengawasan pembangunan tambatan perahu Dusun Toro Padang Kalua Kabupaten Luwu tidak dibayarkan sampai hari ini karena pihak rekanan tidak dapat menerbitkan efaktur yang disebabkan adanya pemutihan PKP oleh Dirjen Pajak.

### UPAYA PEMECAHAN MASALAH

- Koordinasi dengan Sub Bagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan agar dalam perubahan anggaran baik parsial ataupun DPA Perubahan dilakukan revisi lokasi dan jumlah unit.
- Pengadaan ATK sebisa mungkin dianggarkan di awal tahun untuk memperlancar kegiatan administrasi di CDK Luwu Raya.
- Jumlah anggaran perjalanan dinas sangat minim jika dibandingkan dengan wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya yang cukup luas sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah anggaran pada setiap seksi/ sub bagian guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan.
- Perlunya penambahan anggaran untuk memaksimalkan kegiatan patroli pengawasan.
- CDK Luwu Raya perlu untuk terus melakukan pembinaan rutin, sosialisasi dan penyadaran hukum terhadap para pemilik kapal, nahkoda dan nelayan kecil.



- Patroli pengawasan SDKP digelar dengan melibatkan para Kelompok Nelayan binaan.
- Para stakehokders/usaha perikanan secara ilegal (tidak sah) dihimbau agar dapat segera melengkapi usahanya dengan dokumen perizinan.
- Para pemilik kapal dihimbau segera melakukan pengukuran ulang terhadap kapal perikanan serta diminta tidak menggunakan alat tangkap ilegal.
- Perlu diupayakan untuk pengadaan kapal pengawasan utnuk lebih memaksimalkan kegiatan patroli pengawasan.
- Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait aktivitas jual beli dan pengalihan lahan laut untuk kepentingan pribadi.
- Pemilihan rekanan untuk kerjasama perlu dilakukan lebih selektif untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan.

Secara umum dari hasil monev triwulan tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan teridentifikasi beberapa kendala/permasalahan tersebut yaitu:

Triwulan I :

Realisasi keuangan sebesar 5,75 % dan fisik 7,80 % dari target 22,98 % disebabkan :

- a. Proses persiapan administrasi kegiatan yaitu penetapan SK PA, KPA, PPTK
- b. Proses persiapan untuk kegiatan yang dikontrakkan dan belanja diserahkan ke masyarakat masih tahap persiapan, identifikasi kelompok dan pembuatan SK kelompok.
- c. Untuk belanja rutin seperti Pembayaran TPP (Januari - Maret) menunggu instruksi dari instansi terkait.

Rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan

- a. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian SK pengelola kegiatan
- b. Mempercepat dan memastikan persiapan administrasi kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.
- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pembayaran TPP Januari - Maret tepat waktu.

Triwulan II :

Realisasi keuangan sebesar 18,97 % dan fisik 24,45 % dari target 50,95 % disebabkan :

- a. Adanya rekomendasi kebijakan untuk pekerjaan belanja langsung ke masyarakat yang dialokasikan di kab/kota untuk memberdayakan rekanan lokal sehingga proses Pengadaan Barang Jasa terhambat dan membutuhkan waktu untuk proses pengadaan.
- b. Kegiatan kontraktual sedang berproses dan kegiatan yang telah berkontrak sedang tahap pelaksanaan.
- c. Pembayaran TPP April masih berproses pengajuan.

Rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan

- a. Berkoordinasi dengan pihak terkait proses pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat proses kontrak
- b. Memantau secara intens perkembangan kegiatan memastikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pembayaran TPP April dan Mei.

Triwulan III :

Realisasi keuangan sebesar 41,29 % dan fisik 58,86 % dari target 79,09 % disebabkan :

- a. Program pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil kegiatan penataan wilayah pesisir sebanyak 4 kali akan direfocusing menjadi 1 kali.
- b. Program pengelolaan perikanan tangkap pengadaan kapal 20 GT, 15 GT dan 5 GT dengan total nilai Rp 2.954.000.000,- tidak dilaksanakan karena kelompok tidak memenuhi persyaratan.
- c. Program pengawasan SDKP pekerjaan perahu pokmaswas dan perlengkapan pokmaswas masih tahap pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan

- a. Unit kerja yang mempunyai anggaran yang direfocusing untuk berkoordinasi dengan subag program dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang tidak di refocusing
- b. Unit kerja Memonitoring dan memantau pelaksanaan kegiatan memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

Triwulan IV :

Realisasi keuangan sebesar 93,77 % disebabkan

Sisa Anggaran Rp 4.937.452.358 terdiri dari :

SPM yang tidak terbayarkan	= Rp 2.266.381.366
Tidak dilaksanakan/Tidak Selesai	= Rp 175.687.332
Sisa belanja kontrak kegiatan (DAK)	= Rp 1.364.333.244
Sisa pagu dari nilai kontrak	= Rp 1.230.395.416

dan fisik 99,73 % disebabkan :

Bantuan sarana prasarana rumput laut Klp. Madeceng, Kp. Minasa, Klp. Innawa Kab. Pangkep sebanyak 20 paket = Rp 100.000.000 dan kab. Bantaeng 7 paket = Rp 35.000.000

sisa pembayaran pembangunan tambatan perahu di Pulau Samalona Kota Makassar progres fisik hanya mencapai 76,32 % = Rp 69.451.932

Kegiatan atk dan perdin perizinan = Rp 6.235.400

Rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Agar unit kerja memperhatikan kebutuhan anggaran dan kegiatan yang betul-betul dibutuhkan sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait (inspektorat dan BKAD) terkait kegiatan yang tidak terbayarkan.

## V. HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

### 5.1. Ekonomi

#### 5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator makro ekonomi untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2018 - 2022 data produksi total perikanan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan rata - rata sebesar 3,7 %.

#### 5.1.2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 total tercatat sebesar 4,532,670.4 ton. Dibanding dengan hasil yang dicapai tahun 2021 sebesar 4,498.891,2 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 33,779.2 ton atau 0,8 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 13. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2021 - 2022

No.	Sumber Daya	Tahun		%
		2021	2022	
1	Penangkapan (Ton)	417,410.7	436,735.7	4.6
	a. Laut	375,833.2	391,316.3	4.1
	b. Perairan Umum	41,577.5	45,419.4	9.2
2	Budidaya (Ton)	4,081,480.5	4,095,934.7	0.4
	a. Tambak	1,358,688.6	1,391,089.2	2.4
	b. Laut	2,701,903.0	2,681,326.7	(0.8)
	c. Kolam	14,740.3	16,315.7	10.7
	d. Sawah	5,180.0	6,151.9	18.8
	e. KJA (Laut)	83.8	64.4	(23.1)
	f. KJA (Tawar)	884.8	986.8	11.5
	Jumlah (Ton)	4,498,891.2	4,532,670.4	0.8

#### a. Budidaya

Ada 2 (dua) komoditi utama yang dipacu dalam menunjang ekspor perikanan yaitu udang dan rumput laut, disamping itu komoditi kepiting bakau juga memiliki prospek untuk diekspor.

#### Udang

Di Sulawesi Selatan ada beberapa jenis udang yang hidup di tambak, tetapi yang dibudidayakan ada 2 (dua) jenis yaitu udang Windu dan Vannamei.

Produksi udang di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 61,446.2 ton yang terdiri dari udang windu 10,662.3 ton, udang vannamei 38,344.9 ton, dan udang lainnya 12,438.9 ton, Jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 54,974.6 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 11,8 %.



Produksi udang di Sulawesi Selatan terbanyak terdapat di kabupaten Pinrang sebesar 15,726.9 ton (25,6 %), Kabupaten Bone sebesar 9,997.5 ton (16,3 %), Kabupaten Barru sebesar 4,708.6 ton (7,7 %), Kabupaten Bulukumba sebesar 3,714.0 ton (6 %) dan Kabupaten Pangkep sebesar 3,427.8 ton (5,6 %).

### **Rumput Laut**

Di Sulawesi Selatan ada 3 (tiga) jenis rumput laut yang diusahakan oleh pembudidaya yaitu jenis *Eucheuma spp*, *Spinosium spp* dan *Gracillaria spp*, jumlah produksi ketiga jenis rumput laut tersebut pada tahun 2022 sebesar 3,796,733.3 ton (basah), yang terdiri dari *Eucheuma spp* sebesar 2,291,602.3 ton basah, *Gracillaria spp* sebesar 1,115,406.6 ton basah dan *Spinosium spp* sebesar 389,724.4 ton basah. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2021 sebesar 3,786,411.7 ton basah, maka terjadi kenaikan sebesar 0,3 %.

Daerah produksi *Eucheuma cottonii* yaitu Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Pangkep, Barru, Luwu Timur, Pinrang, Maros dan Kota Palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Eucheuma cottonii* terbesar terdapat di kabupaten Wajo sebesar 439,665.7 ton basah (19,2 %), Kabupaten Takalar sebesar 371,330.4 ton (16,2 %), Kabupaten Pangkep sebesar 321,765.0 ton (14%), Kabupaten Luwu sebesar 310,570.8 ton (13,6 %) dan Kabupaten Jeneponto sebesar 238,508.4 ton (10,4 %).

Daerah produksi *Gracillaria spp* yaitu Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Maros, Pangkep, Luwu Timur, Pinrang, Gowa dan Kota Palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Gracillaria sp* terbesar terdapat di kabupaten Luwu sebesar 317,413.4 ton (28,5 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 187,994.1 ton (16,9 %), kabupaten Bone sebesar 165,590.0 ton (14,8 %), Kabupaten Luwu Timur sebesar 153,829.5 ton (13,8 %) dan Kota Palopo sebesar 143,425.0 ton (12,9 %).

Daerah produksi *Spinosium spp* yaitu Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Selayar dan Bantaeng. Produksi Rumput laut untuk jenis *Spinosium spp* terbesar terdapat di kabupaten Takalar sebesar 162,174.0 ton (41,6 %), Pangkep sebesar 74,240.0 ton (19,1 %), Bulukumba sebesar 68,503.4 ton (17,6 %), Bantaeng sebesar 44,634.6 ton (11,5 %) dan Sinjai sebesar 25,737.9 ton (6,6 %).

### **Kepiting Bakau (*Scylla serrata*)**

Adapun komoditi lainnya melalui usaha budidaya yaitu kepiting bakau (*Scylla serrata*). Produksi pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,569.7 ton sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,258.7 ton atau terjadi kenaikan produksi sebesar 24,7 %.

Selain komoditi udang, rumput laut dan kepiting bakau, ada beberapa komoditi ikan hasil budidaya yang dipacu untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat meliputi ikan bandeng, ikan mas, ikan nila dan ikan lainnya.

#### *Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)*

Produksi ikan bandeng dari hasil budidaya pada tahun 2022 tercatat sebesar 206,104.9 ton dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 211,225.4 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 5,120.5 ton atau 2,4 %. Penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan terdapat di kabupaten Bone sebesar 105,737.0 ton (51,3 %), Kabupaten Pinrang sebesar 22,711.1 ton (11,0 %), kabupaten Wajo sebesar 16,111.1 ton (7,8 %), kabupaten Luwu Tinur sebesar 14,270.6 ton (6,9 %) dan kabupaten Pangkep sebesar 12,815.0 ton (6,2 %).

#### *Ikan Mas (*Cyprinus carpio*)*

Produksi ikan Mas dari hasil budidaya di kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2022 tercatat sebesar 10,024.3 ton, dibanding dengan tahun 2021 tercatat sebesar 9,609.3 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 415 ton atau 4,3 %. Daerah-daerah yang selama ini andalan produksi ikan Mas yaitu Kabupaten Pinrang sebesar 2,192.7 ton (21,9 %), Kabupaten Toraja Utara sebesar 1,500.2 ton (14,9 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,153.7 ton (11,5 %), Kabupaten Bone sebesar 1,085.8 ton (10,8 %) dan Kabupaten Enrekang sebesar 698.2 ton (6,9 %).

#### *Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)*

Produksi ikan Nila dari hasil budidaya kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2022 tercatat sebesar 12,896.3 ton, dibanding dengan tahun 2021 tercatat sebesar 11,422.8 ton, maka terjadi peningkatan produksi sebesar 1,473.5 ton atau 12,9 %. Kabupaten penghasil ikan Nila di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pinrang sebesar 3,054.1 ton (23,7 %), Kabupaten Pangkep sebesar 2,891.0 ton (22,4 %), Kabupaten Sidrap sebesar 1,003.9 ton (7,8 %), Kabupaten Enrekang sebesar 983.5 ton (7,6 %) dan Kabupaten Bone sebesar 953.1 ton (7,4 %).

### **b. Penangkapan**

#### *Ikan Tuna /Cakalang/Tongkol*

Dimaksudkan dengan ikan tuna/cakalang/tongkol adalah ikan-ikan pelagis besar dalam hal ini meliputi : Albakora, Madidihang, Tuna Mata Besar, Setuhuk Loreng, Setuhuk Biru, Setuhuk Hitam, Ikan Layaran, Ikan pedang, Tongkol Komo, Tongkol Krai, Tongkol Abu-Abu, Lisong, Kenyar, Cakalang.

Pada tahun 2022 produksi tangkapan ikan tuna/Cakalang/Tongkol di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 79,534.3 ton, sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebesar 75,427.9 ton hal tersebut berarti terjadi kenaikan produksi tangkapan ikan tuna/cakalang/tongkol sebesar 4,106.4 ton atau sebesar 5,4 %. Kabupaten/Kota Penghasil TTC di Sulawesi selatan yaitu : Kabupaten Bukukumba sebesar 19,975.0 Ton (25,1 %), Kabupaten Bone 15,759.1 Ton (19,8 %), Kabupaten Sinjai sebesar 11,796.7 Ton (14,8 %), Kabupaten Luwu sebesar 5,438.5 Ton (6,8 %) dan kabupaten Pinrang sebesar 4,615.2 Ton (5,8 %).

#### **5.1.3. Konsumsi Ikan**

Konsumsi ikan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 69,7 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2021 tercatat sebesar 68,3 kg/kapita/ tahun dengan penduduk Sulawesi Selatan mencapai 9,225,747 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan konsumsi perkapita sebesar 2,1 %.

#### **5.1.4. Volume dan Nilai Eksport**

Komoditi hasil perikanan Sulawesi Selatan dipasarkan tujuan ekspor, antar Provinsi dan lokal. pada tahun 2022 tercatat sebesar 191,322 ton dengan nilai US\$ 528,397,804.0 dan pada tahun 2021 tercatat sebesar 179,019 ton dengan nilai US\$ 397,787,706 atau terjadi Kenaikan volume sebesar 6,8 % dan kenaikan nilai 32,8 %.

#### **5.1.5. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya**

Tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sangat bervariasi besarnya, dimana sangat ditentukan oleh sumberdaya yang dikelola dan komoditi yang diusahakan.

Tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya ikan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 tercatat antara Rp. 17,199,570 sampai Rp. 94,933,751 per tahun. Secara berurutan tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya di Sulawesi Selatan adalah di Budidaya Sawah/MinaPadi Rp. 17,199,570, Budidaya Kolam Rp. 24,215,698, Budidaya KJA Air Tawar Rp. 34,951,980, Budidaya Tambak Rp. 39,987,928, Budidaya KJA Laut Rp. 58,410,109 dan Budidaya laut (Rumput Laut) Rp. 94,933,751 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 29,132,262 dan nelayan perairan umum Rp. 72,015,838.

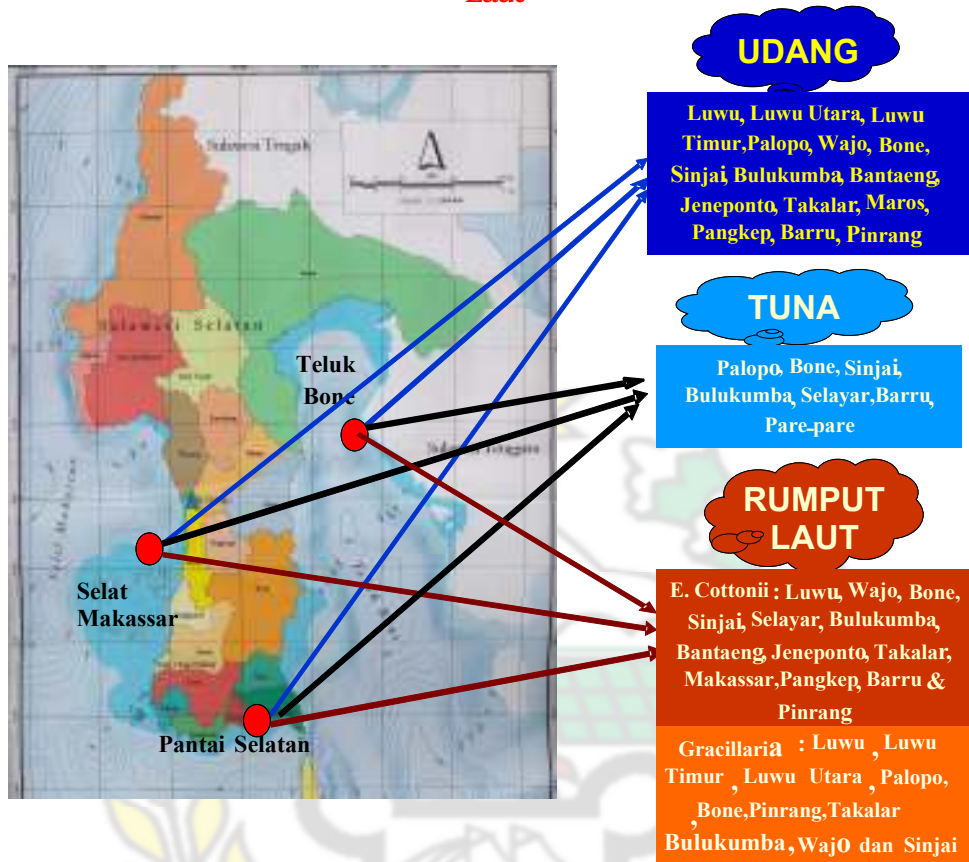
#### **5.1.6. Tenaga Kerja**

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tercatat pada Tahun 2022 sebanyak 500,538 orang atau 5,4 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 275,392 orang (55,0 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 225,146 orang (45,0 %).

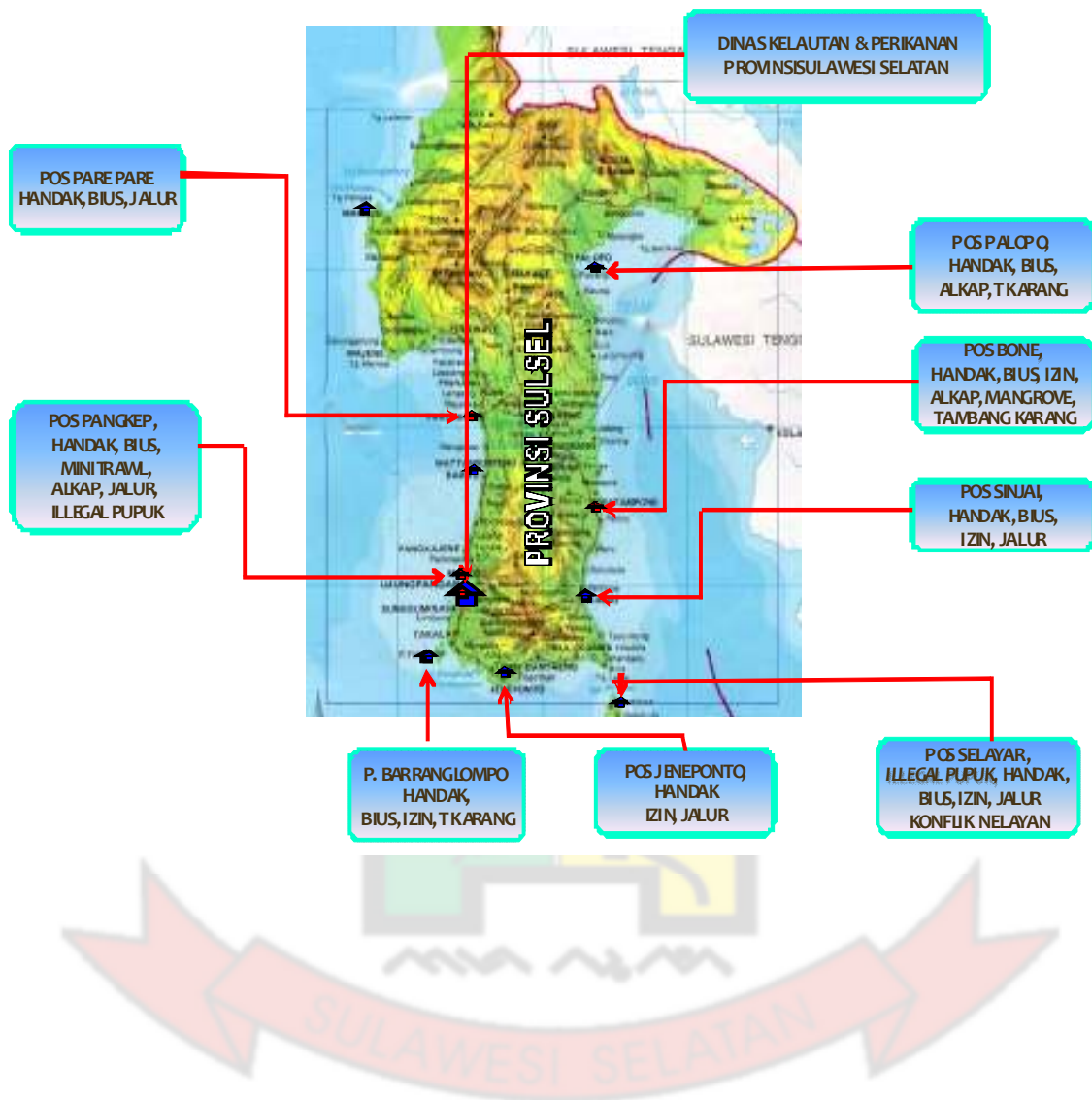




Lampiran 1. Wilayah Peta Penangkapan Tuna dan Budidaya, Udang dan Rumput Laut



Lampiran 2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Subsie Pengembangan SDM Pengawasan  
KP Sulawesi Selatan Tahun 2022



Lampiran 3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan,  
Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Total
1	Selayar	139,145
2	Bulukumba	443,292
3	Bantaeng	199,399
4	Jeneponto	410,639
5	Takalar	305,077
6	Gowa	783,167
7	Sinjai	263,827
8	Maros	403,774
9	Pangkajene Dan Kepulauan	351,426
10	Barru	186,910
11	Bone	813,188
12	Soppeng	236,049
13	Wajo	379,706
14	Sidenreng Rappang	327,416
15	Pinrang	411,795
16	Enrekang	230,622
17	Luwu	369,820
18	Tana Toraja	291,046
19	Luwu Utara	327,820
20	Luwu Timur	305,521
21	Toraja Utara	268,198
22	Makassar	1,432,189
23	Pare-Pare	154,854
24	Palopo	190,867
	<b>Jumlah</b>	<b>9,225,747</b>

Sumber : Angka ini merupakan angka proyeksi dari Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

#### Lampiran 4. Data Produksi Pembenuhan Udang Windu pada UPT Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut Tahun 2022

##### Periode Bulan Maret - Mei

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JENIS KOMODITI	JUMLAH (EKOR)	KETERANGAN
1	12 Maret 2022	Ir. Taufik	Pinrang	Windu	380,000	Pandawa 1000
2	13 Maret 2022	Ir. Taufik	Pinrang	Windu	562,000	Pandawa 1000
3	14 Maret 2022	Ir. Taufik	Pinrang	Windu	340,000	Pandawa 1000
4	15 Maret 2022	Ir. Taufik	Pinrang	Windu	320,000	Pandawa 1000
5	16 Maret 2022	Ir. Taufik	Pinrang	Windu	398,000	Pandawa 1000
6	20 April 2022	H. Anwar	Pangkep	Vanamae	70,000	Pembelian Umum
7	20 April 2022	H. Sudi	Pinrang	Vanamae	200,000	Pembelian Umum
8	21 April 2022	Andi Wahid	Suppa	Vanamae	150,000	Pembelian Umum
9	22 April 2022	H. Maming	Barru	Vanamae	40,000	Pembelian Umum
10	23 April 2022	H. Anwar	Pangkep	Vanamae	70,000	Pembelian Umum
11	23 April 2022	H. Maming	Barru	Vanamae	40,000	Pembelian Umum
12	25 April 2022	H. Kadir	Takkalasi	Vanamae	20,000	Pembelian Umum
13	25 April 2022	Madani	Suppa	Vanamae	250,000	Pembelian Umum
14	20 Mei 2022	H. Kadir	Takkalasi	Vanamae	70,000	Pembelian Umum
15	20 Mei 2022	Jamil	Suppa	Vanamae	100,000	Pembelian Umum
16	20 Mei 2022	H. Muhamamad	Suppa	Vanamae	50,000	Pembelian Umum
17	21 Mei 2022	P. Onding	Langnga	Vanamae	110,000	Pembelian Umum
18	22 Mei 2022	H. Anwar	Suppa	Vanamae	70,000	Pembelian Umum
19	22 Mei 2022	Abd. Latief	Suppa	Vanamae	50,000	Pembelian Umum
20	24 Mei 2022	H. Sudirman	Pekabata	Vanamae	160,000	Pembelian Umum
				<b>Sub Jumlah</b>	<b>3,450,000</b>	
				<b>Windu</b>	<b>2,000,000</b>	
				<b>Vanamae</b>	<b>1,450,000</b>	

##### Periode Bulan Juli - September

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JENIS KOMODITI	JUMLAH (EKOR)	KETERANGAN
1	10 Juni 2022	H. Anwar		Vanamae	70,000	Pembelian Umum
2	10 Juni 2022	H. Muhammad	Suppa	Vanamae	60,000	Pembelian Umum
3	10 Juni 2022	Ical		Vanamae	20,000	Pembelian Umum
4	11 Juni 2022	H. Maming	Barru	Vanamae	25,000	Pembelian Umum
5	13 Juni 2022	Ilyas	Pangkep	Vanamae	50,000	Pembelian Umum
6	13 Juni 2022	Jamil	Suppa	Vanamae	40,000	Pembelian Umum
7	16 Juni 2022	Ikbali Dewi	Maros	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
8	16 Juni 2022	Sahrul	Maros	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
9	17 Juni 2022	Olleng	Pangkep	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
10	17 Juni 2022	Mustafa	Pangkep	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
11	18 Juni 2022	Bung Tomo	Barru	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
12	21 Juni 2022	Ibrahim	Gowa	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
13	21 Juni 2022	Adam	Gowa	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
14	21 Juni 2022	Takauddin	Takalar	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
15	21 Juni 2022	Kamaruddin A	Takalar	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
16	22 Juni 2022	H. Muslimin	Makassar	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
17	24 Juni 2022	Samsuddin N	Jeneponto	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
18	24 Juni 2022	Asdir	Jeneponto	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
19	24 Juni 2022	Harmini	Jeneponto	Windu	30,000	Bantuan Gubernur
20	24 Juni 2022	Rustam	Pinrang	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
21	24 Juni 2022	Abd. Adir	Pinrang	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
22	7 Juli 2022	K. Dg. Palinga	Wajo	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
23	14 Juli 2022	H. Ruslan	Makassar	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
24	14 Juli 2022	Syaruddin/Rida	Makassar	Windu	30,000	Bantuan Gubernur
25	14 Juli 2022	M.Nawir/A. Agun	Pinrang	Windu	30,000	Bantuan Gubernur
26	20 Agus 2022	H. Agus	Barru	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
27	26 Agus 2022	Herman	Bone	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
28	26 Agus 2022	A. Rusman	Bone	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
29	31 Agus 2022	H. Ahmad Said	Sinjai	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
30	31 Agus 2022	Saddang Husain	Sinjai	Windu	250,000	Bantuan Gubernur



## LAPORAN TAHUNAN 2022

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JENIS KOMODITI	JUMLAH (EKOR)	KETERANGAN
31	6 Agus 2022	Andi Musakkir	Luwu	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
32	6 Agus 2022	Tomi	Luwu	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
33	24 Agus 2022	Andi Aso	Pinrang	Vanamae	50,000	Pembelian Umum
34	24 Agus 2022	Andi Ratna	Pinrang	Vanamae	50,000	Pembelian Umum
35	24 Agus 2022	Adi	Pekkabata	Vanamae	250,000	Pembelian Umum
36	25 Agus 2022	Ruslan	Pangkep	Vanamae	145,000	Pembelian Umum
37	25 Agus 2022	H. Kadir	Suppa	Vanamae	60,000	Pembelian Umum
38	25 Agus 2022	H. Sappe	Barro	Vanamae	65,000	Pembelian Umum
39	30 Agus 2022	Taufik	Pandawa 1000	Windu	398,000	Pembelian Umum
40	3 Sept 2022	Taufik	Pandawa 1000	Windu	136,000	Pembelian Umum
41	12 Sept 2022	Taufik	Pandawa 1000	Windu	720,000	Pembelian Umum
42	14 Sept 2022	Baharuddin	Luwu Timur	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
43	14 Sept 2022	Muh. Natsir	Luwu Timur	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
44	18 Sept 2022	Gusman	Patobong	Vanamae	100,000	Pembelian Umum
45	18 Sept 2022	Arfa	Pangkep	Vanamae	90,000	Pembelian Umum
46	19 Sept 2022	Algy	Malili	Vanamae	180,000	Pembelian Umum
47	19 Sept 2022	Abdul Kadir	Suppa	Vanamae	60,000	Pembelian Umum
48	19 Sept 2022	Jamil	Lanrisang	Vanamae	119,000	Pembelian Umum
49	20 Sept 2022	Akbar	Wotu	Vanamae	120,000	Pembelian Umum
				<b>Sub Jumlah</b>	<b>9,148,000</b>	
				<b>Windu</b>	<b>7,594,000</b>	
				<b>Vanamae</b>	<b>1,554,000</b>	

### Periode Bulan Oktober – Desember

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JENIS KOMODITI	JUMLAH (EKOR)	KETERANGAN
1	4 okt 2022	Wahab	Pinrang	Vanamae	30,000	Pembelian Umum
2	5 okt 2022	Egy	Pinrang	Vanamae	125,000	Pembelian Umum
3	5 okt 2022	Hamzah	Pinrang	Vanamae	85,000	Pembelian Umum
4	5 okt 2022	Jufri	Pangkep	Vanamae	35,000	Pembelian Umum
5	4 Okt 2022	Jufri	Wajo	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
6	6 Okt 2022	Abd Jalil	Luwu Utara	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
7	6 Okt 2022	Aris	Luwu Utara	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
8	12 Okt 2022	Zainuddin	Bulukumba	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
9	12 Okt 2022	H. Syahrudin	Bulukumba	Windu	250,000	Bantuan Gubernur
10	12 Nov. 2022	Wahab	Pinrang	Vanamae	70,000	Pembelian Umum
11	12 Nov. 2022	Aris	Luwu Utara	Vanamae	190,000	Pembelian Umum
12	14 Nov. 2022	Ruslan	Pangkep	Vanamae	160,000	Pembelian Umum
13	14 Nov. 2022	Hamzah	Pinrang	Vanamae	30,000	Pembelian Umum
14	18 Nov. 2022	Akbar	Palopo	Windu	80,000	Pembelian Umum
15	18 Nov. 2022	Ambo Baha	Polman	Windu	50,000	Pembelian Umum
16	18 Nov. 2022	H. Sudi	Pekkabata	Windu	150,000	Pembelian Umum
17	18 Nov. 2022	Gusman	Pinrang	Windu	170,000	Pembelian Umum
18	19 Nov. 2022	A. Aso	Pinrang	Windu	50,000	Pembelian Umum
19	19 Nov. 2022	A. Ratna	Pinrang	Windu	95,000	Pembelian Umum
20	27 Nov. 2022	Jamil	Suppa	Windu	120,000	Pembelian Umum
21	28 Nov. 2022	Mancu	Pinrang	Windu	100,000	Pembelian Umum
22	28 Nov. 2022	Gusman	Pinrang	Windu	150,000	Pembelian Umum
23	28 Nov. 2022	H. Muhammad	Suppa	Windu	50,000	Pembelian Umum
24	28 Nov. 2022	Jufri	Suppa	Vanamae	60,000	Pembelian Umum
25	28 Nov. 2022	Madani	Suppa	Vanamae	150,000	Pembelian Umum
26	29 Nov. 2022	Algy	Luwu	Vanamae	150,000	Pembelian Umum
27	4 Des. 2022	Gusman	Pinrang	Windu	70,000	Pembelian Umum
28	4 Des. 2022	Taufik	Lanrisang	Windu	174,000	Pembelian Umum
29	5 Des. 2022	Pangky	Pekkabata	Vanamae	100,000	Pembelian Umum
30	5 Des. 2022	Algy	Malili	Vanamae	150,000	Pembelian Umum

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JENIS KOMODITI	JUMLAH (EKOR)	KETERANGAN
31	6 Des. 2022	Wahab	Pinrang	Vanamae	50,000	Pembelian Umum
32	7 Des. 2022	Ari	Pinrang	Vanamae	100,000	Pembelian Umum
33	9 Des. 2022	Arfa	Pangkep	Vanamae	120,000	Pembelian Umum
34	9 Des. 2022	Harmini	Jeneponto	Vanamae	50,000	Pembelian Umum
35	12 Des. 2022	H. Sudi	Pinrang	Vanamae	150,000	Pembelian Umum
36	12 Des. 2022	Algi	Malili	Vanamae	100,000	Pembelian Umum
37	21 Des. 2022	Nasir	Pangkep	Vanamae	45,000	Pembelian Umum
38	21 Des. 2022	Baso	Makassar	Vanamae	93,000	Pembelian Umum
39	22 Des. 2022	Ida	Suppa	Vanamae	37,000	Pembelian Umum
40	22 Des. 2022	Jasman	Barru	Vanamae	85,000	Pembelian Umum
				<b>Sub Jumlah</b>	<b>4,674,000</b>	
				<b>Windu</b>	<b>2,509,000</b>	
				<b>Vanamae</b>	<b>2,165,000</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>17,272,000</b>	
				<b>Windu</b>	<b>12,103,000</b>	
				<b>Vanamae</b>	<b>5,169,000</b>	
<b>PERINCIAN</b>						
				1 Benur Hasil Penjualan	<b>9,682,000</b>	
				Windu	4,513,000	
				Vanamae	5,169,000	
				2 Benur Bantuan	<b>7,590,000</b>	
				Windu	7,590,000	
				Vanamae	-	

Sumber : UPT PBAPL

Lampiran 5. Rekapitulasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Grade	Tanggal	
							Terbit	valid
Januari 2022								
1	PT. ANUGERAH MAPAN JAYA	Jl. Poros Kariango Dusun Majannang, Kel. Kurusumange, Kec.		Kering	1 Dried Seaweed	A	06-01-2022	06-01-2024
2	CV. GUNA BAHARI INDONESIA	Pergudangan Parangloe Indah, Jl. Ir. Sutami Blok I-1 No.3, Kel. Bira, Kec.	Perpanjangan	Kering	2 Dried Seaweed	B	07-01-2022	07-01-2024
3	PT. PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) CABANG MAKASSAR	Jl. Sabutung 1 No.1 Paotere, Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	3 Frozen Cephalopoda	B	14-01-2022	14-01-2024
					4 Frozen Cooked Octopus			
					5 Frozen Demersal Fish			
					6 Frozen Pelagic Fish			
					7 Frozen Fish Fillet			
					8 Frozen Tuna			
				Segar	9 Frozen Tuna Loin			
					10 Fresh Demersal Fish			
					11 Fresh Pelagic Fish			
					12 Fresh Tuna Loin			
					13 Fresh Tuna			
					14 Fresh Cephalopods			
4	PT. GOH FADEL BUANA	Jl. Poros Makassar-Maros No.126, Lingk. Ballu-Ballu,	Baru	Segar	15 Fresh Cephalopods	B	1/14/2022	1/14/2024
5	CV. LINTAS SAMUDERA MANDIRI	Kompleks PPI Lonrae Kav 3, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten	Baru	Beku	16 Frozen Tuna	B	14-01-2022	14-01-2024
				Segar	17 Fresh Tuna			
					18 Fresh Demersal Fish			
6	CV. CERITA TENTANG IKAN	Jl. Arsitek VI Blok D No.182, Kel. Biring Romang, Kec.	Baru	Segar	19 Fresh Demersal Fish	B	19-01-2022	19-01-2024
					20 Fresh Pelagic Fish			
7	PT. KEUMKANG INDUSTRI INDONESIA	Jl. Kima 15 Kav R4D - R4E, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	21 Frozen Tuna	B	21-01-2022	21-01-2024
					22 Frozen Pelagic Fish			
					23 Frozen Cephalopods			
					24 Frozen Demersal Fish			
				Segar	25 Fresh Demersal Fish			
8	PT. MINA TIMUR INDONESIA	Jl. Pendidikan No.8, Kel. Bontolanra, Kec. Galesong	Perpanjangan	Kering	26 Dried Flying Fish Roe	B	21-01-2022	21-01-2024
9	PT. USAHA CENTRALJAYA SAKTI	Jl. Patene No 34, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya		Kering	27 Dried Seaweed	B	25-01-2022	25-01-2024

## LAPORAN TAHUNAN 2022

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Grade	Tanggal	
							Terbit	valid
10	PT. BIOTA LAUT GANGGANG	Jl. Kebangkitan No.8, Dusun Belabelawa, Kel. Polewali, Kec. Suppa, Kabupaten Pinrang	Perpanjangan	Kering	28 Carrageenan Powder	A	27-01-2022	27-01-2024
					29 Dried Seaweed			
					30 Seaweed Powder			
					31 Agar-agar Powder			
11	CV. ANUGERAH JAYA FISHERY	Jl. Poros Maros Ruko Graha Cemerlang Blok C No.10/11	Baru	Segar	32 Fresh Demersal Fish	B	28-01-2022	28-01-2024
<i>Februari 2022</i>								
12	PT. LAUT NUSANTARA ABADI	Jl. H.M. Yasin Limpo No. 10, Kel. Somba Opu, Kec.	Baru	Kering	33 Seaweed Powder	B	09-02-2022	09-02-2024
13	PT. SUKSES RAYA FOOD	Jl. Bahagia No.2, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya,	Baru	Beku	34 Frozen Tuna	A	16-02-2022	16-02-2024
				Segar	35 Fresh Tuna			
14	PT. PRIMA GLOBAL SUKSES	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No.32 A, Kel. Bira, Kec.		Beku	36 Tuna Ball, Tuna Nugget, Tuna Cake	B	17-02-2022	17-02-2024
15	PT. BOGATAMA MARINUSA	Jl. Kima Raya 2 Kav N-4 B1, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota	Perpanjangan	Beku	37 Frozen Cooked Shrimp	A	17-02-2022	17-02-2024
					38 Frozen Raw Shrimp			
					39 Frozen Breaded Shrimp			
16	PT. TRANS ANUGRAH MULIA	Pattene Bussines Park Blok U3 B, Kel. Temmapaduae,	Baru	Beku	40 Frozen Slipper Lobster	A	22-02-2022	22-02-2024
17	PT. KENNDIO FISHERIES INDONESIA	Jl. Tol Lama No.3 (1 KM dari Ujung Jembatan Tol), Kel.	Baru	Beku	41 Frozen Cephalopods	B	22-02-2022	22-02-2024
18	CV. SEMANGAT KAWAN SEJATI BARU	Jl. Gatot Subroto V No.6, Kel. Kaluku Bodoa, Kec.	Perpanjangan	Kering	42 Dried Shark Fin	B	23-02-2022	23-02-2024
19	PT. FLYING FISH ALGAE	Jl. Ir. Sutami No.19, Kel. Parang Loe, Kec.	Perpanjangan	Kering	43 Dried Seaweed	B	23-02-2022	23-02-2024
<i>Maret 2022</i>								
20	PT. CHEN WOO FISHERY	Jl. Kima 4 Kav K-9 Blok B2 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	44 Fresh Demersal Fish	A	01-03-2022	01-03-2024
					45 Fresh Pelagic Fish			
					46 Fresh Tuna			
				Beku	47 Frozen Demersal Fish			
					48 Frozen Pelagic Fish			
21	CV. BAHTERA KARYA	Kawasan Industri Malili, Kel. Pasi-pasi, Kec. Malili,	Baru	Kering	49 Frozen Tuna	B	02-03-2022	02-03-2024
22	CV. LINTAS SAMUDERA MANDIRI	Kompleks PPI Lonrae Kav 3, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	51 Frozen Pelagic Fish	B	02-03-2022	02-03-2024
					52 Frozen Demersal Fish			
					53 Frozen Cephalopods			
					54 Frozen Milkfish			
					55 Frozen Shrimp			
23	CV. SUMBER MARINA SEMESTA	Jl. Poros Makassar Maros No.138, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros	Baru	Beku	56 Fresh Pelagic Fish	B	02-03-2022	02-03-2024
				Segar	57 Fresh Demersal Fish			
					58 Fresh Swimming Crab			
24	PT. RIKA RAYHAN MANDIRI	Jl. Kima IV Kav P3A, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya,	Perpanjangan	Kering	59 Dried Seaweed	B	07-03-2022	07-03-2024
25	PT. HASIL INDO SEJAHTERA	Jl. Ir. Sutami, Komplek Pergudangan Parangloe	Perpanjangan	Kering	60 Dried Seaweed	B	10-03-2022	10-03-2024
26	PT. LONTARA JAYA SAKTI	Jl. Pasar Ikan Beba, Kel. Tamasaju, Kec. Galesong	Baru	Beku	61 Frozen Shellfish	B	10-03-2022	10-03-2024
27	PT. PIALA LAUT INDONESIA	Jl. Kima 17 Kav DD 9, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota	Perpanjangan	Beku	62 Frozen Shrimp	B	18-03-2022	18-03-2024
28	CV. MAROS TIMUR JAYA	Jl. Poros Makassar - Maros, Dusun Bulutanae, Kel. Marumpa, Kec. Marusu,	Perpanjangan	Segar	63 Fresh Demersal Fish	B	22-03-2022	22-03-2024
					64 Fresh Pelagic Fish			
				Hideup	65 Live Crab			
29	PT. KARISA TIMUR INDONESIA	Jl. Pattene Raya Ruko NONI No.3, Kel. Sudiang, Kec.	Baru	Kering	66 Dried Fish Skin	B	23-03-2022	23-03-2024
					67 Dried Fish Maw			
30	PT. CELEBES BERKAH NIAGA UNIT II	Pergudangan Garuda Blok B2, Jl. Lantebung No.42,	Perpanjangan	Kering	68 Dried Seaweed	B	23-03-2022	23-03-2024
31	PT. MANARA ATHA SAMUDRA	Jl. Kima 10 Kav T-3A, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya,	Baru	Beku	69 Frozen Tuna	A	23-03-2022	23-03-2024
32	PT. MITRA KARTIKA SEJATI	Jl. Kima Raya I Kav D-1B Kawasan Industri	Perpanjangan	Beku	70 Frozen Cooked Shrimp	A	24-03-2022	24-03-2024
					71 Frozen Raw Shrimp			
33	UKM CAHAYA BANDENG	Jl. Dusun Bira-bira, Kel. Kurusumange, Kec.	Baru	Beku	72 Boneless Milkfish	C	28-03-2022	28-03-2024
				Kering	73 Shredded Thorn Milkfish			
34	PT. GLOBAL MAJU PRATAMA	Pattene Business Park Blok H No.2, Kel. Pabentengan,	Perpanjangan	Beku	74 Frozen Snail	A	28-03-2022	28-03-2024
35	PT. KENCANA BINTANG TERANG	Jl. Kima 3 No.2 Kawasan Industri Makassar, Kel.	Baru	Pasteurisasi	75 Pasteurized Crab Meat	A	31-03-2022	31-03-2024
<i>April 2022</i>								
36	CV. ASRYL PERKASA	Perumahan Citra Sanggalea Indah D4 No.4, Kel.	Perpanjangan	Segar	76 Fresh Tuna Loin	b	06-04-2022	06-04-2024
37	PT. BAHARI MAKMUR SEJATI - CABANG MAKASSAR	Jl. Kima 16 Kav BB 4, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota	Baru	Beku	77 Frozen Shrimp	A	08-04-2022	08-04-2024
38	PT. BIRU LAUT NUSANTARA	Jl. Kima 8 Kav SS No. 23A Kawasan Industri Makassar, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota	Perpanjangan	Segar	78 Fresh Slipper Lobster	A	13-04-2022	13-04-2024
					79 Fresh Crab			
				Beku	80 Frozen Slipper Lobster			
					81 Frozen Crab			

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Grade	Tanggal	
							Terbit	valid
39	PT. LONTARA JAYA SAKTI	Desa Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan	Baru	Beku	82 Frozen Tuna 83 Frozen Demersal Fish 84 Frozen Cephalopods 85 Frozen Pelagic Fish	B	13-04-2022	13-04-2024
				Segar	86 Fresh Tuna			
40	PT. MULTI SARI MAKASSAR	Jl. Kima 14 Kav SS 12, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	87 Fresh Demersal Fish 88 Fresh Cephalopods 89 Fresh Tuna 90 Fresh Pelagic Fish 91 Fresh Shrimp	A	26-04-2022	26-04-2024
				Beku	92 Frozen Demersal Fish 93 Frozen Cephalopods 94 Frozen Tuna 95 Frozen Pelagic Fish 96 Frozen Shrimp			
41	CV. ANUGERAH BAHARI MANDIRI	Jl. Kapasa Raya No.38A, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	97 Frozen Pelagic Fish 98 Frozen Milkfish 99 Frozen Cephalopod 100 Frozen Demersal	B	26-04-2022	26-04-2024
42	PT. SUMBER LAUTAN NUSANTARA	Jl. Lantebung No.168, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota	Perpanjangan	Kering	101 Dried Flying Fish Roe	B	27-04-2022	27-04-2024
<i>Mei 2022</i>								
43	KEDAI PESISIR	Jl. Keterampilan No.25, Kel. Cappa Galung, Kec.	Baru	Kering	102 Shredded Fish	C	31-05-2022	31-05-2024
<i>Juni 2022</i>								
44	ZAUKY	Langnga, Kel. Langnga, Kec. Mattiro Sompe, Kabupaten	Baru	Kering	103 Shredded Fish	C	03-06-2022	03-06-2024
45	CV. TIGA PUTRA RAJAWALI	BTN Dwi Dharma Yanti Blok D.1 No.1, Kel. Sudiang	Baru	Kering	104 Dried Seaweed	B	03-06-2022	03-06-2024
46	KOPERASI PRODUSEN SIMPUL DISTRIBUSI KOMODITI	Jl. DR. Ratulangi Km. 10 (Poros Palopo-Masamba)	Baru	Kering	105 Dried Seaweed	B	10-06-2022	10-06-2024
47	MARIJO 88	Jl. Poros Pinrang - Pare-Pare Km 6, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	106 Shredded Milkfish Bone 107 Fish Amplang 108 Fish Bone Stick 109 Boneless Milkfish 110 Fish Ball	B	03-06-2022	03-06-2024
				Beku				
48	PT. KENDDO FISHERIES INDONESIA	Jl. Tol Lama No.3, Kel. Parang Loe, Kec.	Baru	Beku	111 Frozen Cooked Cephalopods 112 Frozen Blanch Octopus Cut	B	16-06-2022	16-06-2024
49	CV. ELITISM MAKASSAR	Jl. Andi Mappainga Ruko 58, Kel. Barombong, Kec.	Baru	Kering	113 Dried Shark Fin	B	22-06-2022	22-06-2024
50	PT. BINTANG MEGAH JAYA PERKASA	Jl. Batangase No.50, Kel. Batangase, Kec. Bontoa,	Perpanjangan	Segar	114 Fresh Pelagic Fish	B	30-06-2022	30-06-2024
<i>Juli 2022</i>								
51	PT. DUNIA MARINE PRODUCTS	Jl. Kawasan Industri Makassar 3/K-4B, Kel.	Baru	Beku	115 Frozen Aballone	B	01-07-2022	01-07-2024
52	UKM AZZAKHRA	Jl. Poros ATKP Sambotara Mandai Maros, Kel.	Baru	Kering	116 Abon Ikan 117 Bakso Ikan	C	01-07-2022	01-07-2024
				Beku				
53	PT. NUSADWIPA CITRA TUNGGA	Jl. Kima 7 Blok J No 4A, Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	118 Frozen Demersal Fish 119 Frozen Cephalopods 120 Frozen Pelagic Fish 121 Fresh Demersal Fish 122 Fresh Pelagic Fish	B	15-07-2022	15-07-2024
				Segar				
54	PT. BLUE OCEAN RECOURCES	Jl Kompleks Perhubungan Nomor 5, , Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kabupaten Maros	Baru	Segar	123 Fresh Demersal Fish 124 Fresh Pelagic Fish 125 Fresh Tuna	B	14-07-2022	14-07-2024
55	CV. ANUGRAH BAHARI	Jl. Sabutung Baru No.14, Kel. Camba Berua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar	Perpanjangan	Segar	126 Fresh Demersal Fish 127 Fresh Pelagic Fish 128 Fresh Cephalopods 129 Fresh Crustacea	B	25-07-2022	25-07-2024
56	PT. BINTANG MEGAH JAYA PERKASA	Jl. Batangase No.50, Kel. Batangase, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros	Perpanjangan	Segar	130 Fresh Demersal Fish 131 Fresh Shrimp 132 Fresh Tuna	B	27-07-2022	27-07-2024
<i>Agustus 2022</i>								
57	CV. GEMBIRA GALESONG	Jl. Abdul Kadir, Kel. Galesong Kota, Kec.	Perpanjangan	Kering	133 Dried Sea Cucumber	B	16-08-2022	16-08-2024
<i>September 2022</i>								
59	PT. USAHA CENTRALIAYA SAKTI	Jl. Kima V Kav E No.3A, Kel. Daya, Kec. Biringkannaya,	Baru	Beku	134 Frozen Demersal Fish	B	02-09-2022	02-09-2024
59	PT. MAA ATAITA INDAH	Jl. Ir. Sutami No 89, Kel. Bulurokeng, Kec.	Baru	Kering	135 Dried Seaweed	B	02-09-2022	02-09-2024
60	PT. PACIFIC GREEN ALGAE	Jl. Kapasa Raya No. 29 B, Kel. Tamalanrea, Kec. Bira,	Baru	Kering	136 Dried Seaweed	B	05-09-2022	05-09-2024
61	PT. SAKINAH BAHARI INDONESIA	Pusat Distribusi Regional Jl. Kima-8, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar	Baru	Beku	137 Frozen Tuna 148 Frozen Cephalopods 139 Frozen Demersal Fish 140 Frozen Pelagic Fish	B	07-09-2022	07-09-2024



## LAPORAN TAHUNAN 2022

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Grade	Tanggal	
							Terbit	valid
62	PT. LONTARA JAYA SAKTI	Jl. Pasar Ikan Beba, Kel. Tamasaju, Kec. Galesong	Baru	Beku	141 Frozen Tuna	B	12-09-2022	12-09-2024
63	PT. SIRIMAN JAYA ABADI	Palalakkang, Kel. Palalakkang, Kec. Galesong,	Baru	Beku	142 Dried Flying Fish Roe	A	16-09-2022	16-09-2024
64	PT. LAUTAN SAKTI JAYA	Jl. Kima No.19 Kav. DD 3 A, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	143 Frozen Shrimp 144 Frozen Pelagic Fish 145 Frozen Demersal Fish 146 Frozen Cephalopods	b	20-09-2022	20-09-2024
65	CV. DIVA BANDENG PRESTO	Jl. Poros Pelabuhan Biringkassi , Kel. Bowong	Baru	Beku	147 Pressed Cooked Milkfish	C	21-09-2022	21-09-2024
66	PT. NIRVANA NIAGA SEJAHTERA	Jl. Kima 6 Kav F3/B1 - F3/B2 Kawasan Industri	Perpanjangan	Segar Beku	148 Fresh Tuna 149 FrozenTuna	B	21-09-2022	21-09-2024
67	PT. NIAGA ADIJAYA MANDIRI	Jl. Kima 6 Kav F3 Kawasan Industri Makassar, Kel.	Baru	Segar Beku	150 Fresh Tuna 151 Frozen Tuna	B	21-09-2023	21-09-2025
68	CV. ANUGERAH BAHARI MANDIRI	Jl. Kapasa Raya No. 38A, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota	Perpanjangan	Segar	152 Fresh Demersal Fish 152 Fresh Pelagic Fish 154 Fresh Tuna	B	29-09-2022	29-09-2024
Oktober 2022								
69	CV. BUANA LAUT NUSANTARA	Jl. Kima VI Kav F1/B1, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar     Beku	155 Frozen Cephalopods 156 Frozen Slipper Lobster 157 Frozen Pelagic Fish 158 Frozen Demersal Fish 159 Frozen Cooked Octopus 160 Fresh Slipper Lobster 161 Fresh Pelagic Fish 162 Fresh Demersal Fish	B	03-10-2022	03-10-2024
70	DUA PUTRA	BTN Pao Pao Permai Blok G2 No. 1, Kel.	Baru	Beku	163 Frozen Whole Tilapia	C	12-10-2022	12-10-2024
71	PT. KAWA GUTI	Jl. Ir. Sutami (Tol Lama) No.22, Kel. Parang Loe, Kec.	Perpanjangan	Beku Kering	164 Frozen Flying Fish Roe 165 Dried Flying Fish Roe	B	21-10-2022	21-10-2024
72	UD. JAYA ABADI SENTOSA	Kima 10, Kawasan Industri Makasar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar	Baru	Beku	166 Frozen Milkfish 167 Frozen Pelagic Fish 168 Frozen Demersal Fish 169 Frozen Tuna Trimmings	B	21-10-2022	21-10-2024
73	CV. NUR BAHARI ABADI	Jl. Sultan Abdullah Raya, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota	Baru	Kering	170 Dried Sea Cucumber	B	19-10-2022	19-10-2024
74	PT. INDO JAYA MARINA	Jl. Pasar Ikan No 22 A, Kel. Bulogading, Kec. Ujung	Baru	Hidup Hidup	171 Live Demersal Fish 172 Live Lobster	B	27-10-2022	27-10-2024
75	BOLUBOLLO	Jalan Pariwisata Macanda RT.005 RW.003, Kel.	Baru	Produk	173 Pressed Cooked Milkfish	A	31-10-2022	31-10-2024
76	PT. JIREH COMMODITY	Jl. Kima Raya 2 Komplek Kima Square Warehouse 2	Perpanjangan	Kering Beku	174 Dried Flying Fish Roe 175 Frozen Flying Fish Roe	A	31-10-2022	31-10-2024
November 2022								
77	CV. SINAR LAUT PERKASA	Jl. H. Bohari, Kel. Bonto Tallasa, Kec. Simbang, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Baru	Kering	176 Dried Fish Maw 177 Dried Fish Skin 178 Dried Sea Worm 179 Dried Shark Fin 180 Dried Sea Cucumber	B	09-11-2022	09-11-2024
78	JUTSUKA	Dusun Sapiri Pangka, Kel. Balleanging, Kec. Ujung Loe	Baru	Kering	181 Dried Salted Fish	C	15-11-2022	15-11-2024
79	CV. KARYA MURNI	Jl. Poros Galesong Utara No. 4 Kampung Parang	Baru	Kering Beku	182 Dried Flying Fish Roe 183 Frozen Shark	B	30-11-2022	30-11-2024
Desember 2022								
80	CV. ANUGERAH BAHARI MANDIRI	Jl. Kapasa Raya No. 38A, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	184 Frozen Tuna	B	07-12-2022	07-12-2024
81	CV. SINAR LAUT PERKASA	Jl. H. Bohari, Kel. Bonto Tallasa, Kec. Simbang, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Baru	Kering	185 Dried Shark Fin	B	07-12-2022	07-12-2024
82	CV. ANUGRAH BINTANG CEMERLANG	Jl. Bambu Runcing No.99, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku  Segar	186 Frozen Milkfish 187 Frozen Tuna 188 Fresh Tuna	B	07-12-2022	07-12-2024
83	CV. SEMBILAN PUTRA JAYA	Jl. Sultan Abdullah Raya No. 43A, Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar	Perpanjangan  Baru	Segar	189 Fresh Pelagic Fish 190 Fresh Demersal Fish 191 Fresh Tuna Loin	B	06-12-2022	06-12-2024
84	PT. YIN JING INTERNASIONAL	Jl. Kima 3 Kav S-13, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar	Perpanjangan	Beku	192 Frozen Shrimp	B	02-12-2022	02-12-2024
85	PT. KAYA SAMUDRA GLOBAL	Jl. Ir. Sutami Komplek Pelitaagro B.6, Kel. Parang		Kering	193 Dried Seaweed	B	08-12-2022	08-12-2024

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Grade	Tanggal	
							Terbit	valid
86	CV. MUTIARA INDO BAHARI	Jl. Kompleks Pergudangan Lantebung Blok B 2 No. 5,	Baru	Kering	194 Dried Seaweed	B	14-12-2022	14-12-2024
87	PT. BINTANG MEGAH JAYA PERKASA	Jl. Batangase No.50, Kel. Batangase, Kec. Bontoa,	Baru	Kering	195 Dried Sea Cucumber	B	15-12-2022	15-12-2024
88	PT. NIAGA ADIJAYA MANDIRI	Jl. Kima 6 Kav F3 Kawasan Industri Makassar, Kel.	Baru	Beku	196 Frozen Salted Sea Urchin Egg	B	15-12-2022	15-12-2024
89	PT. BINTANG MEGAH JAYA PERKASA	Jl. Batangase No.50, Kel. Batangase, Kec. Bontoa,	Baru	Beku	197 Frozen Demersal Fish	B	20-12-2022	20-12-2024
90	KSM.TENGGIRI	UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan	Baru	Beku	198 Frozen Value Added	C	21-12-2022	21-12-2024
91	KSM.TENGGIRI	Jl. Kalampeto, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara,	Baru	Kering	199 Shredded Fish	C	23-12-2022	23-12-2024

Sumber : UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan

### Lampiran 6. Daftar Unit CBIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

NO	NAMA UNIT PEMBUDIDAYA	KAB/KOTA	KOMODITAS	ALAMAT	PREDIKAT	No.	MASA BERLAKU
					SERTIFIKAT	SERTIFIKAT	
	TAHUN 2022						
1	PT. 2512	Bulukumba	Udang Vannamae	Kel. Mariorennu, Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Sangat Baik	ID-CBIB-SS-P-0001151	04/01/2022 - 04/01/2026
2	H. Andi Pabiseangi Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001124	04/01/2022 - 04/01/2025
3	H. Munir Nio Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001125	04/01/2022 - 04/01/2025
4	Sangkala Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001126	04/01/2022 - 04/01/2025
5	Muh. Hasanuddin Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001127	04/01/2022 - 04/01/2025
6	Rudi Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001128	04/01/2022 - 04/01/2025
7	Helleng Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001129	04/01/2022 - 04/01/2025
8	Tulada Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001130	04/01/2022 - 04/01/2025
9	Mustafa Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001131	04/01/2022 - 04/01/2025
10	Irwanto Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001132	04/01/2022 - 04/01/2025
11	H. M. Arsyad Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001133	04/01/2022 - 04/01/2025
12	H. Sakka Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001134	04/01/2022 - 04/01/2025
13	H. Hakim Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001135	04/01/2022 - 04/01/2025
14	Sulaiman Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001136	04/01/2022 - 04/01/2025
15	Jarre Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001137	04/01/2022 - 04/01/2025
16	Tajuddin Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001138	04/01/2022 - 04/01/2025
17	Sahabuddin Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001139	04/01/2022 - 04/01/2025
18	Abd Aziz Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001140	04/01/2022 - 04/01/2025
19	A. Rustati Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001141	04/01/2022 - 04/01/2025
20	Wani Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001142	04/01/2022 - 04/01/2025
21	H. Abidin Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001143	04/01/2022 - 04/01/2025
22	Bakri Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001144	04/01/2022 - 04/01/2025
23	P. Amiruddin Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001145	04/01/2022 - 04/01/2025
24	Haya Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001146	04/01/2022 - 04/01/2025
25	Dahlang Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001147	04/01/2022 - 04/01/2025
26	Alimuddin Fam	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001148	04/01/2022 - 04/01/2025
27	H. A. Rustam Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001149	04/01/2022 - 04/01/2025
28	Herman Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Langga, Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SS-P-0001150	04/01/2022 - 04/01/2025
29	Awaluddin Farm	Takalar	Windu dan Bandeng	Kel. Takalar, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001152	04/01/2022 - 04/01/2024
30	Sunandar Farm	Takalar	Windu dan Bandeng	Kel. Takalar, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001153	04/01/2022 - 04/01/2024
31	Arsad Farm	Takalar	Windu dan Bandeng	Kel. Takalar, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001154	04/01/2022 - 04/01/2024
32	Syamsuardi Farm	Takalar	Windu dan Bandeng	Kel. Takalar, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001155	04/01/2022 - 04/01/2024
33	Amiruddin Farn	Takalar	Windu dan Bandeng	Kel. Takalar, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001156	04/01/2022 - 04/01/2024
34	Muh. Natsir Dg. Nai Farm	Takalar	Windu dan Bandeng	Desa Banyuanyara, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001057	04/01/2022 - 04/01/2024
35	Sahruni Farm	Takalar	Windu dan Bandeng	Desa Banyuanyara, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001058	04/01/2022 - 04/01/2024
36	Jambo Dg. Ngimba Farm	Takalar	Windu dan Bandeng	Desa Banyuanyara, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001059	04/01/2022 - 04/01/2024
37	H. ABD. Basir Dg. Naja Farm	Takalar	Windu dan Bandeng	Desa Banyuanyara, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001060	04/01/2022 - 04/01/2024
38	Bahrudin Dg. Ramma Farm	Takalar	Windu dan Bandeng	Desa Banyuanyara, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001061	04/01/2022 - 04/01/2024
39	Suardi Farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Pajukukang, Kec. Bontoa, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001062	04/01/2022 - 04/01/2024
40	H. Batolla Farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Pajukukang, Kec. Bontoa, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001063	04/01/2022 - 04/01/2024

## LAPORAN TAHUNAN 2022

NO	NAMA UNIT PEMBUKIDAYA	KAB/KOTA	KOMODITAS	ALAMAT	PREDIKAT	No.	MASA BERLAKU
					SERTIFIKAT	SERTIFIKAT	
41	Halir Farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Pajukukang, Kec. Bontoa, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001064	04/01/2022 - 04/01/2024
42	Ambo farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Pajukukang, Kec. Bontoa, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001065	04/01/2022 - 04/01/2024
43	Fandi Farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Pajukukang, Kec. Bontoa, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001066	04/01/2022 - 04/01/2024
44	Syamsir Farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Nisombalia, Kec. Marusu, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001067	04/01/2022 - 04/01/2024
45	Abd Latief Farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Nisombalia, Kec. Marusu, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001068	04/01/2022 - 04/01/2024
46	Muh. Asbar Farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Nisombalia, Kec. Marusu, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001069	04/01/2022 - 04/01/2024
47	Ambo Masse Farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Nisombalia, Kec. Marusu, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001070	04/01/2022 - 04/01/2024
48	Muhammad Saleh Farm	Maros	Windu dan Bandeng	Desa Nisombalia, Kec. Marusu, Kab. Maros	Cukup	ID-CBIB-SS-P-0001071	04/01/2022 - 04/01/2024
49	Syarifuddin Salam Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Waetuwo, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SN-P-001172	01/08/2022 - 01/08/2025
50	Mustamin Nurdin Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Paris, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SN-P-001173	01/08/2022 - 01/08/2025
51	Dulla Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Paris, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SN-P-001174	01/08/2022 - 01/08/2025
52	Sakur Farm	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa Paris, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SN-P-001175	01/08/2022 - 01/08/2025
53	Abdul Rahim Farm (Abbesoang)	Pinrang	Windu dan Bandeng	Desa tasiwalleis, Kec. Suppa, Kab. Pinrang	Baik	ID-CBIB-SN-P-001176	01/08/2022 - 01/08/2025
54	Basri Farm (Klp. Sejahtera)	Bantaeng	Rumput Laut	Desa Bontosunggu, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng	Baik	ID-CBIB-SN-P-001177	01/08/2022 - 01/08/2025
55	Zulhidayat Farm (Klp Boto L)	Bantaeng	Rumput Laut	Desa Lumpangan, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng	Baik	ID-CBIB-SN-P-001178	01/08/2022 - 01/08/2025
56	Syarifuddin Farm	Bantaeng	Rumput Laut	Desa Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng	Baik	ID-CBIB-SN-P-001179	01/08/2022 - 01/08/2025
57	Siti Hasbiah (Klp Boto L)	Bantaeng	Rumput Laut	Desa Lumpangan, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng	Baik	ID-CBIB-SN-P-001180	01/08/2022 - 01/08/2025
58	Subhan Yusuf Farm (Klp Abbulo S)	Bantaeng	Rumput Laut	Desa Bontosunggu, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng	Baik	ID-CBIB-SN-P-001181	01/08/2022 - 01/08/2025
59	Muhammad Umar (Klp Boto L)	Bantaeng	Rumput Laut	Desa Lumpangan, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng	Baik	ID-CBIB-SN-P-001182	01/08/2022 - 01/08/2025
60	Sahabuddin Farm	Bantaeng	Rumput Laut	Desa Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng	Baik	ID-CBIB-SN-P-001183	01/08/2022 - 01/08/2025
61	Abdul Rauf Farm	Bantaeng	Rumput Laut	Desa Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng	Baik	ID-CBIB-SN-P-001184	01/08/2022 - 01/08/2025
62	Abdul Rasyid Farm	Bantaeng	Rumput Laut	Desa Borong Loe, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng	Baik	ID-CBIB-SN-P-001185	01/08/2022 - 01/08/2025

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP

### Lampiran 7. Hasil Produksi Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (Sitto Bangkit) Tahun 2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Produksi (Kg)	Keterangan
1	Maros	1. Kec. Bontoa Desa Tupabbiring	1,105	Selesai
		2. Kec. Marusu Desa Bori Masunggu	878.0	Selesai
2	Pangkajene	1. Kec. Labakkang Desa Kanaungan	320.0	Selesai
		2. Kec. Labakkang Desa Gentung	360.0	Selesai
3	Barru	1. Kec. Barru Desa Siawung	92	Selesai
		2. Kec. Tanete Rilau Desa Garessi	-	Gagal
4	Pinrang	1. Kec. Cempa Desa Salipolo	383.2	Selesai
		2. Kec. Suppa Desa Tassiwalie	156.3	Selesai
5	Bone	1. Kec. Kajuara Desa Massangkae	249.5	Selesai
		2. Kec. Kajuara Desa Pude	78.5	Selesai
6	Wajo	1. Kec. Takkalalla Desa Lagoari	281.0	Selesai
		2. Kec. Takkalalla Desa Manyili	-	Gagal
7	Luwu	1. Kec. Ponrang Desa Buntu Kamiri	30.0	Selesai
		2. Kec. Larompong Desa Larompong	-	Gagal
8	Luwu Utara	1. Kec. Bone-Bone Desa Batang Tongka	334.0	Selesai
		2. Kec. Tanalili Desa Karondang	255.0	Selesai
9	Luwu Timur	1. Kec. Malili Desa Lakawali	184.0	Selesai
		2. Kec. Malili Desa Lakawali Pantai	179.0	Selesai
10	Makassar	1. Kec. Tallo Kel. Lakkang	320	Selesai
		2. Kec. Tamalanrea Kel. Parangloe	300	Selesai
11	Takalar	1. Kec. Mappakasunggu Kel. Takalar	675.0	Selesai
		2. Kec. Mappakasunggu Desa Soreang	1,120.0	Selesai
12	Jeneponto	1. Kec. Binamu Kel. Sidenre Link. Kunjungmae	-	Gagal
		2. Kec. Binamu Kel. Sidenre Link. Bosalie	105.0	Selesai
13	Bulukumba	1. Kec. Ujung Loe Desa Garanta	114.6	Selesai
		2. Kec. Ujung Loe Desa Manjalling	-	Gagal

Lanjutan.....				
No	Kabupaten	Kecamatan	Produksi (Kg)	Keterangan
14	Gowa	1. Kec. Bontonompo Selatan Desa Bontosunggu 2. Kec. Bontonompo Selatan Desa Salajo	201.0 327.0	Selesai Selesai
15	Sinjai	1. Sinjai Utara Desa Lappa 2. Sinjai Timur Desa Samataring	54 50	Selesai Selesai
TOTAL			8,152	

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Lampiran 8. Hasil Produksi Kegiatan 1.000 (Udang Windu) Ha Ta. 2022

Satuan : Kg						
No	Nama Pembeli	size 100 - 150	size 70 - 60	size 40 - 50	size 30 - 20	Mix Size
	PT. Atina	15,650.00				
	Kawasan Industri Makassar				12,030.00	
	Pasar Lokal		6,000.00	5,525.00		
Total (Kg)						39,205.00

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Lampiran 9. Hasil Produksi Paket Bantuan Sarana Produksi Budidaya Rumput Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Ta. 2022

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Klp Penerimaan	Jml Paket	Hasil Produksi (Kg)
1	Sinjai				38	377,450
		Pulau Sembilan	Padaelo	Batu Balandae	10	123,900.0
		Pulau Sembilan	Pulau Harapan	Budi Utama	10	114,800.0
		Pulau Sembilan	Pulau Harapan	Kambuno IB	10	120,600.0
		Pulau Sembilan	Padaelo	Tunas Muda	8	18,150.0
2	Luwu				47	9,960.00
		Bua	Raja	Mekar Karang	7	1,545.00
		Ponrang Selatan	Lampuara	Sikoca	13	2,940.00
		Ponrang Selatan	Lampuara	Karya Bersama	13	2,560.00
		Ponrang Selatan	Lampuara	Ingin Maju	14	2,915.00
3	Takalar				58	14,800
		Kep. Tanakeke	Rewataya	Sitallasi	9	2,400.0
		Kep. Tanakeke	Tompotana	Laut Dalam	9	2,500.0
		Kep. Tanakeke	Tompotana	Harapan Bersama	9	4,750.0
		Kep. Tanakeke	Maccini Baji	Abbulo Sibatang	11	1,400.0
		Mappakasunggu	Takalar	Tanah Tumbu	10	1,760.0
		Mangarabombang	Laikang	Mutiara Boddia	10	1,990.0
4	Pangkep				35	8,845
		Ma'rang	Pitusunggu	Mamminasae	13	3,996.0
		Ma'rang	Tamangapa	Cotoni	11	3,342.0
		Ma'rang	Pitue	Barokah	11	1,507.0



## LAPORAN TAHUNAN 2022

Lanjutan.....

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Klp Penerimaan	Jml Paket	Hasil Produksi (Kg)
5	Bantaeng				31	1,830
		Bantaeng	Letta	Maeqi	10	643.0
		Bantaeng	Pallantikang	Bunga Laut Mawar	9	442.0
		Pajukukang	Nipa-Nipa	Nipa-Nipa Maju	12	745.0
6	Jeneponto				19	5,772
		Bangkala	Bontomarannu	Ketapal	10	3,390.0
		Bangkala	Punagaya	Birkas Utama	9	2,382.0
7	Luwu Timur				34	29,570
		Wotu	Bawalipu	Raja Katonik	10	14,800.0
		Burau	Mabonta	Pesisir Laut Biru	15	2,950.0
		Wotu	Lampenai	Lestari Katonik	9	11,820.0
8	Wajo				70	87,440
		Sajoanging	Barangmamase	Pantai Rumpit	25	34,240.0
		Pitumpanua	Siwa	Hidup Bersama	15	53,200.0
9	Kota Palopo				30	35,397
		Wara Selatan	Sapoddo	Milik Bersama	10	8,474.0
		Wara Timur	Malatunrung	Sejahtera Cottonii	10	15,850.0
		Wara Timur	Ponjalele	Sipatuo Sipatokkon	10	8,675.0
		Wara Timur	Salekoe	Labombo Cottonii	10	2,398.0
10	Luwu Utara				40	110,030
		Tanalili	Poreang	Angin Surga	18	42,280.0
		Malangke	Benteng	Jaya Baru	12	34,500.0
		Tanalili	Poreang	Pantai Seta	10	33,250.0
Total					332	593,654

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

### Lampiran 10. Data Pokmaswas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
1	Pangkep		40 Klp				
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Bone	Komando	Muh. Ridwan	13	Pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang	2015
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Ujung	Mattiro Ujung	Saparuddin	17	Pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Matae	Cinta Bahari	H. Tajuddin Nur	13	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Bulu	Mattiro Bulu	Mustakim	9	Pengawasan di perairan laut	2015
		Kec. Liukang Tangayya Desa Balo-Baloang	Balo Baloang	Rustam	16	Pengawasan di perairan laut	2015
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Deceng	Lestari Biru	Abdullah	13	Pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang	2019
		Kec. Liukang Tangayya Kel. Sapula	Ampibi	Irfan Samsir	35	Pengawasan di perairan laut	2020

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Bungoro Desa Bulu Cindea	Balanga	H. Muksin	9	Pengawasan di perairan laut	2021
		Kec. Ma'rang Desa Pitusunggu	Mappideceng	Abd. Rakib Dg. Gama	96	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Langi	Bina Laut	Safaruddin	12	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Mandalle Desa Boddie	Berkah Laut	Mustakin	12	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Sompe	Balang Taesa	Nursaid	13	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Bone	Sinar Laut	Tuwo Dahang	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Langi	Alam Lestari	Muhammad Nur	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattaro Adae	Mattaro Adae	Mustamin, S.Pdi	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Kanja	Mattiro Kanja	Abd. Rahman. N	11	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Baji	Baji Bahari	Hamirullah	22	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Bombang 1	Mattiro Bombang 1	Syahrir	13	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Bombang 2	Mattiro Bombang 2	Rijal	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Wale	Pallodang	Nur Alam, Amd.Pi	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Ulang	Nusa Bahari	Muksin	17	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Kalmas Desa Dewakang	Cahaya Pulau	Juhairi	15	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Balo Baloang	Bahari Lestari	Tinri	14	Pengawasan di perairan laut	2006
		Kec. Liukang Tangayya Desa Satanger	Duta Bahari Sumanga	Muhlis	13	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Satanger	Satanger Jaya	Muslimin	13	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Mandalle Desa Mandalle	Mandalle	Anwar	15	Pengawasan di perairan Laut	2019

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Mandalle Desa Tamarupa	Tamarupa	Faisal	25	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Tamarupa	Sahabat Bahari	Burhanuddin	12	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Labangeng	Nelayan Tappaang Bersatu	Ramli	18	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Tappaang	Nelayan Aloang Bersatu	A. Malau	15	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Tappaang	Nelayan Kawassang Bersatu	Mansyur	18	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Tappaang	Nelayan Sappingang Bersatu	Ambo Naha	17	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Sompe	Toddopuli Balang Lompo	Maskur	13	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Dolangeng	Sahabat Jaya	Muh. Ilyas	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Mandalle Desa Boddie	Berkah Laut	Mustakim	11	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Kalmas Desa Sabaru	Pabeta Hebat	Muh. Arsyad	18	Pengawasan di perairan laut	2021
		Kec. Liukang Tangaya Desa Sabalana	Arung Samudera Kayu Bangkoa	Sapo	24	Pengawasan di perairan laut	2022
		Kec. Liukang Tangayya Desa Balo- Baloang	Passamaturukang	Tinri	14	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Kapoposang Bali	Sahabat Nelayan	Suhaedy	15	Pengawasan di perairan laut	2021
		Kec. Liukang Tangayya Desa Sailus Besar	Baracuda Perkasa	Rahman	11	Pengawasan di perairan	2021
2	Luwu Utara	13 Klp					
		Kec. Bone Bone Desa Munte	Kuda Laut	Bahtiar Baso	14	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Pombakka	Pombakka Affair	Mursalim	15	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Desa Takkalala	Bone Pute	Juswan	15	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bone Bone Desa Poreang	Bunga Karang	Aksan Siswali	11	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Malangke Desa Tongke	Bajak Laut	Jasmin	17	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Bone Bone Desa Tamuku	Mappatunru	Hafid Hasan	14	Pengawasan di perairan Laut	2010

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Malangke Barat Desa Waelawi	Pulau Indah	Jisman	22	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Pao	Pao Raja	Marsuki	18	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Desa Benteng	Mamminasae	Syamsudin	15	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Bone Bone Desa Batangtongka	Sipatuo	M. Arief	9	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Sukamaju Desa Subur	Harapan Baru	Darwis	9	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Desa Salekoe	Teluk Bone	Bahar	9	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Pengkajoang	Mantalinga Indah	H. Annas	13	Pengawasan di perairan laut	2018
3	Kota Palopo	6 Klp					
		Kec. Wara Timur Kel. Sarutanga	Wahana Lingkungan	Basri Taha	19	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Wara Selatan Desa Sampoddo	Retona	Basmi	15	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Selatan Desa Takkalala	Salu Karo	Awaluddin	24	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Selatan Kel. Songka	Salutanga	Sabil	24	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Timur Kel. Benteng	Salu Tompotika	Idris	25	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Timur Kel. Malatunrung	Baja Pole	Drs. Hamruddin, SE	25	Pengawasan di perairan Laut	2015
4	Luwu Timur	8 Klp					
		Kec. Wotu Desa Bawalipu	Cinta Bahari	Mismar, S.Pd	34	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Angkona Desa Harapan Baru	Harapan Baru	Jumhur	21	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Angkona Desa Harapan Baru	Lampia	Rusdin	16	Pengawasan di perairan laut	2013
		Kec. Burau Desa Lauwo	Teluk Bone	Muh. Yusuf	27	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Wotu Desa Lera	Lalambate	Ansar M. Galib	22	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Malili Desa Cerekang	Pejuang WTC	Arlin, S.Pi	18	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Wotu Desa Lakawali	Bintang Timur	Andi Wahyudin	22	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Nuha Desa Nikkel	Pengawas Danau	H. Umar Ranggo	13	Pengawasan di perairan umum daratan	2020
5	Takalar	12 Klp					
		Kec. Mangarabombang Desa Laikang	Tanjung Laikang	Basir Sila	34	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Sanrobone Desa Ujung Baji	Lestari Alam Samudra	Ahmad Yusuf Mile	10	Pengawasan di perairan laut	2014



No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Mangarabombang Desa Punaga	Tubariana	Syamsu Alam	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Galesong Utara Desa Tamasaju	Sitalasi	Aswandi Dg. Duni	10	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Galesong Kota,Desa Galesong Baru	Sanrobengi	Ripai Nai	30	Pengawasan di perairan laut	2008
		Kec. Mangarabombang	Tumalilia	Abd. Rahman	10	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Galesong Selatan Ds. Bontokanang	Hunter	M. Ramli Liong	30	Pengawasan di perairan laut	2008
		Kec. Mappakasunggu	Panjis	Umar Bani	8	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Galesong Utara	Perintis Bahari	Mustari Tantu	15	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Galesong Desa	Lestari Bahari	Saharuddin Dg. Tayang	30	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Mappakasunggu Desa Balang Datu	Balang Datu	Abdul Malik Dg. Ngewa	11	Pengawasan di perairan laut	2013
		Kec. Mappakasunggu Desa Tompo Tanah	Tompo Tanah	Haris Dg. Nangga	13	Pengawasan di perairan laut	2013
6	Maros	9 Klp					
		Kec. Bonto Desa Pajukukang	Singa Laut	Ilham	20	Pengawasan di perairan Laut	2020
		Kec. Bontoa Desa Pajukukang	Bahari	Hasanuddin /	25	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontoa Kel. Pajukukang	Sipakatau	Idrus Bora	19	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Marusu Kel. Nisombalia	Mina Bahari	H. Ruslan Manye	13	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Maros Baru Kel. Bori Masunggu	Minasa Baji	Supriadi	15	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Lau Kel. Soreang	Sejahtera	Arsyad Rauf	13	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Marusu Desa Nisombalia Dsn. Kuri Caddi	Samudra Bahari Jaya	Sapri	13	Pengawasan di perairan laut	2021
		Kec. Lau Desa Marannu Dusun Kalokko	Rajawali	Safaruddin	13	Pengawasan di perairan laut	2021
		Kec. Bontoa Desa Ampekale	Kuda Laut	H. Muh.Nur	25	Pengawasan di perairan Laut	2021
7	Bantaeng	12 Klp					
		Kec. Bisapu Desa Bontojai	Pantai Batunu	Subhan Yusuf	10	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bissapu Desa Bonto Lebang	Sikamaseang	syahrir	10	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Pajukukang Desa Borong Loe	Marina Indah	H. Nurung	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Biangkeke	Biangkeke Berkarya	Ismail	27	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Baruga	Pantai Gading	Ahmad	11	Pengawasan di perairan Laut	2014

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Pajukukang Desa Nipa Nipa	Kuda Laut	Nasir	9	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Ds. Lumpangang	Lumpangang Raya	Hasan	7	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Pajukukang	Pajukukang Raya	Bakso Pali	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Papanloe	Papanloe Bersinar	H. Arif	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Kel. Lembang	Pantai Selatan	Ihsan	7	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Pajukukang Desa Rappoa	Pinang Raya	M. Yunus	10	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bantaeng Kel. Palantikang	Timur Laut	Achmad	10	Pengawasan di perairan Laut	2015
8	Luwu	6 Klp					
		Kec Larompong Desa Buntu Matabing	Bilongka	Abd. Rahman	30	Pengawasan di perairan laut	2013
		Kec. Larompong Selatan Desa Babang	Pasir Putih	Ismail Marsuki, SH	10	Pengawasan di perairan laut	2007
		Kec. Larompong Selatan Desa Batu Lappa	Antasari	Drs. Syukri. L	19	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Larompong Selatan Desa Temboe	Cinta Bahari	Abdi, S.Pd	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Belopa Utara Desa Lauwa	Alam Bahari	M. Aris Sade, SH.MH	22	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Ponrang Desa Muladimeng	Teluk Mutiara	Ihwan Ilham	12	Pengawasan di perairan Laut	2021
9	Bone	14 Klp					
		Kec. Salomekko Desa Manera	Manera	Muh. Asaf	20	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tellu Siattinge Desa Lamuru	Mabarackae	Bakhris Bahtiar	56	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Awangpone Desa Mallari	Mallari Ade	Mahyudin, S.Ag.S.Pd	19	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tonra Desa Bulu-Bulu	Bahari	Arsyad	20	Pengawasan di perairan Laut	2009
		Kec. Sibulue Desa Pattiro Sompe	Pattiro Sompe	Abbas Amir, S.Pd,Msi	25	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Awangpone Desa Kajuara	Mattiro Deceng	Suardi	33	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Awangpone Desa Carigading	Mallusetasi	Herman Sukri	21	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tanete Riattang Timur Desa Pallette	Pallette	Abdullah, A.Ma	30	Pengawasan di perairan laut	2007
		Kec. Tanete Riattang Timur Desa Bajoe	Bintang Laut	Zulkifli Azroni	25	Pengawasan di perairan laut	2007
		Kec. Barebo Desa Kading	Kading	Kile	10	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Mare Desa Ujung Salangketo	Sipatokkong	Mujetaba	37	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tonra Desa Pada Tuo	Pada Tuo	Abdullah	15	Pengawasan di perairan Laut	2007

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Kajuara Desa Angkue	Angkue	Alias	15	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tanete Riattang Timur Kel. Bajoe	Bajo Bersatu	Suyuti	10	Pengawasan di perairan laut	2020
10	Makassar	7 Klp					
		Kec. Ujung Pandang Kel. Lae Lae	Lumba Lumba	Yusran	8	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Ujung Pandang Kel. Lae Lae	Hiu	H. Yusup	8	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Ujung Tanah Kel. Barrang Lompo	Bahari	Abd. Rasyid	10	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Mariso Kel. Mariso (Pulau Samalona)	Barakuda	Kamaruddin Dg. Lalo	15	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Kepulauan Sangkarang Kel. Barrang	Barrang Lompo	Ismail Muhtar	10	Pengawasan di perairan laut	2008
		Kec. Ujung Pandang Kel. Lae Lae	Cinta Laut	Wahab Dg. Sikki	7	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Ujung Tanah Kel. Barrang Cadi	Bahari Nusantara	Jala'	14	Pengawasan di perairan Laut	2021
11	Pare-Pare	2 Klp					
		Kec. Wattang Soreang Kel. Wattang Soreang	Bagan Lolo	Ali Hafid	17	Pengawasan di perairan laut	2014
		Kec. Bacukiki Barat Kel. Data	La' Balesse	Ahmad Yani	11	Pengawasan di perairan Laut	2014
12	Barru	5 Klp					
		Kec. Mallusetasi Kel. Mallawa	Nirwana Bahari	Bowo Prihanto	33	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Mallusetasi Desa Kupa	Batu Loange	Suardi Haruna	40	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Palanro Kel. Palanro	Bunga Nelayan	Udin Basri	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Tanete Rillau Desa Lasitae	Balanak	Usman	23	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Tanete Rillau Desa Tellumpanua	Bahari Polejiwa	Hamzah	13	Pengawasan di perairan Laut	2014
13	Sinjai	8 Klp					
		Kec. Tellulimpoe Desa Bua	Sipakainge	Bustam	12	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Sinjai Timur Desa Panaikang	Adapi Nagau	Umar, S.Pdi	18	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pulau Sembilan Ds. Pulau Persatuan	Mamminasae	Andi Darwis	15	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pulau Sembilan Desa Pulau Padaelo	Seasseri	Hijriandi	14	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Sinjai Timur Desa Sinjai	Mattiro Deceng	Baharuddin, S.Sos	21	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pulau Sembilan Desa Pulau Harapan	Karang Merah	Abdullah	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pulau Sembilan Desa Pulau Buhung Pitue	Batu Maccidong	Umar	13	Pengawasan di perairan laut	2014
		Kec. Sinjai Timur Desa Pasimaranu	Mabbulo Sipeppa	Rustan, S.Pi	14	Pengawasan di perairan Laut	2014

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
14	Jeneponto	10 Klp					
		Kec. Bangkala Kel. Pantai Bahari	Bahari	Muh. Nasir	25	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bangkala Kel. Pantai Bahari	General	Suharto	13	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Binamu Kel. Empoang Selatan	Pannara Indah	Dado Dg. Joa	15	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Arungkeke Kel. Araneae	Bahari Arungkeke	Abd. Razak	15	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Tamalate Desa Bontojai	Lompo Bulu	Dulla	20	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Tarowang Kel. Tarowang	Tarowang Indah	Bazuki	20	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bangkala Barat Desa Garassikang	Samaturu	Supardi	23	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Bangkala Desa Bontorannu	Sipakatau	Dg. Beta	20	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bangkala Kel. Pantai Bahari	Garuda Bahari	Andi Mattewakang	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Binamu Kel. Empoang Selatan	Senapan	Sudirman	13	Pengawasan di perairan Laut	2009
15	Selayar	11 Klp					
		Kec. Bontomanai Desa Parak	Bambangan	Andi Nawir	16	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontosikuyu Desa Patikarya	Harayya	Mursalim	10	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Benteng Kel. Benteng Utara	Antasena	Rahmat Bonto	8	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontomatene Desa Barat Lambangan	Boneria	Demma Lalli	14	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontoharu Desa Bontoborusu	Liang Kareta	Lukman	11	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontomanai Desa Barugaia	Julu Siri	Andi Suryanto	12	Pengawasan di perairan Laut	2020
		Kec. Bontomanai Desa Parak	Pamtera 2	Burhanuddin	11	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontosikuyu Desa Tambolongan	Nambolaki	Muh. Amang	10	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontomatene Desa Menara Indah	Cahaya Purnama	Marzuki	14	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Pasimarannu Desa Bonea	Taka Bassi Bonea	Kamaluddin	11	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Pasimarranu Desa Bonea	Taka Bassi Bonea 2	La onso	10	Pengawasan di perairan Laut	2021
16	Pinrang	8 Klp					
		Kec. Supa Desa Lotang Salo	Lotang Salo	Abidin	19	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Lembang Desa Binanga Karaeng	Bina Bahari	Muh. Basir Basiru	22	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Mattiro Sompe Kel. Langnga	Sinar Bahari	Herman	10	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Lasinrang Desa Waetue	Mario Marennu	Muladi	33	Pengawasan di perairan Laut	2013



Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Lembang Desa Sabang Paru	Bina Bahari	Alimuddin	28	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Mattiro Sompe Kel. Pallameang	Samaturue	Ibnu Hajar	24	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Supa, Desa Labuang Ujung	Bersatu	H. Ahmad Jawadi	28	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Supa, Desa Labuang Ujung	Siamasei	Erwin Daming	19	Pengawasan di perairan Laut	2015
17	Wajo	14 Klp					
		Kec. Takkalala ,Ds Pantai Timur	Sipakainge	Syarifudin	12	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Pitumpunua Kel. Siwa	Kompas	Muchin	21	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Takkalala Desa Pantai Timur	Mappideceng	Umar H. Sandu	13	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Penrang Desa Doping	Wahana Bahari	H. Panogi	19	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bola Desa Pasir Putih	Mappasitujue	Baso Mattalunru	15	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Sajoanging Desa Akkajeng	Bina Lestari	Mustamin	21	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Pitumpunua Desa Siwa	Siwa Bahari	Gunawan Malik	19	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Keera Desa Keera	Maruddanie	Nurdin	31	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Pitumpunua Desa Siwa	Basma Community	Hafid Assegaf	31	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Pammana Desa Pammana	Sukamaju	Abd. Halid	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Tanasitolo Desa Tanasitolo	Massedie	Samsu Alam	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Tempe Desa Watallipue	Siparingerrang	Arifin	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Belawa Desa Limporilau	Tosagena	Suparman	11	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Maniangpajo Desa Maniangpajo	Sipakainge	Joni. K	11	Pengawasan di PUD	2015
18	Soppeng	3 Klp					
		Kec. Marioriawa Desa Attang Salo	Salomate	Ismail	5	Pengawasan di perairan umum	2017
		Kec. Marioriawa Desa Attang Salo	Bintang 27	Ambo Aman	13	Pengawasan di perairan umum	2017
		Kec. Marioriawa Kel. Kaca	Lasimpo	La Tanggung	14	Pengawasan di perairan umum	2017
19	Bulukumba	6 Klp					
		Kec. Kajang Desa Tana Jaya	Lumba Lumba Putih	H. Muh. Judar	12	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Bontobahari Kelurahan Sapolohe	Batu Mesu	Nurdin Patta	14	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Herlang Kel. Bonto Kamase	Katinroang Jangang	Sangkali	12	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Bontobahari Desa Tanah Lemo	Ujung Baru	H. Ali Imran	10	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bontobahari Kel. Eka Tiro	Cakalang	Badorra	13	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Bonto Bahari Ds. Darubiah Dusun Kasuso	Kasuso Bersatu	Mappawali	27	Pengawasan di perairan Laut	2022

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
20	Sidrap	2 Klp					
		Kec. Watang Sidenreng Desa Mojong	Mamminasae	H. Ardin	26	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Watang Sidendeng Desa Mojong	Mojong Sejahtera	Balbastian	16	Pengawasan di perairan umum	2022
21	Enrekang	12 Klp					
		Kec. Baraka Desa Baraka	Baraka	Simen	18	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Malua Kel. Malua	Malua	Sudirman Datma	12	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Curio Kel. Salasa	Wai Sitodon	Syarif Sinaru	17	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Masalle Desa Buntu Sarong	Masalle	Mardan, A.Md.Pi	14	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Cendana Desa Cendana	Salu Sa'dang	Muhammad Yunus, S.Sos	15	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Buntu Batu Desa Latimojong	Buntu Batu	Ikhsan	16	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Anggeraja Desa Tampo	Anggeraja	Taufan Supu	18	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Baroko Desa Baroko	Baroko	Waluddin	15	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Maiwa Desa Pattondonsalu	Maiwa	Sainal Ballu	16	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Bungin Kel. Bungin	Bungin	Jamaluddin	19	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Enrekang Kel. Galonta	Samata	Supatman Polimin, SP	17	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Alla Desa Pana	Pedas Alla	Basri Pea	30	Pengawasan di perairan umum	2015
22	Gowa	3 Klp					
		Kec. Parangloe Kel. Bontoparang	Beroanging	Rais Patta, S.Sos	26	Pengawasan di perairan umum	2011
		Kec. Parangloe Kel. Lanna	Jeneberang	Hadi, S.Sos	16	Pengawasan di perairan umum	2011
		Kec. Manuju Kel. Bontoparang	Sinar Moncong Loe	Johannis	15	Pengawasan di perairan umum	2011
Jumlah		211 Klp					

Sumber : Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2022

Lampiran 11. Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	IUU Fishing SPB (Surat Persetujuan Berlayar)	Muh Jafar	1 (Satu) unit KMN SAPA MARWA 03 1 (Satu) Bundel dokumen KMN SAPA MARWA 03	Senin ,24 Januari 2022, Pukul 13.30 Wita Perairan Makassar	Pasal 98 UU RI no 45tahun 2009 tentang perikanan	Pelimpahan perkara dari Polairud ke CDK Pangkep Pembinaan

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
2	<b>Destructive Fishing</b> Penggunaan Bahan Kimia (BIUS)	Basri Bin Abu	2 (dua) jerigen ukuran 5 liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate 7 (tujuh) jerigen ukuran 2 liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate 4 (empat) jerigen ukuran 1 liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate 6 (enam) botol bekas ukuran 1,5 liter 3 (tiga) buah karung warna putih sebagai pembungkus bahan peledak	Selasa, 08 Februari 2022, Pukul 11.00 di Pulau Karanrang Kab Pangkep	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951, dan atau pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK DAN P21
3	<b>IUU Fishing</b> SPB (Surat Persetujuan Berlayar)	Patahuddin Bin Dg Ngaseng	1 (satu) unit KMN. RAHMAT MANAI 1 (satu) Bundel dokumen KMN. RAHMAT MANAI 1 (satu) buah JARING/CANTRANG	Rabu, 20 Juli 2022 Pukul 13.30 wita, sekitar perairan sebelah timur pulau Balang Lompo, Kepulauan Pangkep	Pasal 98 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan	Pelimpahan perkara dari Polairud ke CDK Pangkep Pembinaan
4	<b>IUU Fishing</b>	Badaruddin Bin Dg Ramli	1 (satu) unit KMN. PANDANG LOLOA 03 1 (satu) Bundel dokumen KMN. PANDANG LOLOA 03 1 (satu) unit jaring cantrang 10 (sepuluh) gabus ikan jenis campuran	Rabu, 20 Juli 2022 Pukul 14.00 Wita, Perairan Barat Pulau Balang Lompo, Kepulauan Pangkep	Pasal 98 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan	Pelimpahan perkara dari Polairud ke CDK Pangkep Pembinaan
5	<b>IUU Fishing</b>	M Said T Bin Ewa	1 (Satu) unit KMN. SYAHRIL RAMADHAN 1 (satu) bundel dokumen KMN. SYAHRIL RAMADHAN 1 (satu) buah ja ring Purse Seine 1 (satu) gabus ikan campuran	Jumat, 22 Juli 2022	Pasal 98 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK DAN P21
6	<b>IUU Fishing</b>	Dato Bin Dg Udu	KMN. TANPA NAMA	Jumat, 28 Juli 2022 pukul 13.15 WITA di Perairan Gusung Jangang-Jangangang Kec. Liukang Tumpabiring Utara, Kab. Pangkep	Pasal 84 ayat (1) Jobs pasal 8 ayat (1) UU RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK DAN P21
7	<b>IUU Fishing</b>	Sukur Dg Rewa Bin Sudding	KMN. TANPA NAMA	10 Oktober 2022, Pukul 16.30 Wita Perairan Pulau Pelokan Kab.Pangkep	Pasal 84 ayat (1) Jobs pasal 8 ayat (1) UU RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK DAN P21
8	<b>IUU Fishing</b>	Saparuddin Alias Sapor Bin Abbas	KMN. BONTO JAI	Kamis, 22 Desember 2022 Pukul 11.00 WITA di Perairan Sebelah Timur Balang Caddi, Kec. Liukang Tumpabiring, Kab. Pangkep	Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana	Proses
9	<b>IUU Fishing</b>	Rais Bin H Bado	KMN. TANPA NAMA	Kamis, 22 Desember 2022 Pukul 12.00 WITA di Perairan Sebelah Timur Balang Caddi, Kec. Liukang Tumpabiring, Kab. Pangkep	Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana	Proses

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
10	<b>Destructive Fishing</b> Penggunaan Bahan Peledak (Bom ikan)	H. Emmang Bin H. Mursidi	1 Perahu Tanpa Nama 2 Mesin Perahu ( taigo 33 & dongfeng) 1 GPS Garmin, Etrex 10 1 Unit Kompresor 1 rol Selang Udara 1 Tabung Oksigen 1 Fins & Kaca Mata Selam 1 Jerigen 10 ltr di duga berisi bahan peledak 1 Jerigen 5 ltr diduga berisi bahan peledak 2 Botol berisi bensin 2 Botol diduga berisi Bahan bahan peledak 1 Kotak Serbuk Detonator Korek Api Obat Nyamuk 1 Aki 1 Sampan Kecil	Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 13.00 WITA Di Perairan Taka Lasalimu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan Pada Posisi 06°37'140" S - 121° 11' 170" T	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951, dan atau pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Membuat Laporan Polisi Melakukan Pemeriksaan Melakukan Pemotretan
11	<b>Destructive Fishing</b> Penggunaan Bahan Peledak (Bom ikan)	Wawan Bin Sakka	1 Unit Perahu Tanpa Nama 1 Unit Kompresor 23 Buah Botol bir diduga berisi pupuk amonium nitrate 9 buah botol plastik bekas di duga berisi pupuk Amonium Nitrate 3 buah jerigen ukuran 2 liter di duga berisi pupuk Amonium Nitrate 1 buah jerigen ukuran 5 liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate 50 batang diduga detonator rakitan 1 pasang kaki bebek 1 buah dakor/regulator 1 buah kacamata selam 2 buah jaring 1/2 gabus ikan jenis campuran	Hari Senin Tanggal 07 Maret 2022, Sekitar Pukul 19.00 Wita-Perairan Sinjai, Sebelah Timur Pulau Kodingareng, Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai Prop. Sulsel, Pada Posisi Koordinat 5° 06'9 S dan 120° 42'6 E.	Pasal 84 ayat (1) UU RI NO. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Membuat Laporan Polisi Mengamankan tersangka dan Barang Bukti Melaporkan kepada pimpinan
12	<b>Destructive Fishing</b> Penggunaan Bahan Peledak (Detonator)	Riko Bin Hadir	5 batang diduga detonator rakitan 2 batang diduga detonator pabrikan 1 bungkus kecil diduga berisi serbuk detonator 1 kantong hitam berisi serbuk warna putih di duga bahan peledak (paranak)	Hari Rabu Tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita.	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951, dan atau pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Membuat Laporan Polisi Mengamankan tersangka dan Barang Bukti Melaporkan kepada pimpinan
13	<b>Destructive Fishing</b> Penggunaan Bahan Peledak	Kisman Bin H. Muharram	15 botol kaca bekas ukuran 600 ml diduga berisi pupuk Amonium Nitrate 1 buah ember bekas cat ukuran 20 kg diduga berisi pupuk Amonium Nitrate 1 buah ember bekas cat	Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 Wita.	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951, dan atau pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Membuat Laporan Polisi Mengamankan tersangka dan Barang Bukti Melaporkan kepada pimpinan
14	<b>Destructive Fishing</b> Penggunaan Bahan Peledak (bom ikan dan detonator rakitan)	Suardi Bin Ambo Akkang	2 buah jerigen 5 liter di duga berisi pupuk amonium nitrate 3 buah jerigen 2 liter diduga berisi pupuk amonium nitrate 10 batang detonator rakitan 1 bungkus plastik bening diduga berisi serbuk TNT	Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 19.00 di kampung Bajo, Desa Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951, dan atau pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Membuat Laporan Polisi Mengamankan tersangka dan Barang Bukti Melaporkan kepada pimpinan



Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
15	<b>Destructive Fishing</b> Penggunaan Bahan Kimia berupa potasium (bius)	Muhammad Bin Jamaluddin	1 perahu Jolloro 1 Unit Mesin Kompresor 2 botol cairan potasium 1 Rol selang 1 pasang sepatu bebek 1 buah kacamatanya selam 1 buah Dakor/regulator	Hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Perairan Makassar Sekitar Pulau Barrang Lompo, Kec. Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar	Pasal 84 ayat (1) UU RI NO. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Membuat Laporan Polisi Mengamankan tersangka dan Barang Bukti Melaporkan kepada pimpinan
16	<b>Destructive Fishing</b> Penggunaan Bahan Kimia peledak( Pupuk Amonium Nitrate)	Diar Bin H. Salibang	1 Baskom berwarna hitam berisiz 15 Kilo diduga pupuk Amonium Nitrate	Hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 05.00 Wita di Kampung Bajo, Desa Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951, dan atau pasal 84 ayat 1 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Membuat Laporan Polisi Mengamankan tersangka dan Barang Bukti Melaporkan kepada pimpinan
17	<b>Destructive Fishing dan IUU Fishing</b>	Hajiri	Dugaan tindak pidana perikanan yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kompresor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI).Serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual ,menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.	09 April 2022 di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	Pasal 100 B UU NO. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUHPidana	Penanganan Kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum SAT Pol Air Polres Kep. Selayar diminta dalam memberikan keterangan saksi/ahli
18	<b>Destructive Fishing dan IUU Fishing</b>	Sabang	Dugaan tindak pidana perikanan yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kompresor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI).Serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual ,menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.	09 April 2022 di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	Pasal 100 B UU NO. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUHPidana	Penanganan Kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum SAT Pol Air Polres Kep. Selayar diminta dalam memberikan keterangan saksi/ahli

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
19	Destructive Fishing dan IUU Fishing	Risal	Dugaan tindak pidana perikanan yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kompressor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI). Serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual ,menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.	09 April 2022 di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	Pasal 100 B UU NO. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUHPidana	Penanganan Kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum SAT Pol Air Polres Kep. Selayar diminta dalam memberikan keterangan saksi/ahli
20	Destructive Fishing dan IUU Fishing	Muh. Basri	Dugaan tindak pidana perikanan yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kompressor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI). Serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual ,menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.	09 April 2022 di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	Pasal 100 B UU NO. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUHPidana	Penanganan Kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum SAT Pol Air Polres Kep. Selayar diminta dalam memberikan keterangan saksi/ahli
21	Destructive Fishing dan IUU Fishing	Swandi	Dugaan tindak pidana perikanan yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kompressor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI). Serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual ,menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.	09 April 2022 di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	Pasal 100 B UU NO. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUHPidana	Penanganan Kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum SAT Pol Air Polres Kep. Selayar diminta dalam memberikan keterangan saksi/ahli
22	Destructive Fishing dan IUU Fishing	Takwin	Dugaan tindak pidana perikanan yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kompressor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI). Serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual ,menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.	09 April 2022 di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	Pasal 100 B UU NO. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUHPidana	Penanganan Kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum SAT Pol Air Polres Kep. Selayar diminta dalam memberikan keterangan saksi/ahli

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
23	Destructive Fishing dan IUU Fishing	Zaenuddin	Dugaan tindak pidana perikanan yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kompressor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI). Serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.	09 April 2022 di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	Pasal 100 B UU NO. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUHPidana	Penanganan Kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum SAT Pol Air Polres Kep. Selayar diminta dalam memberikan keterangan saksi/ahli
24	Destructive Fishing dan IUU Fishing	Suhardi	Dugaan tindak pidana perikanan yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kompressor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI). Serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.	09 April 2022 di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	Pasal 100 B UU NO. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUHPidana	Penanganan Kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum SAT Pol Air Polres Kep. Selayar diminta dalam memberikan keterangan saksi/ahli
25	Destructive Fishing dan IUU Fishing	Abidin	Dugaan tindak pidana perikanan yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional taka bonerate dengan menggunakan kompressor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI). Serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.	09 April 2022 di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	Pasal 100 B UU NO. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUHPidana	Penanganan Kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum SAT Pol Air Polres Kep. Selayar diminta dalam memberikan keterangan saksi/ahli

Sumber : Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2022

Lampiran 12. Data kasus *illegal fishing* atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Bosowasi selama TA 2022

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
1	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	W BIN S	Amonium Nitrat dan sumbu	Kodingareng, Pulau Sembilan, Sinjai, (koordinat 5° 069 S dan 120° 426 E)	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	diproses berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 78 / III / 2022 / SPKT.DITPOLAIRUD.POLDA SULSEL, tanggal 08 Maret 2022. ----- CDK Bosowasi bekrjasama Penyidik melengkapi berkas perkara dengan Alat Bukti berupa Keterangan AHLI.
2	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	W BIN S	Amonium Nitrat dan sumbu	Kodingareng, Pulau Sembilan, Sinjai, (koordinat 5° 069 S dan 120° 426 E)	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Perkara Tedakwa telah diperiksa, diadili dan divonis Oleh Majelis Hakim di PN Sinjai
3	Penggunaan alkap trawis yang merusak keberlanjutan SDI	H Alias A Bin A	Alat Tangkap Trawis 1 Set	Perairan di Sajoangng, Wajo	pasal 85 UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	diproses berdasarkan Laporan Polisi Nomor : R-LI/17 /III/2022 /Reskrim.Tipidter, tanggal 03 Maret 2022. ----- CDK Bosowasi bekrjasama Penyidik melengkapi berkas perkara dengan Alat Bukti berupa Keterangan AHLI.
4	Penggunaan alkap trawis yang merusak keberlanjutan SDI	J Bin J	Alat Tangkap Trawis 1 Set	perairan Jalang Kab Wajo	pasal 85 UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	diproses berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP- A / 430 / IV / 2022 / SPKT, tanggal 01 April 2022. ----- CDK Bosowasi bekrjasama Penyidik melengkapi berkas perkara dengan Alat Bukti berupa Keterangan AHLI.
5	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	R BIN H	Amonium Nitrat	kampung Bajo, Desa Bajoe, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	diproses berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 116 / IV / 2022 /SPKT.DITPOLAIRUD POLDA SULSEL, tanggal 07 April 2022, ----- CDK Bosowasi bekrjasama Penyidik melengkapi berkas perkara dengan Alat Bukti berupa Keterangan AHLI.
6	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	R BIN H	Amonium Nitrat	kampung Bajo, Desa Bajoe, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Perkara Tedakwa telah diperiksa, diadili dan divonis Oleh Majelis Hakim di PN Bone
7	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	K BIN H. M	Amonium Nitrat dan detonator	Pulau Kanalo II, Desa, Persatuan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai,	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	diproses berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 168 / V / 2022 /SPKT.DITPOLAIRUD POLDA SULSEL, tanggal 26 Mei 2022, ----- CDK Bosowasi bekrjasama Penyidik melengkapi berkas perkara dengan Alat Bukti berupa Keterangan AHLI.
8	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	K BIN H. M	Amonium Nitrat dan detonator	Pulau Kanalo II, Desa, Persatuan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai,	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Perkara Tedakwa telah diperiksa, diadili dan divonis Oleh Majelis Hakim di PN Sinjai
9	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	S BIN AA	Amonium Nitrat	Kampung Bajo, Desa Bajoe, Tanete Riattang Timur, Kab. Bone	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Tersangka diproses secara hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 323 / VIII / 2022 / SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA SULSEL, tanggal 19 Agustus 2022, . ----- CDK Bosowasi diminta membantu melengkapi berkas perkara dengan Alat Bukti berupa Keterangan AHLI.



NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
10	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	S BIN AA	Amonium Nitrat	Kampung Bajo, Desa Bajoe, Tanete Riattang Timur, Kab. Bone	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Perkara Tedakwa telah diperiksa, diadili dan divonis Oleh Majelis Hakim di PN Bone
11	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	D BIN H. S	Amonium Nitrat	kampung Bajo, Desa Bajoe, Tanete Riattang, Kab. Bone	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	CDK Bosowasi diminta membantu melengkapi berkas perkara dengan Alat Bukti berupa Keterangan AHLI.
12	Penggunaan bahan kimia / bahan peledak / bom ikan	D BIN H. S	Amonium Nitrat	kampung Bajo, Desa Bajoe, Tanete Riattang, Kab. Bone	Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Perkara Tedakwa telah diperiksa, diadili dan divonis Oleh Majelis Hakim di PN Bone
13	Penggunaan alat tangkap yang mengganggu & merusak SDI	Nakhoda A/ Pemilik Trawls A	Alat Tangkap Trawls, Kapal Perikanan	Waktu : tgl 23 mei 2022 di perairan Lamuru Tellusiattinge	pasal 85 Sub pasal 100b UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik kepada Nakhoda/pemilik kapal, kepadanya diberikan pembinaan /peringatan, buat pernyataan akan dipidana bila mengulangi perbuatan
14	Penggunaan alat tangkap yang mengganggu & merusak SDI	Nakhoda D/ Pemilik Trawls D	Alat Tangkap Trawls, Kapal Perikanan	Waktu : tgl 23 mei 2022 di perairan Lamuru/Tellusiattinge	pasal 85 Sub pasal 100b UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik kepada Nakhoda/pemilik kapal, kepadanya diberikan pembinaan /peringatan, buat pernyataan akan dipidana bila mengulangi perbuatan
15	Penggunaan alat tangkap yang mengganggu & merusak SDI	Nakhoda M/ Pemilik Trawls M	Alat Tangkap Trawls, Kapal Perikanan	Waktu : tgl 15 Agustus 2022 di perairan BarebboBone	pasal 85 Sub pasal 100b UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik kepada Nakhoda/pemilik kapal, kepadanya diberikan pembinaan /peringatan, buat pernyataan akan dipidana bila mengulangi perbuatan
16	Penggunaan alat tangkap yang mengganggu & merusak SDI	Nakhoda A/ Pemilik Trawls A	Alat Tangkap Trawls, Kapal Perikanan	Waktu : tgl 16 Agustus 2022 di perairan Barebbo Bone	pasal 85 Sub pasal 100b UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik kepada Nakhoda/pemilik kapal, kepadanya diberikan pembinaan /peringatan, buat pernyataan akan dipidana bila mengulangi perbuatan
17	Penggunaan alat tangkap yang mengganggu & merusak SDI	Nakhoda M/ Pemilik Trawls M	Alat Tangkap Trawls, Kapal Perikanan	Waktu : tgl 11 Oktober 2022 di perairan Sajoanging Wajo	pasal 85 Sub pasal 100b UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik kepada Nakhoda/pemilik kapal, kepadanya diberikan pembinaan /peringatan, buat pernyataan akan dipidana bila mengulangi perbuatan
18	Penggunaan alat tangkap yang mengganggu & merusak SDI	Nakhoda S Pemilik Trawls S	Alat Tangkap Trawls, Kapal Perikanan	Waktu : tgl 12 Oktober 202 di perairan Sajoanging Wajo	pasal 85 Sub pasal 100b UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik kepada Nakhoda/pemilik kapal, kepadanya diberikan pembinaan /peringatan, buat pernyataan akan dipidana bila mengulangi perbuatan

Lanjutan.....

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
19	Penggunaan alat tangkap yang mengganggu & merusak SDI	Nakhoda L/ Pemilik Trawls L	Alat Tangkap Trawls, Kapal Perikanan	Waktu : tgl 2 November 2022 di perairan Salomekko, Bone	pasal 85 Sub pasal 100b UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik kepada Nakhoda/pemilik kapal, kepadanya diberikan pembinaan /peringatan, buat pernyataan akan dipidana bila mengulangi perbuatan
20	Penggunaan alat tangkap yang mengganggu & merusak SDI	Nakhoda B/ Pemilik Trawls B	Alat Tangkap Trawls, Kapal Perikanan	Waktu : tgl 23 mei 2022 di perairan Mare Kab.Bone	pasal 85 Sub pasal 100b UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik kepada Nakhoda/pemilik kapal, kepadanya diberikan pembinaan /peringatan, buat pernyataan akan dipidana bila mengulangi perbuatan

Sumber : CDK Bosowasi 2022

**Lampiran 13. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Bosowasi TA 2022**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Bibit	Luas Areal	Jenis Mangrove
1	Bone	Kec. Tanete riattang Timur	Kelurahan Pallette	38.000	3,8 Ha	Rhizophora,SP
2	Wajo	Kec. Bola dan Kec Takalla	Desa Pasir Putih dan Desa Pantai Timur	38.000	3,8 Ha	Rhizophora,SP
3	Bone	Kec. Salomekko	Kelurahan Pancaitana	38.000	3,8 Ha	Rhizophora,SP
4	Wajo	Kec. Sajoanging	Kelurahan Akkajeng	40.000	2 Ha	Rhizophora,SP
5	Bone	Kec. Tanete riattang Timur	Kelurahan Bajoe	5.353	0,4 Ha	Rhizophora,SP

Sumber : CDK Bosowasi 2022

**Lampiran 14. Data Pembuatan Rumah Ikan/Apartemen Ikan yang dilakukan Oleh CDK Bosowasi TA 2022**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Modul
1	Wajo	Kecamatan Pitumpanua	Desa Bangsalae	27
2	Bone	Kec. Tanete riattang Timur	Kelurahan Bajoe	23

Sumber : CDK Bosowasi 2022

**Lampiran 15. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Bibit	Luas Areal	Jenis Mangrove
1	Makassar	Biringkanaya	Untia	38.000 Btg	1,8 Ha	Rhizophora
2	Takalar	Kep. Tanakeke	Tompotana	38.000 Btg	1,8 Ha	Rhizophora
3	Takalar	Mangarabombang	Laikang	38.000 Btg	1,8 Ha	Rhizophora
4	Maros	Marusu	Nisombalia	38.000 Btg	1,8 Ha	Rhizophora
5	Maros	Lau	Marannu	39.000 Btg	1,9 Ha	Rhizophora
6	Maros	Maros Baru	Borimasunggu	40.000 Btg	2 Ha	Rhizophora
7	Maros	Bontoa	Ampekale	38.000 Btg	1,8 Ha	Rhizophora

Sumber : CDK Mamminasata 2022

Lampiran 16. Data Transplantasi Karang yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Luas Areal	Jenis Karang
1	Makassar	Sangkarrang	Pulau Barrang Caddi	200 M <sup>2</sup>	<i>Acropora Formosa</i> dan <i>Acropora Nobilis</i>
2	Makassar	Sangkarrang	Pulau Kodingareng Keke	39 M <sup>2</sup>	<i>Acropora Formosa</i> dan <i>Acropora Nobilis</i>
3	Makassar	Ujung Pandang	Pulau Lae-Lae	200 M <sup>2</sup>	<i>Acropora Sp</i>
4	Makassar	Mariso	Pulau Samalona	400 M <sup>2</sup>	<i>Acropora Sp</i>
5	Makassar	Sangkarrang	Pulau Barrang Lompo	250 M <sup>2</sup>	<i>Acropora Sp</i>
6	Makassar	Sangkarrang	Pulau Lanjukang	250 M <sup>2</sup>	<i>Acropora Sp</i>
7	Takalar	Kep. Tanakeke	Pulau Satangnga	200 M <sup>2</sup>	<i>Acropora Formosa</i> dan <i>Acropora Nobilis</i>
8	Takalar	Galesong	Pulau Sanrobengi	200 M <sup>2</sup>	<i>Acropora Tabulate</i>

Sumber : CDK Mamminasata 2022

Lampiran 17. Data Pembuatan Rumah Ikan/Apartemen Ikan yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Luas Areal
1	Makassar	Sangkarrang	Pulau Kodingareng	900 M <sup>2</sup>
2	Makassar	Sangkarrang	Pulau Barrang Caddi	900 M <sup>2</sup>
3	Takalar	Galesong	Pulau Sanrobengi	900 M <sup>2</sup>

Sumber : CDK Mamminasata 2022

Lampiran 18. Data Hasil Pemeriksaan Patroli IUU Fishing yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022

No	Nama Kapal / Pemilik (Nahkoda)	Alat Tangkap	Lokasi Pemeriksaan /Pemantauan	Hasil Pemeriksaan dan Pemantauan
1	Farina Indah 02 / H. Abd Jabbar	Pancing	5°02'26.99"S 119°22'85.78"E	Dokumen Kapal Perikanan Lengkap
2	Ikbal Jaya Reski / H. Syafaruddin Mangka	Pancing	5°03'40.90"S 119°23'55.54"E	Dokumen Kapal Perikanan Lengkap
3	Matahariku 02 / Samsir	Pancing	4°00'00.54"S 119°22'41.70"E	Dokumen Kapal Perikanan Lengkap
4	Cahaya Bone 1 19 A / Kampo	Purse Seine	5°01'02.60"S 119°21'30.17"E	Dokumen Kapal Perikanan Lengkap
5	Arfah 01 / Muhlis	Pancing	4°58'57.72"S 119°24'57.06"E	Dokumen Kapal Perikanan Lengkap
6	Cahaya Santri / Hapia	Pancing	5°01'19.81"S 119°25'23.34"E	Dokumen Kapal Perikanan Lengkap
7	Faniya / Mando Dg Ngitung	Pancing	5°02'51.50"S 119°25'45.80"E	Dokumen Kapal Perikanan Lengkap
8	Harapan Baru 09 / Suardi	Pancing	5°04'36.59"S 119°25'51.02"E	Dokumen Kapal Perikanan Lengkap
9	Rahmat Ilahi 06 A / H. Dora Dg Narang	Pancing	5°03'30.50"S 119°20'50.02"E	Dokumen Kapal Perikanan Lengkap
10	Cahaya Galesong / Muh Agus Dg Siriwa	Pancing	5°22'56.96"S 119°14'15.61"E	Dokumen Perizinan Lengkap
11	Tiwi 02 / Mansur Dg Mangung	Pancing	5°24'47.84"S 119°12'38.27"E	Dokumen Perizinan Lengkap
12	Syahrizky Jaya / Herman	Pancing	5°25'51.06"S 119°10'50.20"E	Dokumen Perizinan Lengkap
13	Sumber Utama 03 / Muh Irfan	Pancing	5°26'21.44"S 119°10'4.84"E	Dokumen Perizinan Lengkap
14	Rafa Jaya 02 / Kasdiar Dg Bantang	Pancing	5°27'50.76"S 119°10'51.17"E	Dokumen Perizinan Tidak ada
14	Rafa Jaya 02 / Kasdiar Dg Bantang	Pancing	5°27'50.76"S 119°10'51.17"E	Dokumen Perizinan Tidak ada
15	Iful Syam Jaya 03 / Sanpara Dg Taba	Pancing	5°29'1.61"S 119°10'16.18"E	Dokumen Perizinan Lengkap
16	Fajar Faril 03 / Nawir Dg Ngitung	Pancing	5°28'15.13"S 119°12'29.20"E	Dokumen Perizinan Lengkap
17	Fajar Alam 02 / Nawir Dg Ngitung	Pancing	5°25'25.57"S 119°16'16.68"E	Dokumen Perizinan Lengkap
18	Doa Suci V / Sattuung BG	Pancing	5°25'22.12"S 119°15'6.66"E	Dokumen Perizinan Lengkap

Lanjutan.....

No	Nama Kapal / Pemilik (Nahkoda)	Alat Tangkap	Lokasi Pemeriksaan /Pemantauan	Hasil Pemeriksaan dan Pemantauan
20	Nurul Hikmah 01 / Juanda	Pancing Ulur	5°24'47.84"S 119°12'38.27"E	Dokumen Perizinan Lengkap
21	Putra Matutu 47 / H. Muh Syahrul	Pancing Ulur	5°25'51.06"S 119°10'50.20"E	Dokumen Perizinan Lengkap
22	Rasul Indah / Rani DG Ngewa	Pancing Ulur	5°26'21.44"S 119°10'4.84"E	Dokumen Perizinan Lengkap
23	Annisa Indah C8 / Magga DG Sila	Pancing Ulur	5°27'50.76"S 119°10'51.17"E	Dokumen Perizinan Tidak ada
24	Alfian Saputra / H. Sutte Rani	Pancing Ulur	5°29'1.61"S 119°10'16.18"E	Dokumen Perizinan Lengkap
25	Hijar Utama / Saripuddin DG Nyala	Pancing	5°28'15.13"S 119°12'29.20"E	Dokumen Perizinan Lengkap
26	Pais / Sakir	Pancing	5°25'25.57"S 119°16'16.68"E	Dokumen Perizinan Lengkap
27	Mutiara Indah 99 / Rani DG Tayang	Pancing Ulur	5°25'22.12"S 119°15'6.66"E	Dokumen Perizinan Lengkap
28	Wahyu Jaya 01 / Riswan	Purse Seine	S.04°98'56.39" .119°21'6241"	Dokumen Lengkap
29	Nur Islam 38 / Yakub	Pancing	4°98'71.85"S 119°13'75.44"	Dokumen Lengkap
30	Sinar Jaya 15 / Baso DG Buang	Pancing	5°18'50.3"S 119°18'29.0"E	Dokumen Lengkap
31	Sonata / H. Jole	Purse Seine	5°034'64.2"S 119°10'57.67"	Dokumen Lengkap
32	Fatima Hakata / Sonda	Purse Seine	5°28'41.6"S 119°20'09.5"E	Dokumen Lengkap
33	Satriani Indah / Sonda	Pancing	5°28'36.9"S 119°10'59.9"E	Dokumen Lengkap
34	Rafa Jaya 02 / Kasdiar	Pancing	5°21'37.6"S 119°11'56.5"E	Dokumen Lengkap
35	Saiful Sanjaya 01 / Sampara	Pancing	5°13'39.0"S 119°18'03.6"E	Dokumen Lengkap
36	Amanah Ilahi 05 / Tuppu	Pancing	5°10'13.8"S 119°17'34.9"E	Dokumen Lengkap
37	Selebes 02 / Rijal	Pancing	5°13'59.3"S 119°20'18.1"E	Dokumen Lengkap
38	Bulan Bintang 055/ Dg Jarre	Purse Seine	5°03'03.49"S 119°14'14.64"E	Dokumen Lengkap
39	Bunga Mawar 03/Ambo Tuwo	Purse Seine	5°14'50.57"S 119°26'64.89"E	Dokumen Perizinan Lengkap
40	Cahaya Madinah 04/Darmawi Dg. Mabe	Purse Seine	4°00'30.82"S 119°08'55.79"E	Dokumen Perizinan Lengkap
41	Cahaya Nusantara Nayla/ Gassing Lanto	Purse Seine	5°00'55.44"S 119°03'24.55"E	Dokumen Lengkap
42	Dua Putra Wahyu Jamaah	Purse Seine	5°14'47.91"S 119°26'42.74"E	Dokumen Lengkap
43	Mina Maritim 106/Muh Jafar	Purse Seine	4°57'03.96"S 119°07'39.14"E	Dokumen Lengkap
44	Baji Minasa 10/Mansi Dg. Talli	Pancing	4°58'20.32"S 119°10'56.89"E	Dokumen Perizinan Lengkap
45	Baji Minasa 20A/Mansi Dg. Talli	Pancing	5°03'10.87"S 119°16'03.43"E	Dokumen Lengkap
46	Bintang Resqi 01 Abdul Rahman Sanjaya	Pancing	5°03'41.04"S 119°15'05.33"E	Dokumen Perizinan Lengkap
47	Remaja Indah 01 /Melo Dg Ngerang	Pancing	5°11'41.32"S 119°19'23.16"E	Dokumen Perizinan Lengkap
48	Aldi Jaya 99 /Aldi	Pancing	5°16'11.57"S 119°21'58.61"E	Dokumen Perizinan Lengkap
49	Jujur Jaya 01 /Syariadi	Pancing	5°16'25.54"S 119°22'26.00"E	Dokumen Perizinan Lengkap
50	Hijar Utama /Saripuddin	Gill Net	5°23'57.19"S 119°17'35.81"E	Dokumen Perizinan Lengkap

Sumber : CDK Mamminasata 2022

**Lampiran 18. Data Hasil Pengawasan Kapal Perikanan Di Bawah 30 GT yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022**

No	Nama Kapal	Pemilik	GT	Alat Tangkap	Tanda Selar
1	CAHAYA BARU B	BAHARUDDIN	10	PANCING	GT.10 1710/LLa
2	CAHAYA FAHRI 02	ANSAR MANGUNG	13	PANCING	GT.13 1774/LLa
3	KARYA UTAMA 501	USMAN	13	PANCING	GT.13 2240/LLa
4	MAGFIRAH FAMILY	USMAN	10	PANCING	GT.10 2257/LLa
5	RESKI LAUT 2	SARIPUDDIN DG GASSING	14	PANCING	GT.14 2015/LLa
6	JABAL NUR 04	H. SYAMSUL RIJAL	16	PANCING	GT.16 1267/LLa
7	AMANA ILAHI 05	SAHRIR TUPPU	17	PANCING	GT.17 1458/LLa
8	ANUGRAH SALSA	HAMZA SONNA	11	PANCING	GT.11 221/LLz
9	CAHAYA FITRI 01	H. GAZALI DG NGEWA	14	PANCING	GT.14 1275/LLa
10	IKHSAN JAYA 05	HENDRA DG SIJAYA	21	PANCING	GT.21 757/LLz
11	NUR INDAH SARI	UMAR SARRO	19	PANCING	GT.19 544/LLz
12	NUR FADILLAH 01	UDIN DG GADING	17	PANCING	GT.17 118/LLz
13	ZIDAN JAYA	MADI DG BELLA	12	PANCING	GT.12 1856/LLa
14	CAHAYA MEKKA 02	ABDUL KADIR ALI	15	PANCING	GT.15 1242/LLa
15	CAHAYA MEKKA 01	ABDUL KADIR ALI	13	PANCING	GT.13 1242/LLa



Lanjutan.....

No	Nama Kapal	Pemilik	GT	Alat Tangkap	Tanda Selar
16	BODDIA JAYA	ALES DG LIONG	19	PANCING	GT.19 334/LLz
17	BERKAH UISAHA 05	DARWIS DG BELLA	10	PANCING	GT.10 282/LLz
18	SUMBER MAS 05	H. SAMPARA DG GAU	11	PANCING	GT.11 205/LLz
19	PUTRI TIGA BULAN	ANTO	14	PANCING	GT.14 752/LLz
20	CAHAYA FITRAH 11	RAHMAN DG ROWA	12	PANCING	GT.12 1624/Lla
21	BERKAH ILAHI	RUSTAM SANGKALA WIJAYA	21	PANCING	GT.21 124/ Llf
22	SUMBER MAS 07	H. SAMPARA DG GAU	12	PANCING	GT.12 206/LLz
23	SUMBER JAYA 06	ABBAS DG KULING	18	PANCING	GT.18 175/LLz
24	REZKI ISMAIL 01	ABDUL SALAM	11	PANCING	GT.11 1227/Lla
25	NUR MULTAZAM 01	ERMIN	21	PANCING	GT.21 549/LLz
26	HENDRI MAULANA	H GAZALI DG NGEWA	8	PANCING	GT.8 1295/Lla

Sumber : CDK Mamminasata 2022

Lampiran 19. Data Hasil Bantuan Sarana Pengawasan yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2022

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Bantuan	Nama Kelompok
1	Makassar	Sangkarrang	Barrang Lompo	Perahu	Barrang Lompo
2	Makassar	Sangkarrang	Barrang Caddi	Perahu	Bahari Nusantara
3	Makassar	Ujung Pandang	Lae-Lae	Perahu	Hiu
4	Maros	Lau	Ampekale	Perahu	Kuda Laut
5	Maros	Lau	Marannu	Perahu	Rajawali
6	Maros	Marusu	Nisombalia	Perahu	Samudra Bahari Jaya
7	Maros	Bontoa	Bonto Bahari	Perahu	Bahari
8	Takalar	Mangarabombang	Punaga	Perahu	Tubarani

Sumber : CDK Mamminasata 2022

Lampiran 20. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Ajatappareng TA 2022

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Bibit	Luas Areal	Jenis Mangrove
1.	Pinrang	Duampanua	Paria	38.000	1,8 Ha	Rhizophora

Sumber : CDK Ajatappareng 2022

Lampiran 21. Data kasus *illegal fishing* atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah CDK Wilayah Selatan selama TA 2022

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
1	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Nandir	KMN. Dua Putra Sapolohe	Tanggal 26 Maret 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°56'48.54" LS 120°11'32.16" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
2	Tidak memiliki dokumen kapal	Mustakim	KMN. Gado-Gadoa	Tanggal 26 Maret 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°32'23.93" LS 120°21'49.47" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.

Lanjutan.....

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
3	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Usman	KMN. Sinar Bajang	Tanggal 26 Maret 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°34'13.51" LS 120°22'8.57" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
4	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Mahful	KMN. Bintang Timur 01	Tanggal 26 Maret 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°34'16.99" LS 120°22'11.96" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
5	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Mursaluddin	KMN. Sama-sama Indah	Tanggal 26 Maret 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°34'42.55" LS 120°22'45.79" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
6	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Sukirman	KMN. Cahaya Purnama	Tanggal 27 Maret 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°34'41.96" LS 120°22'46.49" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
7	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Kamaruddin	KMN. Rina Jaya 05	Tanggal 27 Maret 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°36'20.93" LS 120°27'59.79" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
8	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Herman	KMN. Lestari Jaya	Tanggal 22 Juni 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°39'56.988" LS 120°14'42.180" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
9	Dokumen SIPI sudah kadaluarsa	Jabiruddin Rauf	KMN. Bunga Nusantara 03	Tanggal 22 Juni 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°34'13.51" LS 120°22'8.57" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
10	Dokumen SIPI sudah kadaluarsa	Safaruddin Dg. Lewa	KMN. Rajawali HD	Tanggal 18 Agustus 2022 di sekitar perairan Kab. Bantaeng dengan titik koordinat 5°37'17.720" LS 120°6'55.206" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
11	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Ali Akbar	KMN. Nusa Raya Persada	Tanggal 19 Agustus 2022 di sekitar perairan Kab. Bantaeng dengan titik koordinat 5°37'14.239" LS 120°7'4.912" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
12	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Anwar Dg. Nuntung	KMN. Asmar Jaya 03	Tanggal 19 Agustus 2022 di sekitar perairan Kab. Bantaeng dengan titik koordinat 5°35'3.952" LS 120°3'48.064" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
13	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Saenuddin	KMN. Asmar Jaya 02	Tanggal 19 Agustus 2022 di sekitar perairan Kab. Bantaeng dengan titik koordinat 5°35'1.583" LS 120°3'47.142" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
14	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Arman	KMN. Rina Jaya	Tanggal 25 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°36'18.92" LS 120°27'57.92" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
15	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Supriadi	KMN. Buana Laut Nusantara	Tanggal 25 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°21'34.61" LS 120°27'0.09" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
16	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Asdar	Tidak ada	Tanggal 25 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°21'34.61" LS 120°27'0.09" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
17	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Suardi	KMN. Jabal Rahma 71	Tanggal 26 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°19'53.95" LS 120°26'18.31" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
18	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Akbar	KMN. Bulan Manai	Tanggal 26 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°19'52.43" LS 120°26'19.20" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
19	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Irham	KMN. Ira Buana Fani	Tanggal 26 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°18'45.86" LS 120°26'47.36" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.

Lanjutan.....

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
20	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Basri	KMN. Naurah 01	Tanggal 26 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°18'42.95" LS 120°26'39.09" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
21	Tidak membawa dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Olang	KMN. Air Utama Jaya	Tanggal 26 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°18'36.04" LS 120°26'26.97" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
22	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Adi Firman	KMN. Anto Jaya 01	Tanggal 26 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°20'1.58" LS 120°25'32.05" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
23	Penangkapan Tidak membawa dokumen pada saat melakukan ikan di laut	Bakri	KMN. Dua Putra Kajang	Tanggal 26 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°20'49.67" LS 120°25'0.67" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.
24	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Subair	KMN. Makareso Sukses	Tanggal 26 Nopember 2022 di sekitar perairan Kab. Bulukumba dengan titik koordinat 5°19'58.23" LS 120°24'44.09" BT	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut.

Sumber : CDK Wilayah Selatan 2022

**Lampiran 22. Data kasus *illegal fishing* atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah CDK Kepulauan Selayar selama TA 2022**

No	Identitas Pelaku	Jenis Kasus/Pelanggaran yang terjadi	Waktu & Tempat Kejadian	Keterangan
1	Hajiri Sabang Risal Muh. Basri Swandi Takwin Zaenuddin Suhardi Abidin	Dugaan tindak pidana yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan taman nasional tak bonerate dengan menggunakan compressor dan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin pengangkutan ikan (SIPI), serta melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Rumusan pasal 100B UU No. 45 tahun 2009, tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Subs Pasal 480 Jo Pasal 55 KUH Pidana	09 April 2022 di Takaboneate Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan kasus sementara dalam penyelidikan Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Kep. Selayar, kami dari CDK Kep. Selayar diminta dalam memberikan Keterangan saksi/ahli

Sumber : CDK Kepulauan Selayar 2022



Lampiran 23. Capaian Indikator Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan CDK Kepulauan Selayar

No	Program/Sub Kegiatan	IKK Outcome/Output	Jumlah Sampel Pelaku KP yang diperiksa	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh	Persentase kepatuhan	keterangan
1	Pengawasan Usaha Perikanan tagkap sampai dengan 12 mil	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) di Selayar yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	21	15	71,43	6 Unit kapal tidak patuh alasannya adalah Kapal ini tidak bisa menunjukkan dokumen kapal berupa Izin, NIB, Sertifikat Standar, Pas Besar dll, sementara setiap kapal yang beroperasi wajib membawa dokumen tersebut diatas kapal dan menunjukkan ke petugas pengawas ketika diperiksa kelengkapan dokumen kapalnya.

Sumber : CDK Kepulauan Selayar 2022

Lampiran 24. Data Tindak Pidana Perikanan yang Ditemukan di Wilayah CDK Pangkep Tahun 2022

No	Jenis Kasus	Nama Pelaku	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian	Pasal yang digunakan	Keterangan
1	IUU Fishing SPB (Surat Persetujuan Berlayar)	MUH. JAFAR	- 1 (Satu) unit KMN SAPA MARWA 03 - 1 (Satu) Bundel dokumen KMN SAPA MARWA 03	Senin ,24 Januari 2022, Pukul 13.30 Wita Perairan Makassar	Pasal 98 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan	Pelimpahan
2	Destructive Fishing Bahan Kimia (BIUS)	BASRI BIN ABU	- 2 (dua) jerigen ukuran 5 liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate - 7 (tujuh) jerigen ukuran 2 liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate - 4 (empat) jerigen ukuran 1 liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate - 6 (enam) botol bekas ukuran 1,5 liter - 3 (tiga) buah karung warna putih sebagai pembungkus bahan peledak	Selasa, 08 Februari 2022, Pukul 11.00 di Pulau Karanrang Kab Pangkep	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951, dan atau pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	P21
3	IUU Fishing SPB (Surat Persetujuan Berlayar)	PATAHUDDIN BIN DG. NGASANG	- 1 (satu) unit KMN. RAHMAT MANAI - 1 (satu) Bundel dokumen KMN. RAHMAT MANAI - 1 (satu) buah JARING/CANTRANG	Rabu, 20 Juli 2022 Pukul 13.30 wita, sekitar perairan sebelah timur pulau Balang Lompo, Kepulauan Pangkep	Pasal 98 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan	Pelimpahan
4	IUU Fishing	BADARUDDIN BIN DG. RAMLI	- 1 (satu) unit KMN. PANDANG LOLOA 03 - 1 (satu) Bundel dokumen KMN. PANDANG LOLOA 03 - 1 (satu) unit jaring cantrang - 10 (sepuluh) gabus ikan jenis campuran	Rabu, 20 Juli 2022 Pukul 14.00 Wita, Perairan Barat Pulau Balang Lompo, Kepulauan Pangkep	Pasal 98 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan	Pelimpahan

Lanjutan.....

No	Jenis Kasus	Nama Pelaku	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian	Pasal yang digunakan	Keterangan
5	IUU Fishing	M. SAID T. BIN EWA	- 1 (Satu) unit KMN. SYAHRIL RAMADHAN - 1 (satu) bundel dokumen KMN. SYAHRIL RAMADHAN - 1 (satu) buah ja ring Purse Seine - 1 (satu) gabus ikan campuran	Jumat, 22 Juli 2022,	Pasal 98 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan	P21
6	IUU Fishing	DATO BIN DG. UDU	KMN. TANPA NAMA	Jumat, 28 Juli 2022 pukul 13.15 WITA di Perairan Gusung Jangang-Jangang Kec. Liukang Tumpabiring Utara, Kab. Pangkep	Pasal 84 ayat (1) Jobs pasal 8 ayat (1) UU RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana	P21
7	IUU Fishing	SUKUR Dg. REWA BIN SUDDING	KMN. TANPA NAMA	10 Oktober 2022, Pukul 16.30 Wita Perairan Pulau Pelokan Kab. Pangkep	Pasal 84 ayat (1) Jobs pasal 8 ayat (1) UU RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana	Pelimpahan
8	IUU Fishing	SAPARUDDIN ALIAS SAPAR BIN ABBAS	KMN. BONTU JAI	Kamis, 22 Desember 2022 Pukul 11.00 WITA di Perairan Sebelah Timur Balang Caddi, Kec. Liukang Tumpabiring, Kab. Pangkep	Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana	Proses
9	IUU Fishing	RAIS BIN H. BADO	KMN. TANPA NAMA	Kamis, 22 Desember 2022 Pukul 11.00 WITA di Perairan Sebelah Timur Balang Caddi, Kec. Liukang Tumpabiring, Kab. Pangkep	Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana	Proses

Sumber Data : CDK Pangkajene dan Kepulauan

Lampiran 25. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Pangkajene dan Kepulauan TA 2022

No	Pulau	Kecamatan	Desa	Jumlah Bibit	Luas Areal (Ha)	Jenis Mangrove
1	P. Kapoposang	Liukang Tupabbiring	Mattiro Ujung	5.000 Batang	0,35	Rhizophora sp
2	P. Cambang-Cambang	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Baji	5.000 Batang	0,35	Rhizophora sp
3	P. Bontomanai	Labakkang	Bontomanai	10.000 batang	0,7	Rhizophora sp

Sumber Data : CDK Pangkajene dan Kepulauan

**Lampiran 26. Data Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Pembangunan Apartemen Ikan yang dilakukan Oleh CDK Pangkajene dan Kepulauan TA 2022**

No	Jenis Kegiatan	Pulau	Desa	Kecamatan	Luas Rehabilitasi (Ha)
1	Transplantasi Karang	Pajeneke	Mattiro Deceng	Liukang Tupabbiring Utara	0,014
2	Transplantasi Karang	Salebbo	Mattiro Walie	Liukang Tupabbiring Utara	0,014
3	Transplantasi Karang	Samatellu Pedda	Mattiro Walie	Liukang Tupabbiring Utara	0,014
4	Apartemen Ikan	Bontosua	Mattiro Bone	Liukang Tupabbiring	0,04
5	Apartemen Ikan	Salebbo	Mattiro Walie	Liukang Tupabbiring Utara	0,04

Sumber Data : CDK Pangkajene dan Kepulauan

**Lampiran 27. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Luwu Raya TA 2022**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah Bibit (Batang)	Luas Areal (Ha)	Jenis Mangrove
1	Luwu Timur	Burau	Burau Pantai	38.000	3,8	Rhizophora, SP
2	Luwu	Larompong	Larompong	28.000	2,8	Rhizophora, SP
3	Luwu	Suli	Suli	28.000	2,8	Rhizophora, SP
4	Palopo	Wara Timur	Salekoe	38.000	3,8	Rhizophora, SP
5	Luwu	Suli	Cimpu	40.000	4	Rhizophora, SP

Sumber Data : CDK Luwu Raya

**Lampiran 28. Daftar Unit Pengolahan Ikan/ Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
1	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N. 4-B1 Makassar Telp (0411)513378 Fax (0411) 513373	Frozen cooked shrimp Frozen Breaded shrimp Frozen Raw Shrimp
2	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. Kima Raya I Kav. D-1b , Makassar Telp (0411) 514515, 514782 Fax (0411) 515430	Frozen Shrimp Frozen cooked shrimp
3	CV. Bone Agung Mina Persada	Jl. Wiyatamandala Kel. Lonrae Timur. Telp(0481)26555 (0418) 26776 355 087 788 Fax 081	Frozen Shrimp Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopods
4	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima raya I Blok D-2B Telp(0411) 514515, 514782 Fax (0411) 515430	Frozen cooked shrimp Frozen Raw Shrimp Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods Frozen Tuna (loin, steak) Frozen Farm Raised Fish (lele) Dried Flying Fish Roe
5	PT. South Suco	Jl. Kima VI Blok G/IV B Telp(0411) 510201, 510215, Fax (0411) 510049	Frozen Shrimp
6	PT. Wahyu Pradana BM	Jl. Kima raya I Blok D No. 2C 4720895, 870760 Telp(0411) (0411) 6191011	Frozen shrimp Dried flying fish roe Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods Fresh Tuna Frozen Tuna Frozen Cookedshrimp
7	CV. Prima Indo Tuna	Jl. Ir. Sutami No. 32 0811442826	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen Demersal Fish

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
8	PT. Sinar Graha	Jl. Sultan Abdullah No. 59 0816256106 (0411) 6074710 (Johan)/085342 536 1093 081 356 152 866 (Indri)	Frozen Pelagic Fish Frozen Slipper Lobster Frozen Octopus Frozen Fish Fillet
9	PT. Perikanan Nusantara	Jl. Sabutung 1 No.1. Telp. 411-21625	Frz Demersal & Pelagic Fish Frozen Chepalopods
10	PT. Prima Bahari Inti lestari	Jl. Kima 12 Kav. 5C Telp (0411) 512688 Fax (0411) 514163	Fresh tuna, Frozen Tuna, Fresh chepalopods, Frozen Chepalopods Fresh fillet fish, Frozen Chepalopods Fresh fish, Frozen Demersal Fish Frozen Boneless Milkfish
11	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K. 9/B2 Telp (0441) 515555 Jl. Kima 4 Kav. P-28, Makassar	Fresh tuna, Frozen tuna, Ikan Demersal Beku, Ikan Demersal Segar
12	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamellang No. 42 kel. Bojo baru Kec. Mallusetasin Kab. Barru Fax (0411) 21105 Telp (0411) 21625	Chilled pasteurized crab meet Frozen Pasteurized crabmeat Can Frozen demersal fish Ikan Scombroid Beku
13	CV. Ome tradingcoy	Jl. Poros kanjilo gowa Fax (0411) 8216946 Hp. 085 243 020 588, 081 355 468 790	Hana katsuobushi
14	PT. Donglim Jireh	Komp kima square blok B. 1-2, 0816251276	Dried Flying Fish Roe
15	PT. Dunia Marine Product	Jl. Kima 3 Kav. 4b Telp (0411) 512619 Fax (0411) 512625, HP. 081241629172	Dried flying fish roe Frozen Shrimp Frz Cephalopods, Teripang krg
16	PT. Kawa Gutti	Jl. Tool lama no.22 Telp (0411) 512615 Fax (0411) 514826	Frozen flying fish roe (Dried Flying Fish Roe)
17	PT. Omeresso food	Jl. Poros Kanjilo, Barombong Gowa 085243020588	Katsuo Powder Hana Katsuo
18	CV. Makassar jaya	Jl. Batara bira 6 Komp. PU No. 13	Dried sea cucumber
19	PT. Multi Sari Makassar	Jl. Kima 14 Kav. SS 12 Telp (0411) 4723232, HP. 085 342 729 113	Fresh Demersal Fish Frozen Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen, Pelagic Fish Frozen chepalopods, Fresh chepalopods, Frozen Tuna, Fresh Tuna Frozen Shrimp, Fresh Shrimp
20	PT. Parlevliet Paraba	Jln. Jembatan Tua No.89 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros Hp. 0812 4219 685 Telp (0411) 5439100, fax (0411) 550623	Fresh Tuna & Frozen Tuna Fresh Pelagic, & Frz. Pelagic Fresh & Frz. Demersal Fish Fresh Cephalopods
21	PT. Kemilau Bintang timur	Jl. Kima 3 Kav. 2A Telp (0411) 512808, 512828 Fax (0411) 513000 Hp. 082 193 088 277	Frozen Crabmeat Frozen Pasteurized crabmeat Frozen Raw shrimp, Frozen chepalopods, Fresh Pelagis Fish, Frozen Pelagis Fish, Fresh Demersal fish, Frozen Demersal fish, Fresh Farm Raised Fish, Frozen Farm Raised Fish
22	CV. Usaha Centra Jaya Sakti	Jl. Kima V Kav. E No.31 Telp (0411) 514781 Fax (0411) 514781, 3619169 Hp. 0811 416 889	Frozen octopus, frozen tuna & fresh Tuna Fresh demersal fish Frozen Demersal Fish Fresh Milk Fish
23	UD Resky Bahari	Jl. Perintis kemerdekaan km. 19 Telp (0411) 5787951, fax 4813721	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish
24	CV. Jaya Indah Cemerlang	Jl. Buru No. 47 Telp (0411) 6077171 081 342 540 495 (Frans)	Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish Dried Shark Fin, Sea Cucumber



Lanjutan....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
25	PT. Global Seafood International Indonesia	Jl. Poros Bantaeng, Bulukumba Km. 131 Ds. Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng Telp (0413) 2424828, Fax( 0413) 2424873	Frozen Surimi
26	PT. Ocean Cham Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Telp(0411) 514827, 510866 Fax (0411) 510686	Pateurized Canned Crab meat
27	PT. Kelola Mina laut	Jl. Kima 17 Blok DD-15-16, Makassar 085242009787 Fax (0411) 4723256	Frozen demersal fish Frozen pelagic fish Frozen cephalopods
28	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 Ruko No. 5 Telp(0411) 510666, 513518, Fax(0411) 511666	Produk kering (Dried Sea Cucumber, sirip Ikan, Perut Ikan, abalone dan rumput laut)
29	CV. Hokky Seafood	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 17 Telp( 0411) 48136251, 434018,5030822 Fax (0411)420618	Live Crab Fresh Tuna Fresh Demersal & Pelagic Fish
30	CV. Anugerah Sejati	Jl. Metro Tanjung Bunga A.33 Ruko Somba Opu Telp (0411) 8113919	Dried Flying Fish Roe
31	CV. Udin Jaya	Jl. Komp Perumahan Nusa Indah mas	Frozen pelagic Fish , Live fish
32	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinrae No. 1, Bulu-Bulu Kec. Marusu Kab. Maros 081355689123, 081355105171 (Surya) Fax (0411) 555 386	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh hrimp Live Fish
33	PT. Anugerah Bintang Cemerlang	Jl. Bambu runcing No. 99 081343512389	Fresh & Frozen Tuna
34	PT. Nusa Dwipa Citra Tunggal	Jl. Kima VII Blok J. N. 4 Telp (0411)514514,513555 081 342 089 182	Frozen Fish
35	PT. Wahyu Putra BimaSakti	Jl. Kima 10 T-2B Makassar	Carrageenan Chip
36	UD. Atops	Jl. Bahagia No. 2 Telp (0411) 556581 Fax (0411) 556582	Dried flying Fis Roe
37	CV. Inti Makmur	Jl. Kima 6 Blok F1/A2 telp (0411) 514242, Fax (0411)514338	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen demersal Fish Frozen Chepalopods Fresh & Frozen Shrimp
38	PT. Mitra Sejahtera Makassar	Jl. Ir. Sutami Blok G2 No.11 Telp (0411) 2606099	Rumput Laut
39	UD. Delton	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Blok C No. 11 Makassar SulSel	Rumput laut Kering
40	CV. Sentosa Bimantara Laut	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Sulawesi Blok C No. 10 makassar SulSel	Rumput laut Kering
41	PT. Giwang Citra Laut	Poros Pabrik Gula Takalar Km 1,5 Ds.Pa'rappunganta,polombangkeng Utara.Kab. Talakar	carrageenan Chips , Semi Refined Carrageenan
42	Koperasi Agroniaga	JL. BAKAU NO. 66, KOTA PALOPO Fax (0471) 832513, 0812 4214 301	Dried Seaweed
43	PT. Sumberguna Makassar Nusa	Jl. Ujung Pandang Baru No.17 Makassar	Dried Seaweed
44	PT. Rapid Niaga International	Jl. Ir. Sutami Blok L.5, Makassar	Dried Seaweed
45	CV. Putri Jaya	Kawasan Pergudangan Parang Loe Indah Telp. 085399127997, 081141048815	Dried Seaweed
46	CV. Adi Tirta	Jl. Sabutung No. 123 Makassar (0411) 452782, 45282	Dried Seaweed

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
47	CV. Benur Rahma	Jl. Tala-Tala Ds. Pattinong, Kec. Galesong Takalar. Telp. 085343822833, (0411) 82326564	Dried Flying fish roe
48	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima 4 Kav.P3A, Makassar	Dried Seaweed
49	UD. Centralindo Agar Utama	Gudang Parangloe Indah Blok E No. 10 Makassar Telp.(0411) 5774648, Fax.( 0411) 4664028	Dried Seaweed
50	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A.Mks	Dried Seaweed
51	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Pemuda Pantai Salu Songka Kec. Wara Timur, Kota Palopo.	Dried Seaweed
52	CV. Pelita	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A Mks	Dried Seaweed
53	UD. Baharu	Komplek Pergudangan lantebung Jl.Ir. Sutami Blok A.12 No.5 Makassar	Dried Seaweed
54	CV. Agro Mina Dewata	Jl. Sungai Saddang Baru No.9A, Makassar	Fresh Demersal Fish
55	PT. Bantimurung Indah	Jl. Sam Ratulangi No. 163, Maros.	carrageenan Chips , Semi Refined Carrageenan
56	PT. Biru Laut Nusantara	Jl. Kima VIII Kav. SS No.23A Kima, Makassar	Frozen Tuna
57	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima 3 Kav.5 Makassar	Daging Rajungan Kaleng Past
58	PT. Mitra Timur Nusantara	Jl. Sultan Abdullah Raya Lrg.3 No. 9 Makassar, Fax (0411) 428228 081 2413 3739	Ikan Demersal Beku ,Ikan Pelagis Beku Cephalopoda Beku Tuna Beku
59	PT. Mina Timur Indonesia	Jl.ABD.Kudus barombong kec. Tamalate, Makassar. Telp (0411) 2122637 081 241 333 359 (Sri)	Telur ikan terbang kering.
60	PT. Sentosa Sumber galesong	Komps.Graha Satelit Blok A/20 Jl. Sultan Hasanuddin , Sungguminasa Gowa, Makassar.	Telur ikan terbang kering
61	PT. Sinar Laut Nusantara	Ds Cikoang,DesaLakotong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Fresh Demersal Fish, Frozen Demersal Fish, Fresh Pelagis Fish Frozen Pelagis Fish, Fresh Cephalopods, Frozen Cephalopods Fresh & Frozen Lobster Fresh & Frozen Slipper Lobster, Fresh Milkfish, Fresh Shrimp
62	PT. Tujuh Samudera Jaya	Jl. Malino Ds. Nirannuang, kec Bontomarannu, Gowa	Frozen Flying Fish Roe
63	PT. Asia Sejahtera Mina	Jl. Ir. Sutami Kawasan Terpadu Logistik Blok A-1 Makassar	Dried Seaweed
64	UKM "88 Marijo"	Jl. Poros Pinrang-Pare,Kel.Manarang (bulu) Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang	Boneless Milkfish
65	PT. Mitra Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No. 38 Blok H2-10, Makassar	Dried Seaweed
66	CV. Eltisyah	Jl. Monumen Emmy Zaelan III Komplek BTN Agraria blok q9/24,Makassar	Fish JELLY Product
67	PT. Karya Jaya Mandiri	Jl. Prof.Ir. Sutami no.15A, Makassar	Dried Seaweed
68	PT. Goh Fadel Buana	Jl. Poros Makassar-Maros no. 126 Ballu-Ballu Kel. Taroad, Kec. Turikale, Makassar	Fresh Pelagic Fish, Frozen Pelagic Fish, fresh Demersal Fish,frozen Demersal Fish, Frozen Fish Fillet
69	PT. Lintas Antar Nusa	Jl. Poros Kupa , Kec. Mallusetasi, Barru	Ikan Terbang beku
70	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng batu-Batu, Galesong Utara, Kab. Takalar	Frozen Dried Flying fish roe
71	PT. Anugerah Gemilang sukses sedayu	Jl.Poros Macoppa Maros Km.26. No.44 Kab.Maros	Dried Seaweed
72	PT. Galesong	Jl. Baso Dg. BellaDesa Kalukuang Galesong Kab. Takalar	Dried Flying fish roe

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
73	PT. Prima Global Sukses	Jl. Prof.Dr.Ir.SutamiNo.32A	Ikan Demersal Segar Ikan Demersal beku Fresh Tuna, Frozen Tuna Cephalopoda Beku
74	PT. Boddia Jaya	Jl.Karaeng Salamaka, Dusun Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
75	UD. Generasi Baru	Jl. Andi Malla Poros pattiwo Bajo. Kel. Biru kec. Tanete Riattang, Bone sulsel	Bandeng asap Bandeng duri lunak & tanpa duri
76	PT.Jireh Commodity	Jl. Kima Raya 2 Komplek Kima Square warehouse 2 No.11,12,13, Makassar	Dried Flying fish roe Frozen Flying fish roe Teripang Kering, Teripang Beku
77	PT. Agarindo	Kab. Bone	Rumput Laut Kering
78	CV. Persada Semesta	Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Rumput Laut Kering
79	PT.Sinar Laut Nusantara	Jl.Kima 4.Kav.P-3B, Makassar	Ikan Demersal Segar, Ikan Demersal beku, Ikan Pelagis segar Ikan Pelagis Beku, Udang segar, Udang Beku, Cephalopoda segar Cephalopoda Beku, Udang Kipas Segar, Udang Ikan Beku, Tuna Segar Tuna Beku
80	Cv. Indah sari	Jl. Dg. Tata IV. Griya Tata Asri Blok E 13 A Takalar	Dried Flying fish roe